HAND OUT

MATA KULIAH
KEBIJAKAN PENDIDIKAN
SEMESTER VI TA. 2019/2020

Disusun untuk mendukung Perkuliahan Masa Covid-19

Dr. H. A. Rusdiana, Drs., MM.

JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

KATA PENGANTAR

Hand-out merupakan bagian penting dalam mendukukung optimalisasi pembelajaran, telebih dalam suasana pembelajaran masa Covid-19 ini menuntut media pendukung yang memadai untuk digunakan sesuai dengan porsi pembelajaran yang baik dan tepat.

Penggunaan *handout* dalam pembelajaran memiliki beberapa fungsi. Seperti yang disampaikan oleh Steffen dan Peter Ballstaedt dalam Prastowo (2013: 80), bahwa fungsi *handout* antara lain adalah: (1) membantu peserta didik agar tidak perlu mencatat; (2) sebagai pendamping penjelasan pendidik; (3) sebagai bahan rujukan pesertadidik (4) memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar; (5) pengingat pokok-pokok materi yang diajarkan; (6) memberi umpan balik; dan (7) menilai hasil belajar. Adapun, tujuan penyusunan *handout* ini, antara lain: (1) untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi peserta didik; (2) untuk memperkaya pengetahuan peserta didik; dan (3) untuk mendukung bahan ajar lainnya atau penjelasan dari dosen (4) Sebagai materi dalam intruksi Gogle class room.

Atas dasar itu, maka *handout* ini, berisi point-point penting dari materi pelajaran yang akan dipelajari sesuai RPS, antara lain; (1) Pengantar Mata Kuliah (2) Konsep Dasar Kebijakan Publik; (3) Perkembangan Historis Kebijakan Penidikan Di Indonesia (4) Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional; (5) Isu-isu Kebijakan Pendidikan Nasional; (6) Formulasi dan Pengesahan/Legitimasi Kebijakan Penidikan; (7) Sosialisasi Dan Komunikasi Kebijakan Penidikan; (8) Implementasi Kebijakan Penidikan; (9) Analisis Kebijakan; (10) Monitoring Evaluasi Kebijakan Penidikan; (11) Kebijakan Makro/Nasional Pengemb Penidikan; (12) Kebijakan Messo/Daerah Pengemb Penidikan; (13) Kebijakan Mikro/Sekolah Pengemb Penidikan

Berdasarkan fungsi dan tujuan penggunaan *hand-out* dalam pembelajaran maka hendaknya peserta didik mampu mengunakan bahan ajar *handout* ini secara bijak.

Bandung, 05 Maret 2020
Penyusun,

Dr. H. A. Rusdiana, Drs., MM.

DAFTAR ISI

1. Pengantar Mata Kuliah
2. Konsep Dasar Kebijakan Publik;
3. Perkembangan Historis Kebijakan Penidikan Di Indonesia
4. Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional;
5. Isu-isu Kebijakan Pendidikan Nasional;
6. Formulasi dan Pengesahan/Legitimasi Kebijakan Penidikan;
7. Sosialisasi Dan Komunikasi Kebijakan Penidikan;
8. Implementasi Kebijakan Penidikan;
9. Analisis Kebijakan;
10. Monitoring Evaluasi Kebijakan Penidikan;
11. Kebijakan Makro/Nasional Pengemb Penidikan;
12. Kebijakan Messo/Daerah Pengemb Penidikan;
13. Kebijakan Mikro/Sekolah Pengemb Penidikan

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

DARI FILOSOFI KE IMPLEMENTASI

IDENTITAS MATA KULIAH

Kode Mata Kuliah	: MKU-20135
Nama Mata Kuliah	: Kebijakan Pendidikan
Jurusan/Prodi	: Manajemen Pendidikan Islam
Kode Mata Kuliah	: ADM 531
Bobot SKS	: 2 sks
Semester	: 6 (enam)
Prasyarat Mata Kuliah	: a. Pengelolaan Pendidikan
	b. Perundang-undangan Pendidikan
Dosen/Pengampu	: Dr. H. A. Rusdiana, Drs., MM

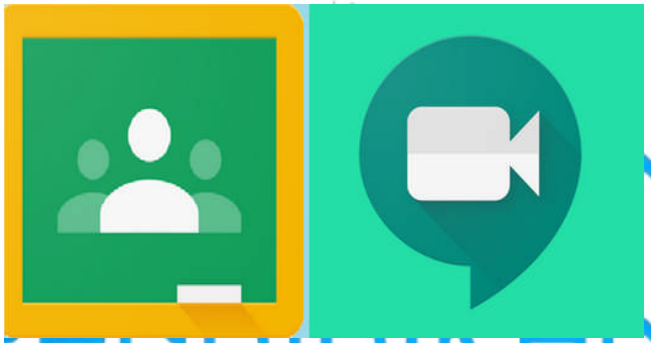

Telp. (022) 5210588 | Fax. (022) 5224105
E-mail. pustaka_seti@yahoo.com
BANDUNG 40253
www.pustakasetia.com

KEBIJAKAN PENDIDIKAN
MPI S-1 VI/ A-B
Class code pp2djtr
KEBIJAKAN PENDIDIKAN
DARI FILOSOFI KE IMPLEMENTASI
Select theme
Upload photo

Google Classroom

Share something with your class...

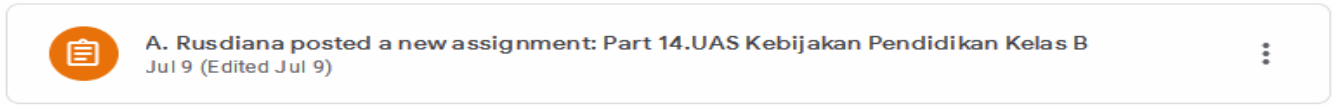
A. Rusdiana posted a new assignment: Part 14.UAS Kebijakan Pendidikan Kelas B
Jul 9 (Edited Jul 9)

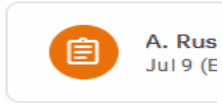
A. Rus
Jul 9 (E

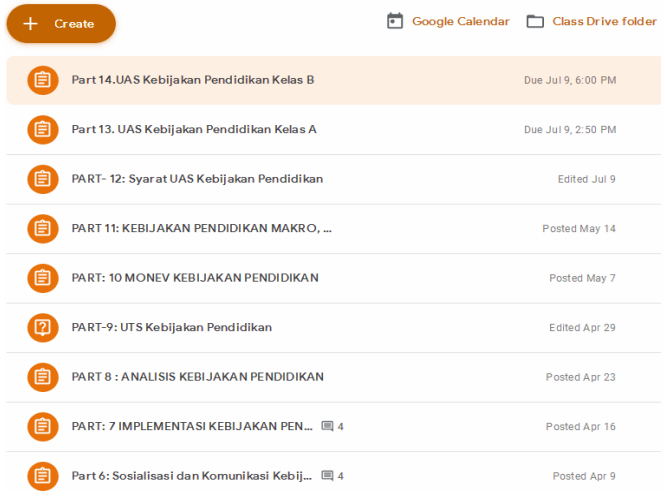
Create
Google Calendar
Class Drive folder
Part 14.UAS Kebijakan Pendidikan Kelas B
Due Jul 9, 6:00 PM
Part 13. UAS Kebijakan Pendidikan Kelas A
Due Jul 9, 2:50 PM
PART- 12: Syarat UAS Kebijakan Pendidikan
Edited Jul 9
PART 11: KEBIJAKAN PENDIDIKAN MAKRO, ...
Posted May 14
PART: 10 MONEV KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Posted May 7
PART-9: UTS Kebijakan Pendidikan
Edited Apr 29
PART 8 : ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Posted Apr 23
PART: 7 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEN... 4
Posted Apr 16
Part 6: Sosialisasi dan Komunikasi Kebij... 4
Posted Apr 9

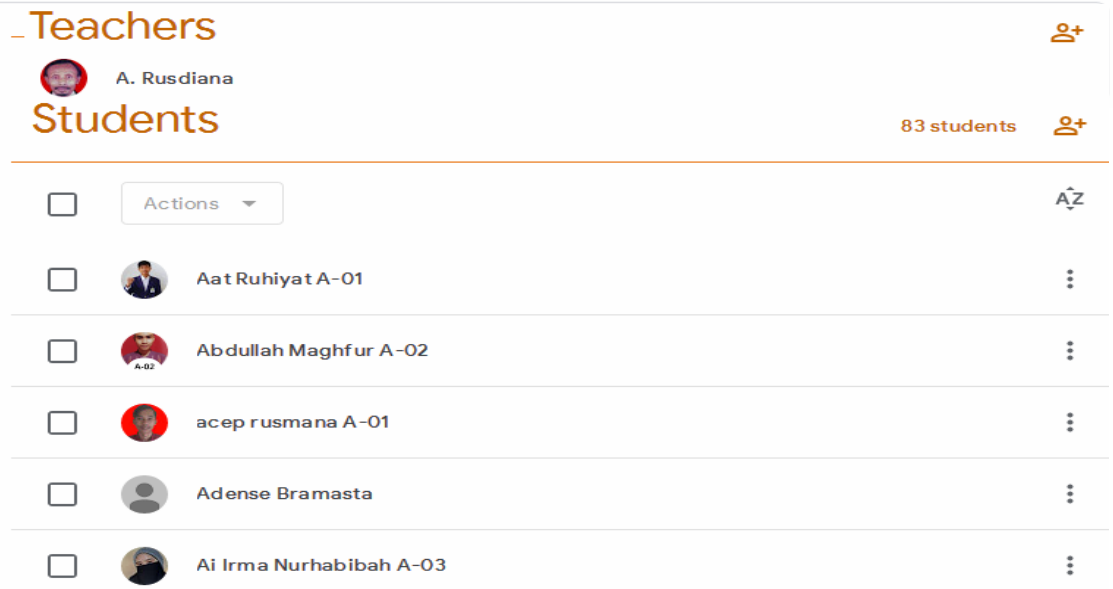
Teachers
A. Rusdiana
Students
83 students
Actions
Aat Ruhiyat A-01
Abdullah Maghfur A-02
acep rusmana A-01
Adense Bramasta
Ai Irma Nurhabibah A-03

YU KULIAH

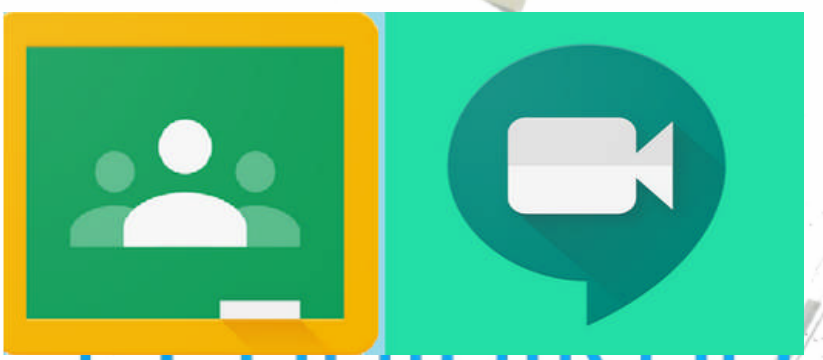

Google Classroom

RENCANA PERKULIAHAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

(RPS)

Mata Kuliah

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Disusun Oleh:

Dr. H. A. Rusdiana, MM

JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG 2020

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN Jl. A.H Nasution No. 105 Bandung	FORM (FR.)	No. Dok. : FTK-MPI-FR-A.05 Tgl. Terbit : 05 Maret 2020 No. Revisi : 00 Hal : 1/28	

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
MATA KULIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

A. IDENTITAS

1. Mata Kuliah : Kebijakan Pendidikan
2. Jurusan/Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
3. Kode Mata Kuliah : ADM 531
3. Bobot SKS : 2 sks
4. Semester : 6 (enam)
5. Prasyarat Mata Kuliah : a. Pengelolaan Pendidikan
   b. Perundang-undangan Pendidikan
4. Dosen/Pengampu : Dr. H. A. Rusdiana, Drs., MM

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH

1. Sikap: Mampu memanfaatkan teori Kebijakan dalam bidang pendidikan dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah pendidikan.
   - Mampu merekomendasikan penyelesaian masalah kebijakan pendidikan
   - Mampu mengidentifikasi perkembangan kebijakan pendidikan
   - Mampu beradaptasi, kreatif terhadap perubahan kebijakan pendidikan
2. Pengetahuan: Menguasai konsep teoritis Kebijakan pendidikan dan mendalam di bidang-bidang tertentu, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
   - Mampu mengaplikasikan kebijakan pendidikan secara berkelanjutan
   - Mampu bekerja secara profesional dan terencana dalam kebijakan pendidikan
   - Mampu mengembangkan konsep kebijakan pendidikan dan memformulasikan permasalahan dalam pengembangan bidang pendidikan secara prosedural
3. Keterampilan: Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.
   - Menjelaskan berbagai aspek, perkembangan dan masalah-maslah kebijakan pendidikan
   - Menjelaskan konsep dan implementasi kebijakan pendidikan
   - Menjelaskan cara-cara pendekatan dalam implemetasi kebijakan pendidikan

C. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah kebijakan pendidikan merupakan suatu mata kuliah yang memberikan pemahaman dan keahlian komprehensif kepada mahasiswa secara konseptual dan praktis mengenai teori kebijakan dan kebijakan pendidikan serta analisanya secara utuh pada formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi sutau kebijakan pendidikan. Secara umum mata kuliah kebijakan pendidikan bertujuan memberikan pemahaman secara mendalam kepada mahasiswa tentang konsep kebijakan pendidikan serta penerapannya dalam analsis kebijakan pendidikan. Secara khusus mata kuliah ini bertujuan untuk: 1) memberi pengertian akan pentingnya kebijkan dalam pembangunan pendidikan; 2) membekali mahasiswa kemampuan memahami konsep kebijakan dan kebijakan pendidikan; 3) memfasilitasi mahasiswa untuk memahami analisis kebijakan pendidikan; 4) membimbing mahasiswa untuk memiliki kemampuan spesifik tentang formulasi kebijakan pendidikan; 5) membimbing mahasiswa untuk memiliki kemampuan spesifik tentang;implementasi kebijakan pendidikan; 6) membimbing mahasiswa untuk memiliki kemampuan spesifik tentang monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan; 7) memfasilitasi mahasiswa menemukan dan merunjukan berbagai kebijakan pendidikan; 8) mendorong mahasiswa untuk menerapkan analisis kebijakan pada kebijakan kebijakan pendidikan.

DOKUMEN LENGKAP TERLAMPIR

RENCANA MUTU PEMBELAJARAN

(RMP)

Mata Kuliah

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Disusun Oleh:
Dr. H. A. Rusdiana, MM

JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG 2020

RENCANA MUTU PEMBELAJARAN

Nama Mata Kuliah	: Kebijakan Pendidikan
Jumlah SKS	: 2 sks
Semester	: III (dua)
Program Studi	: Manajemen Pendidikan Islam S-2
Alokasi Waktu	: 100 menit
Nama Dosen	: Dr. H. A. Rusdiana, Drs. MM

PERTEMUAN: KE 1
Pengantar Kuliah
- Silabus
- Kerangka Perkuliahan
- Kontrak Kuliah

PERTEMUAN: KE 2
KONSEP DASAR KEBIJAKAN PUBLIK

I. Capaian Akhir Mata Kuliah

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep kebijakan pendidikan secara komprehensip untuk kepentingan pengembangan pendidikan.

Mahasiswa memahami pentingnya konsep dasar kebijakan publik terhadap pembangunan pendidikan Indonesia.

II. Bahan Kajian (Materi ajar)
Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang Konsep Dasar Kebijakan publik

III. Capaian yang diharapkan
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kempuan untuk:
1. Menjelaskan arti penting mempelajari kebijakan;
2. Menjelaskan kebijakan pendidkan sebagai kebijakan publik;
3. Menjelaskan Proses kebijakan.

IV. Materi Ajar
1. Arti penting mempelajari kebijakan;
2. Kebijakan pendidkan sebagai kebijakan publik;
3. Proses Kebijakan.

V. Metode/Strategi Pembelajaran:
Ceramah/Diskusi kelompok

VI. Tahap Pembelajaran:
a. Kegiatan Awal:
Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah
b. Kegiatan Inti:
- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok
- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok
- Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kecompok dalam kelas
- Dosen memberi komentar

c. Kegiatan Akhir: Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi

DOKUMEN LENGKAP TERLAMPIR

KONTRAK KULIAH

PERT/ KE-	HARI TANGGAL	MATERI/ POKOK BAHASAN	KET.
01	Kamis 05-03-020	**Penngantar:** - Silabus - Kerangka Perkuliahan (5W+1H) - Kesepakatan Perkuliahan/berbagai aturan dan tugas-tugas perkuliahan	CDT
02	12-03-020	Konsep Dasar Kebijakan Publik	CDT/asp
03	19-03-020	Perkembangan Historis Kebijakan Penidikan Di Indonesia	CDT/asp
04	26-03-020	Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional Dan Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional	CDT/asp
05	02-04-020	Formulasi Dan Pengesahan Kebijakan Penidikan	DK-1
06	09-04-020	Sosialisasi Dan Komunikasi Kebijakan Penidikan	DK-2
07	16-04-020	Implementasi Kebijakan Penidikan	DK-3
08	**23-04-020**	**UTS**	
	07-05-020	**Libur Hari Raya Waisak**	
09	14-05-020	Analisis Kebijakan	DK-4
	21-05-020	**Libur Kenaikan Isa Almasih**	
10	28-05-020	Monitoring Evaluasi Kebijakan Penidikan	DK-5
11	04-06-020	Kebijakan Makro/Nasional Pengemb Penidikan	DK-6
12	11-06-020	Kebijakan Messo/Daerah Pengemb Penidikan	DK-7
13	18-06-020	Kebijakan Mikro/Sekolah Pengemb Penidikan	DK-8
14	**25-06-020**	**UAS/Analisis**	

Cuti bersama Hari Raya Iedul Fitri tgl 22 sd. 27 Juni 2020

PEMBAGIAN KELOMPOK (1-4)

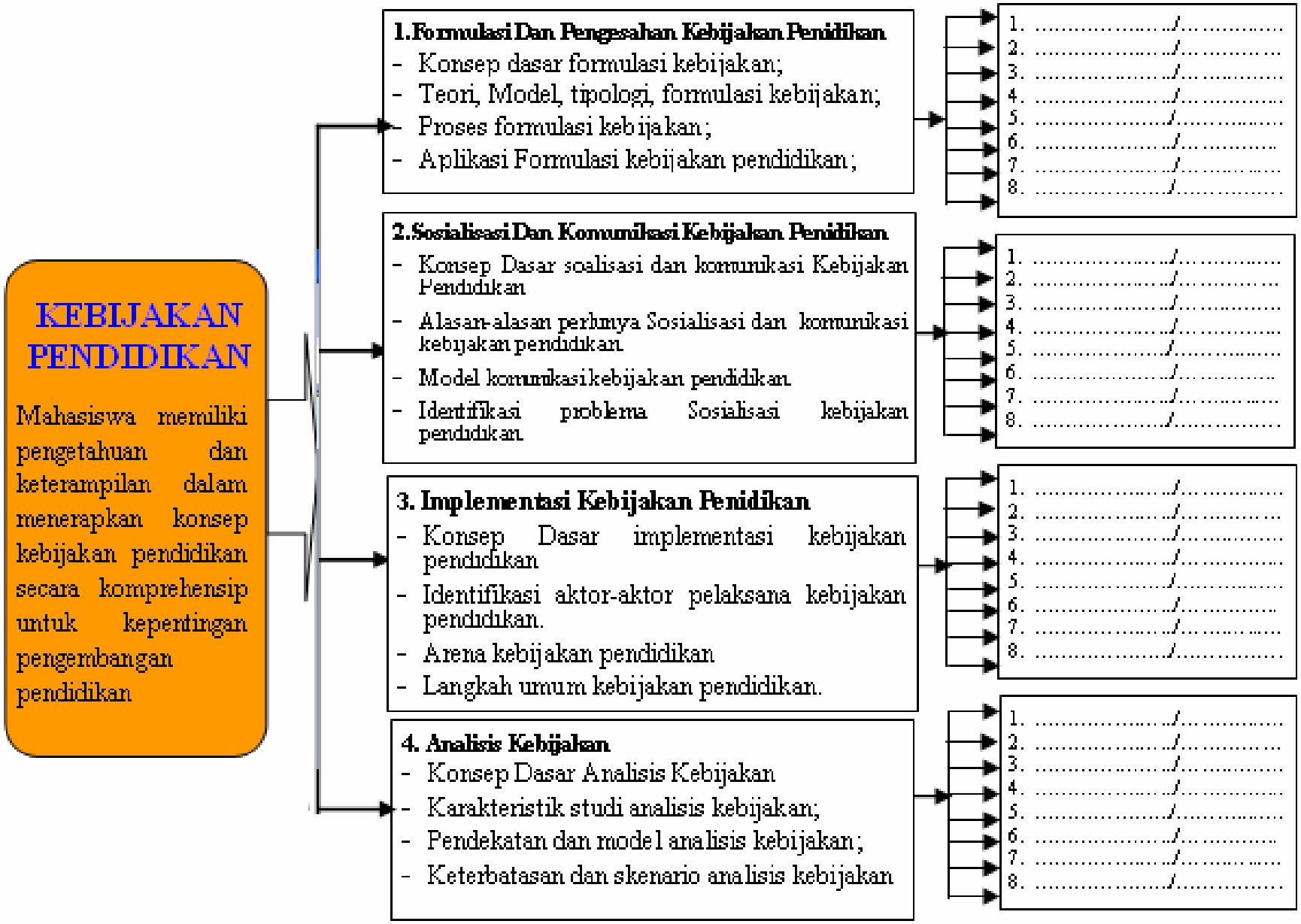

PEMBAGIAN KELOMPOK (5-8)

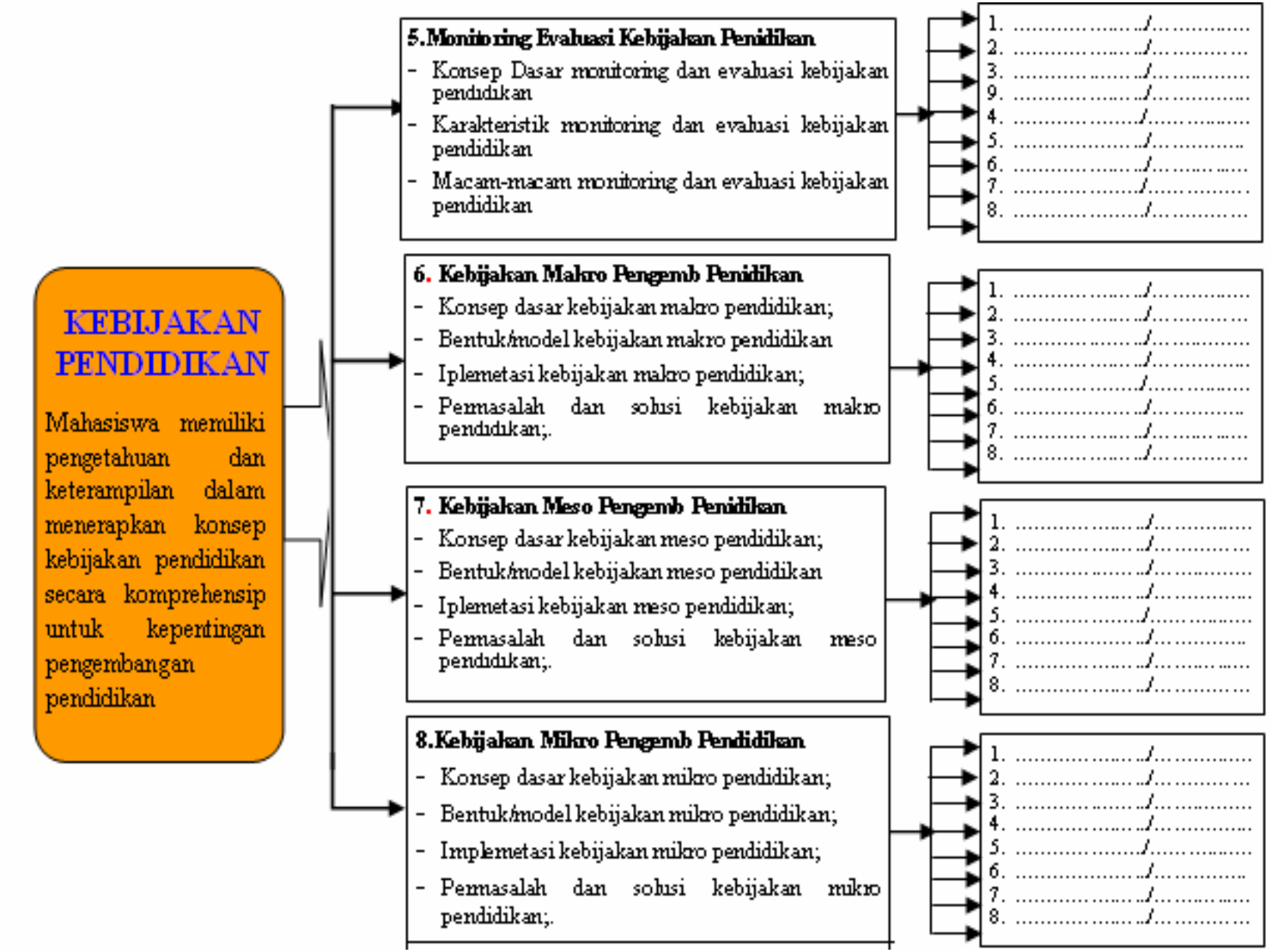

MODEL PERKULIAHAN

Tujuan Pendidikan Tinggi

Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan menjadi warga negara yang demokratis,bertanggung jawab (mahasiswa cinta Indonesia dan Pancasila), dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

SISTEM DAN PROSES PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN TINGGI

6 C for HOTS (Communication, Collaboration, Compassion, Critical thinking, Creative thinking, computation logic), Adaptive, flexible, Leadership, Reading Skill, writing skill, himbauan penambahan SKS Bahasa Inggris dan IT Skills

Lulusan

Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Psl 3 UU 20) dan UU 12/2012

KKNI
SKKNI
CPL/
LO
International Certificate

Mahasiswa

Kurikulum
Capaian Pembelajaran
Sistem Pembelajaran
Hybrid/ Blended Learning

+

Tridharma PT
- ✓ Pendidikan (dan magang)
- ✓ Penelitian (dan magang)
- ✓ Pengabdian Masyarakat

Literasi Baru:
1.Big Data
2.Teknologi
3.Manusia

SN Dikti 03/ 2020 dan 50/ 2018

Ijazah, SKPI

Sertifikat KOMPETENSI
SERTIFIKAT PROFESI
Sertifikat Bahasa Asing

Sertifikat Internasional
Regiter Profesi Nasional
Register Profesi Internasional

Capaian Pembelajaran
CPL Waterloo/ lulus PAI/ SOA

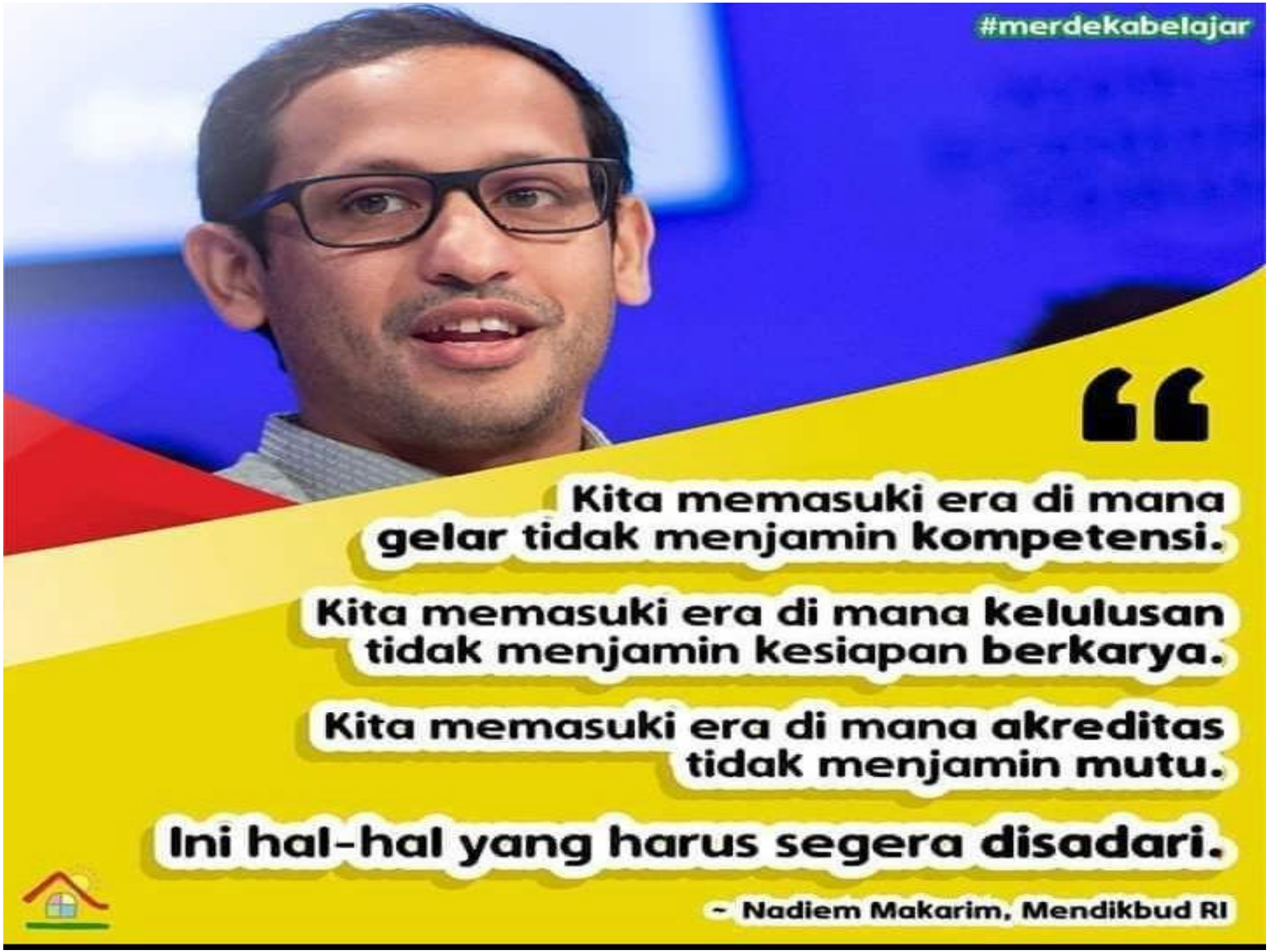
#merdekabelajar
“
Kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi.
Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya.
Kita memasuki era di mana akreditas tidak menjamin mutu.
Ini hal-hal yang harus segera disadari.
~ Nadiem Makarim, Mendikbud RI

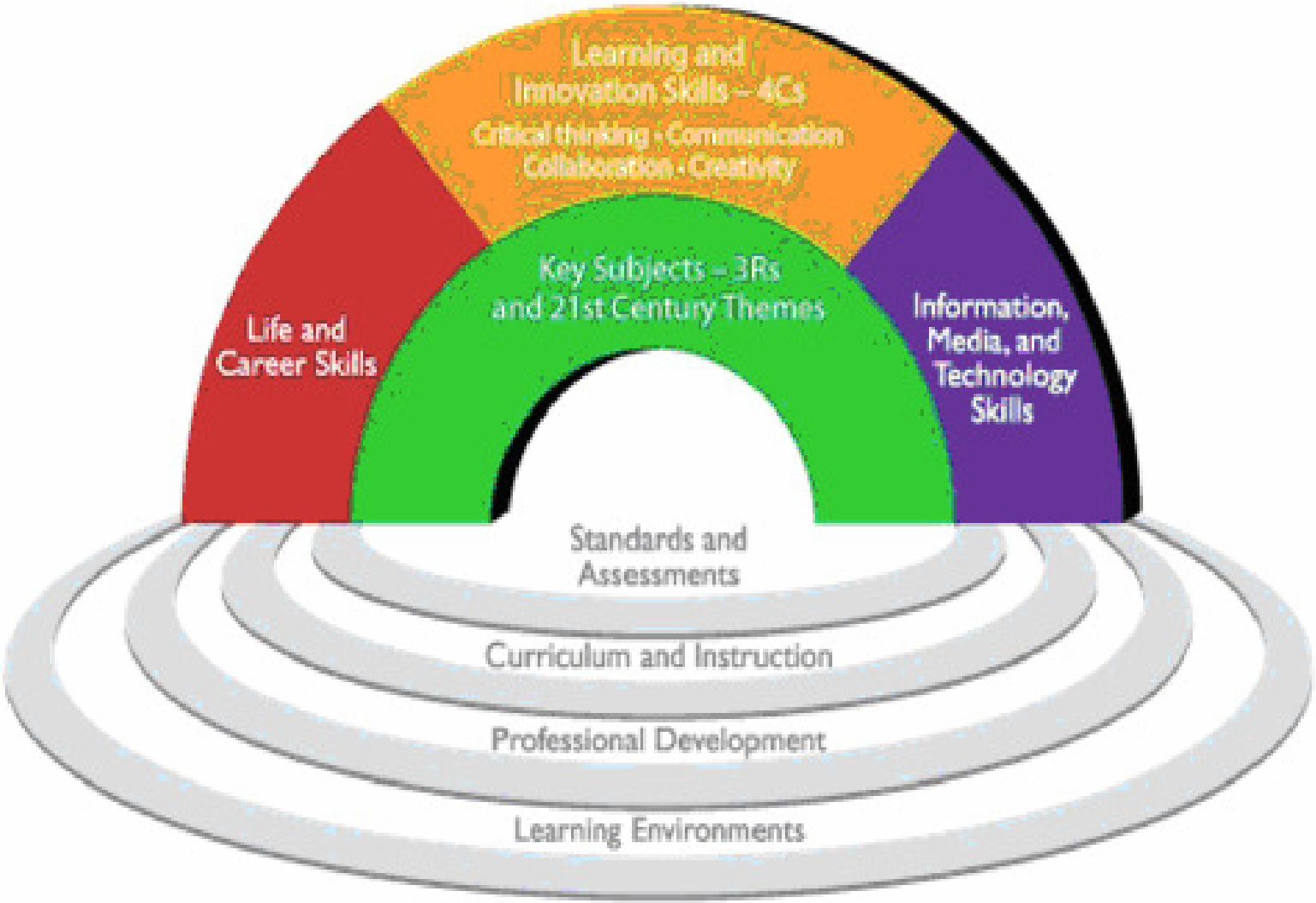

Framework Pembelaiaran Abad 21
Trilling dan Fadel, 2009

Framework pembelajaran abad ke-21

- Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*Critical-Thinking and Problem-Solving Skills*), mampu berfikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah;
- Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (*Communication and Collaboration Skills*), mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak;
- Kemampuan mencipta dan membaharui (*Creativity and Innovation Skills*), mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif;
- Literasi teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communications Technology Literacy*), mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari;
- Kemampuan belajar kontekstual (*Contextual Learning Skills*) , mampu menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi, dan
- Kemampuan informasi dan literasi media, mampu memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan beragam pihak. (BNSP.2010).

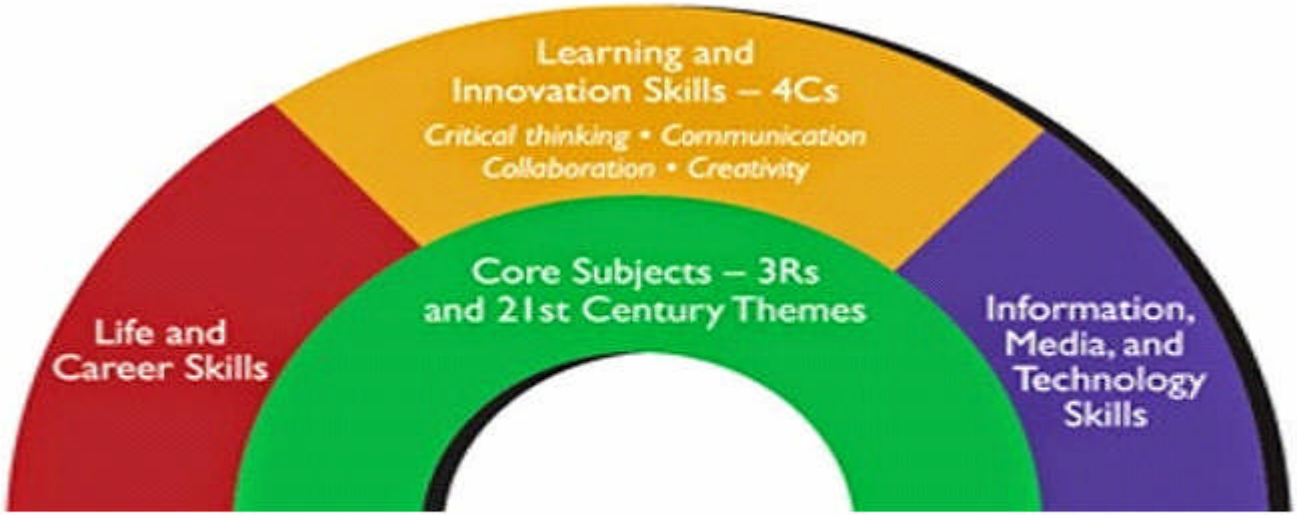

Pelangi Keterampilan Pengetahuan Abad 21

Trilling dan Fadel, 2009

Skema 1. Pergeseran Paradigma Belajar Abad 21

Core subject 3R

Core subject 3R. dalam konteks pendidikan, 3R adalah singkatan dari *reading, writing dan arithmatik*, diambil lafal "R" yang kuat dari setiap kata.

Dari subjek *reading dan writing*, muncul gagasan pendidikan modern yaitu literasi yang digunakan sebagai pembelajaran untuk memahami gagasan melalui media kata-kata.

- Dari subjek aritmatik muncul pendidikan modern yang berkaitan dengan angka yang artinya bisa memahami angka melalui matematika.
- Dari subjek aritmatik muncul pendidikan modern yang berkaitan dengan angka yang artinya bisa memahami angka melalui matematika.

Ketrampilan Abad 21

Ketrampilan Abad 21 yang dianggap bisa memperkuat modal social (*social capita*l) dan modal intelektual (*intellectual capital)*, biasa disingkat dengan 4C: *communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan creativity and innovation*.

Secara operasional, 4C ini dijabarkan dalam empat kategori langkah, yakni:

- Cara berpikir, termasuk berkreasi, berinovasi, bersikap kritis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan belajar pro-aktif.
- Cara bekerja, termasuk berkomunikasi, berkolaborasi, bekerja dalam tim.
- Cara hidup sebagai warga global sekaligus local; dan keempat, alat untuk mengembangkan ketrampilan abad 21, yakni teknologi informasi, jaringan digital, dan literasi.

Model Pembelajaran berbasis kecakapan abad 21

Setiap orang harus memiliki keterampilan berpikir kritis, pengetahuan dan kemampuan literasi digital, literasi informasi, literasi media dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi.

Peta kompetensi keterampilan 4Cs sesuai dengan P21

FRAMEWORK 21st CENTURY SKILLS	KOMPETENSI BERPIKIR P21
Creativity Thinking and innovation	Peserta didik dapat menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif baik secara mandiri maupun berkelompok.
Critical Thinking and Problem Solving	Peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengakajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Communication	Peserta didik dapat mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi.
Collaboration	Peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permsalahan yang ditemukan

Sumber: Litbang Kemdikbud, 2013

MODEL PROSES PERKULIAHAN

BERBASIS (CONE OF EXPERIENCE) EDGAR DALE

(TERAKMULASI DALAM RPS DAN RPM)

SUBSTANSI KERUCUT PENGALAMAN (CONE OF EXPERIENCE) EDGAR DALE

Kerucut Pengalaman

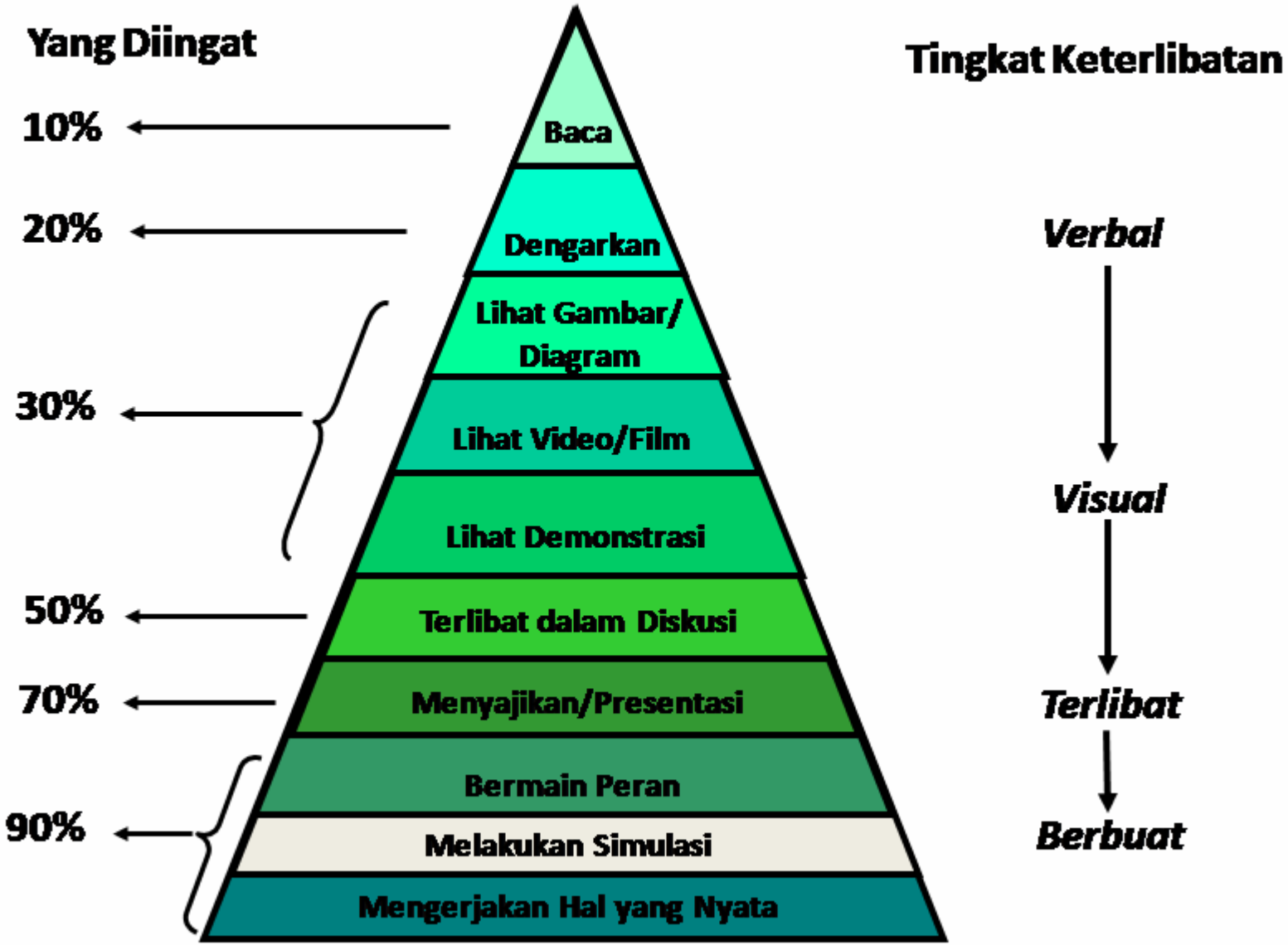

"Succesful Learning Comes from doing" (Wyatt $ Looper, 1999)

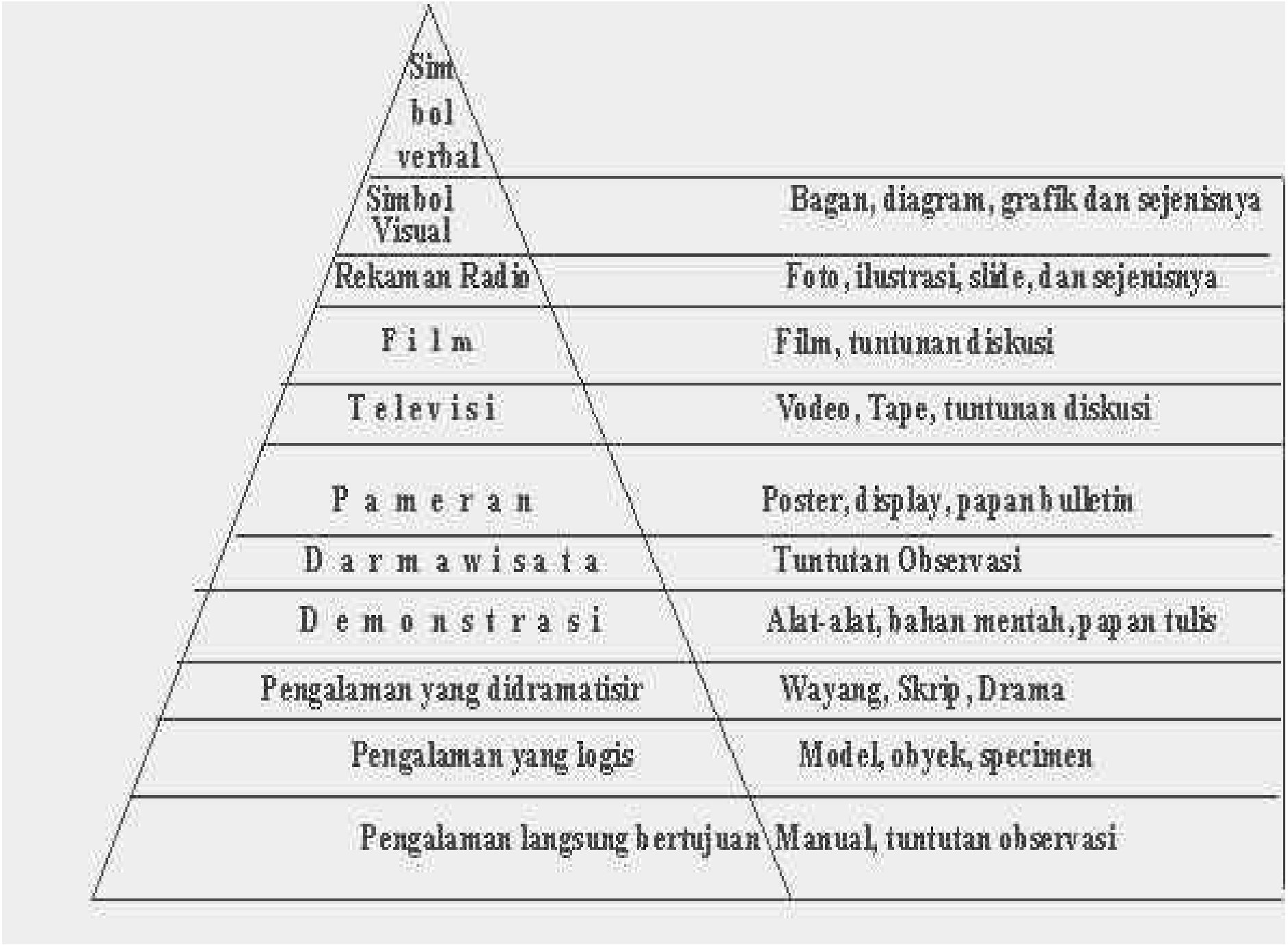
Sim
bol
verbal
Simbol Visual
Bagan, diagram, grafik dan sejenisnya
Rekaman Radio
Foto, ilustrasi, slide, dan sejenisnya
Film
Film, tuntunan diskusi
Televisi
Vodeo, Tape, tuntunan diskusi
Pameran
Poster, display, papan bulletin
Darmawisata
Tuntutan Observasi
Demonstrasi
Alat-alat, bahan mentah, papan tulis
Pengalaman yang didramatisir
Wayang, Skrip, Drama
Pengalaman yang logis
Model, obyek, specimen
Pengalaman langsung bertujuan
Manual, tuntutan observasi

MODEL KETERLIBATAN

Karakteristik Modalitas Belajar Siswa

Modalitas belajar adalah ungkapan dari rancangan sistem otak-pikiran. Merupakan kemampuan dasar individu untuk memperoleh dan menciptakan pengalaman.

Modalitas belajar adalah berbagai cara yang digunakan sistem otak-pikiran untuk mengakses pengalaman (masukan) dan mengungkap pengalaman (luaran).

Seluruh modalitas belajar tekait dengan indra dan diubah menjadi sandi-sandi bagi pengalaman indrawi. otak)

Dalam buku Quantum Learning dipaparkan 3 modalitas belajar seseorang yaitu: "modalitas visual, auditori atau kinestetik (V-A-K). Walaupun masing-masing dari kita belajar dengan menggunakan ketiga modlaitas ini pada tahapan tertentu, kebanyakan orang lebih cenderung pada salah satu di antara ketiganya".

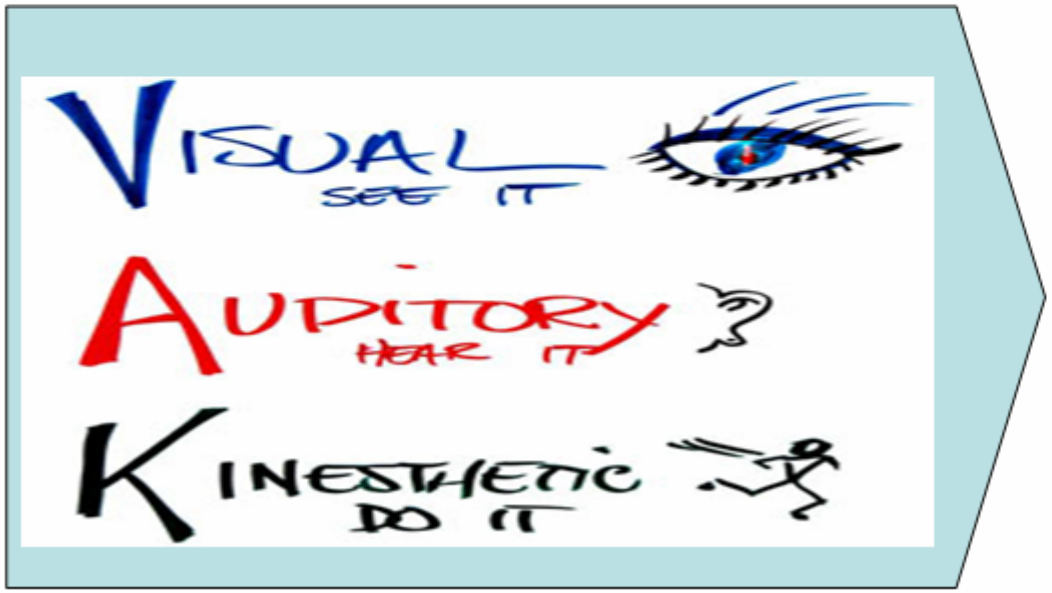

Gaya belajar dapat menentukan prestasi belajar anak. Jika diberikan strategi yang sesuai dengan gaya belajarnya, anak dapat berkembang dengan lebih baik. Gaya belajar otomatis tergantung dari orang yang belajar. Artinya, setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda.

Bobbi DePorter dan Mike Hernacki (2009:110-111)

2 KARAKTERISTIK SISWA ABAD 21

Setiap penyelenggara sekolah mendambakan agar siswa yang dibinanya menjadi siswa yang pandai atau cerdas. Makna pandai terus berubah sejalan dengan perubahan tantangan hidup. Dulu, dapat membaca, menulis dan berhitung telah cukup untuk menjadi fondasi kepandaian. Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, pandai berarti menguasai ilmu pengetahuan yang luas. Kini keterampilan itu menjadi tidak cukup, orang pandai itu harus berahlak, hidupnya beretika, memiliki semangat kerja, dan terampil. Itu pun belum cukup, orang pandai itu harus terampil bekerja sama, cerdas dalam menggunakan pikiran, inspiratif, dan cekatan dalam mengintegrasikan otaknya dengan imajinasinya.

Keterampilan seperti apa yang sesungguhnya siswa perlukan agar menjadi orang pandai dalam kehidupan abad 21? Pertanyaan telah menggerakan banyak ahli dari berbagai bidang kehidupan untuk berkumpul mempelajari tentang apa yang sesungguhanya karakter orang yang dunia kerja perlukan di masa kini dan pada masa depan. Hasil dari analisis yang telah dilakukan sejak tahun 2005 muncullah empat keterampilan utama, yaitu keterampilan menguasai kompetensi akademik.

Model POE2WE:

Alternatif PembelajaranKebijakan Pendidikan Era Covid-19

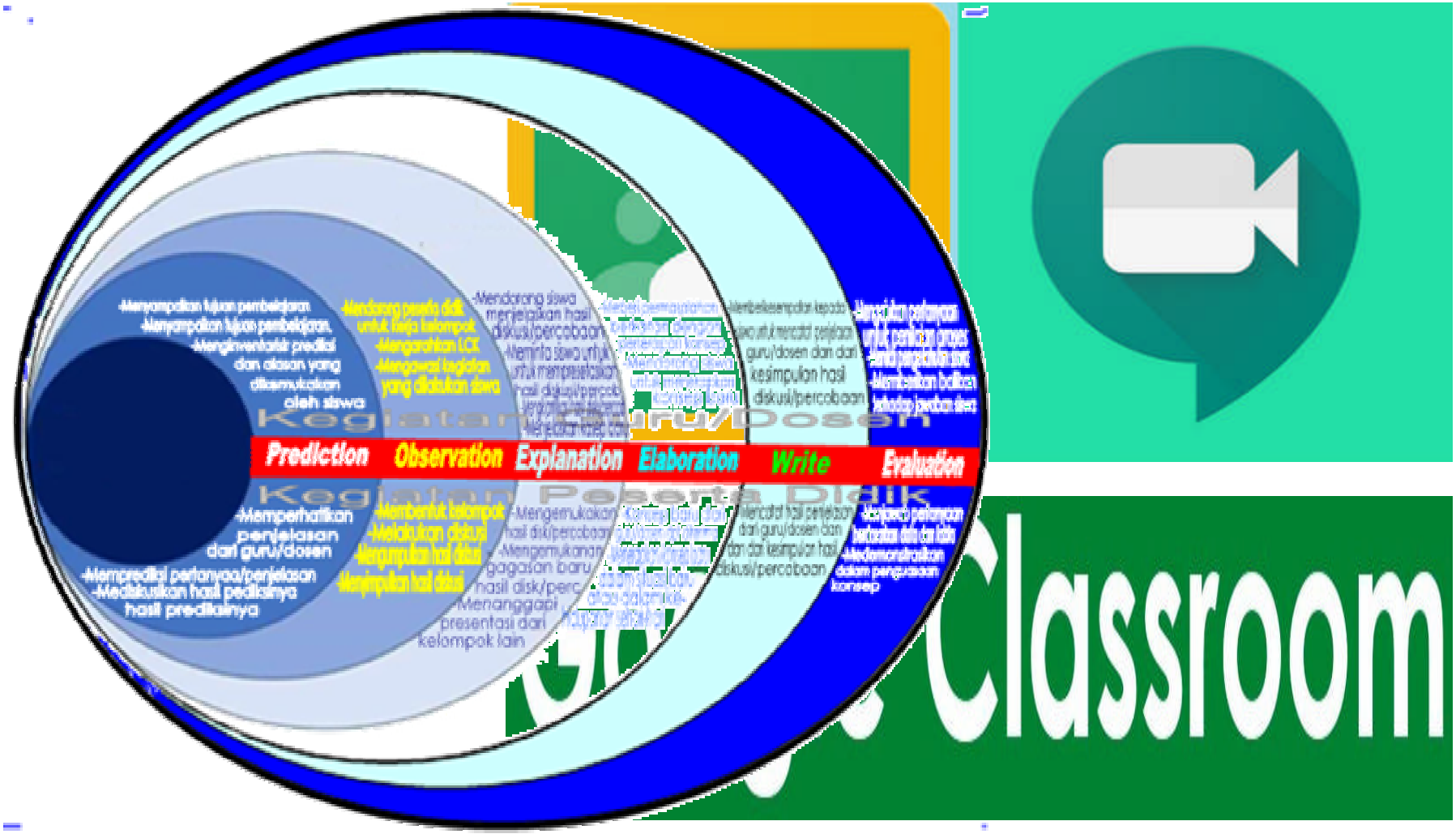

KONTRAK KULIAH

PERT/ KE-	HARI TANGGAL	MATERI/ POKOK BAHASAN	KET.
01	Kamis 05-03-020	**Penngantar:** - Silabus - Kerangka Perkuliahan (5W+1H) - Kesepakatan Perkuliahan/berbagai aturan dan tugas-tugas perkuliahan	CDT
02	12-03-020	Konsep Dasar Kebijakan Publik	CDT/asp
03	19-03-020	Perkembangan Historis Kebijakan Penidikan Di Indonesia	CDT/asp
04	26-03-020	Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional Dan Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional	CDT/asp
05	02-04-020	Formulasi Dan Pengesahan Kebijakan Penidikan	DK-1
06	09-04-020	Sosialisasi Dan Komunikasi Kebijakan Penidikan	DK-2
07	16-04-020	Implementasi Kebijakan Penidikan	DK-3
08	**23-04-020**	**UTS**	
	07-05-020	**Libur Hari Raya Waisak**	
09	14-05-020	Analisis Kebijakan	DK-4
	21-05-020	**Libur Kenaikan Isa Almasih**	
10	28-05-020	Monitoring Evaluasi Kebijakan Penidikan	DK-5
11	04-06-020	Kebijakan Makro/Nasional Pengemb Penidikan	DK-6
12	11-06-020	Kebijakan Messo/Daerah Pengemb Penidikan	DK-7
13	18-06-020	Kebijakan Mikro/Sekolah Pengemb Penidikan	DK-8
14	**25-06-020**	**UAS/Analisis**	

Cuti bersama Hari Raya Iedul Fitri tgl 22 sd. 27 Juni 2020

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPS)
Mata Kuliah
KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Disusun Oleh:
Dr. H. A. Rusdiana, MM

JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG 2020

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
MATA KULIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

A. IDENTITAS

1. Mata Kuliah : Kebijakan Pendidikan
2. Jurusan/Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
3. Kode Mata Kuliah : ADM 531
3. Bobot SKS : 2 sks
4. Semester : 6 (enam)
5. Prasyarat Mata Kuliah : a. Pengelolaan Pendidikan
   b. Perundang-undangan Pendidikan
4. Dosen/Pengampu : Dr. H. A. Rusdiana, Drs., MM

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH

1. Sikap: Mampu memanfaatkan teori Kebijakan dalam bidang pendidikan dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah pendidikan.
   - Mampu merekomendasikan penyelesaian masalah kebijakan pendidikan
   - Mampu mengidentifikasi perkembangan kebijakan pendidikan
   - Mampu beradaptasi, kreatif terhadap perubahan kebijakan pendidikan
2. Pengetahuan: Menguasai konsep teoritis Kebijakan pendidikan dan mendalam di bidang-bidang tertentu, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
   - Mampu mengaplikasikan kebijakan pendidikan secara berkelanjutan
   - Mampu bekerja secara profesional dan terencana dalam kebijakan pendidikan
   - Mampu mengembangkan konsep kebijakan pendidikan dan memformulasikan permasalahan dalam pengembangan bidang pendidikan secara prosedural
3. Keterampilan: Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.
   - Menjelaskan berbagai aspek, perkembangan dan masalah maslah kebijakan pendidikan
   - Menjelaskan konsep dan implementasi kebijakan pendidikan
   - Menjelaskan cara cara pendekatan dalam implemetasi kebijakan pendidikan

C. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah kebijakan pendidikan merupakan suatu mata kuliah yang memberikan pemahaman dan keahlian komprehensif kepada mahasiswa secara konseptual dan praktis mengenai teori kebijakan dan kebijakan pendidikan serta analisanya secara utuh pada formulasi,implementasi, monitoring dan evaluasi sutau kebijakan pendidikan. Secara umum mata kuliah kebijakan pendidikan bertujuan memberikan pemahaman secara mendalam kepada mahasiswa tentang konsep kebijakan pendidikan serta penerapannya dalam analsis kebijakan pendidikan. Secara khusus mata kuliah ini bertujuan untuk: 1) memberi pengertian akan pentingnya kebijkan dalam pembangunan pendidikan; 2) membekali mahasiswa kemampuan memahami konsep kebijakan dan kebijakan pendidikan; 3) memfasilitasi mahasiswa untuk memahami analisis kebijakan pendidikan; 4) membimbing mahasiswa untuk memiliki kemampuan spesifik tentang formulasi kebijakan pendidikan; 5) membimbing mahasiswa untuk memiliki kemampuan spesifik tentang;implementasi kebijakan pendidikan; 6) membimbing mahasiswa untuk memiliki kemampuan spesifik tentang monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan; 7) memfasilitasi mahasiswa menemukan dan menunjukan berbagai kebijakan pendidikan; 8) mendorong mahasiswa untuk menerapkan analisis kebijakan pada kebijakan kebijakan pendidikan.

D. RENCANA PEMBELAJARAN

Prtemuan/ Minggu **Ke-**	**Bahan Kajian (Materi ajar)**	**Kemampuan Akhir yang diharapkan**	**Materi Ajar**	**Bentuk Perkuliahan**		**Waktu**	**Penilaian**		**Refernsi**
				Strat/Metode/media sumber belajar	Aktifitas Mahasiswa		Bentuk/tek/Kriteria penilaian	**Bobot**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**8**	**9**
1	Konsep Dasar Kebijakan Publik	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan arti penting mempelajari kebijakan; 2. Menjelaskan kebijakan pendikan sebagai kebijakan publik; 3. Menjelaskan Proses kebijakan.	1. Arti penting mempelajari kebijakan; 2. Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik; 3. Proses kebijakan	Strategi: Ekspositori & inkuiri Metode: ceramah, tanya jawab, penugasan dan diskusi Tugas: Pembuatan, laporan buku/ bab/ makalah; presentasi, observasi dan studi kasus Media: RPS, WB, spidol infokus, LCD, Komputer, internet, HO, Bahan ajar	1. Mengkaji hakikat dan ruang lingkup dan proses kebijakan pendidikan sebagai kebijkan publik 2. Mendiskusikan problem dan solusi kbijakan pendidikan sebagai kebijakan publik;	100’	a. Teknik dan instrumen penilaian: - Hasil diskusi - Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi - Tes tertulis b. Kriteria Penilaian $\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt = Nf}{10}$ Ket: Pt= Portofolio Ps= Proses Tt = Tes Tulis Nf=Nilai Formatif	5	1,3.5.7,9
2	Studi dan Analisis Kebijakan	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan karakteristik studi analisis kebijakan; 2. Menjelaskan pendekatan dan model analisis kebijakan; 3. Menjelaskan keterbatasan dan skenario analisis kebijakan	1. Karakteristik studi analisis kebijakan; 2. Pendekatan dan model analisis kebijakan; 3. Keterbatasan dan skenario analisis kebijakan	Strategi: Ekspositori & inkuiri Metode: ceramah, tanya jawab, penugasan dan diskusi Tugas: Pembuatan, laporan buku/bab/makalah; presentasi, observasi dan studi kasus Media: RPS, WB, spidol infokus, LCD, Komputer, internet, HO, Bahan ajar .	1. Mengkaji Karakteristik studi analisis kebijakan; Pendekatan dan model analisis kebijakan; Keterbatasan dan skenario analisis kebijakan 2. Mendiskusikan topik Studi dan Analisis Kebijakan	100’	a. Teknik dan instrumen penilaian: - Hasil diskusi - Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi - Tes tertulis b. Kriteria Penilaian $\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt = Nf}{10}$ Ket: Pt= Portofolio Ps= Proses Tt = Tes Tulis Nf=Nilai Formatif	5	2,3.5.7,9

1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
3	Model Analisis Kebijakan Pendidikan	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan kerangka berfikir analisis kebijakan pendidikan; 2. Menjelaskan kegiatan analisis kebijakan pendidikan; 3. Menjelaskan presfektif analisis kebijakan 4. Menjelaskan model-model analisis kebijakan	1. Kerangka berfikir analisis kebijakan pendidikan; 2. Kegiatan analisis kebijakan pendidikan; 3. Presfektif analisis kebijakan 4. Model-model analisis kebijakan	Strategi: Ekspositori & inkuiri Metode: ceramah, tanya jawab, penugasan dan diskusi Tugas: Pembuatan, laporan buku/ bab/makalah; presentasi, observasi dan studi kasus Media: WB, spidol infokus, LCD, Komputer, internet, HO, Bahan ajar	1. Mengkaji Kerangka berfikir analisis kebijakan pendidikan; Kegiatan analisis kebijakan pendidikan; Presfektif analisis kebijakan; Model-model analisis kebijakan 2. Mendiskusikan dilema analisis kebijakan	100’	a. Teknik dan instru men penilaian: - Hasil diskusi - Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi - Tes tertulis b. Kriteria Penilaian $\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt = Nf}{10}$ Ket: Pt= Portofolio Ps= Proses Tt = Tes Tulis Nf=Nilai Formatif	5	2,34,8,9
4	Formulasi dan Pengesahan Kebijakan Penidikan	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan konsep dasar dan teori formulasi kebijakan; 2. Menjelaskan, model, tipologi, & proses formulasi kebijakan; 3. Menjelaskan, formulasi kebijakan pendidikan;	1. Konsep dasar dan teori formulasi kebijakan; 2. Model, tipologi, dan proses formulasi kebijakan; 3. Formulasi kebijakan pendidikan;	Strategi: Ekspositori & inkuiri Metode: ceramah, tanya jawab, penugasan dan diskusi Tugas: Pembuatan, laporan buku/bab/ makalah; presentasi, observasi & studi kasus Media: WB, spidol infokus, LCD, Komputer, internet, HO, Bahan ajar	1. Mengkaji konsep dasar formulasi kebijakan; Model, tipologi, dan proses formulasi kebijakan; dan formulasi kebijakan pendidikan. 2. Mendiskusikan Problema formulasi dan pengesahan kebijakan pendidikan	100’	Teknik dan instru men penilaian: - Hasil diskusi - Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi - Tes tertulis b. Kriteria Penilaian $\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt = Nf}{10}$ Ket: Pt= Portofolio Ps= Proses Tt = Tes Tulis Nf=Nilai Formatif		
5	Soalisasi dan komuikasi Kebijakan Pendidikan	Mahasiswa mampu: 1. Mendefinisikan soalisasi dan komuikasi Kebijakan Pendidikan 2. Menjelaskan alasan perlunya Sosialisasi dan komunikasi kebijakan pendidikan.	1. Soalisasi dan komunikasi Kebijakan Pendidikan 2. Alasan perlunya Sosialisasi dan komunikasi kebijakan pendidikan. 3. Model komunikasi kebijakan pendidikan.	Strategi: Ekspositori & inkuiri Metode: ceramah, tanya jawab, penugasan dan diskusi Tugas: Pembuatan, laporan buku/ bab/makalah; presentasi, observasi dan studi kasus	1. Mengkaji soalisasi dan komunikasi Kebijakan Pendidikan; Alasan perlunya Sosialisasi dan komunikasi kebijakan pendidikan; Model komunikasi kebijakan pendidikan.	300’	a. Teknik dan instru men penilaian: - Hasil diskusi - Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi - Tes tertulis b. Kriteria Penilaian $\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt = Nf}{10}$		2,34,8,9

1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
		3. Menjelaskan model komunikasi kebijakan pendidikan. 4. Mengidentifikasi problema kebijakan pendidikan.	4. Problema kebijakan pendidikan	Media: WB, spidol infokus, LCD, Komputer, internet, HO, Bahan ajar	2. Mendiskusikan Problema kebijakan pendidikan		Ket: Pt= Portofolio Ps= Proses Tt = Tes Tulis Nf=Nilai Formatif		
6	Implementasi Kebijakan Pendidikan	Mahasiswa mampu: 1. Mendefinisikan implementasi kebijakan pendidi-kan 2. Mengidentifikasi aktor pelaksana Kebijakan pendidikan. 3. Menjelaskan arena kebijakan pendidikan 4. Menjelaskan jenis kebijakan pendidikan. 5. Menjelaskan langkah-langkah kebijakan pendidikan.	1. Kosep implementasi kebijakan pendidikan 2. Aktor pelaksana Kebijakan pendidikan. 3. Arena kebijakan pendidikan 4. Jenis kebijakan pendidikan. 5. Langkah umum kebijakan pendidikan.	Strategi: Ekspositori & inkuiri Metode: ceramah, tanya jawab, penugasan dan diskusi Tugas: Pembuatan, laporan buku/bab/ makalah; presentasi, observasi & studi kasus Media: WB, spidol infokus, LCD, Komputer, internet, HO, Bahan ajar	1. Mengkaji Kosep implementasi kebijakan pendidikan; Aktor pelaksana Kebijakan pendidikan; Arena kebijakan pendidikan; Jenis kebijakan pendidikan; Langkah umum kebijakan pendidikan. 2. Mendiskusikan problematika Implementasi Kebijakan Pendidikan	300’	a. Teknik dan instrumen penilaian: - Hasil diskusi - Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi - Tes tertulis b. Kriteria Penilaian $\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt = Nf}{10}$ Ket: Pt= Portofolio Ps= Proses Tt = Tes Tulis Nf=Nilai Formatif		2,34,8,9
7	Monitoring &evalusi Kebijakan Pendidikan	Mahasiswa mampu: 1. Mendefinisikan moniev kebijakan pendidikan 2. Menjelaskan macam-macam evaluasi kebijakan pendidikan 3. Menjelaskan karakteristik evaluasi kebijakan pendidikan 4. Menginventarisir faktor-faktor evaluasi kebijakan pendidikan.	5. Definisi Monev kebijakan pendidikan 6. Bentuk evaluasi kebijakan pendidikan 7. Karakteristik evaluasi kebijakan pendidikan 8. Faktor-faktor evaluasi kebijakan pendidikan 9. Problem-problem evaluasi kebijakan pendidikan.	Strategi: Ekspositori & inkuiri Metode: ceramah, tanya jawab, penugasan dan diskusi Tugas: Pembuatan, laporan buku/bab/ makalah; presentasi, observasi & studi kasus Media: WB, spidol infokus, LCD, Komputer, internet, HO, Bahan ajar	1. Mengkaji monev Kebijakan Pendidikan; Bentuk, karakteristik, faktor monev kebijakan pendidikan 2. Mendiskusikan problem monev kebijakan pendidikan	100’	a. Teknik dan instrumen penilaian: - Hasil diskusi - Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi - Tes tertulis b. Kriteria Penilaian $\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt = Nf}{10}$ Ket: Pt= Portofolio Ps= Proses Tt = Tes Tulis Nf=Nilai Formatif		1,3.5.7, 9

1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
8.	Perkembangan historis kebijakan pendidikan di Indonesia	Mahasiswa mampu: 1. Mengidentifikasi kebijakan pendidikan sebelum Proklamasi 2. Mengidentifikasi kebijakan pendidikan pasca kemerdekaan 3. Mengidentifikasi kebijakan pendidikan masa orde baru 4. Mengidentifikasi kebijakan pendidikan Reformasi	1. Kebijakan pendidikan sebelum Proklamasi 2. Kebijakan pendidikan pasca kemerdekaan 3. Kebijakan pendidikan masa orde baru 4. Kebijakan pendidikan Reformasi	Strategi: Ekspositori & inkuiri Metode: ceramah, tanya jawab, penugasan dan diskusi Tugas: Pembuatan, laporan buku/bab/ makalah; presentasi, observasi & studi kasus Media: WB, spidol infokus, LCD, Komputer, internet, HO, Bahan ajar	1. Mengkaji kebijakan pendidikan sebelum prolklamasi, pasca kemerdekaan; masa orde baru, dan masa reformasi. 2. Mendiskusikan problema Perkembangan historis kebijakan pendidikan di Indonesia	100’	a. Teknik dan instrumen penilaian: - Hasil diskusi - Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi - Tes tertulis b. Kriteria Penilaian $\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt = Nf}{10}$ Ket: Pt= Portofolio Ps= Proses Tt = Tes Tulis Nf=Nilai Formatif		1,2.3.7, 9
9-10-11	Kebijakan pokok pembangunan pendidikan Nasional	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan Konsep dasar kebijakan pokok pembangunan Pendidikan nasional; 2. Menjelaskan pemerataan dan perluasan akses 3. Menjelaskan peningkatan mutu pendidikan, relevansi dan daya saing 4. Menjelaskan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik.	1. Konsep dasar kebijakan pokok pembangunan Pendidikan nasional; 2. Pemerataan dan perluasan akses 3. Peningkatan mutu pendidikan, relevansi & daya saing 4. Penguatan tata kelola, akuntabiliitas, dan citra publik.	Strategi: Ekspositori & inkuiri Metode: ceramah, tanya jawab, penugasan dan diskusi Tugas: Pembuatan, laporan buku/bab/ makalah; presentasi, observasi & studi kasus Media: WB, spidol infokus, LCD, Komputer, internet, HO, Bahan ajar	1. Mengkaji Konsep dasar kebijakan pokok pembangunan Pendidikan nasional; Pemerataan dan perluasan akses; Peningkatan mutu pendidikan, relevansi & daya saing; penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik. 2. Mendiskusikan problema kebijak pokok pembangunan Pendidikan Nasional	300’	a. Teknik dan instrumen penilaian: - Hasil diskusi - Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi - Tes tertulis b. Kriteria Penilaian $\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt = Nf}{10}$ Ket: Pt= Portofolio Ps= Proses Tt = Tes Tulis Nf=Nilai Formatif		1,4.3.7, 9

1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
12	Kebijakan Makro Pembangunan Pendidikan	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan konsep dasar kebijakan makro pendidikan; 2. Menjelaskan bentuk/model kebijakan makro pendidikan; 3. Menjelaskan implemetasi kebijakan makro pendidikan; 4. Menjelaskan permasalah dan solusi kebijakan makro pendidikan;.	1. Konsep dasar kebijakan makro pendidikan; 2. Bentuk/model kebijakan makro pendidikan; 3. Iimplemetasi kebijakan makro pendidikan; 4. Permasalah dan solusi kebijakan makro pendidikan;.	Strategi: Ekspositori & inkuiri Metode: ceramah, tanya jawab, penugasan dan diskusi Tugas: Pembuatan, laporan buku/bab/ makalah; presentasi, observasi & studi kasus Media: WB, spidol infokus, LCD, Komputer, internet, HO, Bahan ajar	1. Mengkaji Konsep dasar kebijakan makro pendidikan Bentuk; Implemetasi kebijakan makro pendidikan; 2. Mendiskusikan Problem & solusi kebijakan makro pendidikan;.	100	a. Teknik dan instrumen penilaian: - Hasil diskusi - Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi - Tes tertulis b. Kriteria Penilaian $\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt}{10} = Nf$ Ket: Pt= Portofolio Ps= Proses Tt = Tes Tulis Nf=Nilai Formatif		
13	Kebijakan Meso Pembangunan Pendidikan	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan konsep dasar kebijakan meso pendidikan; 2. Menjelaskan bentuk/model kebijakan meso pendidikan; 3. Menjelaskan implemetasi kebijakan meso pendidikan; 4. Menjelaskan permasalah dan solusi kebijakan meso pendidikan;.	1. Konsep dasar kebijakan meso pendidikan; 2. Bentuk/model kebijakan meso pendidikan; 3. Iimplemetasi kebijakan meso pendidikan; 4. Permasalah dan solusi kebijakan meso pendidikan;.	Strategi: Ekspositori & inkuiri Metode: ceramah, tanya jawab, penugasan dan diskusi Tugas: Pembuatan, laporan buku/bab/ makalah; presentasi, observasi & studi kasus Media: WB, spidol infokus, LCD, Komputer, internet, HO, Bahan ajar	1. Mengkaji Konsep dasar kebijakan meso pendidikan Bentuk; Implemetasi kebijakan meso pendidikan; 2. Mendiskusikan Problem & solusi kebijakan meso pendidikan;.	100	a. Teknik dan instrumen penilaian: - Hasil diskusi - Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi - Tes tertulis b. Kriteria Penilaian $\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt}{10} = Nf$ Ket: Pt= Portofolio Ps= Proses Tt = Tes Tulis Nf=Nilai Formatif		

1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
14	Kebijakan Mikro Pembangunan Pendidikan	1. Menjelaskan konsep dasar kebijakan mikro pendidikan; 2. Menjelaskan bentuk/model kebijakan mikro pendidikan; 3. Menjelaskan implemetasi kebijakan mikro pendidikan;	1. Konsep dasar kebijakan mikro pendidikan; 2. Bentuk/model kebijakan mikro pendidikan; 3. Iimplemetasi kebijakan mikro pendidikan; 4. Permasalah dan solusi kebijakan mikro pendidikan;.	Strategi: Ekspositori & inkuiri Metode: ceramah, tanya jawab, penugasan dan diskusi Tugas: Pembuatan, laporan buku/bab/ makalah; presentasi, observasi & studi kasus Media: WB, spidol infokus, LCD, Komputer, internet, HO, Bahan ajar	1. Mengkaji Konsep dasar kebijakan mikro pendidikan Bentuk; Implemetasi kebijakan mikro pendidikan; 2. Mendiskusikan Problem & solusi kebijakan mikro pendidikan;.		a. Teknik dan instru men penilaian: - Hasil diskusi - Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi - Tes tertulis b. Kriteria Penilaian $\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt = Nf}{10}$ Ket: Pt= Portofolio Ps= Proses Tt = Tes Tulis Nf=Nilai Formatif		

E. REFERENSI

1. Agus Dwiyanto dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia.Pusat Studi*
2. *kependudukan dan Kebijakan.* Universitas Gajah Mada, 2002.
3. Ali Imran. 1993. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia,* Jakarta: Bumi Aksara
4. Denhardt, Janet V. & Denhardt, Robert B., *The New Public Services:Serving, Not Steering*. ME Sharpe, Armond, New York. 2003.
5. Dun William. 1981. *Public Policy Analysis; An Introduction*, NewYork:Prentice-Hall,Inc
6. Dye, N., Thomas. 1976. *Policy Analysis, What Government Do,Why DoThey It, and What Difference it Makes.* Alabama: The Univ of Alabama
7. Guthrie, James, W. Reed, Roney, J. 1986. *Educational Administrationand Policy, Effective Leadership for american Education.* New Jersey: Prentice-Hall.
8. Holzer, Marc and Callahan, Kathe. *Government at Work: Best Practices and Model Programs.* Sage Publications. London.1998.
9. Houg. 1985. *Educational Policy.* New York: Mc Graw-Hill
10. Hogwood, Brian, W. 1984. *Policy Analysis for The Real World.*London:Oxford Univ
11. Hadari Nawawi.1999. *Kebijakan pendidikan di Indonesia ditinjau dari sudut hokum*, Jogjakarta: Gajahmada University Press
12. Jones, O. Charles. *Pengantar Kebijakan Publik.* Jakarta: Rajawali Kerr, Donna H.1976 *Educational Policy, Analysis, Structure, and*
13. *Justification.*New York: David McKay Company. Mann, Dale. 1975. *Policy Decision Makinbg in Education.*New York: Teacher College Press.
14. Majchrzak, Ann.1984. *Method for Policy Research.* Beverly Hills: Sage
15. M.Irfan Islami.1997. *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara*.Jakarta: Bumi Aksara.
16. Pal, Leslie.1996.*Public Policy Analysis; An Introduction.* Canada: Nelson
17. Patton, Carl., Sawicki., Davis S. 1986. *Basic Methods of Policy Analysis and* Planning. New Jersey: Engliwood
18. Parsons, Wayne. 2000. Public Policy. New Jersey: Engliwood Ledivina V. Carino *"Administrative Accountability."*A Riview of a Key Concept in Public Administration." Referensi lain yang dapat dicari di website.
19. Supandi & Sanusi. 1988. *Kebijakan & Keputusan Pendidikan.* Depdikbud.
20. Rusdiana, A. 2015. Kebijakan Pendidikan: *Dari Filosofi ke Implementasi*.Bandung: Pustaka Setia.
21. Rusdiana, A. 2017. *Manajemen Evaluasi Program Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia

Bandung, 5 Maret 2020

Disetujui Oleh:

Diosen Pengampu:

Dr. Irawan, S.Pd., M.Hum.
NIP.19720822199901000

Dr. H. A. Rusdiana, Drs. MM
NIP.: 196104211986021001

RENCANA MUTU PEMBELAJARAN
(RMP)
Mata Kuliah
KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Disusun Oleh:
Dr. H. A. Rusdiana, MM

JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG 2020

RENCANA MUTU PEMBELAJARAN

Nama Mata Kuliah : Kebijakan Pendidikan
Jumlah SKS : 2 sks
Semester : III (dua)
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam S-2
Alokasi Waktu : 100 menit
Nama Dosen : Dr. H. A. Rusduana, Drs. MM
.

PERTEMUAN: KE 1

Pengantar Kuliah

- Silabus
- Kerangka Perkuliahan
- Kontrak Kuliah

PERTEMUAN: KE 2

KONSEP DASAR KEBIJAKAN PUBLIK

I. Capaian Akhir Mata Kuliah

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep kebijakan pendidikan secara komprehensip untuk kepentingan pengembangan pendidikan.

Mahasiswa memahami pentingnya konsep dasar kebijakan publik terhadap pembangunan pendidikan Indonesia.

II. Bahan Kajian (Materi ajar)

Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang Konsep Dasar Kebijakan publik

III. Capaian yang diharapkan

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kempuan untuk:

1. Menjelaskan arti penting mempelajari kebijakan;
2. Menjelaskan kebijakan pendikan sebagai kebijakan publik;
3. Menjelaskan Proses kebijakan.

IV. Materi Ajar

1. Arti penting mempelajari kebijakan;
2. Kebijakan pendikan sebagai kebijakan publik;
3. Proses Kebijakan.

V. Metode/Strategi Pembelajaran:

Ceramah/Diskusi kelompok

VI. Tahap Pembelajaran:

a.Kegiatan Awal:
Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah

b.Kegiatan Inti:

- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok
- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok
- Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas
- Dosen memberi komentar

c.Kegiatan Akhir: Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:

a. Alat/Media : OHP-OHT, LAPTOP – LCD
b. Bahan/Sumber Belajar:

- Budi Winarno. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Media Pressindo.
- Lindblom, Charles E, 1986, *The Policy-Making Process,* New Jersey: Prentice-Hall Inc,
- Imron, Ali. 1995. *Kebijakan Pendiikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Islamy, Irfan M. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Joko Widodo, 2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aolikasi Analisis Proses Kebijakan Publik,* Malang: Bayumedia Publishing,
- Peters, B. Guy, 1982, *American Public Policy Process and Performance*, Frankiln Watts, New York.
- Pongtuluran, Aris. 1995. *Kebijakan Organisasi dan Pengambilan Keputusan Manajerial*. Jakarta: LPMP
- Said Zainal Abidin, 2006. *Kebijakan Publik,* Jakarta: Suara Bebas,
- Rusdiana A, 2015. *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke imlentasi*. Bandung Pustaka Setia.

VIII. Penilaian:

a. Teknik dan instrumen penilaian:
   1. Hasil diskusi
   2. Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi
   3. Tes tertulis
b. Kriteria Penilaian

$$\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt}{10} = Nf$$

Keterangan:

Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt = Tes Tulis
Nf = Nilai Formatif

PERTEMUAN: KE 3

FORMULASI DAN PENGESAHAN KEBIJAKAN PENIDIKAN

I. Capaian Akhir Mata Kuliah

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep kebijakan pendidikan secara komprehensip untuk kepentingan pengembangan pendidikan dan penelitian.

II. Bahan Kajian (Materi ajar)

Formulasi, dan pengesahan kebijakan pendidikan

III. Capaian yang diharapkan

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui batasan-batasan Formulasi, dan pengesahan kebijakan pendidikan, serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyan berikut:

1. Menjelaskan tentang konsep dasar dan teori formulasi kebijakan;
2. Menjelaskan, model, tipologi, formulasi kebijakan;
3. Menjelaskan, tentang proses formulasi kebijakan pendidikan;

IV. Materi Ajar

1. Konsep dasar dan teori formulasi kebijakan;
2. Model, tipologi, formulasi kebijakan;
3. Proses formulasi kebijakan;
4. Aplikasi Formulasi kebijakan pendidikan;

V. Metode/Strategi Pembelajaran:

Ceramah/Diskusi kelompok

VI. Tahap Pembelajaran:

a.Kegiatan Awal:

Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah

b.Kegiatan Inti :

- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok
- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok
- Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas
- Dosen memberi komentar

c.Kegiatan Akhir:

Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:

a. Alat/Media : OHP-OHT, LAPTOP – LCD

b. Bahan/Sumber Belajar:

- Sholihin Abdul Wahab,1991, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Impelementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Jogjakarta: Gajah Mada University Press
- Amitai and Etzioni, Eva.(1964). *Social Change, Sources, Patterns and. Consequences.* New York, London: Basic Books
- Ace Suryadi dan HAR Tilaar, 1983, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sutjipto, 1987, *Analisis Kebijaksanaan Pendidikan Suatu Pengantar*, IKIP Padang, Padang.
- Checkland, Peter and Scholes, Jim, 1990, *Soft Systems Methodology in Action*, John Wiley & Sons, England.
- Rusdiana A, 2015. *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke imlentasi*. Bandung Pustaka Setia.

VIII. Penilaian:

a. Teknik dan instrumen penilaian:
   1) Hasil diskusi
   2) Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi
   3) Tes tertulis

b. Kriteria Penilaian

$$\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt}{10} = Nf$$

Keterangan:

Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt = Tes Tulis
Nf = Nilai Formatif

PERTEMUAN: KE 4
SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENIDIKAN

I. Capaian Akhir Mata Kuliah

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep kebijakan pendidikan secara komprehensip untuk kepentingan pengembangan pendidikan dan penelitian.

II. Bahan Kajian (Materi ajar)

Sosialisasi Kebijakan pendidikan implikasinya terhadap pembangunan pendidikan Indonesia

III. Capaian yang diharapkan

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui batasan-batasan analisis kebijakan, serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyan berikut:

1. Mendefinisikan soalisasi dan komunikasi Kebijakan Pendidikan
2. Menjelaskan Alasan-alasan perlunya Sosialisasi dan komunikasi kebijakan pendidikan.
3. Mengidentifikasi problema dalam sosialisasi kebijakan pendidikan.
4. Menjelaskan model idel dalam sosialisasi dan komunikasi kebijakan pendidikan.

IV. Materi Ajar

1. Definisikan soalisasi dan komunikasi Kebijakan Pendidikan
2. Alasan-alasan perlunya Sosialisasi dan komunikasi kebijakan pendidikan.
3. Model komunikasi kebijakan pendidikan.
4. Identifikasi problema Sosialisasi kebijakan pendidikan.

V. Metode/Strategi Pembelajaran:

Ceramah/Diskusi kelompok

VI. Tahap Pembelajaran:

a.Kegiatan Awal:

Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah

b.Kegiatan Inti :

- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok
- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok
- Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas
- Dosen memberi komentar

c.Kegiatan Akhir:

Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:

a. Alat/Media : OHP-OHT, LAPTOP – LCD

b. Bahan/Sumber Belajar:

- Arni Muhammad. 1989. *Komunikasi Oganisasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suprapto, Tommy. 2009. *Pengantar Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI).
- Sherwyn P. Morreale, Brian H. Spitzberg, J. Kevin Barge 2007. *Human Communication: Motivation, Knowledge, and Skills.*

- Anonimus, 2013. *Alasan-Alasan Perlunya Komunikasi Kebijakan Pendidikan*, (Online), (http://ebookbrowse. com/alasan-alasan-perlunya-komunikasi-kebijakan-pen didikan-pdf-d355894780), diakses 28 Agustus 2014.
- Rusdiana A, 2015. *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke imlentasi*. Bandung Pustaka Setia.
- Rusdiana A, 2017. *Komunikasi dan Teknologi Inforgasi Pendidikan:* Bandung Pustaka Setia.

VIII. Penilaian:

a. Teknik dan instrumen penilaian:
   1) Hasil diskusi
   2) Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi
   3) Tes tertulis
b. Kriteria Penilaian

$$\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt}{10} = Nf$$

Keterangan:
Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt = Tes Tulis
Nf = Nilai Formatif

PERTEMUAN: KE 5

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENIDIKAN

I. Capaian Akhir Mata Kuliah

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep kebijakan pendidikan secara komprehensip untuk kepentingan pengembangan pendidikan dan penelitian.

II. Bahan Kajian (Materi ajar)

Imlementasi kebijakan pendidikan.

III. Capaian yang diharapkan

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui batasan-batasan analisis kebijakan, serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyan berikut:

1. Mendefinisikan implementasi kebijakan pendidikan
2. Mengidentifikasi aktor-aktor pelaksana Kebijakan pendidikan.
3. Menjelaskan arena kebijakan pendidikan
4. Menjelaskan jenisjenis kebijakan pendidikan.
5. Menjelaskan langkah umum kebijakan pendidikan.

IV. Materi Ajar

1. Definisikan implementasi kebijakan pendidikan
2. Identifikasi aktor-aktor pelaksana kebijakan pendidikan.
3. Arena kebijakan pendidikan
4. Langkah umum kebijakan pendidikan.

V. Metode/Strategi Pembelajaran:

Ceramah/Diskusi kelompok

VI. Tahap Pembelajaran:

a.Kegiatan Awal: Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah

b.Kegiatan Inti :

- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok
- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok
- Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas
- Dosen memberi komentar

c.Kegiatan Akhir:

Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:

a. Alat/Media : OHP-OHT, LAPTOP – LCD

b. Bahan/Sumber Belajar:

- Anderson James E, 1979. *Public Policy Making*, New York, Holt, Rinehart and Wiston,.
- Ali Imron, 1995. *Kebijakan Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Said Zainal Abidin, 2006. *Kebijakan Publik,* Jakarta: Suara Bebas,
- Joko Widodo, 2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aolikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia Publishing,
- Abdulsyani, 2007. *Sosiologi "skematika, teori, dan terapan*". Jakarta: Bumi aksara.
- H.A.R. Tilaar&Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan public*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriadi, Dedi, dan Hoogenboom, Ireene. 2003. *Guru di Indonesia Dari Masa KeMasa*. Jakarta: Depdikbud.
- Nugroho, Riant, 2006, *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Yoyon Bahtiar Irianto, 2011. *Kebijakan Pendidikan Dalam Konteks Desentralisasi Pembangunan Manusia,* Bandung: PDF/UPI.
- Rusdiana A, 2014. *IInovasi Pendidikan: dari Filosofi ke imlentasi*. Bandung Pustaka Setia.
- Rusdiana A, 2015. *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke imlentasi*. Bandung Pustaka Setia.
- Rusdiana A, 2017. *Sistem Pemikiran Manajemen Pendidikan.*Bandung Pustaka Setia.

VIII. Penilaian:

a. Teknik dan instrumen penilaian:

1) Hasil diskusi
2) Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi
3) Tes tertulis

b. Kriteria Penilaian

$$\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt}{10} = Nf$$

Keterangan:

Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt = Tes Tulis
Nf = Nilai Formatif

PERTEMUAN: KE 6

STUDI DAN ANALISIS KEBIJAKAN

I. Capaian Akhir Mata Kuliah

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep kebijakan pendidikan secara komprehensip untuk kepentingan pengembangan pendidikan dan penelitian.

II. Bahan Kajian (Materi ajar)

Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang studi dan analisis kebijakan pendidikan pembangunan pendidikan Indonesia.

III. Capaian yang diharapkan

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kempuan untuk:

2. Menjelaskan karakteristik studi analisis kebijakan;
3. Menjelaskan pendekatan dan model analisis kebijakan;
4. Menjelaskan keterbatasan dan skenario analisis kebijakan

IV. Materi Ajar

1. Karakteristik studi analisis kebijakan;
2. Pendekatan dan model analisis kebijakan;
3. Keterbatasan dan skenario analisis kebijakan

V. Metode/Strategi Pembelajaran:

Ceramah/Diskusi kelompok

VI. Tahap Pembelajaran:

a.Kegiatan Awal:

Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah

b.Kegiatan Inti :

- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok
- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok
- Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas
- Dosen memberi komentar

c.Kegiatan Akhir:

Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:

c. Alat/Media : OHP-OHT, LAPTOP – LCD

d. Bahan/Sumber Belajar:

- Dunn, William N, 1981, *An Introduction to Public Policy Analysis*, Prentice Hall: Englewood Cliff, NJ.
- Amitai Etzioni, (1980) *A Comparative Analysis of Complex Organizations*, New York , Free Press.
- Sholihin Abdul Wahab, 1998, *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
- Rusdiana A, 2015. *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke imlentasi*. Bandung Pustaka Setia.

VIII. Penilaian:

a. Teknik dan instrumen penilaian:
   1) Hasil diskusi
   2) Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi

3) Tes tertulis

b. Kriteria Penilaian

$$\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt}{10} = Nf$$

Keterangan:
Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt = Tes Tulis
Nf = Nilai Formatif

PERTEMUAN: KE 7

MODEL ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

I. Capaian Akhir Mata Kuliah

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep kebijakan pendidikan secara komprehensip untuk kepentingan pengembangan pendidikan dan penelitian.

II. Bahan Kajian (Materi ajar)

Model analisis kebijakan pendidikan

III. Capaian yang diharapkan

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui batasan-batasan studi analisis kebijakan pendikan, serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyan berikut:

5. Menjelaskan kerangka berfikir analisis kebijakan pendidikan;
6. Menjelaskan kegiatan analisis kebijakan pendidikan;
7. Menjelaskan presfektif analisis kebijakan
8. Menjelaskan model-model analisis kebijakan

IV. Materi Ajar

1. Kerangka berfikir analisis kebijakan pendidikan;
2. Kegiatan analisis kebijakan pendidikan;
3. Presfektif analisis kebijakan
4. model-model analisis kebijakan

V. Metode/Strategi Pembelajaran:

Ceramah/Diskusi kelompok

VI. Tahap Pembelajaran:

a.Kegiatan Awal:
Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah

b.Kegiatan Inti :

- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok
- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok
- Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas
- Dosen memberi komentar

c.Kegiatan Akhir:
Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:

a. Alat/Media : OHP-OHT, LAPTOP – LCD

b. Bahan/Sumber Belajar:

VIII. Penilaian:

b. Teknik dan instrumen penilaian:
   1) Hasil diskusi
   2) Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi
   3) Tes tertulis

b. Kriteria Penilaian

$$\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt}{10} = Nf$$

Keterangan:

Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt = Tes Tulis
Nf = Nilai Formatif

PERTEMUAN: KE 8

MONITORING EVALUASI KEBIJAKAN PENIDIKAN

I. Capaian Akhir Mata Kuliah

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep kebijakan pendidikan secara komprehensip untuk kepentingan pengembangan pendidikan dan penelitian.

II. Bahan Kajian (Materi ajar)

Monitoring dan mengevaluasi kebijakan pendidikan

III. Capaian yang diharapkan

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui batasan-batasan monitoring dan mengevaluasi, serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyan berikut:

1. Mendefinisikan monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan
2. Menjelaskan macam-macam evaluasi kebijakan pendidikan
3. Menjelaskan karakteristik evaluasi kebijakan pendidikan
4. Menginventarisir faktor-faktor evaluasi kebijakan pendidikan
5. Mengidentifikasi problem-problem evaluasi kebijakan pendidikan.

IV. Materi Ajar

1. Definisikan monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan
2. Karakteristik monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan
3. Macam-macam monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan
4. Faktor-faktor monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan
5. Problem-problem evaluasi kebijakan pendidikan.

V. Metode/Strategi Pembelajaran:

Ceramah/Diskusi kelompok

VI. Tahap Pembelajaran:

a.Kegiatan Awal:

Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah

b.Kegiatan Inti :

- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok
- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan

- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok
- Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas
- Dosen memberi komentar

c.Kegiatan Akhir:

Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:

a. Alat/Media : OHP-OHT, LAPTOP – LCD

b. Bahan/Sumber Belajar:

- Anderson James E, 1979. *Public Policy Making*, New York, Holt, Rinehart and Wiston,.
- Ali Imron, 1995. *Kebijakan Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, 2007, *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Elexmedia.
- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arif Rohman, 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang. Mediatama.
- Nugroho, Riant, 2006, *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Austin, N., & Peters, T. (1985). *A Passion for Excellence*. Glasgow: Fontana/Collins.
- Ripley, Randal B. 1985. *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson-Hall Publisher
- Parsons, Wayne. 2001. *Public Policy*. Edward Elgar Publishing Ltd.
- Suhardan, Dadang, dkk. 2011. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Rusdiana A, 2015. *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke imlentasi*. Bandung Pustaka Setia.
- Rusdiana, A. 2017. *Manajemen Evaluasi Program Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia

VIII. Penilaian:

a. Teknik dan instrumen penilaian:
   1) Hasil diskusi
   2) Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi
   3) Tes tertulis

b. Kriteria Penilaian

$$\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt}{10} = Nf$$

Keterangan:

Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt = Tes Tulis
Nf = Nilai Formatif

PERTEMUAN: KE 9

PERKEMBANGAN HISTORIS KEBIJAKAN PENIDIKAN DI INDONESIA

I. Capaian Akhir Mata Kuliah

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep kebijakan pendidikan secara komprehensip untuk kepentingan pengembangan pendidikan dan penelitian.

II. Bahan Kajian (Materi ajar)

Perkembangan histories kebijakan pendidikan di Indonesia

III. Capaian yang diharapkan

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui batasan-batasan perkembangan histories, serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyan berikut:

1. Mengidentifikasi kebijakan pendidikan sebelum Proklamasi
2. Mengidentifikasi kebijakan pendidikan pasca kemerdekaan
3. Mengidentifikasi kebijakan pendidikan masa orde baru
4. Mengidentifikasi kebijakan pendidikan zaman Reformasi

IV. Materi Ajar

1. Kebijakan pendidikan sebelum Proklamasi
2. Kebijakan pendidikan pasca kemerdekaan
3. Kebijakan pendidikan masa orde baru
4. Kebijakan pendidikan zaman Reformasi

V. Metode/Strategi Pembelajaran:

Ceramah/Diskusi kelompok

VI. Tahap Pembelajaran:

a.Kegiatan Awal: Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah

b.Kegiatan Inti:

- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok
- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok
- Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas
- Dosen memberi komentar

c.Kegiatan Akhir:

Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:

a. Alat/Media : OHP-OHT, LAPTOP – LCD

b. Bahan/Sumber Belajar:

- Nasution, 1994. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia,* Bandung: Dinas Sejarah TNI AD dan Penerbit Angkasa Bandung,
- Gunawan, Ari, 1986, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan.* Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Arif Rohman, 2009. *Politik Ideologi Pendidikan,* Yogyakarta: LaksBang Mediatama..
- Patriana, Uwe Schippers Djadjang Madya, *Pendidikan Kejuruan di Indonesia*, Bandung: Angkasa. 1994, hlm. 7
- Sam M.Chan dan Tuti T.Sam, 2007, *Analisis Swot Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah,* Jakarta: Grafindo.

- Mustafa dan abdulloh, 1998. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Bandung Pustaka setia.
- Anam, S, 2010. S*ekolah dasar, pergulatan mengejar ketertinggalan*, Solo: Wijatri,
- Zuhairini dkk, 1986, *Sejarah Pendidikan Islam, Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama*, Jakarta,
- Soenarto, N., *Biaya Pendidikan di Indonesia: Perbandingan pada Zaman Kolonial Belanda dan NKRI*, acses, http://www.kompas.com,
- Sanjaya, W. *Kajian Kurikulum dan Pembelajaran*, Bandung: Sekolah Pasca Sarjana UPI, 2007
- Assegaf, Abd. Rachman. 2005 . *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam.
- Rusdiana A, 2015. *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke imlentasi*. Bandung Pustaka Setia.
- Rusdiana A, 2017. *Sistem Pemikiran Manajemen Pendidikan.*Bandung Pustaka Setia.

VIII. Penilaian:

a. Teknik dan instrumen penilaian:
   1) Hasil diskusi
   2) Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi
   3) Tes tertulis

b. Kriteria Penilaian

$$\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt}{10} = Nf$$

Keterangan:
Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt = Tes Tulis
Nf = Nilai Formatif

PERTEMUAN: KE 10

KEBIJAKAN POKOK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL

I. Capaian Akhir Mata Kuliah

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi kebijakan pokok pembangunan Pendidikan nasional (tiga pilar tiga pilar kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional);

II. Bahan Kajian (Materi ajar)

Kebijakan pokok pembangunan Pendidikan nasional

III. Capaian yang diharapkan

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui batasan-batasan kebijakan pokok pembangunan nasional, menerapkannya, serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyan berikut:

1. Menjelaskan Konsep dasar kebijakan pokok pembangunan Pendidikan nasional (tiga pilar tiga pilar kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional);

2. Menjelaskan pemerataan dan perluasan akses
3. Menjelaskan peningkatan mutu pendidikan, relevansi dan daya saing
4. Menjelaskan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik.

IV. Materi Ajar

1. Konsep dasar kebijakan pokok pembangunan Pendidikan nasional (tiga pilar tiga pilar kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional);
2. Pemerataan dan perluasan akses
3. Peningkatan mutu pendidikan, relevansi dan daya saing
4. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik.

V. Metode/Strategi Pembelajaran:

Ceramah/Diskusi kelompok

VI. Tahap Pembelajaran:

a.Kegiatan Awal: Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah

b.Kegiatan Inti:

- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok
- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok
- Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas
- Dosen memberi komentar

c.Kegiatan Akhir:

Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:

a. Alat/Media: OHP-OHT, LAPTOP – LCD

b. Bahan/Sumber Belajar:

- Armida S. Alisjahbana, 2000. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan*, Bandung: Universitas Padjajaran.
- Hasbullah, 2007. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan,* Jakarta: Pustaka Mandiri
- H.A.R Tilaar, 2004. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Suwendi, 2004. *Sejarah dan pemikiran pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adi Suryanto, et al. 2010. *Evaluasi Pembelajaran di SD.* Jakarta: Universitas Terbuka
- Syarif Hidayat, 2012. *Profesi Kependidikan*. Jakarta: Pustaka Mandiri
- Keputusan BSNP tentang Prosedur Operasi Standar Pelaksanaan UN Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
- Renatra Kemediknas 2015-2020
- Rusdiana, 2015. *Pengembangan Orgnaisasi Lembaga Pendidikan*: Bandung; Pustaka Setia.

VIII. Penilaian:

a. Teknik dan instrumen penilaian:
   1) Hasil diskusi
   2) Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi

3) Tes tertulis

b. Kriteria Penilaian

$$\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt}{10} = Nf$$

Keterangan:
Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt = Tes Tulis
Nf = Nilai Formatif

PERTEMUAN: KE 11

KEBIJAKAN MAKRO PEMBANGUNAN PENDIDIKAN /TK NASINAL

I. Capaian Akhir Mata Kuliah

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep kebijakan pendidikan secara komprehensip untuk kepentingan pengembangan pendidikan dan penelitian.

II. Bahan Kajian (Materi ajar)

Kebijakan makro pembangunan pendidikan.

III. Capaian yang diharapkan

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui batasan-batasan kebijakan pembangunan pendidikan makro, (level nasional); serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyan berikut:

1. Menjelaskan konsep dasar kebijakan makro pendidikan;
2. Menjelaskan bentuk/model kebijakan makro pendidikan;
3. Menjelaskan implemetasi kebijakan makro pendidikan;
4. Menjelaskan permasalah dan solusi kebijakan makro pendidikan;.

IV. Materi Ajar

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kempuan untuk:

1. Konsep dasar kebijakan makro pendidikan;
2. Bentuk/model kebijakan makro pendidikan
3. Iplemetasi kebijakan makro pendidikan;
4. Permasalah dan solusi kebijakan makro pendidikan;.

IV. Materi Ajar

1. Konsep dasar Motivasi
2. Model, teknik dan usaha untuk membangkikan Motivasi
3. Model strategi penerapan teori motivasi di lembaga pendidikan

V. Metode/Strategi Pembelajaran:

Ceramah/Diskusi kelompok

VI. Tahap Pembelajaran:

a.Kegiatan Awal:

Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah

b.Kegiatan Inti :

- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok
- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok
- Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas
- Dosen memberi komentar

c.Kegiatan Akhir: Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:

a. Alat/Media : OHP-OHT, LAPTOP – LCD

b. Bahan/Sumber Belajar:

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Suara Bebas
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta. Gajah Mada University Press
- Imron , Ali. 1995. *Kebijakan Pendiikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muhdi, Ali. 2007. *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta. Pustaka Fahima.
- Pongtuluran, Aris. 1995. *Kebijakan Organisasi dan Pengambilan Keputusan Manajerial*. Jakarta. LPMP
- Keputusan BSNP tentang Prosedur Operasi Standar Pelaksanaan UN Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
- Renatra Kemediknas 2015-2020
- Rusdiana, 2015. *Pengembangan Orgnaisasi Lembaga Pendidikan*: Bandung; Pustaka Setia.
- Yaya S & Rusdiana, 2015. *Pendidikan Multi Kultural*: Upaya Penguatan Jatidiri Bangsa. Bandung; Pustaka Setia.

VIII. Penilaian:

c. Teknik dan instrumen penilaian:
   1) Hasil diskusi
   2) Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi
   3) Tes tertulis

d. Kriteria Penilaian

$$\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt}{10} = Nf$$

Keterangan:

Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt = Tes Tulis
Nf = Nilai Formatif

PERTEMUAN: KE 12

KEBIJAKAN MESO PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TK DAERAH

I. Capaian Akhir Mata Kuliah

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep kebijakan pendidikan secara komprehensip untuk kepentingan pengembangan pendidikan dan penelitian.

II. Bahan Kajian (Materi ajar)

Kebijakan pembangunan pendidikan meso

III. Capaian yang diharapkan

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui batasan-batasan kebijakan pembangunan pendidikan meso, (level regional.daerah); serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyan berikut:

1. Menjelaskan konsep dasar kebijakan meso pendidikan;
2. Menjelaskan bentuk/model kebijakan meso pendidikan;
3. Menjelaskan implemetasi kebijakan meso pendidikan;
4. Menjelaskan permasalah dan solusi kebijakan meso pendidikan;.

IV. Materi Ajar

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kempuan untuk:

1. Konsep dasar kebijakan meso pendidikan;
2. Bentuk/model kebijakan meso pendidikan
3. Iplemetasi kebijakan meso pendidikan;
4. Permasalah dan solusi kebijakan meso pendidikan;.

V. Metode/Strategi Pembelajaran:

Ceramah/Diskusi kelompok

VI. Tahap Pembelajaran:

a.Kegiatan Awal:

Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah

b.Kegiatan Inti:

- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok
- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok
- Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas
- Dosen memberi komentar

c.Kegiatan Akhir: Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:

a. Alat/Media : OHP-OHT, LAPTOP – LCD

b. Bahan/Sumber Belajar:

- Abdurrahman. 1987. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta : Media Sarana Press
- Danuredjo. 1977. *Otonomi Indonesia Ditinjau dalam Rangka Kedaulatan*. Jakarta : Penerbit Laras
- Hasbullah, 2006. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Koesoemahatmadja. 1979. *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan di Daerah di Indonesia*. Bandung : Binacipta
- Nugroho, D. Riant. 2000. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta : PT Elex Media Computindo
- Saleh, Syarif. 1963. *Otonomi dan Daerah Otonom*. Jakarta : Penerbit Endang
- Wayong J. 1979. *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*. Jakarta:Penerbit *Djambatan*
- Muhdi, Ali. 2007. *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta. Pustaka Fahima.
- Rusdiana, 2015. *Pengelolaan Pendidikan*: Bandung; Pustaka Setia
- Rusdiana, 2015. *Pengembangan Orgnaisasi Lembaga Pendidikan*: Bandung; Pustaka Setia.

VIII. Penilaian:

a.Teknik dan instrumen penilaian:

1) Hasil diskusi
2) Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi

3) Tes tertulis

b. Kriteria Penilaian

$$\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt}{10} = Nf$$

Keterangan:
Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt = Tes Tulis
Nf = Nilai Formatif

PERTEMUAN: KE 13

KEBIJAKAN MIKRO PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

I. Capaian Akhir Mata Kuliah

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep kebijakan pendidikan secara komprehensip untuk kepentingan pengembangan pendidikan dan penelitian.

II. Bahan Kajian (Materi ajar)

Kebijakan pembangunan pendidikan mikro

III. Capaian yang diharapkan

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui batasan-batasan kebijakan pembangunan pendidikan mikro, (level institusional/lembaga pendidikan); serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyan berikut:

1. Menjelaskan konsep dasar kebijakan mikro pendidikan;
2. Menjelaskan bentuk/model kebijakan mikro pendidikan;
3. Menjelaskan implemetasi kebijakan mikro pendidikan;
4. Menjelaskan permasalah dan solusi kebijakan mikro pendidikan;.

IV. Materi Ajar

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kempuan untuk:

1. Konsep dasar kebijakan mikro pendidikan;
2. Bentuk/model kebijakan mikro pendidikan;
3. Implemetasi kebijakan mikro pendidikan;
4. Permasalah dan solusi kebijakan mikro pendidikan;.

V. Metode/Strategi Pembelajaran:

Ceramah/Diskusi kelompok

VI. Tahap Pembelajaran:

a.Kegiatan Awal:
Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah

b.Kegiatan Inti:
- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok
- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok
- Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas
- Dosen memberi komentar

c.Kegiatan Akhir: Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:

a. Alat/Media : OHP-OHT, LAPTOP – LCD

b. Bahan/Sumber Belajar:
- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Suara Bebas
- Hasbullah, 2006. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

- Muhdi, Ali. 2007. *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta. Pustaka Fahima.
- Nugroho, D. Riant. 2000. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta : PT Elex Media Computindo
- Pongtuluran, Aris. 1995. *Kebijakan Organisasi dan Pengambilan Keputusan Manajerial*. Jakarta. LPMP
- Saleh, Syarif. 1963. *Otonomi dan Daerah Otonom*. Jakarta : Penerbit Endang
- Suryono, Yoyon. 2000. *Arah Kebijakan Otonomi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta. FIP UNY
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta

VIII. Penilaian:

a. Teknik dan instrumen penilaian:
   4) Hasil diskusi
   5) Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi
   6) Tes tertulis

b. Kriteria Penilaian

$$\frac{2\,Pt + 3\,Ps + 5Tt}{10} = Nf$$

Keterangan:
Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt = Tes Tulis
Nf = Nilai Formatif

Bandung, 05 Maret 2020

Mengetahui
Ketua Jurusan/Prodi,

Dosen Pengampu Mata Kuliah,

Dr. Irawan, S.Pd., M.Hum
NIP.19720822199901000

Dr. H. A. Rusdiana, Drs., M.M.
NIP:194612161965041001

AGENDA PERKULIAHAN
Identitas Mata Kuliah:

1. Mata Kuliah : Kebijakan Pendidikan
2. Kode Mata Kuliah : KP20103
3. Bobot SKS : 3 SKS
4. Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
6. Semester : 4 (tujuh)
6. Kelas : VI/A-B)*
6. Dosen/Pengampu : Dr. H. Rusdiana, MM.

AGENDA DAN KONTRAK PERKULIAHAN
MK. Kebijakan Pendidikan*)

PERT/ KE-	HARI/ TANGGAL	MATERI/ POKOK BAHASAN	KET.
01	Kamis 05-03-020	**Penngantar:** - Silabus - Kerangka Perkuliahan (5W+1H) - Kesepakatan Perkuliahan/berbagai aturan dan tugas-tugas perkuliahan	CDT Daring
02	12-03-020	Konsep Dasar Kebijakan Publik	CDT/asp Daring
03	19-03-020	Perkembangan Historis Kebijakan Penidikan Di Indonesia	CDT/asp Daring
04	26-03-020	Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional Dan Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional	CDT/asp Daring
05	02-04-020	Formulasi Dan Pengesahan/Legitimasi Kebijakan Penidikan	DK-1 Daring
06	09-04-020	Sosialisasi Dan Komunikasi Kebijakan Penidikan	DK-2 Daring
07	16-04-020	Implementasi Kebijakan Penidikan	DK-3 Daring
08	23-04-020	**UTS**	Daring
	07-05-020	**Libur Hari Raya Waisak**	
09	14-05-020	Analisis Kebijakan	DK-4 Daring
	21-05-020	**Libur Kenaikan Isa Almasih**	
10	28-05-020	Monitoring Evaluasi Kebijakan Penidikan	DK-5 Daring
11	04-06-020	Kebijakan Makro/Nasional Pengemb Penidikan	DK-6 Daring
12	11-06-020	Kebijakan Messo/Daerah Pengemb Penidikan	DK-7 Daring
13	18-06-020	Kebijakan Mikro/Sekolah Pengemb Penidikan	DK-8 Daring
	22-27-020	**Cuti bersama Hari Raya Iedul Fitri tgl 22 sd. 27 Juni 2020**	
14	06 sd. 11-07-020	**UAS/Analisis**	Daring

Catatan:
*) Disesukan SE Rektor UIN SGD No. B-392/Un. 05/II/.04/HM/01/03/2020 Tgl 26 Maret 2020

Bandung, 05 Maet 2020

Kosma**,** Kls……. Dosen Pengampu MK**,**

..... **Dr. H. A. Rusdiana, Drs., MM**
NIM..... NIP. 196104211986021001

KERANGKA KERJA TUGAS

(bahan tugas terstruktur dan mandiri)

SK/KD | **TUGAS TERSTRUKTUR** Kerja kelompok 1-8 | **TUGAS MANDIRI** Riset Kebijakan

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep kebijakan pendidikan secara komprehensip untuk kepentingan pengembangan pendidikan

1.Formulasi Dan Pengesahan Kebijakan Penidikan
- Konsep dasar formulasi kebijakan;
- Teori, Model, tipologi, formulasi kebijakan;
- Proses formulasi kebijakan;
- Aplikasi Formulasi kebijakan pendidikan;

1. ……/……..
2. ……/……
3. ……/……..
4. ……/……..
5. ……/……..
6. ……/……..
7. ……/……..
8. ……/……

2.Sosialisasi Dan Komunikasi Kebijakan Penidikan
- Konsep Dasar soalisasi dan komunikasi Kebijakan Pendidikan
- Alasan-alasan perlunya Sosialisasi dan komunikasi kebijakan pendidikan.
- Model komunikasi kebijakan pendidikan.
- Identifikasi problema Sosialisasi kebijakan pendidikan.

1. ……/……..
2. ……/……
3. ……/……..
4. ……/……..
5. ……/……..
6. ……/……..
7. ……/……..
8. ……/……

3. Implementasi Kebijakan Penidikan
- Konsep Dasar implementasi kebijakan pendidikan
- Identifikasi aktor-aktor pelaksana kebijakan pendidikan.
- Arena kebijakan pendidikan
- Langkah umum kebijakan pendidikan.

1. ……/……..
2. ……/……
3. ……/……..
4. ……/……..
5. ……/……..
6. ……/……..
7. ……/……..
8. ……/……

4. Analisis Kebijakan
- Konsep Dasar Analisis Kebijakan
- Karakteristik studi analisis kebijakan;
- Pendekatan dan model analisis kebijakan;
- Keterbatasan dan skenario analisis kebijakan

1. ……/……..
2. ……/……
3. ……/……..
4. ……/……..
5. ……/……..
6. ……/……..
7. ……/……..
8. ……/……

5.Monitoring Evaluasi Kebijakan Penidikan
- Konsep Dasar monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan
- Karakteristik monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan
- Macam-macam monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan

1. ……/……..
2. ……/……
3. ……/……..
9. ……/……..
4. ……/……..
5. ……/……..
6. ……/……..
7. ……/……..
8. ……/……

6. Kebijakan Makro Pengemb Penidikan
- Konsep dasar kebijakan makro pendidikan;
- Bentuk/model kebijakan makro pendidikan
- Iplemetasi kebijakan makro pendidikan;
- Permasalah dan solusi kebijakan makro pendidikan;.

1. ……/……..
2. ……/……
3. ……/……..
4. ……/……..
5. ……/……..
6. ……/……..
7. ……/……..
8. ……/……

7. Kebijakan Meso Pengemb Penidikan
- Konsep dasar kebijakan meso pendidikan;
- Bentuk/model kebijakan meso pendidikan
- Iplemetasi kebijakan meso pendidikan;
- Permasalah dan solusi kebijakan meso pendidikan;.

1. ……/……..
2. ……/……
3. ……/……..
4. ……/……..
5. ……/……..
6. ……/……..
7. ……/……..
8. ……/……

8.Kebijakan Mikro Pengemb Pendidikan
- Konsep dasar kebijakan mikro pendidikan;
- Bentuk/model kebijakan mikro pendidikan;
- Implemetasi kebijakan mikro pendidikan;
- Permasalah dan solusi kebijakan mikro pendidikan;.

1. ……/……..
2. ……/……
3. ……/……..
4. ……/……..
5. ……/……..
6. ……/……..
7. ……/……..
8. ……/……

SISTIMATIKA PENULISAN TUGAS KELOMPOK
Tugas Terstruktur (TT)

Sampul Depan

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

b. Rumusan Masalah

c. Maksud dan Tujuan

BAB II PEMBAHASAN

Bagi SUB Judul Tunggal*)

A. .....

B. .....

C. .....

D. .....

E. .....

F. dst.....

Bagi SUB Judul Jamak*)

A. .....
   1. .....
   2. .....
   3. dst.....

B. .....
   1. .....
   2. .....
   3. dst.....

C. .....
   1. .....
   2. .....
   3. dst.....

*) Sub Pokok bahasan: lihat point IV, pada Rencana Mutu Pembelajaran (RPM)

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

Cara Penulisan:

Aswab Mahasin, 2015. *Masyarakat Madani dan Lawan-lawannya: Sebuah Mukadimah", Pengantar untuk Ernest Gellner, Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat Menuju Kebebasan*, Terjemahan Ilyas Hasan, Bandung, Mizan.

Bagir Manan, 2016. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,

Cogan, John J. and Ray Derricott. 2018. *Citizenship Education For the 21 st Century*: Setting the Context .London: Kogan Page

Din Syamsuddin, 2019. *Etika Agama dalam membangun Masyarakat Madani,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Takizudin E, 2015. "Kebijakan pendidikan Inklusif" *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan (JAMP),* Vol 2. No.1 (Jannuari 2015): 51-77

Uswatun Hasanah, 2016. "Implentasi Kebijakan Biaya Operasional Sekolah/Madrasah" *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam,* Vol 5. No.2 (Juli 2016): 131-143

Zaki Nurzaman M, 2017. "Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Perguruan Tinggi" *Jurnal Wawan Pendidikan*, Vol 5. No.2 (Mei, 2017): 135-149.

Catatan:

Setiap Makalah Kelompok menggunakan Referen, minimal 3 referen (1 Referen Buku dan 2 refereen Jurnal) dalam liama tahun terakhir (2015-2020).

PENILAIAN KELOMPOK

Mata Kuliah :.....
Kompetensi Dasar :.....
Indikator/Sub. KD :
.....
.....
.....

Kelompok:...../Kelas/...../Jur. .....Semester.....Th. Akademik.....

No	NIM	Nama Mahasiaswa	Faraf	No	NIM	Nama Mahasiaswa	Faraf
1				6			
2				7			
3				8			
4				9			
5				10			

PENILAIAN

1. Makalah

No	Aspek Penilaian	Skala Penilaian			
		1	2	3	4
1	Perumusan masalah				
2	Pembahasan masalah				
3	Kajian teori				
4	Pemecahan masalah				
5	Sistematika pembahasan				
	Jumlah Total				

Keterangan :
1 = Sangat tepat
2 = Tepat
3 = Kurang tepat
4 = Tidak tepat

N2 = Total nilai x 10 / 5

2. Presentasi dan Dikusi **Hari/Tgl.** ……/……..

No	Aspek Penilaian	Skala Penilaian			
		1	2	3	4
1	Penyampaian ide pokok makalah				
2	Penguasaan materi				
3	Penggunaan media				
4	Menjawab pertanyaan				
5	Kerja sama kelompok				
	Jumlah Total				

Keterangan :
1 = Sangat baik
2 = Baik
3 = Kurang baik
4 = Tidak baik

N3 = Total nilai x 10 / 5

Bandung, ……...
Dosen,

Dr. H. A. Rusdiana, MM
NIP. 196104211986021001

PORTOPOLIO

I. PORTOPOLIO KELOMPOK (TUGAS KELOMPOK/TERSTRUKTUR)

SAMPUL
PORTO POLIO KLP

Logo
MATA KULIAH
…….

Kelompok:.....
SMT/Kelas.....
Nama Mhs...../NIM...
Nama Mhs...../NIM...

Nama Prodi……
Fak……..
UIN……
TH…..

Uraian ISI per kelompok	Cekclist
1. Makalah Final Hasil Diskusi dilengkapi dengan Poster	
2. Notula Diskusi	
3. Makalah yang didiskusikan….mak ke….	
4. Makalah Hasil Revisi/Masukan Kelompok Diskusi	
5. Makalah Hasil Revisi/Masukan Kelompok Diskusi	
6. Makalah Sebelum didiskusikan….mak ke….sd. ...ke.....	

NOTULEN DISKUSI

Tanggal diskusi : .....
Tempat diskusi : Ruang …….
Waktu diskusi : 10.00-10.45 WIB
Tema diskusi : **Pemanasan Global (Global Warming**)
Moderator : Ravika Wulandari
Panelis/Pembicara : Azlia Priharsi
Peserta : Mahasiswa.....
Jumlah : ..... orang

Uraian Pelaksanaan Diskusi :

1. Diskusi dipimpin dan dibuka oleh moderator (Ravika Wulandari) pada pukul 10.00 WIB.
2. Setelah diskusi dibuka, moderator mulai memperkenalkan anggota kelompok satu persatu.
3. Kemudian dilanjutkan oleh narasumber yang menyampaikan materi diskusi pada pukul 10.05 – 10.25 WIB.
4. Ketika narasumber selesai menyampaikan materi, moderator membuka kesempatan kepada para peserta diskusi untuk mengajukan pertanyaan. Setiap kelompok mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji dan terjadi interaksi yang baik saat sesi tanya jawab. Secara umum, diskusi berjalan dengan lancar selama 45 menit. Para peserta mengikuti diskusi yang berlangsung dengan tenang, serius, dan antusias. Jika melihat jalannya diskusi, tampaknya para peserta tertarik dengan tema diskusi. Apalagi permasalahan yang disampaikan oleh panelis berhubungan langsung dengan kehidupan dan masa depan bumi ini.
5. Setelah selesai menjawab semua pertanyaan dari peserta diskusi, moderator menutup diskusi pada pukul 10.45 WIB.

PAPARAN MATERI

Uraian singkat pemeparan

PERTANYAAN/MASUKAN

Pertanyaan 1:
Diketahui bahwa salah satu upaya mengatasi global warming adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan menggantinya dengan bersepeda atau berjalan kaki. Namun, tingginya tingkat kejahatan yang terjadi membuat bersepeda dan berjalan kaki menjadi tidak efektif untuk dilakukan. Menurut pendapat kalian, apa solusi dari permasalahan tersebut?

Pertanyaan 2 :
Bagaimana cara memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat global warming?

Pertanyaan 3:
Diketahui bahwa tidak menyalakan lampu pada siang hari merupakan salah satu upaya menanggulangi global warming, lalu bagaimana pendapat kalian tentang peraturan yang mewajibkan pengendara untuk menghidupkan lampu kendaraan bermotor pada siang hari?

Pertanyaan 4 :
Pada umumnya masyarakat telah mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi global warming. Namun, sebagian besar dari masyarakat tidak merealisasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya penyadaran yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, apakah ada lembaga yang bergerak untuk menyadarkan masyarakat agar mau merealisasikan upaya mengatasi global warming? Jika ada, sebutkan nama lembaganya dan apa saja usaha yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat?

Pertanyaan 5 :

Pertanyaan 6 :

Pertanyaan 7 :

JAWABAN ATAS PERTANYAAN/MASUKAN

Jawaban pertanyaan 1:
Menurut pendapat kami, solusi permasalahan tersebut tergantung pada kondisi keamanan suatu wilayah. Karena kondisi keamanan tiap wilayah itu berbeda-beda. Untuk wilayah yang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi, bisa mengganti penggunaan kendaraan bermotor dengan penggunaan angkutan umum yang disediakan oleh pemerintah setempat. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki tingkat kejahatan yang rendah, bisa mengganti penggunaan kendaraan bermotor dengan bersepeda atau berjalan kaki saja. Selain itu, ada alternatif lain yang bisa digunakan, yaitu dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Selain dapat mempercepat pengendara sampai ke tujuan, kendaraan ramah lingkungan ini juga dapat mengatasi permasalahan global warming.

.....

Jawaban pertanyaan 2 :
Untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat global warming membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan ada kerusakan yang tidak dapat lagi untuk diperbaiki, seperti mencairnya es

di kutub. Namun ada beberapa kerusakan yang masih bisa diperbaiki, seperti efek rumah kaca. Hal tersebut bisa diperbaiki dengan memperbanyak penanaman pohon. Dengan banyaknya penanaman pohon, maka gas-gas yang menghambat sinar matahari untuk keluar dari bumi dapat berkurang. Hal ini disebabkan gas-gas tersebut akan diserap oleh pohon untuk dijadikan bahan dalam proses fotosintesis. Dengan demikian, semakin banyak pohon yang ditanam, maka semakin banyak pula gas-gas penghambat sinar matahari yang terserap dan semakin berkuranglah pemanasan global yang terjadi.

Jawaban pertanyaan 3 :

Menurut pendapat kelompok kami, peraturan tersebut ada baiknya diberlakukan. Karena peraturan tersebut berlaku untuk meningkatkan keselamatan pengendara. Walaupun sebenarnya lampu pada kendaraan bermotor merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Namun jika kalian merasa khawatir dengan global warming yang disebabkan oleh lampu kendaraan bemotor. Ada baiknya kalian menggunakan sepeda atau berjalan kaki saja.

Jawaban pertanyaan 4 :

Ya, ada lembaga yang bergerak untuk menyadarkan masyarakat agar mau merealisasikan upaya mengatasi global warming. Lembaga tersebut adalah United Nations Enveironmental Programme (UNEP) yang bertugas untuk menangani masalah lingkungan hidup. Ada berbagai usaha yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat agar mau merealisasikan upaya untuk mengatasi permasalahan global worming. Salah satunya adalah dengan memperingati hari lingkungan hidup sedunia. Hari lingkungan hidup sedunia ini diperingati pada tanggal 5 juni demi meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk mengambil tindakan lingkungan yang positif bagi perlindungan alam dan planet bumi. Pada peringatan ini akan diadakan kegiatan menanam seribu pohon yang dimaksudkan untuk membiasakan masyarakat untuk senantiasa peduli dan menjaga lingkungan sekitarnya.

Jawaban pertanyaan 5 :

Jawaban pertanyaan 6 :

Jawaban pertanyaan 7 :

KESIMPULAN:

Pemanasan global (bahasa Inggris: Global warming) merupakan suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi yang disebabkan oleh polusi karbondioksida yang berasal dari pembangkit listrik bahan bakar fosil dan pembakaran bensin untuk transportasi, gas metana dari peternakan dan pertanian, aktivitas penebangan liar pohon, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan,

dan efek rumah kaca. Hal ini akan berdampak pada kehidupan makhluk di bumi dan bahkan menyebabkan kerugian bagi beberapa pihak. Seperti adanya kenaikan permukaan air laut seluruh dunia, meningkatkan intensitas terjadinya badai, menurunnya produksi bidang pertanian akibat gagal panen, terjadi bencana kelaparan dan kekeringan dimuka bumi, munculnya berbagai macam penyakit, dan terjadinya kepunahan beberapa species mahluk hidup.
Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan beberapa kegiatan, seperti tidak menebang hutan sembarangan, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi atau jangan menyalakan lampu di siang hari, meningkatkan penggunaan transportasi umum, dan menanam pohon.

Daftar Hadir

No	Nama	Tanda tangan	No	Nama	Tanda tangan
1.			2.		
3.			4.		
5.			6.		
7.			8.		
9.			10.		
11.			12.		
13.			14.		
15.			16.		
17.			18.		
19.			20.		

Bandung, …….

Piminan **Moderator** **Notulis,**

Nasikin **Ravika Wulandari** **Tifany Putri Sahara**

II. UAS INDIVIDU
RISET MINI

PANDUAN UJIAN SEMESTER
MATA KULIAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN

I. UJIAN TENGAN SEMESTER
LAPORAN STUDI KASUS
KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Sampul
Judul : sesuai RPS dan Kelompok
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I **PENDAHULUAN**
Bagian ini berisi atau menyajikan:
A. Latar belakang masalah
B. Perumusan masalah,
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.

BAB II **KAJIAN PUSTAKA**
Bagian ini berisi atau menyajikan, sejumlah terori, konsep, peraturan yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III **METODOLOGI PENELITIAN**
Bagian ini berisi atau menyajikan, Uraian tentang:
A.Jenis dan Pendekatan Penelitian
B. Data dan Sumber Data
C. Prosedur dan Teknik Pengumpulan Data

BAB IV **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
Bagian ini berisi atau menyajikan, Uraian tentang:
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (paparan)
B. Temuan Penelitian; Paparan mengenai data dan temuan data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan Judul, Perumusan masalah, dan tujuan penelitian

BAB V **PENUTUP**
Bagian ini berisi atau menyajikan, Uraian tentang:
A. Simpulan
B. Rekomensasi/saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Keterangan:
1) Topik harus sesuai dengan tema MANJEMEN KANTOR (Madrasah)"
2) Cakupan dan setting dapat mengambil yang kecil tetapi dibahas secara mendalam;
3) Laporan terdiri dari 15-20 halaman A-4, ketikan 1,5 spasi; *Times New Roman*
4) Keterangan telah melakuka studi/observasi dari pimpinan lembaga
5) Laporan diserahkan pada saat ujian tengah semester. (**selmbat-lambatnya tanggal 13 Mei 2019**). Sudah dalam bentuk Bundel

III. PORTOPOLIO INDIVIDU (TUGAS INDIVIDU)

Uraian	Cekclist
1. Catatan Kuliah	
2. UTS	
3. UAS/RISET MINI dg Poster	

Logo
PORTO POLIO
MATA KULIAH
…….
Nama Mhs.....
NIM.....
SMT/Kelas.....

Nama Prodi……
Fak……..
UIN……
TH…..

CATATAN KULIAH
Hari/Tgl : .....
Materi Kuliah: .....
Metode : .....
Oleh :.....

Ringkasan Materi :
……
……
……
……
……
……
..

Bdg, ...
ttd. ttd.
Dosen, Mhs

UTS
Hari/Tgl : .....
Materi Kuliah: .....
Metode : .....
Oleh :.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

UAS
Logo
Judul
……
…. Di.....

Nama Mhs.....
NIM.....
SMT/Kelas.....

Prodi……
Fak……
UIN……
TH…..

AGENDA DAN KONTRAK PERKULIAHAN
MK. Kebijakan Pendidikan*)

PERT/ KE-	HARI/ TANGGAL	MATERI/ POKOK BAHASAN	KET.
01	Kamis 05-03-020	**Penngantar:** - Silabus - Kerangka Perkuliahan (5W+1H) - Kesepakatan Perkuliahan/berbagai aturan dan tugas-tugas perkuliahan	CDT Daring
02	12-03-020	Konsep Dasar Kebijakan Publik	CDT/asp Daring
03	19-03-020	Perkembangan Historis Kebijakan Penidikan Di Indonesia	CDT/asp Daring
04	26-03-020	Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional Dan Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional	CDT/asp Daring
05	02-04-020	Formulasi Dan Pengesahan/Legitimasi Kebijakan Penidikan	DK-1 Daring
06	09-04-020	Sosialisasi Dan Komunikasi Kebijakan Penidikan	DK-2 Daring
07	16-04-020	Implementasi Kebijakan Penidikan	DK-3 Daring
08	23-04-020	**UTS**	Daring
	07-05-020	**Libur Hari Raya Waisak**	
09	14-05-020	Analisis Kebijakan	DK-4 Daring
	21-05-020	**Libur Kenaikan Isa Almasih**	
10	28-05-020	Monitoring Evaluasi Kebijakan Penidikan	DK-5 Daring
11	04-06-020	Kebijakan Makro/Nasional Pengemb Penidikan	DK-6 Daring
12	11-06-020	Kebijakan Messo/Daerah Pengemb Penidikan	DK-7 Daring
13	18-06-020	Kebijakan Mikro/Sekolah Pengemb Penidikan	DK-8 Daring
	22-27-020	**Cuti bersama Hari Raya Iedul Fitri tgl 22 sd. 27 Juni 2020**	
14	06 sd. 11-07-020	**UAS/Analisis**	Daring

Catatan:
*) Disesukan SE Rektor UIN SGD No. B-392/Un. 05/II/.04/HM/01/03/2020 Tgl 26 Maret 2020

AGENDA DISKUSI KELOMPOK
MK. Kebijakan Pendidikan

DISPOK KE-	HARI KAMIS TANGGAL	MATERI/ POKOK BAHASAN	PELAKSANA
01	04-06-020	Formulasi Dan Pengesahan/Legitimasi Kebijakan Penidikan	KELOMPOK-1 Daring
02	04-06-020	Sosialisasi Dan Komunikasi Kebijakan Penidikan	KELOMPOK-2 Daring
03	04-06-020	Implementasi Kebijakan Penidikan	KELOMPOK-3 Daring
04	04-06-020	Analisis Kebijakan	KELOMPOK-4 Daring
05	11-06-020	Monitoring Evaluasi Kebijakan Penidikan	KELOMPOK-5 Daring
06	11-06-020	Kebijakan Makro/Nasional Pengemb Penidikan	KELOMPOK-6 Daring
07	11-06-020	Kebijakan Messo/Daerah Pengemb Penidikan	KELOMPOK-7 Daring
08	11-06-020	Kebijakan Mikro/Sekolah Pengemb Penidikan	KELOMPOK-8 Daring

Part: II

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

DARI FILOSOFI KE IMPLEMENTASI

Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu yang dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, yaitu ku antara teori dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, mempunyai validitas

perhitungi kemampuan di lapangan. Oleh sebab tersedianya dana, pelaksanaan yang bertahap, serta kemampuan riset dan pengembangan merupakan syarat bagi kebijakan pendidikan yang efisien.

Buku ***Kebijakan Pendidikan -Dari Filosofi ke Implementasi-*** ini merupakan alternatif bacaan dan rujukan bagi para manajer/birokrat dalam upaya mengembangkan kemampuan mengelola kebijakan. Buku ini menyajikan pokok bahasan filosofi dan konsep dasar memahami teori ataupun formulasi kebijakan pendidikan dan ruang lingkupnya, memahami perkembangan paradigma kebijakan pendidikan kontemporer, mengetahui apek-aspek yang memengaruhi kebijakan pendidikan, mengenali komponen, faktor-faktor, dan faktor kebijakan pendidikan yang memengaruhi dalam memformulasikan, mengiplementasikan, serta melakukan evaluasi kebijakan pendidikan.

PENERBIT PUSTAKA SETIA
Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164
Telp. (022) 5210588 | Fax. (022) 5224105
E-mail. pustaka_seti@yahoo.com
BANDUNG 40253
www.pustakasetia.com

ISBN 978-979-076-478-1
KEBIJAKAN PENDIDIKAN

KONSEP DASAR KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. H. A. Rusdiana, M.M.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

DARI FILOSOFI KE IMPLEMENTASI

Pengantar Prof. Dr. H. Iim Wasliman, M.Si.

Kebenaran Terkadang Pahit

UN 0,29% KE 9.070 INDEKS NASDAQ DITUTUP TURUN 0,

by Wicaksono

O COPY
60

Kebijakan vs Kebijaksanaan

bijak/bi·jak/ *a* **1** selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir

Kebijakan

kebijakan/ke·bi·jak·an/ *n* **1** kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; **2** rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan

Kebijaksanaan

Definisi atau arti kata kebijaksanaan berdasarkan KBBI:
bijaksana /bi·jak·sa·na/ *a* **1** selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya); arif; tajam pikiran; **2** pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb) apabila menghadapi kesulitan dsb: *dng bijaksana ia menjawab pertanyaan yg bersifat menjerat;*
kebijaksanaan /ke·bi·jak·sa·na·an/ *n* **1** kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya): *berkat - beliau, terlepaslah kita dr bahaya besar;* **2** kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan dsb: *perkara ini terserah kpd - orang tua si anak*

KONSEP DASAR KEBIJAKAN

Kebijakan

- = policy, # wisdom
- **Ealau dan Prewitt,** kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu).
- Kamus Webster memberi pengertian kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan

- **Titmuss** mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu➔ *problem-oriented & action-oriented*
- **Jones :**"*…behavioral consistency and repeatitiveness associated with efforts in and through government to resolve public problems*"
- **H. Hugh Heglo:** "*a course of action intended to accomplish some end*," (suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu).

Pengertian Kebijakan mempunyai beberapa implikasi:

1. Bahwa kebijaksanaan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah
2. bahwa kebijaksanaan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanana dalam bentuk yang nyata
3. bahwa kebijaksanaan Negara itu, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu
4. bahwa kebijaksanaan itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat

Sebuah kebijakan merupakan produk dari sebuah keputusan.

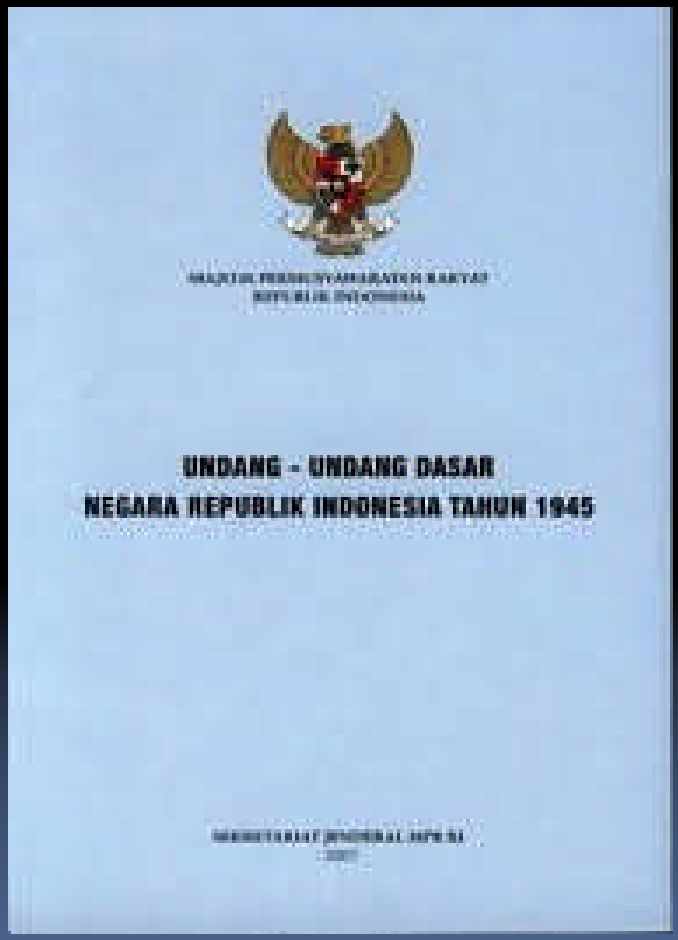

Tujuan Kebijakan

1. untuk menjamin kepentingan umum semaksimal mungkin
2. ditetapkan berdasarkan prosedur yang berlaku
3. didorong oleh keinginan untuk menghindari pertentangan yang destruktif

Kategorisasi Kebijakan:

1. Kebijakan *regulatory*
   - tentang pengenaan pembatasan atau larangan-larangan perbuatan atau tindakan-tindakan perilaku bagi seseorang atau sekelompok orang
2. Kebijakan *self-regulatory*
   - tentang pembatasan-pembatasan atau pengawasan perbuatan pada masalah-masalah tertentu bagi seklompok orang

3. Kebijakan *distributive*
   - tentang pemberian pelayanan dan berbagai keuntungan bagi sejumlah khusus penduduk, individu, kelompok, perusahaan dan masyarakat tertentu.
4. Kebijakan *redistributive*
   - kebijakan yang sengaja dikeluarkan pemerintah untuk memindahkan pengelolaan kekayaan, pendpatan, pemilikan atau hak milik di antara kelas-kelas dan kelompok penduduk. Ex: Kebijakan pengentasan masyarakat miskin

5. Kebijakan *substantive*

- Yaitu kebijakan-kebijakan tentang apa yang akan atau ingin dilakukan oleh pemerintah, penekanannya terletak pada *subject-matter*nya

6. Kebijakan procedural

- Adalah kebijakan-kebijakan tentang siapa atau pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan, serta cara bagaimana perumusan kebijakan dilaksanakan

7. Kebijakan material

- Merupakan kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata atau kekuasaan yang hakiki bagi para penerimanya atau pengenaan beban bagi yang harus mengalokasikannya

8. Kebijakan simbolik

- Adalah kebijakan-kebijakan yang memaksa, karena kebijakan tersebut akan memberikan keuntungan atau kerugian yang hanya relative kecil bagi masyarakat

9. *Collective goods policies*

- Yaitu kebijakan-kebijakan tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan keperluan orang banyak

10. *Private goods policies*

- Adalah kebijakan tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan bagi kepentingan orang tertentu atau untuk kepentingan orang tertentu atau untuk kepentingan perseorangan yang tersedia di pasaran bebas dan orang yang memerlukannya harus membayar dengan biaya tertentu

11. *Liberal policies*

- Adalah jenis kebijakan yang menganjurkan pemerintah untuk mengadakan perubahan-perubahan social, terutama yang diarahkan untuk memperbesar hak-hak persamaan

12. *Conservatives policies*

- Adalah lawan dari kebijakan liberal, jadi kebijakan ini menganggap bahwa yang ada sudah merupakan hal yang cukup baik, sehingga tidak perlu adanya perubahan social atau kalau perubahan social diperlukan harus diperlambat dan berjalan alamiah

13. *Capitalizations policies*

- Kebijakan ini terutama dikeluarkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian bantuan kepada petani untuk meningkatkan industri pertanian, pemberia subsidi pada perusahaan untuk mengekplorasi dan memproduksi usaha serta pemberian subsidi pinjaman

14. *Ethical policies*

- Bahwa kebijakan dapat diterapkan pada upaya mewujudkan isu-isu moral yang berada dalam masyarakat. Dengan kata lain, perhatian terhadap isu-isu yang berkembang untuk dapat diwujudkan dalam kenyataan.

sebuah kebijakan akan selalu mempunyai arahan atau sasaran tertentu, berkaitan dengan tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan.

3 aktivitas utama yang penting dalam implementasi kebijakan

Organisasi

- Merupakan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan

Interpretasi

- Menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan

Penerapan

- Kebutuhan rutin dari pelayanan pembayaran atau lainnya, yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program

Proses Kebijakan

PENYUSUNAN AGENDA

PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN

PERUMUSAN USULAN KEBIJAKAN

PENILAIAN KEBIJAKAN

PENGESAHAN KEBIJAKAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Tahapan formulasi kebijakan:

1. Identifikasi dalam pemahaman masalah
2. Penyusunan agenda → Formulasi masalah kebijakan
3. Mendesain kebijakan
4. Adopsi kebijakan

- perumusan masalah adalah proses memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dengan mempersoalkan asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda

agenda setting, actor kebijakan melakukan kegiatan mempersepsi masalah, mendefinisikan masalah, memobilisasi dukungan termasuk agenda problem.

desain kebijakan seharusnya mencerminkan antara kebutuhan dan keinginan warga Negara dan diaplikasikan berdasarkan saran ahli dan skill teknikal dalam memenuhi aspirasi masyarakat.

adopsi kebijakan melalui rekomendasi. Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternative yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan seperti: tingkat risiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan criteria dalam pembuatan pilihan dan menentukan tanggung jawab administrative dalam implementasi kebijakan

Analisis Kebijakan

- usaha terencana yang berkaitan dengan pemberian penjelasan (*explanation*) dan preskripsi atau rekomendasi (*prescription or recommendation*) terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan sosial yang telah diterapkan.
- Multidisiplin

Penelaahan terhadap kebijakan sosial

1. Penelitian dan rasionalisasi yang dilakukan untuk menjamin keilmiahan dari analisis yang dilakukan.
2. 2. Orientasi nilai yang dijadikan patokan atau kriteria untuk menilai kebijakan tersebut berdasarkan nilai benar dan salah.
3. 3. Pertimbangan politik yang umumnya dijadikan landasan untuk menjamin keamanan dan stabilitas.

Aspek Kebijakan	Penelitian dan Rasionalitas	Orientasi Nilai	Pertimbangan Politik
Pernyataan masalah	√	√	√
Pernyataan mengenai cara atau metode penerapan kebijakan	√	√	√
Konsekuensi-konsekuensi kebijakan	√	√	√

Hirarki Peraturan Perundangan

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945)
2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan pasal 7

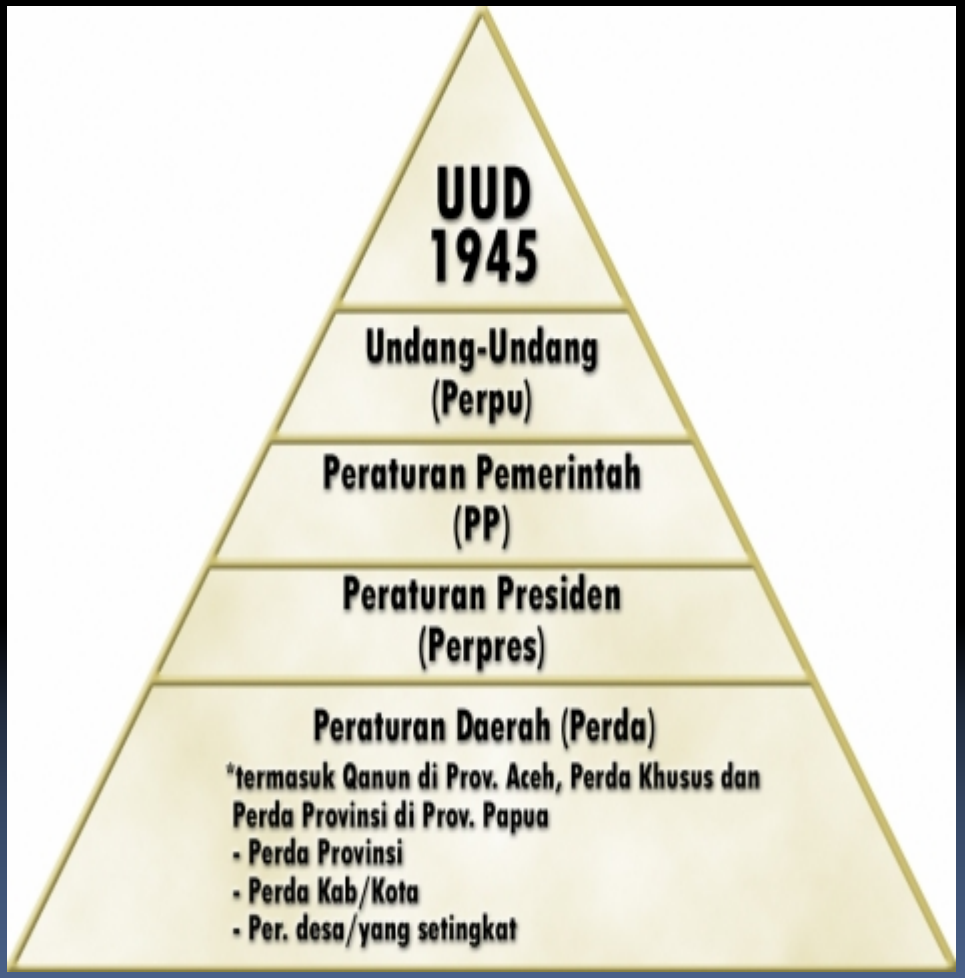

Kebijakan Pendidikan...>

YU KULIAH

Part: III:M-2

TUT WURI HANDAYANI

PERKEMBANGAN HISTORIS KEBIJAKAN PENIDIKAN DI INDONESIA

(LJ-Materi-1)

26 Maret 2020

Periodisasi Pengembangan Kebijakan Pendidikan di Indonesia

1. Zaman Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
2. Pasca Kemerdekaan (Orde Lama)
3. Periode 1966-1998 (Orde Baru)
4. Masa Reformasi (1998-Sekarang)

Periodesasi Bentuk atau Model Kebijakan Pendidikan Zaman Sebelum Proklamasi Kemerdekaan

Periodisasi	Bentuk atau Model Kebijakan Pendidikan	Tujuan atau Arah Politik Kebijakan Pendidikan
Animisme& dinamisme (sebelum M)	Pendidikan tidak ter-lembagakan dan ber-langsung secara turun temurun menurut adat suku atau kelompok masyarakat.	Tujuan pendidikan sangatlah praktis untuk menjaga keberlangsungan hidup individu maupun kelompok.
Sinkretisme Budha & Hindu-Syiwa (1M-15M)	Pendidikan yang berbasis keagamaan ini diselenggarakan oleh kaum Brahmana dan hanya diperuntukkan bagi kalangan kerajaan dan bangsawan dengan model pengajaran di kuil-kuil, pondok, maupun secara privat. Kasta rendah tidak diberikan kesempatan untuk berpendidikan	Tujuan pendidikan yang diadakan hanya bagi kasta tertentu ini adalah untuk melanggengkan kekuasaan kaum elit kerajaan dan bangsawan agar rakyat dapat dihegemoni melalui perbudakan

Islam (12M)	Pendidikan berbasis keagamaan ini diperuntukkan bagi semua golongan masyarakat secara tradisional dan melalui jalan damai. Pengajaran dilakukan di langgar, surau, pesantren, maupun model perjalanan dakwah melalui wali-wali.	Penguasa kerajaan memeluk Islam dan membantu penyebarannya untuk mempermudah hubungan dengan pedagang-pedagang bangsa asing pemeluk agama Islam
Portugis (16M)	Pendidikan dilakukan di sekolah formal seperti seminari dan sejenisnya, diperuntukkan bagi semua golongan	Pendidikan berbasis keagamaan ini mengandung misi penyebaran agama Katholik melalui sekolah-sekolah formal.

VOC (1596-1799)	Kebijakan dari VOC yang bekerjasama dengan pihak zending (NZG).	Pendidikan diselenggarakan dengan misi Kristenisasi untuk menghalau pengaruh Katholikisasi Portugis, dan untuk memfasilitasi anak-anak pegawai VOC yang tinggal di negeri jajahan bersama orang tuanya, serta untuk mendapatkan pegawai rendahan dari golongan priyayi pribumi.
Hindia Belanda (1799-1811)	Peraturan umum pendidikan dan pengajaran	Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk memfasilitasi anak-anak pegawai VOC yang tinggal di negeri jajahan bersama orang tuanya, serta untuk mendapatkan pegawai rendahan dari golongan priyayi pribumi.

Inggris (1811-1816)	Pendidikan tidak diperhatikan sehingga mengalami kemunduran.	-
Hindia Belanda (1816-1942)	Regeringsreglement 1848, Dekrit Kerajaan, dan peraturan-peraturan mengenai pendidikan dan pengajaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal dan perangkat-perangkat dibawahnya.	Pendidikan diselenggarakan untuk memfasilitasi anak-anak pegawai VOC yang tinggal di negeri jajahan bersama orang tuanya, serta untuk mendapatkan pegawai rendahan dari golongan priyayi pribumi.
Jepang (1942-1945)	Osamu Sirei No.1 dan Makhumat-makhumat tentang system persekolahan	Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk menghilangkan pengaruh Belanda dan menanamkan indoktrinasi Nipponisasi, memperkuat kepentingan perang Jepang, serta melubiskan tenaga kepegawaian untuk pengelolaan pemerintahan.

Zaman Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

1. Zaman Permulaan Kebudayaan Indonesia (Sebelum 1 M)

Sebelum masuknya agama Hindu dan Budha yang disebarkan melalui pedagang-pedagang dari India, penduduk yang tinggal (terutama) di pulau Jawa masih menganut paham animisme dan dinamisme. Dapat diperkirakan bahwa proses pendidikan yang berlangsung pada masa tersebut masih berkisar pada pengajaran life skill, seperti bagaimana caranya melangsungkan kehidupan dan bertahan hidup, yang diajarkan turun-temurun melalui keluarga-keluarga yang hidup secara berkelompok. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikutip berikut ini, bahwa "…keterampilan yang perlu sebagai senjata mencari penghidupannya kelak dipelajari dengan langsung dari praktek sehari-hari, tidak berurutan dan beraturan sehingga tidak canggung lagi menghadapi kesulitan hidup" (Said dan Affan, 1987). Ditambahkan pula, bahwa sistem pendidikan tersebut sangat bergantung dengan sistem perkawinan, apakah patrilineal atau matrilineal, seperti halnya pendidikan pada suku Batak yang patrilineal tentunya sangat berbeda dengan suku Minangkabau yang matrilineal, dan seterusnya.

2. Zaman Dicernakannya Unsur-Unsur Kebudayaan Hindu Dan Budha (Abad 1 M - 15 M)

- **Pendidikan pada zaman tersebut masih bersifat sangat individualistis, hanya mementingkan kesejahteraan dan keselamatan diri sendiri atau golongan tertentu. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam kemunduran kerajaan Sriwijaya yang akhirnya tergantikan dengan kerajaan agraris pedalaman seperti kerajaan Majapahit yang besar dengan percampuran agama Budha dengan Hindu Syiwa (Said dan Affan, 1987).**
- **Ajaran Hindu yang menganut sistem kasta membuka celah yang sangat lebar dalam munculnya perbudakan. Secara otomatis, kasta yang lebih tinggi akan melakukan hegemoni terhadap kasta yang lebih rendah karena kastanisasi dalam ajaran Hindu sangatlah tertutup (tidak memungkinkan adanya percampuran antar kasta). Sebab itulah, hanya golongan kasta menengah keatas saja yang mendapatkan pengajaran budi pekerti untuk kesempurnaan pribadi dalam hal agama, kekebalan dan kekuatan fisik, keterampilan menggunakan senjata tajam, dan menunggang kuda. Secara politis, minimnya distribusi ilmu pengetahuan menjadi salah satu upaya golongan yang memiliki kasta tertinggi, yaitu raja dan keturunannya, untuk melanggengkan hegemoni terhadap kasta-kasta yang lebih rendah darinya. Sehingga rakyat jelata yang berada pada golongan kasta terendah tetap saja buta huruf, tidak berilmu pengetahuan, dan tetap terhegemoni dalam lestarinya budaya bisu.**

3. Zaman Dicernakannya Unsur-Unsur Kebudayaan Islam Pada Awal Penyebarannya (Abad 12 M)

- Agama Islam mulai masuk dan berkembang secara perlahan-lahan di daerah pesisir pantai pulau Jawa diperkirakan mulai abad 12 hingga abad 13. Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan Hindu terbesar yang mulai mengalami keruntuhan pada masa itu juga sangat mempermudah penyebaran Islam. Pasalnya, disintegrasi politik dan degenerasi kultural tersebut menjadi kondisi yang sangat optimal untuk sebuah perubahan dalam hal penerimaan nilai-nilai baru seperti nilai Islam (Kartodirdjo, 1987).
- Agama Islam yang menjadi jalan masuk bagi ilmu pengetahuan di bumi nusantara berkembang melalui sebuah model lembaga pendidikan tradisional yang disebut dengan pesantren.

Klasifikasi model Pendidikan

- Karel Steenbrink bahkan membuat klasifikasi terhadap model pengajaran agama Islam menjadi dua bentuk, yang adalah sebagai berikut:

1) Model pertama adalah pengajaran Al-Qur'an sebagai model pendidikan Islam yang paling sederhana dan dapat ditemukan di langgar, surau, maupun di rumah guru mengaji; yang kedua adalah pendidikan lanjutan berupa pengajian kitab-kitab selain Al-Qur'an dan ilmu fiqh, ushuluddin, tafsir Al-Qur'an, bahasa Arab dan sejenisnya pada sebuah lembaga pendidikan tradisional yang disebut dengan pesantren. Pada model pertama, pengajian Al-Qur'an diberikan secara individual sehingga lama pendidikan setiap santri akan berbeda-beda sesuai dengan daya tangkapnya masing-masing.
2) Model kedua, santri belajar dengan sistem halaqah (pengajaran diberikan pada santri secara berkelompok oleh seorang kiai) dan juga model asistensi (santri yang lebih lama dan memiliki pengetahuan lebih dahulu menjadi pembimbing bagi santri yang baru masuk). Selain perbedaan akan apa yang dipelajari, santri yang belajar di pesantren diharuskan menginap dalam pondok-pondok yang biasanya berada di sekitar rumah kiai pemilik pesantren, berbeda dengan model pengajian Al-Qur'an di langgar atau surau yang tidak menginapkan santri. Kesemua model pendidikan Islam ini tidaklah memungut biaya karena dalam agama Islam tidak diperkenankan untuk meminta bayaran atas penyebaran agama Islam. Sehingga para kiai pemilik pesantren mendapat bayaran dari statusnya sebagai daerah perdikan atau waqaf dan juga mendapatkan hadiah berupa hasil panen dari orang tua santri maupun zakat yang dibayarkan pada kiai tersebut (Steenbrink, 1986).

Tantangan Pendidikan Islam

- Pendidikan agama Islam dilakukan secara damai sebelum kedatangan bangsa Eropa yang tidak murni berdagang melainkan juga melakukan politik ekspansi yang pada akhirnya mengarah pada kolonisasi. Tentunya model pendidikan Islam mulai banyak mendapatkan tantangan yang cukup berarti pada masa tersebut. Semisal setelah kedatangan Portugis yang begitu masif upaya Katholikisasinya, membuat penyebaran agama Islam di wilayah Timur nusantara terhenti. Demikian halnya dengan kedatangan bangsa Belanda yang cukup membuat penyebaran agama Islam melalui lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren semakin terdesak ke desa-desa terpencil di pedalaman. Berbeda dengan kedatangan Jepang yang justru semakin memasifkan kegiatan pendidikan ke-Islam-an di Indonesia meskipun tetap melanjutkan kebijakan yang dualistis warisan Belanda yang sampai saat ini masih diberlakukan dalam sistem pendidikan nasional.

4. Pengaruh Kedatangan Portugis (Awal Abad 16 M Hingga Menjelang Akhir Abad 16 M)

- Perjanjian Tordessilas (1494 M) berisi hak istimewa dari Bulla Paus untuk bangsa Portugis dan Spanyol dalam hal pembagian wilayah daratan untuk dikuasai. Perjanjian tersebut menjadi dasar perjalanan mereka untuk melakukan politik ekspansi ke daratan Asia dan Afrika.
- Tujuan tersebut jelas karena pada dasarnya, bangsa Eropa menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang mendapatkan tugas suci dari Tuhan untuk menyelamatkan penduduk selain bangsa mereka ke jalan yang benar. Akhirnya Portugis menginjakkan kakinya untuk pertama kali di daratan Malaka pada tahun 1509 M.

Portugis di Malaka

- Kedatangan mereka yang selalu dibarengi dengan para misionaris Roma Katholik, membuat setiap daerah yang mereka datang menjadi memiliki gereja dan sekolah. Sekolah pertama yang didirikan oleh orang-orang Portugis adalah di pulau Ambon pada tahun 1536 (Supriadi, 2003).
- Pada masa kepemimpinan Antonio Galvao waktu itu, yang didirikan adalah sekolah seminari untuk anak-anak pribumi. Tentunya selain mengajarkan agama Katholik, mereka juga mengajarkan pelajaran calistung.
- Sekolah sejenis juga dibuka di daerah kepulauan Solor tetapi dengan menambahkan bahasa Latin dalam mata pelajarannya. Sekolah keguruan pertama didirikan beberapa saat setelahnya di daerah Ternate oleh kaum pendeta Portugis.

Portugis di Maluku

- Ketika Portugis menjejakkan kakinya di Maluku, seperti diutarakan oleh Russell Jones, Islam telah mengakar di kalangan penduduk setempat sekitar 80 tahun. Di daerah ini khususnya Ambon, melalui peran ordo Jesuit hingga tahun 1560 M, tercatat ada sekitar 10.000 orang yang memeluk Roma Katholik dan bertambah menjadi 50.000 hingga 60.000 pada tahun 1590 M.

Belanda di bumi nusantara berhasil menghalau Portugis hingga ke wilayah Timor Timur pada tahun 1641.

- Kedatangan bangsa Belanda di bumi nusantara berhasil menghalau Portugis hingga ke wilayah Timor Timur pada tahun 1641. Seluruh gereja dan sekolah yang telah dibangun oleh Portugis, diambil alih sepenuhnya oleh Belanda.
- Berbagai upaya bahkan dilakukan untuk menghilangkan pengaruh Portugis di bumi Nusantara, seperti dengan mengajarkan agama Kristen di sekolah-sekolah dan mengganti penggunaan bahasa Portugis dengan bahasa Belanda yang juga diajarkan di sekolah-sekolah (Said dan Affan, 1987).

5. Zaman Penjajahan Belanda (Akhir Abad 16 M Hingga Pertengahan Abad 20 M)

- **Pendidikan dilakukan tidak semata untuk mencapai kesejahteraan pengetahuan peserta didik, apalagi kedatangan Belanda juga dibarengi dengan Nederlands Zendelingen Genootschap (NZG), gereja Kristen dari Belanda yang akhirnya menangani pendidikan di bumi nusantara. Sehingga tidaklah mengherankan bila pendidikan pada masa itu termasuk dalam usaha-usaha Kristenisasi, terlebih lagi dengan motto Gold-Glory-Gospel yang diusung oleh bangsa-bangsa Eropa.**
- **Pendidikan berbasis agama Islam tidak disentuh secara kasar oleh pemerintah Belanda pada masa itu (der Wal, 1977). Karena memang kebijakan yang diambil adalah untuk mengambil hati penduduk jajahan sehingga mereka tidak ingin secara terang-terangan terlihat memusuhi pemeluk agama Islam walaupun sebenarnya memang demikian.**
- **IJ Brugmans menjelaskan, bahwa secara yuridis formal, tujuan pendidikan dalam peraturan persekolahan yang dikeluarkan pada tahun 1684 menetapkan bahwa "…murid-murid kelas satu sanggup dipekerjakan pada pemerintahan dan gereja" Meskipun tujuan pendidikan pada masa itu adalah untuk mencetak pegawai pemerintahan dan misi Kristenisasi, sifat umum dari pengajaran tetaplah diutamakan. Dan hal tersebut menjadi ciri khas dari pengajaran di zaman pendudukan Belanda. (Said dan Affan, 1987),**

Zaman Pemerintahan Hindia Belanda (1799-1811)

- Masa pemerintahan Hindia Belanda yang menggantikan VOC yang tumbang karena kebangkrutannya; Setelah Portugis dihalau oleh Belanda, tidak ada dorongan yang mendesak untuk meluaskan Kristenisasi (Said dan Affan, 1987).
- Sehingga pendidikan yang berlandaskan Kristenisasi pada masa tersebut adalah untuk memberangus pengaruh Portugis semata.

- **Gubernur Jenderal Dirk van Hogendorp (1799-1808)**

Pada masa ini, aktivitas pemerintahan yang dilakukan lebih kepada upaya-upaya normalisasi keadaan sepeninggal VOC yang kebangkrutannya mewarisi banyak hutang (Kartodirdjo, 1987). Tidak ada kebijakan yang cukup berarti dalam bidang pendidikan pada masa Gubernur Jenderal Dirk van Hogendorp. Hal tersebut dapat diasumsikan sedemikian rupa karena dari sekian banyak literatur yang ditemui oleh penulis, belum ditemukan satu pun yang membahas permasalahan pendidikan pada masa itu. Aktivitas yang dilakukan malah lebih banyak menekankan pada upaya normalisasi pemerintahan sepeninggal kebangkrutan VOC yang salah satunya adalah mengusahakan model desentralisasi pemerintahan untuk memotong jalur korupsi pada model sentralisasi yang telah diberlakukan sebelumnya.

- **Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811)**

Gubernur Jenderal HW Daendels mendapatkan tugas dari Ratu untuk meringankan nasib rakyat jajahan dan mengurangi perbudakan, meski pada akhirnya malah menambah beban rakyat dengan kerja rodi proyek raksasa pembangunan jalan Anyer-Panarukan sepanjang 1000 km. Di bidang pendidikan, ia memiliki ide baru untuk memberikan pendidikan yang tidak terbatas pada golongan bangsa Eropa dan pemeluk Kristen saja seperti yang telah terjadi sebelumnya. Pada masa ini, ia menugaskan para Bupati di Jawa untuk mendirikan sekolah-sekolah rendah di tiap-tiap kabupaten yang memberikan pendidikan berdasarkan adat istiadat, undang-undang, dan agama Islam. Sekolah angkatan laut sempat didirikan di Semarang, demikian pula dengan sekolah kejuruan bidan dan sekolah ronggeng. Sayangnya semua usaha tersebut gagal karena pembiayaan yang sangat minim (Said dan Affan, 1987), disamping ia sudah terlanjur dipanggil pulang sebelum sempat merealisasikan semua ide-idenya (Najamuddin, 2005).

6.Zaman Pendudukan Inggris (1811-1816)

- Periode yang ketiga adalah masa pemerintahan Inggris yang berlangsung sangat singkat tetapi berandil besar dalam kemunduran pendidikan di bumi nusantara;
- Akibat kekalahan Belanda dalam Revolusi Perancis melawan Inggris, dimana Belanda bersekutu dengan Perancis, tanah Nederland diduduki oleh Inggris, berikut daerah jajahannya termasuk Hindia Belanda. Namun demikian, Belanda masih dapat mengakses daerah jajahannya meski dibawah pemerintahan Inggris. Thomas Stamford Raffles ditugaskan untuk menjadi Gubernur Jendral di Hindia Belanda untuk mewakili pendudukan Inggris.
- Dibawah pemerintahan Raffles, kekuasaan Bupati dan segala kalangan elit priyayi berusaha dipangkas dengan model pemerintahan langsung meski mendapatkan banyak sekali tentangan (Kartodirdjo, 1987 dan Najamuddin, 2005).

- Kerja rodi dan perbudakan digantikan dengan pajak penyewaan tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah.
- Keadaan ekonomi yang sudah sangat sulit pada masa itu, malah semakin dipertajam dengan kewajiban untuk membayar pajak land rent, sehingga rakyat harus bekerja lebih ekstra lagi agar kewajibannya dapat dipenuhi.
- Raffles lebih berminat dalam mengadakan penelitian untuk menelusuri kebudayaan Jawa dibanding meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pendidikan.
- Selama pemerintahan Raffles, sekolah-sekolah banyak yang tak terurus dan mati dengan sendirinya karena pemerintahan pada masa itu tidak menganggarkan dana untuk pendidikan rakyat jajahan.

1) Serah Terima Komisaris Jenderal Belanda dari pihak Inggris (1816-1818)

- Komisaris Jenderal pada masa tersebut cukup menaruh perhatian di bidang pendidikan. Terbukti setelah beberapa waktu berselang dari proses serah terima daerah jajahan dari pihak Inggris ke pihak Belanda, ia menunjuk CGC Reinwardt sebagai Direktur Pengajaran (Najamuddin, 2005).
- Pada tahun terakhir dimasa pemerintahannya, dikeluarkan peraturan persekolahan yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai pengawasan dan penyelenggaraan pengajaran.
- Sayangnya, ide-ide Daendels pada masa sebelumnya yang ingin memperluas kesempatan pemerolehan pendidikan bagi penduduk jajahan tidak dilanjutkan pada masa ini. Hal tersebut sangat jelas karena dalam ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan pada masa ini sangatlah sedikit yang membahas masalah pengajaran untuk penduduk jajahan. Salah satunya adalah peraturan umum tentang pendidikan sekolah, yang berisi bahwa “pendidikan hanya untuk orang Belanda saja” (Said dan Affan, 1987)

2) Gubernur Jenderal Van der Capellen (1819-1826)

- Pada masa awal pemerintahannya, Van der Capellen menerbitkan surat keputusan tertanggal 8 Maret 1819 yang berisi perintah untuk mengadakan penelitian tentang pendidikan masyarakat Jawa dengan tujuan:
  - Meningkatkan kemampuan baca tulis masyarakat,
  - Memperbaiki pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pendidikan sesuai dengan hasil penelitian.
- Meskipun kurang representatif, dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa ada beberapa orang juru tulis yang mengajarkan bahasa dan huruf Arab, Jawa, dan Latin, dan juga keberadaan lembaga pendidikan agama Islam dengan bahasa Arab yang dianggap sangat penting bagi masyarakat Jawa. Pasalnya, hanya 12 orang Residen yang mengumpulkan angket kembali, meski angket tersebut telah dibagikan pada seluruh Residen yang ada (Steenbrink, 1986).

3) Gubernur Jenderal LPJ Du Bus de Gisignies (1826-1830)

- Gubernur Jenderal Du Bus yang diangkat oleh Raja Willem I untuk menggantikan Van der Capellen ini lebih menitikberatkan pada peningkatan produksi untuk ekspor sebagai dasar guna memajukan perdagangan dan pajak tanah (Kartodirdjo, 1987).
- Optimisme keberhasilan politik kolonial Du Bus ini pada akhirnya malah membuahkan kemerosotan pemasukan pajak tanah dan tidak menampakkan kemajuan hasil ekspor.
- Sementara di bidang pendidikan, belum ditemukan literatur yang membahas usaha-usaha Du Bus di bidang pendidikan yang mungkin saja dikarenakan tidak adanya kebijakan yang begitu berarti pada masa ini.

4) Gubernur Jenderal Van den Bosch (1830-1848)

- **Pada masa pemerintahannya, pencetus tanam paksa ini mulai menyediakan kesempatan untuk pendidikan anak-anak priyayi meskipun jumlahnya sangat sedikit sekali.**
- **Pemberian kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidaklah setulus kelihatannya, karena hal ini dilakukan dalam rangka menjalin hubungan baik dengan golongan priyayi elitis di pulau Jawa. Budaya paternalistik dan feodal yang mengakar di pulau Jawa semakin dilanggengkan demi memperkuat birokrasi pemerintahan Belanda. Selain itu, pelaksanaan tanam paksa juga sangat membutuhkan banyak sekali pegawai rendahan yang nantinya dijabat oleh anak-anak dari golongan priyayi.**
- **Pendirian sekolah bagi anak-anak Belanda dilakukan pada jenjang di atas sekolah dasar, semisal pendirian sekolah menengah di Surakarta pada tahun 1832 (Supriadi, 2003).**
- **Meskipun pada masa ini kebutuhan pendirian sekolah sangatlah tinggi, realisasinya tidak didukung dengan pengadaan dana yang optimal. Kekurangan dana dalam bidang pendidikan disiasati dengan model magang.**
- **Anak-anak golongan priyayi ditempatkan magang sebagai pesuruh di rumah-rumah orang Belanda. Sembari bekerja, mereka diajarkan bahasa Belanda, dan calistung. Meski tidak digaji, mereka mendapatkan makan dan pemondokan gratis. Bila kepandaian mereka sudah dianggap cukup, barulah mereka dipekerjakan sebagai pegawai tata usaha di kantor-kantor pamong praja (Kartodirdjo, 1987).**

5) Gubernur Jenderal Rochussen (1848-1852)

- **Hingga pada bulan September 1848 masa pemerintahan Gubernur Jenderal Rochussen, barulah terlihat komitmen pemerintah Belanda untuk mendirikan sekolah-sekolah dasar bagi penduduk pribumi dengan pengantar bahasa Melayu dengan diterbitkannya Dekrit Kerajaan yang mengatur pendirian Volksschool atau Sekolah Rakyat (Supriadi, 2003).**
- **Fokus pengajaran pada SR hanya sebatas pada calistung dengan bahasa Melayu atau bahasa lokal penduduk setempat.**
- **Pada tahun 1849 tercatat bahwa penduduk pribumi yang berada di sekolah-sekolah Eropa di pulau Jawa hanyalah 37 orang. Dengan pembangunan SR yang terus berkelanjutan, pada akhirnya jumlah penduduk pribumi yang mengenyam pendidikan tentunya semakin meningkat. Pada tahap pertama didirikan 20 SR yang lokasinya diprioritaskan pada setiap ibukota karesidenan di pulau Jawa. Dari tahun ke tahun pendiriannya semakin diperbanyak sejalan dengan kebutuhan pemerintah Belanda yang semakin besar akan tenaga pegawai rendahan.**
- **Kebijakan pendidikan yang tidak tulus untuk mencerdaskan penduduk negeri jajahan semata, ternyata juga menuai kritik dari warga Belanda sendiri. Kritik Van Hoevell terhadap perkembangan sekolah rakyat (Inlandschesholen): "Pemerintah hanya menyiapkan beberapa gelintir manusia saja untuk menjalankan roda pemerintahan, tidak untuk memuaskan keinginan orang Jawa pada pendidikan." Tidak mengherankan bila jumlah murid di daerah jajahan Belanda ini (1846-1849) hanya 155.355 murid dan 102 guru.**

6) Pemerintahan Hindia Belanda Pada Pertengahan Hingga Akhir Abad 19 M

- Secara umum, perkembangan pendidikan dan pengajaran sampai akhir abad ke-19 menunjukkan kecenderungan-kecenderungan yang dipolitisir, sebagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda berikut ini:
    - Pendidikan dan pengajaran harus bersifat netral dan tidak berdasarkan agama (Kartodirdjo, 1987). Hal ini jelas dilakukan karena pengaruh aliran liberalisme yang sedang berkembang di Nederland. Lagipula, model pendidikan tradisional yang sudah ada seperti pesantren dan langgar, dianggap sangat sukar untuk diintegrasikan dengan pendidikan yang liberal. Sehingga untuk memojokkan pendidikan berbasis agama Islam dilakukan Belanda dengan mengeluarkan Ordonantie yang rumit secara birokratis, tidak memberikan dukungan pendanaan, dan mempercepat kenaikan status pegawai pangreh praja yang sekuler kebarat-baratan meskipun memeluk Islam (Ham, 2004).
    - Bahasa Belanda tidak diajarkan di sekolah-sekolah pribumi, dengan alasan untuk tetap melestarikan kebudayaan lokal dengan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah pribumi. Padahal kebijakan ini ditempuh karena ketakutan pemerintah Belanda bila penduduk jajahan mengetahui bahasa mereka maka akan mengetahui strategi kolonisasi Belanda.
    - Pembukaan sekolah pribumi hanya didasarkan sebatas kebutuhan praktis pemerintah Belanda saja, misalnya untuk kebutuhan pegawai rendahan, dan tidak untuk mencerdaskan penduduk jajahan.
    - Pendidikan lebih dikhususkan pada anak-anak golongan priyayi. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan penduduk yang lebih rendah status sosialnya dapat mudah ditundukkan karena pemerintah Belanda telah memegang golongan priyayi yang merupakan kaum elit (Rickfles, 2001).

Sistem Pendidikan

- Sistem pendidikan yang dualistis pada masa ini juga membuat garis pemisah yang tajam antara dua subsistem: sistem sekolah Eropa dan sistem sekolah pribumi. Tetapi, pada tahun 1892 akhirnya dilakukan restrukturisasi terhadap sistem persekolahan karena kebutuhan yang sangat besar terhadap pegawai rendahan yang bisa berbahasa Belanda, sebagaimana berikut (Kartodirdjo, 1987):
- Sekolah kelas satu (ongko sidji) atau eerste klasse untuk anak-anak golongan priyayi dengan pelajaran bahasa Belanda;
- Sekolah kelas dua (ongko loro) atau tweede klasse untuk rakyat kebanyakan tanpa pelajaran bahasa Belanda.

7)Periode Politik Etis (1900-1942)

- Pada tahun 1899, seorang berkebangsaan Belanda, van Deventer menulis sebuah artikel berjudul ‘Een Eereschuld’ (utang kehormatan) yang berisi kerisauan kaum intelektual Belanda terhadap dehumanisasi di Hindia Belanda yang terpengaruh kapitalisme sangat kuat (Supriadi, 2003). Begitu ironis karena Belanda pada masa tersebut telah menggembar-gemborkan dirinya sebagai bangsa yang humanis dan memiliki peradaban yang sangat tinggi, tetapi melakukan politik pengerukan keuntungan secara besar-besaran dengan sistem tanam paksa (1830) dan sistem liberal (1870). Diungkapkan pula oleh van Deventer bahwa pemerintah Belanda berhutang pada penduduk Hindia Belanda lebih dari 187 juta gulden yang mana harus dibayarkan kembali dengan menyediakan anggaran khusus untuk peningkatan kesejahteraan mereka di segala bidang.
- Munculnya artikel tersebut akhirnya memicu perubahan yang sangat drastis pada kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda terhadap penduduk jajahan di Hindia Belanda, yaitu dengan dicanangkannya politik etis atau politik balas budi secara resmi pada tahun 1901 oleh Ratu Belanda.
- Rekaman surat-surat antar para pejabat pendidikan (khususnya Kementerian Pendidikan, Agama, dan Kerajinan), Menteri Tanah Jajahan, dan Gubernur Jenderal mengenai kebijakan pendidikan di Hindia Belanda dalam kurun waktu 1900-1940 menunjukkan secara jelas bahwa sejak awal abad ke-20 telah terjadi arus balik dari pendidikan yang elitis menuju pendidikan yang lebih populis. Van der Wal dalam Supriadi, 2003), meskipun kedua model pendidikan tersebut masih tetap diberlakukan secara kombinatif hingga akhir pendudukan Belanda di bumi nusantara.

- Meski kerajaan Belanda terlihat sangat tulus dalam perubahan kebijakan di negeri jajahan melalui politik etis, yang terjadi di Hindia Belanda tidaklah demikian (van Niel, 1984). Pasalnya, sistem pendidikan yang diterapkan di Hindia Belanda masih tetap dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan kekuasaan kolonial dan tidak berupaya untuk mencerdaskan kehidupan penduduk jajahan semata. Lulusan dari lembaga pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah Belanda hanya diproyeksikan untuk dapat memenuhi kebutuhan pegawai rendahan semata. Hal tersebut terlihat dari penerapan kurikulum sekolah tingkat dasar yang hanya terbatas pada calistung dan mengabaikan mata pelajaran geografi dan sejarah yang ditakutkan memiliki potensi untuk menumbuhkan semangat nasionalisme (Supriadi, 2003).
- Selain memperluas pendirian pendidikan dasar, pemerintah Belanda juga mendirikan lebih banyak sekolah lanjutan umum (MULO), sekolah-sekolah kejuruan (Ambachtsschool), sekolah keguruan (Kweekschool dan Normaalschool), dan berbagai jenis sekolah tinggi (STOVIA, Rechtschool, dst) yang diperuntukkan bagi penduduk pribumi. Tentu saja kebijakan tersebut akhirnya membuat jumlah penduduk pribumi yang mengenyam pendidikan formal menjadi meningkat drastis. Akibat yang tidak disengaja muncul adalah bangkitnya kaum intelektual nasionalis yang merupakan hasil didikan lembaga-lembaga formal Belanda (Suminto, 1984). Mereka mendirikan berbagai macam organisasi pergerakan dan lembaga pendidikan kebangsaan yang turut andil dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. (masa berakhirnya Pemerintahan Belanda di Indonesia)

4. Zaman Pendudukan Jepang (1942-1945)

- Periode yang keempat adalah kembalinya kekuasaan di bumi nusantara ini pada pemerintah Hindia Belanda hingga berpindah tangan pada Jepang. Pada periode pemerintah Hindia Belanda yang termasuk dalam empat periode besar tersebut, periodisasinya dibagi lagi dalam sub-sub yang lebih kecil lagi berdasarkan masa pemerintahan Gubernur Jenderal pada masa tersebut. Hal ini dilakukan untuk lebih memperjelas kebijakan pendidikan yang diambil oleh masing-masing Gubernur Jenderal yang tentunya memiliki pribadi dan ambisi yang berlainan dalam menetapkan kebijakan pendidikan bagi penduduk jajahan.
- Meski zaman pendudukan Jepang di bumi nusantara sangatlah singkat, tetapi pengaruhnya bagi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia sangatlah besar.

Tujuan pendidikan Masa Pendudukan Jepang

- Tujuan pendidikan pada masa itu telah disisipi misi Nipponisasi dan juga upaya-upaya pemberdayaan bangsa Indonesia untuk membantu kepentingan perang Jepang.
- Misi tersebut dilakukan dengan mendekati tokoh-tokoh kiai yang menjadi panutan umat Islam agar dapat dijadikan sandaran politik mereka. Pertemuan antara 32 ulama dengan Gunseikan pada 7 Desember 1942 berisi tukar pendapat mengenai ke-Islam-an dan komitmen Jepang untuk melindungi adat dan agama Islam, tidak mencampuri lembaga keagamaan bahkan diperkenankan secara resmi untuk meneruskan pekerjaannya, serta memberi kedudukan yang baik pada mereka yang telah mendapatkan pendidikan agama tanpa membeda-bedakannya dengan golongan lain (Assegaf, 2005). Intinya, misi Nipponisasi tersebut dianggap akan tertanam lebih mudah pada rakyat kecil bila mereka sudah terebut hatinya dengan perlakuan istimewa Jepang terhadap mayoritas rakyat yang beragama Islam.
- Efek samping yang tidak disadari oleh Jepang karena kebijakan tersebut adalah perkembangan lembaga pendidikan ke-Islam-an non formal seperti pesantren dan yang formal seperti madrasah, menjadi begitu pesat.

Kebijakan Penddikan Jepag

- Demi melancarkan usaha Nipponisasi-nya, Lewat Kebijakannya:

1. Pelarangan penggunaan bahasa Eropa (Inggris dan Belanda) dalam komunikasi lisan dan tulisan, dan hanya memperbolehkan komunikasi dalam bahasa Indonesia dan Jepang. Pengaruh tersebut sangat terasa dalam dunia pendidikan karena semasa pendudukan Belanda, bahasa pengantar yang dipergunakan di sekolah-sekolah adalah bahasa Belanda.
2. Jepang membentuk juru bahasa sebagai penerjemah ketika guru sedang mengajar, mempopulerkan bahasa Jepang sebagai pengganti bahasa Belanda dengan membuka sekolah bahasa
3. Jepang, mengadakan perlombaan bahasa Jepang, memasukkan bahasa Jepang dalam ujian calon guru dan ujian akhir murid.
4. Jepang mengganti seluruh istilah yang digunakan baik dalam dunia pendidikan, persuratkabaran, hingga nama lembaga pemerintah maupun non pemerintah dengan bahasa Jepang. Propaganda tersebut juga dilakukan melalui radio dan dunia hiburan seperti film layar lebar, drama, wayang kulit, tari-tarian dan nyanyian.
5. Jepang membentuk panitia penyempurnaan bahasa Indonesia, yang mana imbasnya sangatlah menguntungkan bagi perkembangan bahasa Indonesia.

Demi kepentingan perangnya,

- Jepang melakukan banyak upaya untuk memberdayakan bangsa Indonesia, misalnya melalui indoktrinasi dengan pengasramaan kiai dan santri-santri untuk dibekali kemampuan bela diri dan kemiliteran untuk membantu Jepang. Malah tanpa disadari Jepang, kebijakan tersebut malah menumbuhkan semangat nasionalisme dan keinginan untuk merdeka yang meluap-luap pada pemuda kalangan pesantren tersebut (Assegaf, 2005).
- Di lain tempat, pekarangan sekolah-sekolah ditanami umbi-umbian dan sayur-sayuran untuk tambahan bahan makanan, serta pohon jarak untuk menambah minyak demi kepentingan perang Jepang, tentunya semua hal tersebut dilakukan oleh para pelajar (Said dan Affan, 1987).
- Pelajar disuruh untuk bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk kepentingan pertahanan.
- Para pelajar dibekali dengan berbagai macam ketangkasan dalam perang untuk mempertahankan diri.
- Pelajar diwajibkan senam pagi untuk menguatkan fisik pelajar dalam membantu Jepang.
- Indoktrinasi dilakukan melalui lagu senam yang berbahasa Jepang, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang sebelum masuk kelas, melakukan penghormatan kepada Kaisar Jepang, mengucapkan sumpah setia kepada cita-cita Indonesia dalam rangka mewujudkan Asia Raya, dan seterusnya.

2. Pasca Kemerdekaan (Orde Lama)

- **Periode 1945-1950**
- Masa depan Indonesia ditentukan oleh bangsa Indonesia sendirisejak tanggal 17 Agustus 1945, saat Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu disamping memikirkan upaya-upaya pembangunan Negara yang rusak akibat perang dan penjajahan yang demikian lama, para pemimpin bangsa pada waktu itu memikirkan pula pendidikan untuk masyarakat. Seperti diketahui, angka buta huruf pada tahun 1945 lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia yang pada saat itu sekitar 70 juta. (Nasution, 1994: 230).
- Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan, merupakan perubahan yang menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita dari suatu bangsa yang merdeka dan negara yang merdeka.
- Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Indonesia yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 dijadikan landasan ideal pendidikan di Indonesia. Mengenai pokok pendidikan dan pengajaran di Indonesia sebagai realisasi dari usaha pembaharuan pendidikan dan pengajaran diusulkan oleh badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) kepada kementian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 29 desember 1945 sebagai berikut:

Pedoman pendidikan dan pengajaran

- Untuk menyusun masyarakat baru, perlu adanya perubahan pedoman pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid menjadi warga Negara yang memiliki rasa tanggung jawab.
- Untuk memperkuat persatuan rakyat.
- Metode yang berlaku di sekolah-sekolah hendaknya berdasarkan sistem sekolah kerja agar aktifitas rakyat kerja kita kepada pekerjaan bisa berkembang seluas-luasnya.
- Pengajaran agama hendaklah mendapat tempat yang teratur dan seksama.
- Pengajaran ekonomi, pertanian, industry, pelayaran dan perikanan hendaklah mendapat perhatian istimewa (Gunawan, Ari, 1986: 31-40).

Tujuan pendidikan pada periode 1945

- Pembentukan warga Negara yang sejati yang sanggup menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk Negara dan bangsa Indonesia. Yang memilki jiwa pancasila yang meliputi:
    - Perasaan bakti terhadap Tuhan Yang maha Esa
    - Cinta kepada alam
    - Cinta kepada Negara
    - Cinta kepada Orang Tua
    - Cinta kepada kebudayaan

Tujuan pendidikan pada periode 1950

- **Membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang masyarakat dan tanah air.**
- **Diwajibkan kepada setiap sekolah menanamkan dan mengembangkan sifat-sifat demokratis pada anak didiknya.**

Sistem persekolahan di Indonesia memberikan kesempatan belajar kepada segala lapisan masyaraka

- Ada tiga tingkat pendidikan dalam system persekolahan di Indonesia yaitu:
  - Pendidikan rendah yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (1 tahun) dan sekolah dasar (6 tahun)
  - SLTP (3 tahun), SLTA (3 tahun)
  - Pendidikan tinggi yang terbuka lebar bagi warga Negara yang memenuhi syarat, pendidikan tinggi ada yang berbentuk universitas dan akademi.
- Kurikulum dari tiap jenjang pendidikan perlu memperhatikan hal-hal berikut:
  - Pendidikan pikiran harus dikurangi
  - Isi pelajaran harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.
  - Memberikan perhatian terhadap kesenian
  - Pendidik watak
  - Pendidikan jasmani
  - Kewarganegaraan dan masyrakat.

Periode 1950-1959

•Negara kesatuan Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 diterimanya anggota PBB yang ke-60 sehingga Indonesia aktif dalam dunia Internasional termasuk pendidikannya dan kurun waktu itu terjadinya dekrit presiden 5 juli 1959 yang isinya:1) Konstituante dibubarkan; 2) Negara kembali ke UUD 1945, 3) Pembentukan Majelis Permusyawaratan sementara, dan Dewan Agung sementara.

- **Sejak Negara kembali ke UUD 1945, maka rumusan umum tujuan pendidikan sebagian telah dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 berlaku lagi dengan tegas, yaitu:**
- **Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.**
- **Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang.**
- **Tujuan pendidikan pada periode 1950-1959 adalah pembentukan warga Negara yang sejati yang sanggup menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk Negara dan bangsa Indonesia.**
- **Sistem persekolahan pada periode ini sama dengan periode 1945-1950, perbedaanya terletak pada pendidikan guru, pada periode ini guru-guru diwajibkan menambah pengetahuan serta memenuhi persyaratan yang berlaku baik dan berkualitas sesuai dengan jenjang dan kariernya**.

Periode 1959-1966

- Kebijakan pendidikan yang terkenal pada saat itu adalah “Sapta Usaha Tama dan Pancawardana” tertuang dalam instruksi mentri PP dan K No 1 tahun 1959.-1966.
- Sapta Usaha Tama berisi:
- Penertiban aparatur dan usaha-usaha kementrian PP dan K
- Menggiatkan kesenian dan olahraga
- Mengharuskan adanya usaha
- Mengharuskan penabungan
- Mewajibkan usaha-usaha koperasi
- Mengadakan kelas masyarakat.

Tujuan pendidikan nasional

Tujuan pendidikan nasional, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi supaya melahirkan warga Negara sosialis Indonesia yang sosial, bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur spiritual maupun material dan berjiwa pancasila, yaitu:

- Ketuhanan Yang Maha Esa
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesias
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan.
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Periode 1966-1998 (Orde Baru)

Orde baru adalah masa pemerintahan di Indonesia sejak 11 Maret 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan, dari presiden Soeharto ke presiden Habibi pada 21 Mei 1998.

Peralihan dari orde lama ke orde baru membawa konsekuensi perubahan strategi politik dan kebijakan pendidikan nasional. Pada dasarnya orde baru adalah suatu korelasi total terhadap orde lama yang didominasi oleh PKI dan dianggap telah menyelewengkan pancasila.

Masa orde baru disebut juga sebagai Orde Konstitusional dan Orde Pembangunan. Bertujuan membangun manusia seutuhnya dan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik (Ricky Diah, 2012).

Kebijakan Pendidikan pemerintah orde Baru

- Seringkali menganak tirikan pendidikan.
- Pendidikan mempunyai anggaran paling kecil dari dana APBD
- Sistem pendidikan yang terpusat atau dengan istilah sentralisasi membuat kualitas pendidikan Indonesia semakin memburuk.
- Sistem doktrinisasi, yaitu sebuah sistem yang memaksakan paham-paham pemerintahan orde baru agar mengakar pada benak anak-anak .
- Mulai dari sekolah dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi, diwajibkan untuk mengikuti penetaran P4 yang berisi tentang hapalan butir-butir Pancasila.
- Sistem pendidikan masa orde baru yang menolak segala bentuk budaya asing, baik itu yang mempunyai nilai baik ataupun mempunyai nilai buruk. Paham orde baru yang membuat kita takut untuk melangkah lebih maju (Dwimas, 2010).

Praktek pendidikan

- **Secara umum praktek dibedakan menurut jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.**
  - **Jenis, Jalur dan Jenjang Pendidikan**
- **Pada umumnya pendidikan menurut jenisnya dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:**
  - **Pendidikan Formal, menunjuk pada sistem pendidikan persekolahan. Pendidikan jenis ini atau sistem persekolahan ini adalah jenis pendidikan yang sudah terstandardisir secara legal-formal. Baik dalam jenjang-jenjangnya, lama belajarnya, paket kurikulumnya, persyaratan unsur-unsur pengelolaannya, persyaratan usia.**
  - **Pendidikan nonformal, memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang diatas, dapat dikatakan relatif lebih lentur, fleksibel, dan berjangka pendek program penyelenggaraannya dibandingkan dengan jenis pendidikan formal.**
  - **Pendidikan informal, jenis pendidikan yang tidak terorganisir secara terstruktur, lebih merupakan hasil pengalaman belajar individual-mandiri. Bentuk nyata dari jenis pendidikan ini adalah pendidikan dalam keluarga. Dalam keluarga tidak dikenal standardisasi program, kurikulum, jenjanng dan lain-lain. Contoh lain: pendidikan media massa, acara-acara keagamaan, dan lain-lain.**

Pendidikan ditinjau dari jenjangnya

- Pendidikan ditinjau dari jenjangnya terdiri dari:

(a)jenjang pra sekolah,

(b)jenjang pendidikan dasar,

(c)jenjang pendidikan menengah, dan

(d)jenjang pendidikan tinggi.

Keempat-empatnya merupakan mata rantai yang berkesinambungan.

- Jenjang pendidikan pra sekolah wujudnya adalah: kelompok bermain (*play group*) dan Taman Kanak-kanak (TK).
- Jenjang pendidikan dasar (SD), Madrassh Ibtidaiyyah (MI), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), serta Madrasah Tsanawiyyah (MTs).
- Jenjang pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA),
- Jenjang pendidikan tinggi yaitu: Akdemi, Sekolah Tinggi, Institut, Universitas

Masa Reformasi (1998-Sekarang)

a.1. Kebijakan tentang Kuantitas dan Kualitas Guru

- Model pembelajaran yang berkaitan dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) diujicobakan, mulai tahun 2004, guru sangat berperan dalam melaksanakannya. Disinilah muncul masalah yang berkaitan dengan guru, apakah guru itu bermutu, berkomptensi, dan berkualitas sedangkan kesejahteraannya pun belum terjamin.
- Masalah lain muncul ketika dipertanyakan mengenai penyebaran jumlah dan mutu guru. Ada sekolah di pedesaan yang hanya memiliki 3-4 orang guru padahal sebaiknya sekolah dasar memiliki 10 guru yang terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, guru bidang studi, dan guru pesuruh. Tetapi di perkotaan jumlah guru di sekolah dasar terjadi penumpukan sehingga satu sekolah memiliki 11-14 orang guru. Sehingga sekolah di perkotaan dapat bertahan dengan kemajuannya sedangkan sekolah di pedesaan bertahan pula dengan ketertinggalannya.
- Kekuatan bagi peningkatan dan penambahan kuantitas dan kualitas guru adalah adanya niat baik pemerintah pusat untuk dapat melakukan pemerataan jumlah guru dengan sistem “guru kontrak” dan mengadakan perubahan kurikulum dengan berbasis pada kompetensi (KBK).
- Kekuatan lain bagi peningkatan mutu guru sebagai salah satu tuntutan dalam penciptaan SDM yang bermutu melalui kegiatan pendidikan yang lebih berkualitas adalah dengan dinaikkannya anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN.

2. Kebijakan terkait kurikulum berbasis kompetensi (KBK)

- Kurikulum terakhir berubah pada tahun 1994, kiranya sudah waktunya pemerintah melakukan revisi kurikulum. Hal ini sesuai dengan anjuran ideal perubahan/perbaikan kurikulum yaitu minimal lima tahun.
- Pada masa orde baru pendidikan dijadikan alat penyeragaman dengan ekonomi sebagai panglima. Hasilnya pada akhir masa orde baru pendidikan malah justru mengingkari kebhinekaan sebagai potensi kekayaan dan keragaman budaya di Indonesia bahkan falsafah bangsa Indonesia.
- Setelah itu sempat pendidikan terlantarkan padahal pendidikan dapat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan tetapi pada akhirnya pemerintah memerhatikan kembali dengan dampak APBN pun naik 20%. Bahkan pemerintah berusaha memperbaharui kurikulum yang berbasis kompetensi.
- Kekuatan lain bagi terlaksananya kurikulum berbasis kompetensi (KBK) ini adalah kesiapan Depdiknas dalam sosialisasi kurikulum ini (bekerjasama dengan Perguruan Tinggi) ke sekolah-sekolah di Indonesia, beberapa saat yang lalu kurikulum berbasis kompetensi telah diujicobakan untuk lebih menyempurnakan kembali bagian-bagian yang masih perlu direvisi. (Sam M.Chan dan Tuti T.Sam, 2007: 106).
- Pada dasarnya tidak ada perbedaan kurikulum kompetensi ini dengan kurikulum sebelumnya tetapi kurikulum berbasis kompetensi ini lebih menekankan pada muatan lokalnya yang ditujukan pada pengelolaan sumber daya yang ada.

3. Kebijakan seputar supervisi pendidikan

- Supervisi pendidikan merupakan bagian dari fungsi-fungsi pokok administrasi pendidikan. Pembicaraan tentang hal ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dengan administrasi pendidikan itu sendiri.
- Supervisi di sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah bertanggungjawab atas segala permasalahan yang ada di sekolah, khususnya segala aspek untuk sebesar-besarnya tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
- Keberhasilan kepala sekolah nantinya bukan semata-mata ditentukan oleh kemampuan individualnya, melainkan turut pula ditentukan oleh kerja samanya dengan para guru dan pegawai lain yang ada di sekolah tersebut.
- Kegiatan supervisi ini terkadang pada kenyataannya menjadi ajang kepala sekolah untuk bertindak sewenang-wenang. Jika ada guru yang pandai “menjilat” akan baik-baik saja bahkan kecipratan rejeki tetapi bagi guru yang berani menentang kebijakan kepala sekolah yang dianggap tidak baik dan bertindak sebagai oposisi maka kegiatan supervisi ini menjadi ajang untuk mencari kesalahan atau kekurangan guru sehingga bisa mempengaruhi tidak munculnya ide atau kreativitas guru dalam mengajar.

Otonomi Daerah&Otonomi Pendidikan

- Setelah reformasi bergulir, dan akhirnya rezim orde baru tumbang, tuntutan otonomi daerah semakin kencang diutarakan dan disuarakan oleh banyak kalangan.
- Sejalan dengan semangat otonomi daerah beberapa kewenangan pemerintah pusat akhirnnya diserahkan ke pemerintah daerah, termasuk diantaranya, beberapa kewenangan di bidang pendidikan.
- Kantor wilayah Departemen Pendidikan Nasional yang selama ini berwenang sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah, sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.
- Dengan demikian, dualism kepemimpinan yang selama ini ada khususnya pada tingkat sekolah dasar sekarang sudah tidak ada lagi (Sam M.Chan dan Tuti T.Sam, 2007: 88-89).

4. Kebijakan pendidikan di era globalisasi

- Pada era globalisasi ini, baik yang mencakup aspek ekonomi, budaya, politik, ataupun sosial sekalipun akan memberikan kemungkinan yang sangat terbuka bagi siapa saja untuk turut bersaing di setiap negara peserta.
- Persaingan bebas ini menuntut setiap negara untuk siap secara optimal bila ingin tetap bisa berperan serta. Kalau tidak, negara tersebut harus bersiap-siap untuk bangkrut dan keluar dari arena persaingan.
- Sektor pendidikan yang menjadi tulang punggung penting dalam membina dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), perlu mengembil langkah konkret dalam menghadapi kecenderungan global tersebut.
- Banyaknya mulai bermunculan sekolah internasional di Indonesia yang didirikan oleh penanam modal asing dari India, America, Australia dan lainnya atau pun penanam modal asing bekerja sama dengan penanam modal dalam negeri merupakan tantangan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dalam bidang pendidikan agar tak tertinggal dalam era globalisasi ini, tetapi sampai sat ini pemerintah belum mampu mengarahkan pada sistem pendidikan yang mantap dan professional.

Jelaskan Periodisasi Pengembangan Kebijakan Pendidikan di Indonesia

1. **Zaman Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia**
2. **Pasca Kemerdekaan (Orde Lama)**
3. **Periode 1966-1998 (Orde Baru)**
4. **Masa Reformasi (1998-Sekarang)**

Periodesasi pengembangan kebijkan pendidikan di indonsia (1) Zaman Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia; (2) Pasca Kemerdekaan (Orde Lama); (3) Periode (Orde Baru) (4) masa reformasi

Framework pembelajaran abad ke-21

- Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*Critical-Thinking and Problem-Solving Skills*), mampu berfikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah;
- Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (*Communication and Collaboration Skills*), mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak;
- Kemampuan mencipta dan membaharui (*Creativity and Innovation Skills*), mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif;
- Literasi teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communications Technology Literacy*), mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari;
- Kemampuan belajar kontekstual (*Contextual Learning Skills*) , mampu menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi, dan
- Kemampuan informasi dan literasi media, mampu memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan beragam pihak. (BNSP.2010).

Soal

6. Kebijakan pelarangan penggunaan bahasa Eropa (Inggris dan Belanda) dalam komunikasi lisan dan tulisan, dan hanya memperbolehkan komunikasi dalam bahasa Indonesia dan…….. Pengaruh tersebut sangat terasa dalam dunia pendidikan karena semasa pendudukan Belanda, bahasa pengantar yang dipergunakan di sekolah-sekolah adalah bahasa Belanda. Sehingga pada masa itu,

Periodesasi pengembangan kebijkan pendidikan di indonsia, paling tidak sudah dialami melalui lima zaman yaitu:

(1) ……
(2) Masa pendudukan jepang;
(3) ……..
(4) Terjadi tahun 1942-45
(5) Dibentuknya Tim penyempurna bhasa Indonesia

7. Kebijakan pendidikan di Indonesia yang terkenal pada saat itu adalah “Sapta Usaha Tama dan Pancawardana” berisi: -Penertiban aparatur dan usaha-usaha kementrian PP dan K; -Menggiatkan kesenian dan olahraga; -Mengharuskan adanya usaha; -Mengharuskan; -penabungan; -Mewajibkan usaha-usaha koperasi; Mengadakan kelas masyarakat.

(1) ……
(2) Tertuang dalam instruksi mentri PP dan K No 1 tahun 1959.
(3) ……..
(4) Terjadi pada masa ordelama
(5) Berlansung tahun 1959-1966.

8. “……Kebijakan pendidikan di indonesia: (1) sistem pendidikan yang terpusat atau dengan istilah sentralisasi membuat kualitas pendidikan Indonesia semakin memburuk. (2) sistem doktrinisasi, yaitu sebuah sistem yang memaksakan paham-paham pemerintahan agar mengakar pada benak anak-anak. (3) mulai dari sekolah dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi, diwajibkan untuk mengikuti penetaran P4 yang berisi tentang hapalan butir-butir Pancasila” (4) menolak segala bentuk budaya asing, baik itu yang mempunyai nilai baik ataupun mempunyai nilai buruk. (Dwimas, 2010).

(1) ……
(2) Pandangan (Dwimas 2010).
(3) ……..
(4) Terjadi pada masa ordebaru
(5) Berlansung tahun 1966-1998.

(1) ……
(2) Pandangan (Chan&Tuti 2007).
(3) ……..
(4) Terjadi pada masa reformasi
(5) Berlansung tahun 1998-sekarang.

Paradigma baru pendidikan Islam harus diorientasikan kepada pembangunan, pembaruan, pengembangan kreativitas, intelektualisme, keterampilan, kecakapan, penalaran, inovatif, mandiri, disiplin dan taat hukum. Selain itu, terbuka dalam masyarakat plural, dan mampu menghadapi serta menyelesaikan persoalan pada eraglobalisasi dengan dilandasi keanggunan moral dan akhlak. Ini dilakukan dalam kerangka usaha membangun manusia dan masyarakat yang berkualitas bagi kehidupan dalam rnasyarakat madani Indonesia (Sanakri, 2003).

Paradigma baru pendidikan Islam

(1) Kebijakan Pendidikan Islam
(2) Paradigma baru pendidikan Islam
(3) Paradigma lama Pendidikan Islam
(4) Hujair Sanaky (2003)
(5) JPI-FIAI Tarbiyah. 8:4, (Juni, 2003), 14

YU KULIAH

Part: IV

ISU KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL

Ketimpangan pendidikan

Oleh: A. Rusdiana

TREND KETIMPANGAN
akses antar propinsi

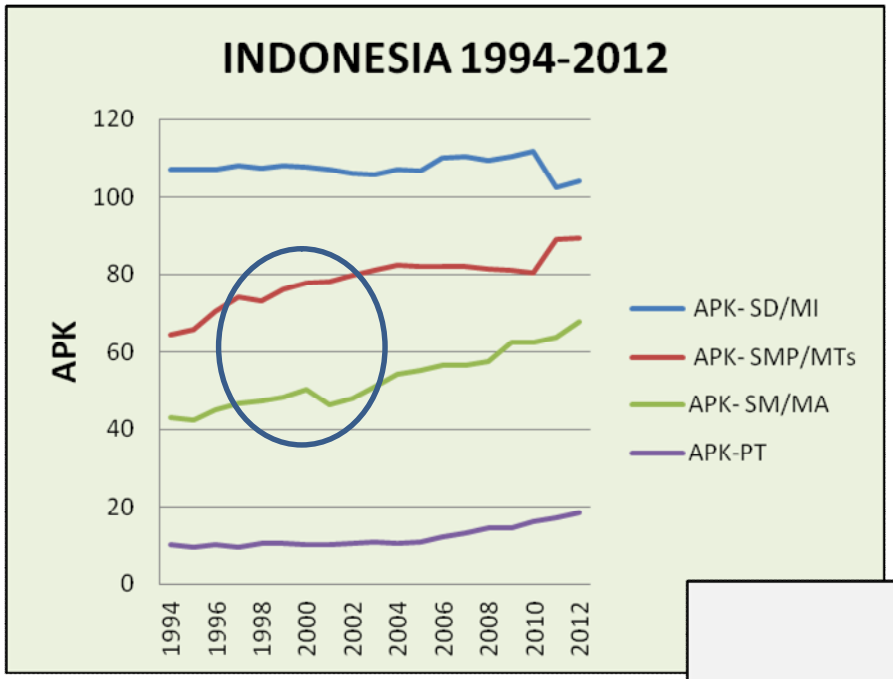
INDONESIA 1994-2012
APK
120
100
80
60
40
20
0
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
APK- SD/MI
APK- SMP/MTs
APK- SM/MA
APK-PT

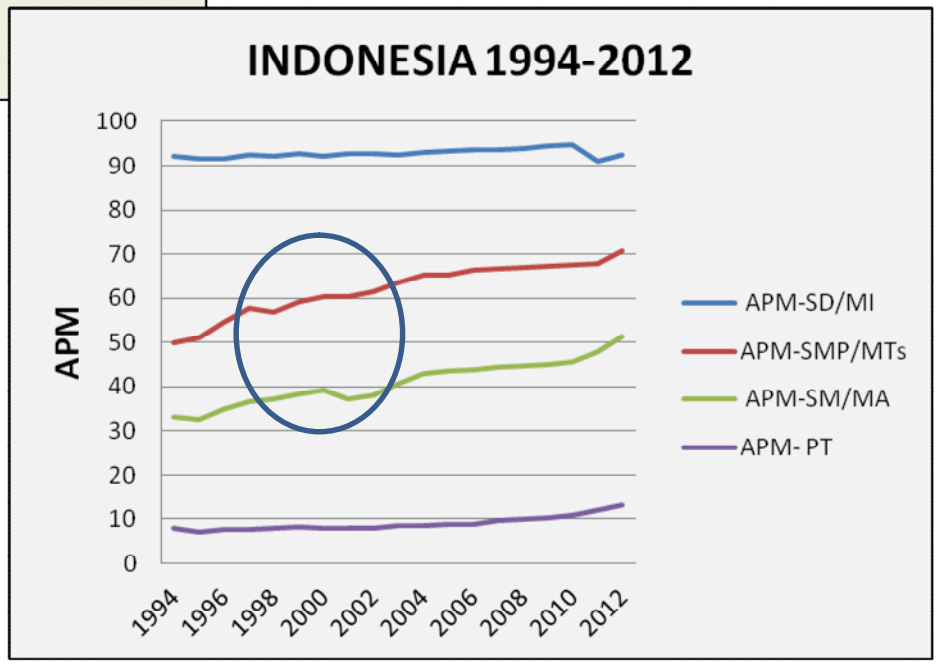
INDONESIA 1994-2012
APM
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
APM-SD/MI
APM-SMP/MTs
APM-SM/MA
APM- PT

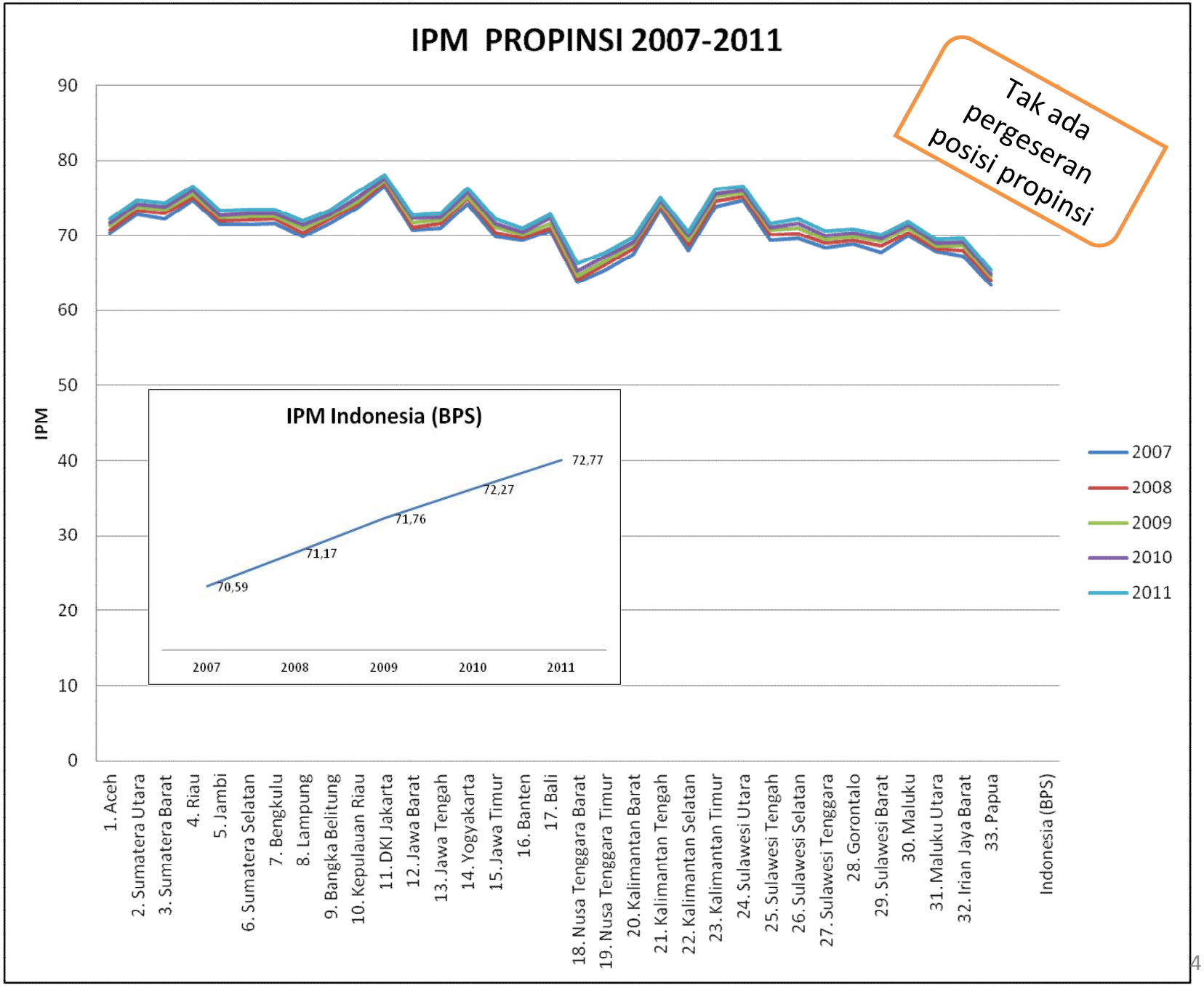
IPM PROPINSI 2007-2011
Tak ada pergeseran posisi propinsi
IPM
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
IPM Indonesia (BPS)
70,59
71,17
71,76
72,27
72,77
2007
2008
2009
2010
2011
1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Sumatera Selatan
7. Bengkulu
8. Lampung
9. Bangka Belitung
10. Kepulauan Riau
11. DKI Jakarta
12. Jawa Barat
13. Jawa Tengah
14. Yogyakarta
15. Jawa Timur
16. Banten
17. Bali
18. Nusa Tenggara Barat
19. Nusa Tenggara Timur
20. Kalimantan Barat
21. Kalimantan Tengah
22. Kalimantan Selatan
23. Kalimantan Timur
24. Sulawesi Utara
25. Sulawesi Tengah
26. Sulawesi Selatan
27. Sulawesi Tenggara
28. Gorontalo
29. Sulawesi Barat
30. Maluku
31. Maluku Utara
32. Irian Jaya Barat
33. Papua
Indonesia (BPS)
2007
2008
2009
2010
2011

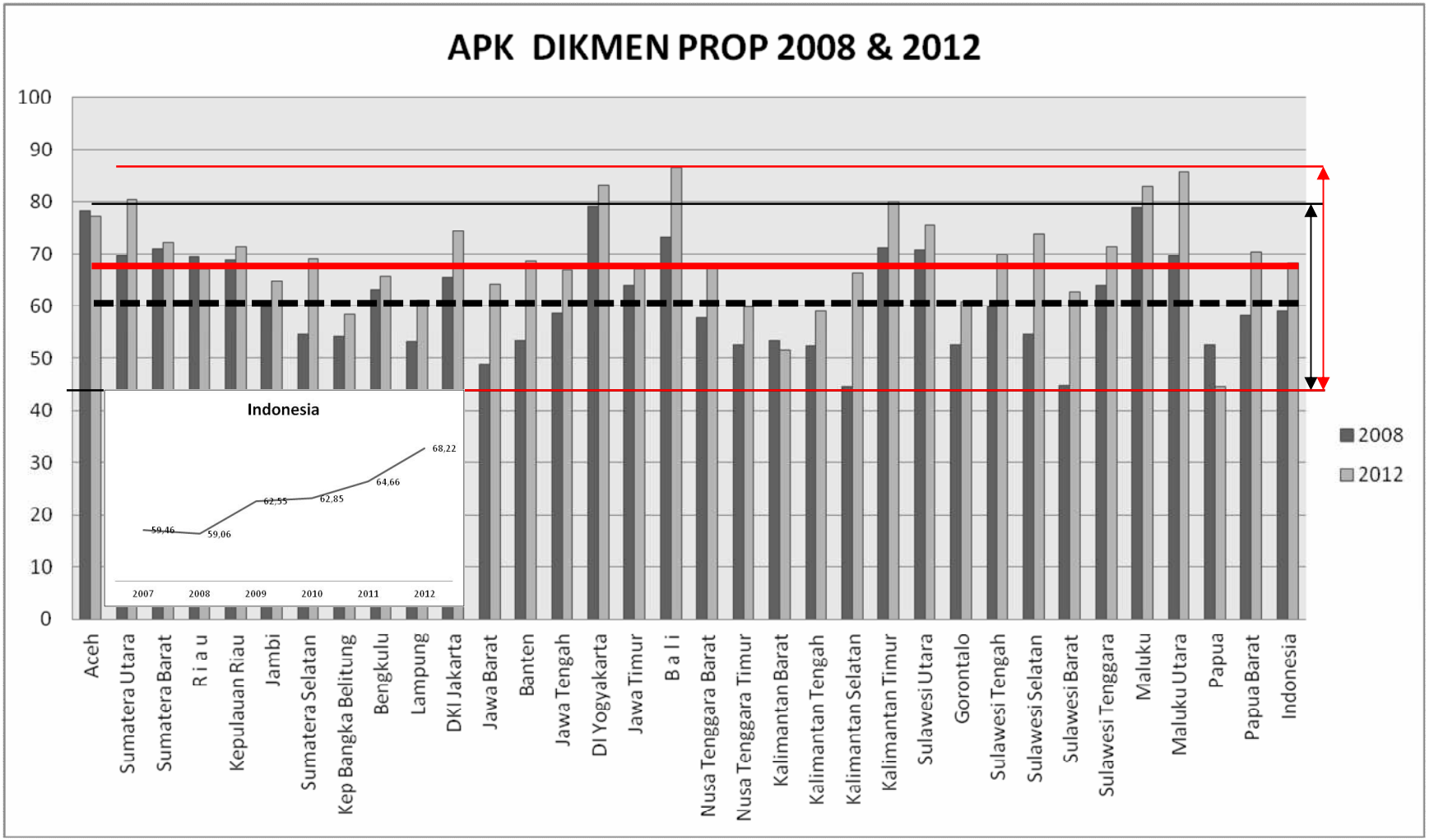

Secara agregatif nasional terus meningkat;
Tetapi diikuti MELEBARNYA KETIMPANGAN

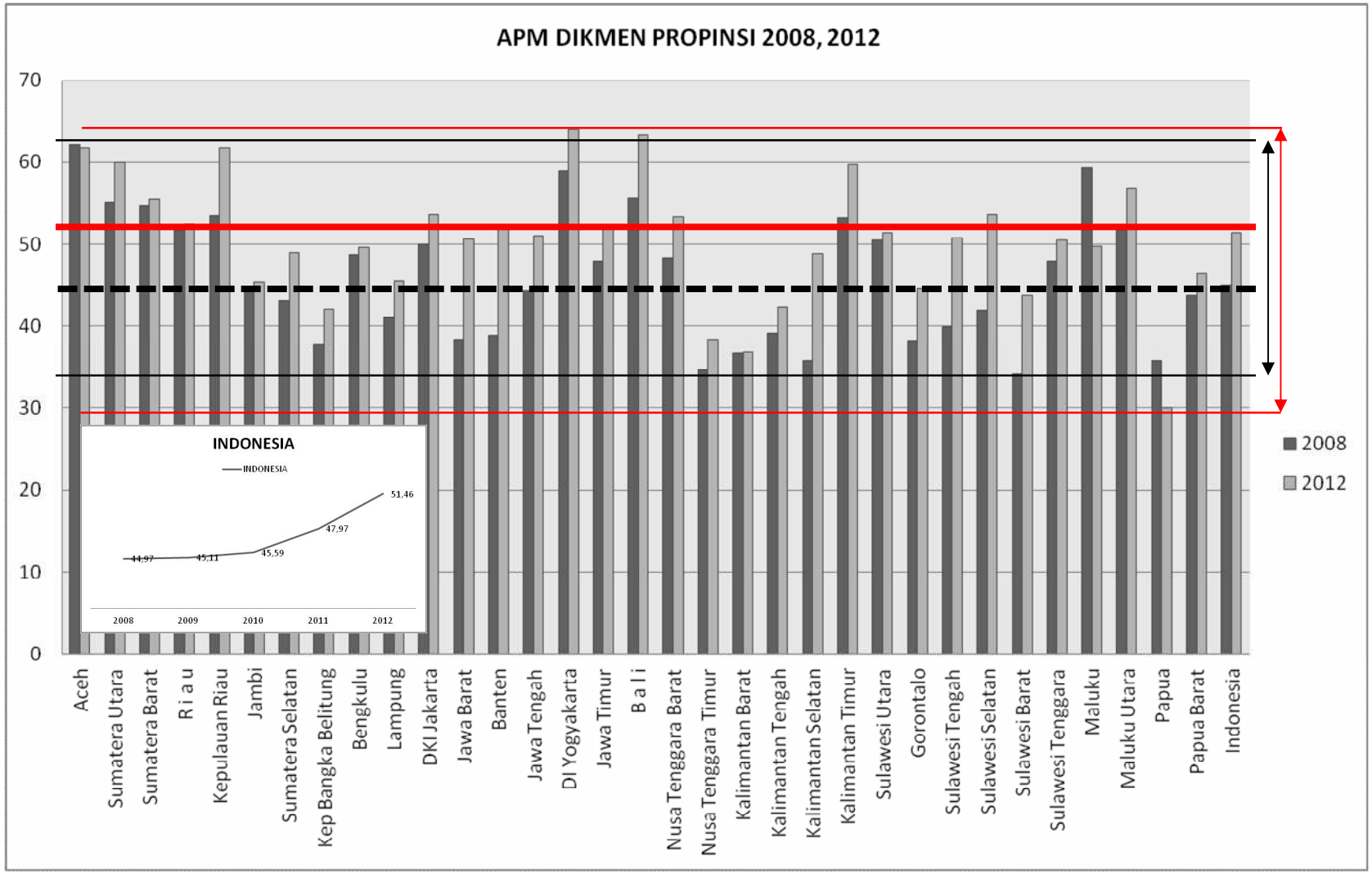

Secara agregatif nasional terus meningkat;
Tetapi diikuti MELEBARNYA KETIMPANGAN

KONSEKUENSI & SOLUSI
disparitas akses pendidikan

- TANPA TEROBOSAN KEBIJAKAN KETIMPANGAN ANTAR DAERAH AKAN BERLANJUT DAN SEMAKIN TAJAM
- ANGKA PARTISIPASI PENDIDIKAN
  - MERUPAKAN FUNGSI SUPPLAY DAN DEMAND
  - BERPENGARUH LANGSUNG THD INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA
- KEBIJAKAN PENDIDIKAN PERLU BERSINERGI DENGAN KEBIJAKAN SEKTOR LAIN DLM PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN NASIONAL:
  - INFRASTRUKTUR → EDUCATION SUPPLY
  - EKONOMI → KETENAGAKERJAAN
  - KEBUDAYAAN → EDUCATION DEMAND
  - POLITIK/ HUKUM → PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DAERAH

KONKLUSI DAN KONSEKUENSI
analisis isu disparitas aksesibilitas pendidikan

DISPARITAS PERFORMA SISWA PD U.N.

- FUNGSI FAKTOR2 YG ADA DI SEKOLAH: asesmen – proses – input
- FUNGSI FAKTOR2 LINTAS SEKOLAH, DINAS PENDIDIKAN DAERAH, & KEBIJAKAN TINGKAT NASIONAL

REKOMENDASI KEBBIJAKAN:

- PENINGKATAN KEEFEKTIFAN DAN PENGEMBANGAN KUALITAS.
- PEMDA cq DINAS PENDIDIKAN: PENDAMPINGAN DI SEKOLAH/ KELAS
- NASIONAL: PENATAAN KURIKULUM, SINKRONISASI KEBIJAKAN & KEGIATAN

ISU KUALITAS PENDIDIKAN
disparitas pendidikan menengah

PPMP – Lemlit UNY (2011)

Analisis mutu SMA di DIY & Jateng bag selatan.

- PERSEN (%) SOAL UJIAN NASIONAL GAGAL DIJAWAB OLEH LEBIH DARI 65% SISWA.
  - ANTAR KABUPATEN/ KOTA
  - ANTAR TAHUN (2008 – 2010)
  - ANTAR IPA – IPS

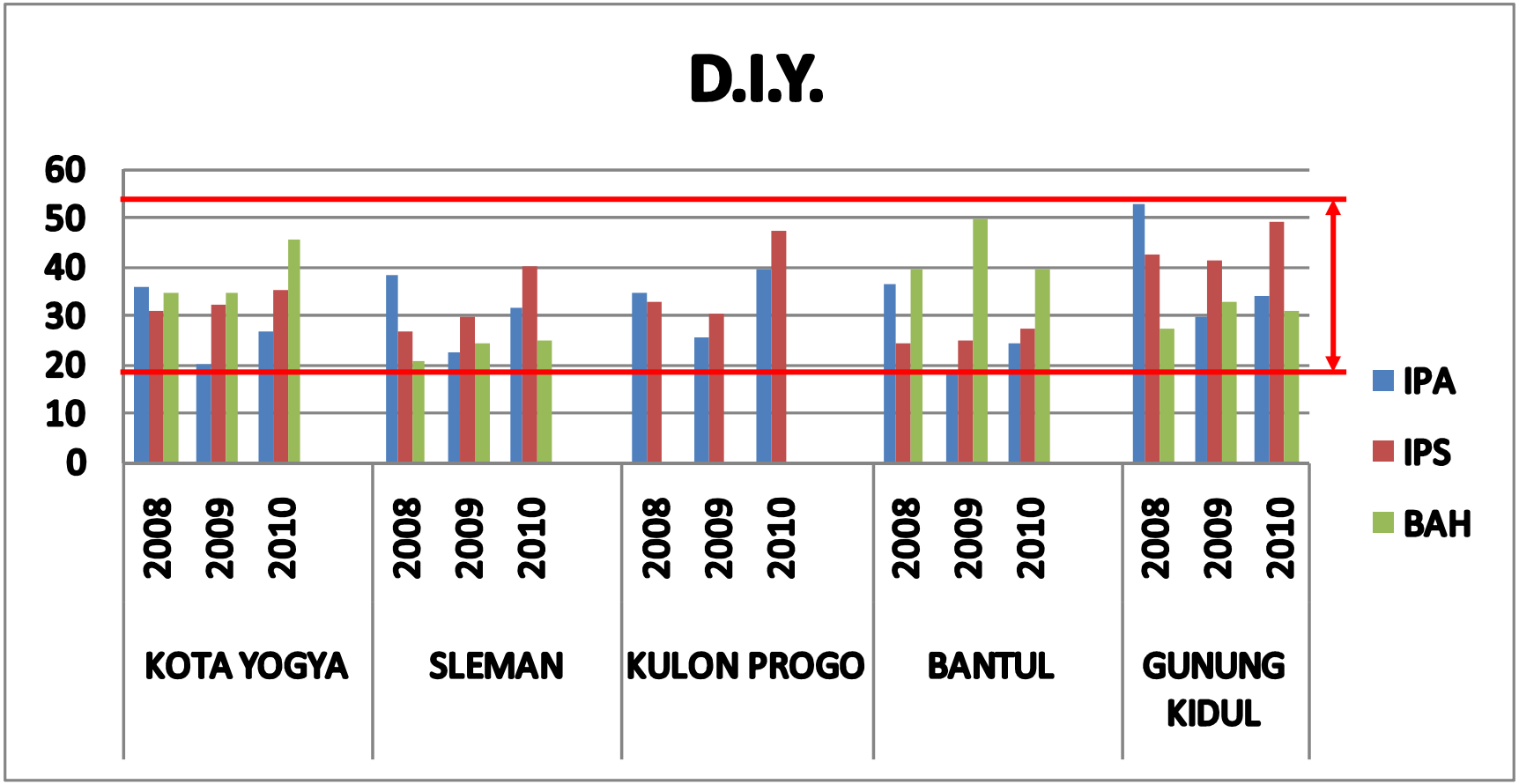
D.I.Y.
60
50
40
30
20
10
0
2008
2009
2010
KOTA YOGYA
SLEMAN
KULON PROGO
BANTUL
GUNUNG KIDUL
IPA
IPS
BAH

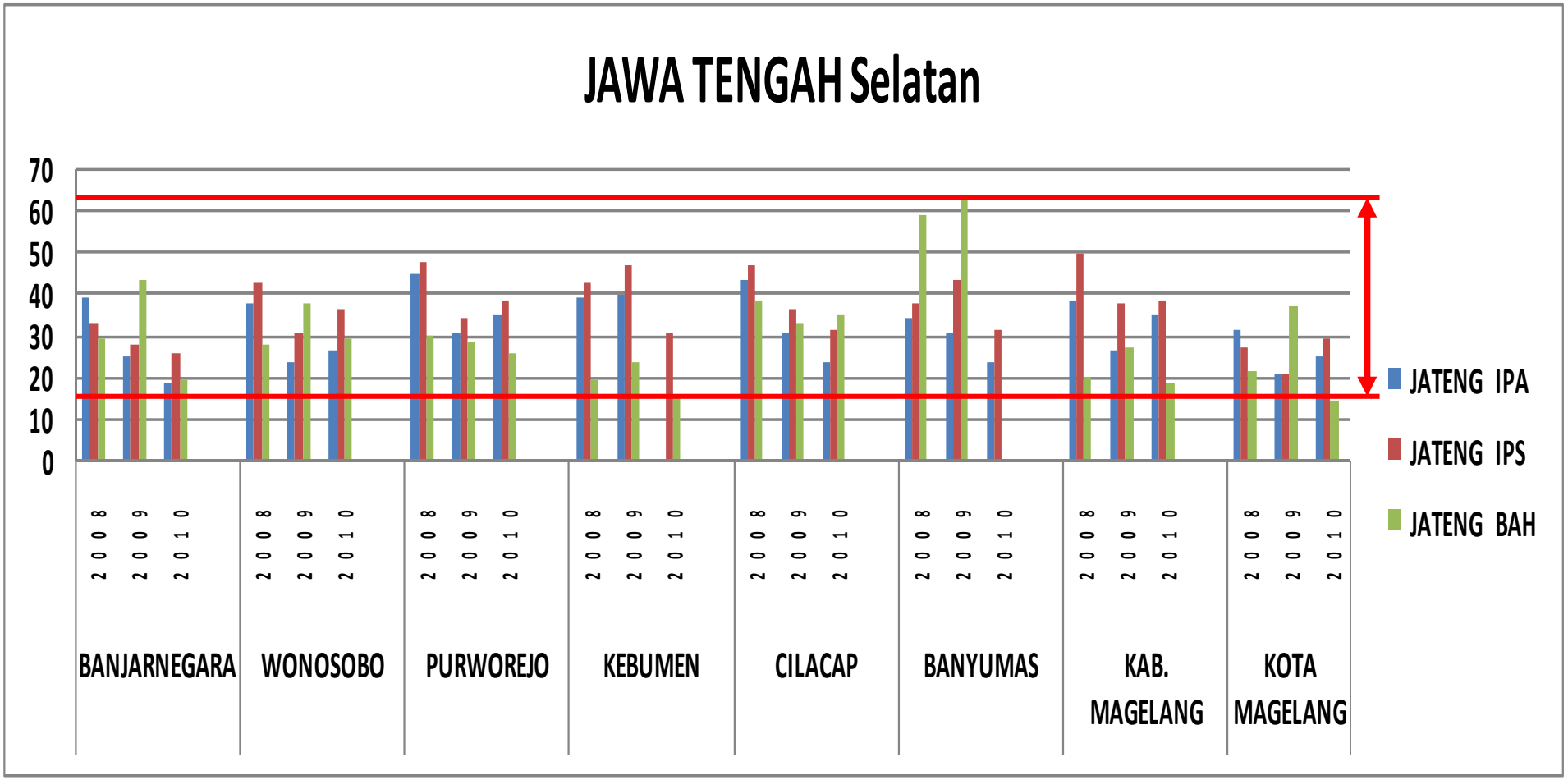
JAWA TENGAH Selatan
70
60
50
40
30
20
10
0
2008
2009
2010
BANJARNEGARA
WONOSOBO
PURWOREJO
KEBUMEN
CILACAP
BANYUMAS
KAB. MAGELANG
KOTA MAGELANG
JATENG IPA
JATENG IPS
JATENG BAH

FAKTOR PENYEBAB

BAHASA INDONESIA

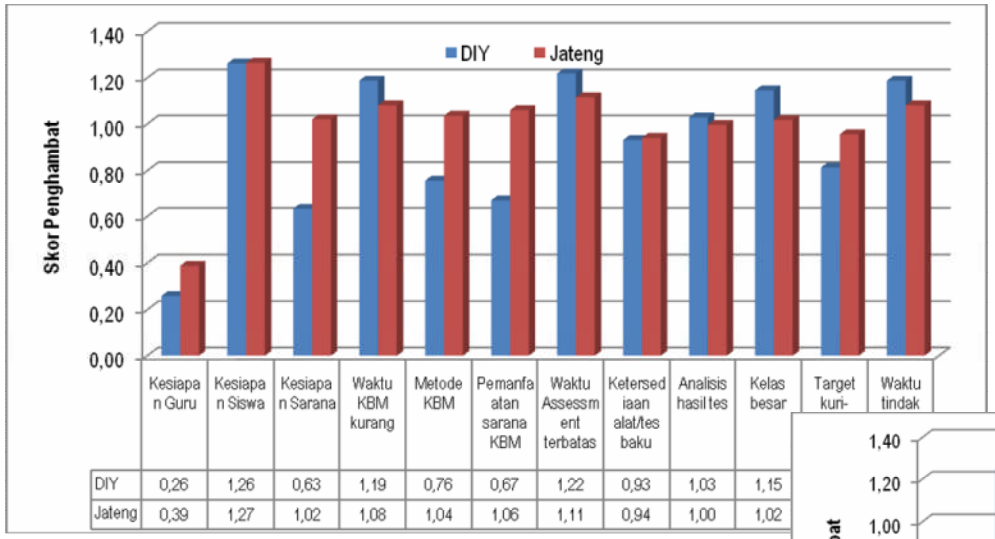

	Kesiapan Guru	Kesiapan Siswa	Kesiapan Sarana	Waktu KBM kurang	Metode KBM	Pemanfaatan sarana KBM	Waktu Assessment terbatas	Ketersediaan alat/tes baku	Analisis hasil tes	Kelas besar	Target kuri-	Waktu tindak
DIY	0,26	1,26	0,63	1,19	0,76	0,67	1,22	0,93	1,03	1,15		
Jateng	0,39	1,27	1,02	1,08	1,04	1,06	1,11	0,94	1,00	1,02		

BAHASA INGGRIS

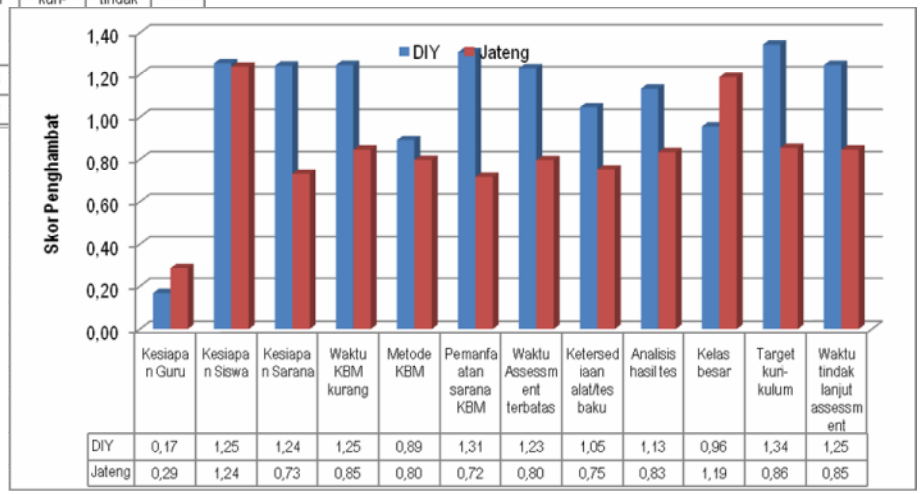

	Kesiapan Guru	Kesiapan Siswa	Kesiapan Sarana	Waktu KBM kurang	Metode KBM	Pemanfaatan sarana KBM	Waktu Assessment terbatas	Ketersediaan alat/tes baku	Analisis hasil tes	Kelas besar	Target kuri-kulum	Waktu tindak lanjut assessment
DIY	0,17	1,25	1,24	1,25	0,89	1,31	1,23	1,05	1,13	0,96	1,34	1,25
Jateng	0,29	1,24	0,73	0,85	0,80	0,72	0,80	0,75	0,83	1,19	0,86	0,85

Para guru bahasa Inggris melaporkan bahwa sumber masalah:

- memang ada pada kesiapan siswa, keterbatasan sarana (misalnya untuk listening);
- yang berdampak pada proses pembelajaran yang kekurangan pemanfaatan sarana karena tidak ada;
- kekurangan waktu karena terbebani mengejar target kurikulum;
- sehingga fungsi asesmenpun juga kurang optimal.

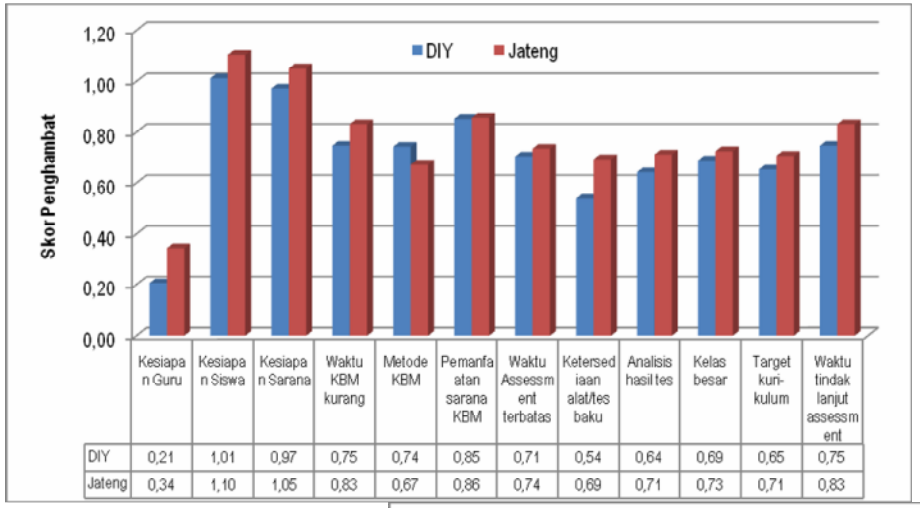

	Kesiapan Guru	Kesiapan Siswa	Kesiapan Sarana	Waktu KBM kurang	Metode KBM	Pemanfaatan sarana KBM	Waktu Assessment terbatas	Ketersediaan alat/tes baku	Analisis hasil tes	Kelas besar	Target kurikulum	Waktu tindak lanjut assessment
DIY	0,21	1,01	0,97	0,75	0,74	0,85	0,71	0,54	0,64	0,69	0,65	0,75
Jateng	0,34	1,10	1,05	0,83	0,67	0,86	0,74	0,69	0,71	0,73	0,71	0,83

FISIKA

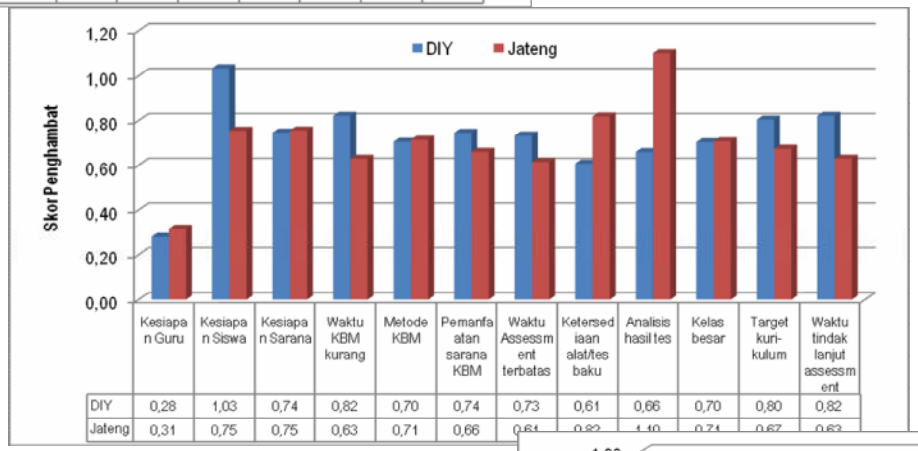

	Kesiapan Guru	Kesiapan Siswa	Kesiapan Sarana	Waktu KBM kurang	Metode KBM	Pemanfaatan sarana KBM	Waktu Assessment terbatas	Ketersediaan alat/tes baku	Analisis hasil tes	Kelas besar	Target kurikulum	Waktu tindak lanjut assessment
DIY	0,28	1,03	0,74	0,82	0,70	0,74	0,73	0,61	0,66	0,70	0,80	0,82
Jateng	0,31	0,75	0,75	0,63	0,71	0,66	0,61	0,82	1,10	0,71	0,67	0,63

KIMIA

BIOLOGI

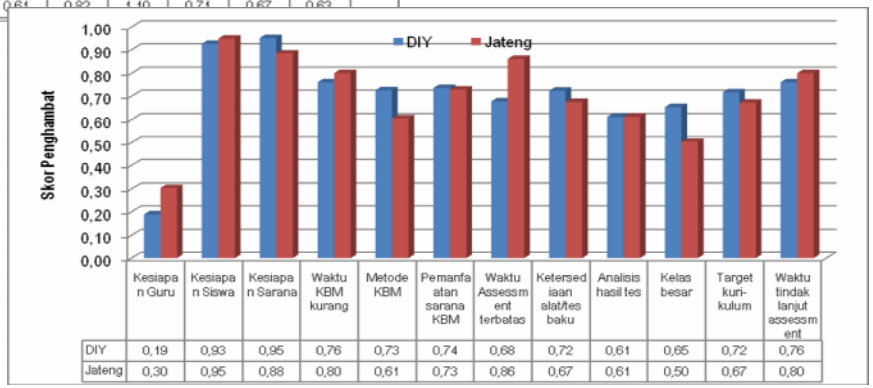

	Kesiapan Guru	Kesiapan Siswa	Kesiapan Sarana	Waktu KBM kurang	Metode KBM	Pemanfaatan sarana KBM	Waktu Assessment terbatas	Ketersediaan alat/tes baku	Analisis hasil tes	Kelas besar	Target kurikulum	Waktu tindak lanjut assessment
DIY	0,19	0,93	0,95	0,76	0,73	0,74	0,68	0,72	0,61	0,65	0,72	0,76
Jateng	0,30	0,95	0,88	0,80	0,61	0,73	0,86	0,67	0,61	0,50	0,67	0,80

Dari FGD dengan para guru ditemukan penjelasan sumber masalah

- kurikulum, misalnya penempatan isi yang bermasalah;
- kebiasaan dan kemampuan membaca terbatas, kurang latihan; dan
- meski ada MGMP, fungsi forum guru tersebut juga kurang optimal.

Sejalan dengan penjelasan menrut para guru inipun, dikemukakan pula berbagai usulan pemecahan masalah misalnya:

- pemberdayaan MGMP,
- *team teaching,*
- koordinasi antar kelas 10-11-12;
- penataan kembali kurikulum,
- peningkatan kapasitas belajar para siswa melalui berbagai pendekatan dalam pembelajaran.

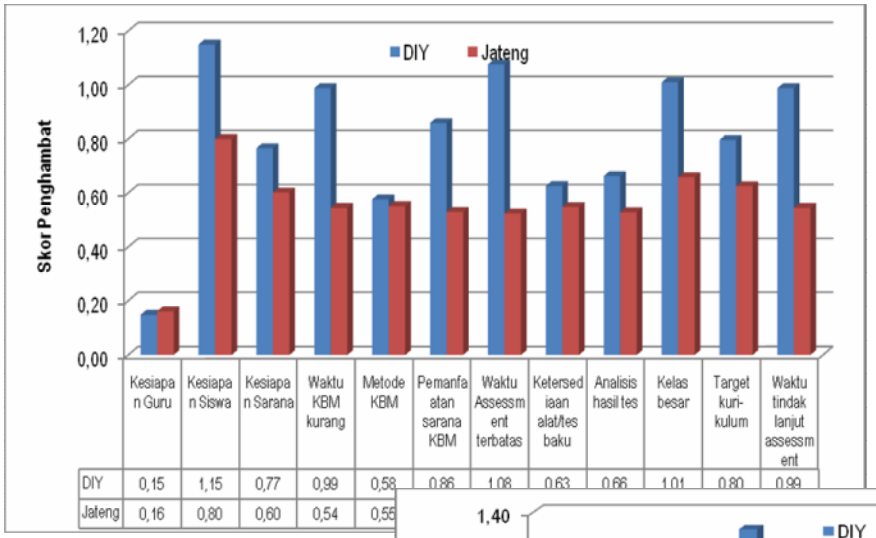

EKONOMI

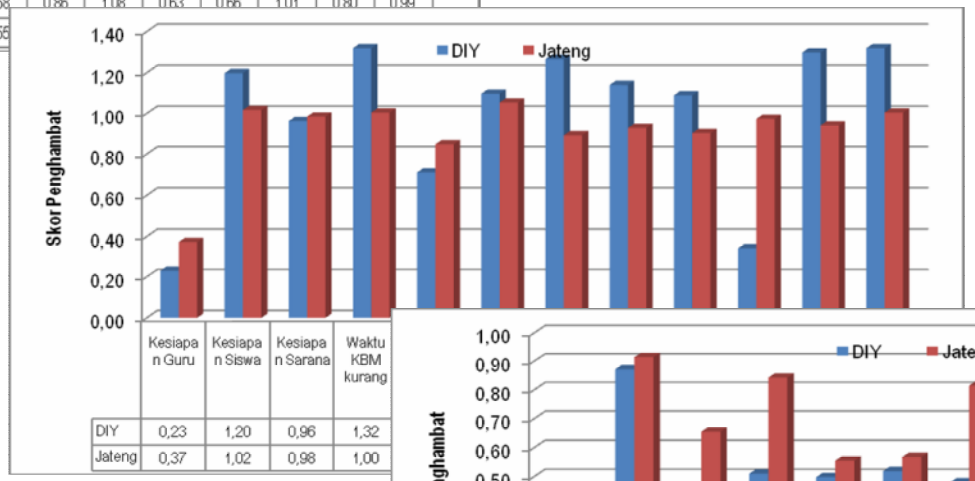

GEOGRAFI

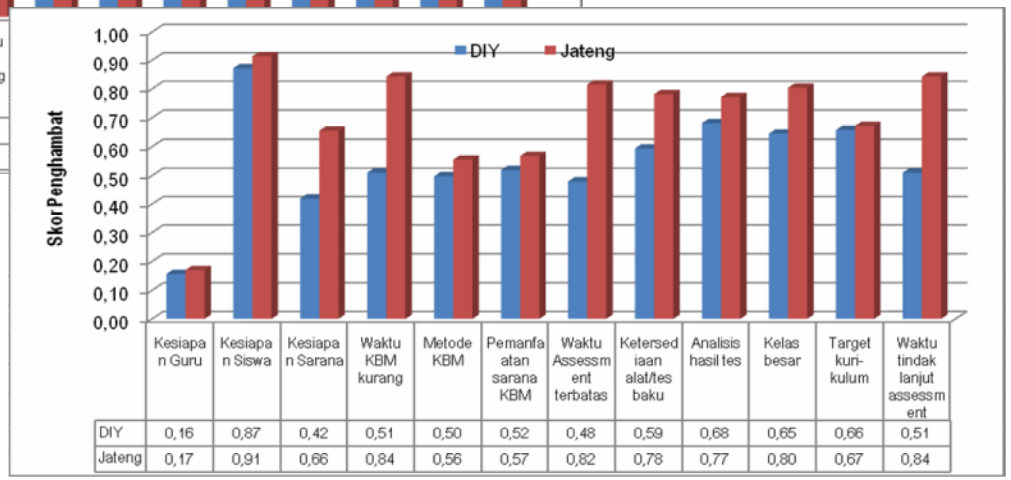

SOSIOLOGI

Penjelasan dari rumpun IPS

- Ketidak sesuaian antara muatan kurikulum dengan komposisi soal UN juga ditemukan di geografi.
- Kegemaran dan kecakapan membaca tentunya hal yang sangat diperlukan di dalam belajar ilmu-ilmu sosial; dan penelitian ini menemukan bahwa hal tersebut masih belum menggembirakan.
- Dalam pelajaran sosiologi, buku juga menjadi salah satu sumber kesulitan; di antaranya: tidak semuanya menjelaskan materi dan konsep secara lengkap; contoh-contoh kurang aktual, kurang kontekstual, dan kurang mutakhir; sehingga sulit difahami.

BAGAIMANA KETIMPANGAN TERJADI?

teori sekolah efektif
teori pembangunan

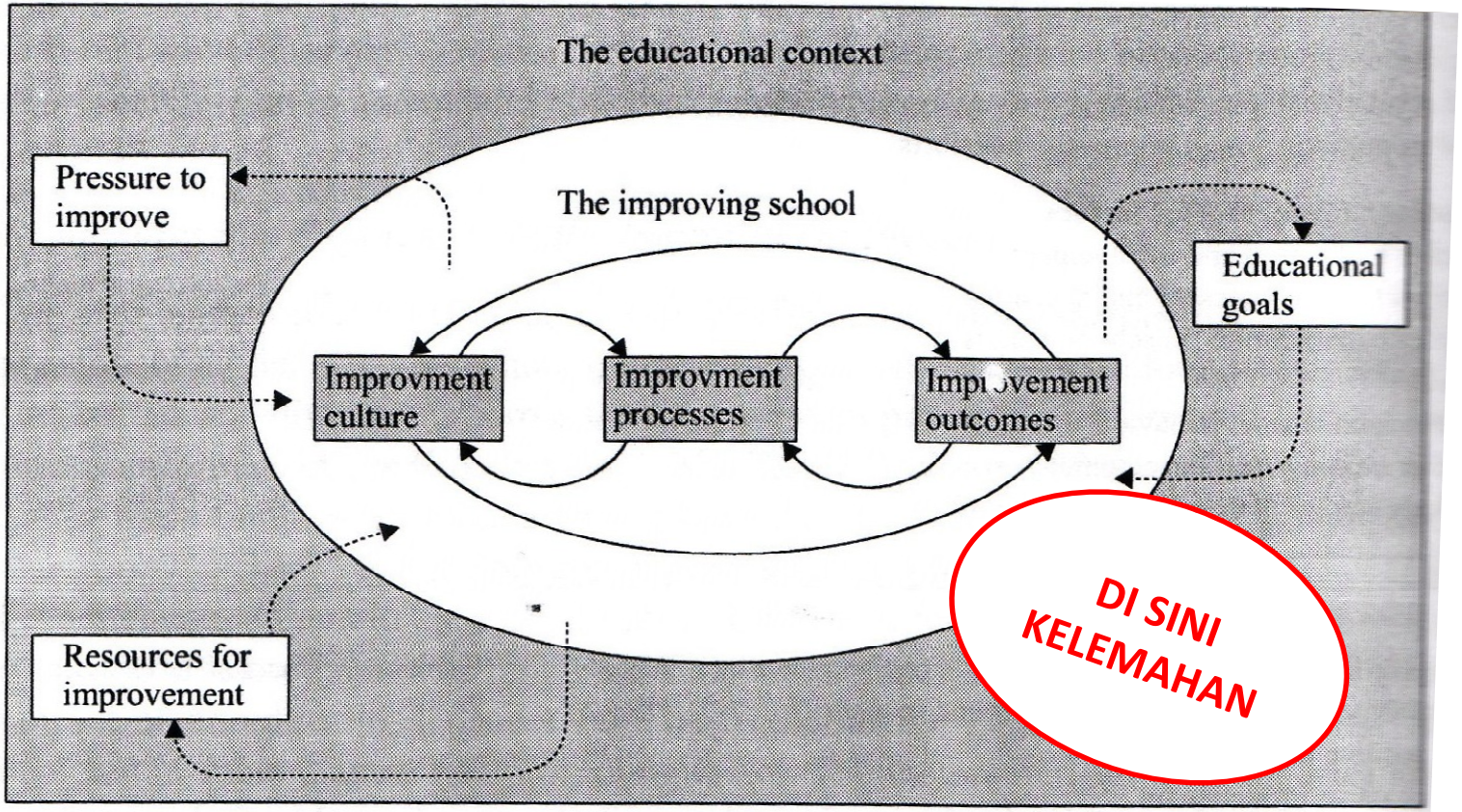

Figure 1. Comprehensive framework for effective school improvement

Sources of theory & policy change

- ***Learning (from unexplained phenomena)***
- ***Changes in ideology***
- ***Changes in international environment***
- ***Changes in domestic institutions, constraints and aspirations***
- ***Culture of the discipline (how to incorporate the four sources)***

TEORI PEMBANGUNAN NASIONAL

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

FALLACIES OF DEVELOPMENT THEORY

Extracted from:

Irma Adelman (1999)

- ***SINGLE CAUSE THEORIES OF UNDERDEVELOPMENT***
- ***SINGLE FIGURE OF MERIT CRITERION OF DEVELOPMENT***
- ***LOG LINEAR PROCESS OF DEVELOPMENT***

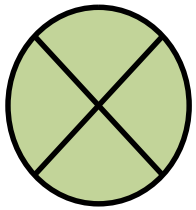

Common mistakes

OVER SIMPLIFICATION

PARTIAL

FALLACY – I
SINGLE CAUSE THEORIES OF UNDERDEVELOPMENT

- **PHYSICAL CAPITAL (1940 – 1970) → marshall plan ← Adam Smith classical ec theory**
- **ENTREPRENEURSHIP (1958 – 1965) → Schumpeterian, Hagen, McClelland**
- **INCORRECT RELATIVE PRICES (1970 – 1980) → classical ec →industrialization → inequality**
- **INTERNATIONAL TRADE (1980 -) → trade is enough**
- **HYPERACTIVE GOVERNMENT (1980 – 1996) → government is the problem, not the solution**
- **HUMAN CAPITAL (1988 -) → human capital is enough**
- **INEFFECTIVE GOVERNMENT (1997 -) → krisis moneter →ek →sos → politik**

FALLACY II
SINGLE CITERION OF DEVELOPMENT PERFORMANCE

- GNP
  - The extent of national potential for improving the welfare of the majority of the nation.

  Later/ better:

  HDI (Human Development Index): a multidimensional index of development

FALLACY III
DEVELOPMENT IS A (LOG) LINEAR PROCESS

- PRODUCTION FUNCTION APPROACH
  - Initial conditions do not matter
  - Levels no matter
  - There is no path dependence
  - Universal policy prescriptions apply to all countries

TANTANGAN:
MEMPERTEMUKAN
DISKREPANSI OBJEKTIF
DG PERSEPTUAL

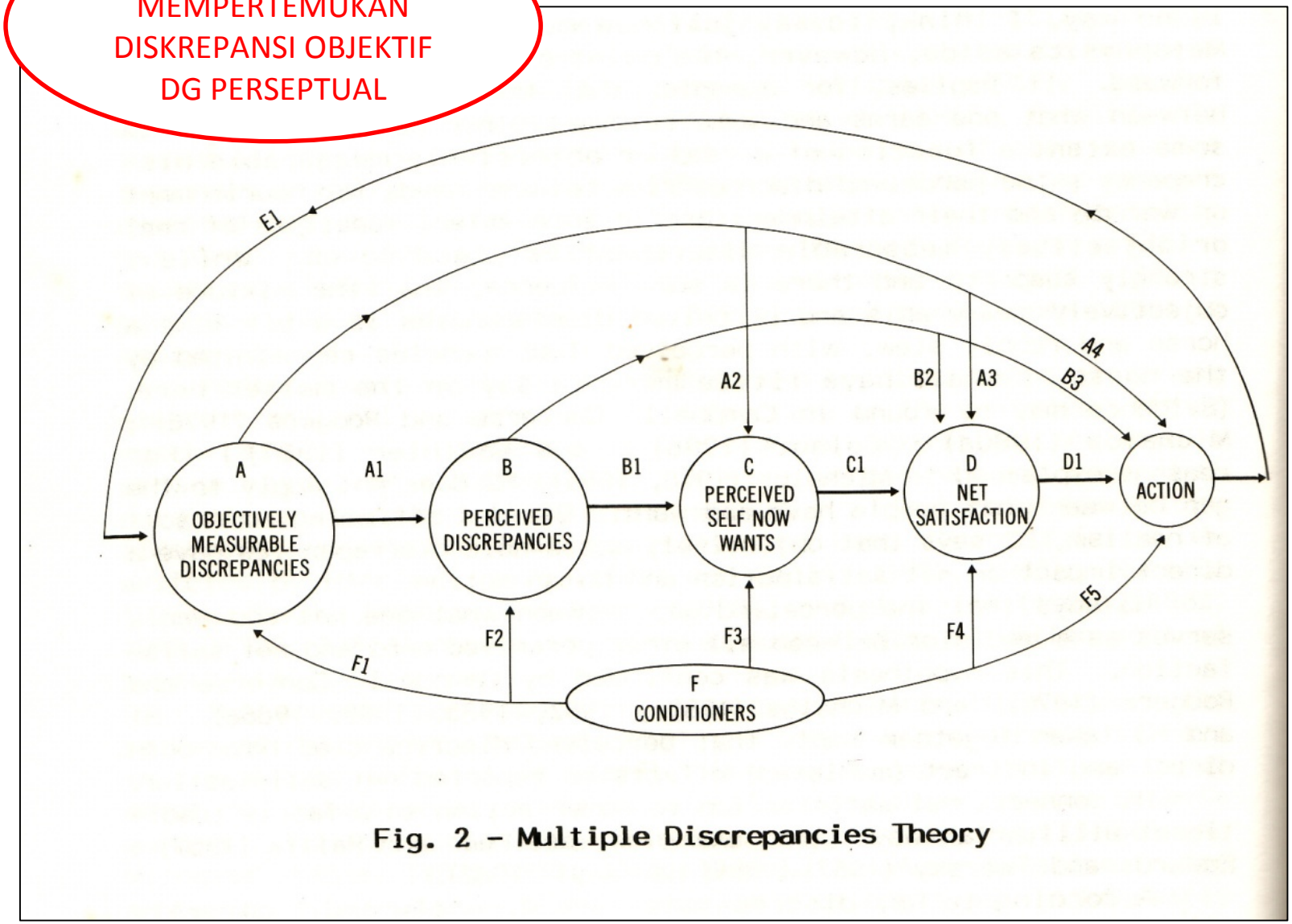

Fig. 2 - Multiple Discrepancies Theory

REFLEKSI ANALISIS KEBIJAKAN

MENGAPA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAK SELALU MENCAPAI HASIL YG DIHARAPKAN?

FAKTOR DETERMINAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

- **THE PROBLEM**

  problem of the problem
- **THE SITE**

  contextual? Target's characteristics?
- **THE ACTORS**

  sense of the policy problems
- **THE PROCESS**

  pressures, demands, resources
- **OUTCOMES**

  capacity of individuals / system

- **EXPECTED CHANGE?**
- **NECESSARY OUTPUTS**
- **REQUIRED PROCESS**
- **INPUTS NEEDED**

MENGAPA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAK SELALU MENCAPAI HASIL YG DIHARAPKAN?

KONDISI YG DAPAT BERPENGARUH THD ADOPSI REFORMASI PENDIDIKAN

- SIFAT PERUBAHAN: kombinasikan akses dg mutu; inkremental; sinergikan dg pembangunan.
- UPAYA MEMPERKUAT SUPPLY: percayakan pd pejabat dg masa jabatan yg memadai; hubungkan aspek2 di luar pendidikan; bentuk unit org yg pro-perubahan yg diharapkan
- UPAYA MEMPERKUAT DEMAND: kampanyekan dg sebanyak2nya informasi; libatkan calon penerima manfaat perubahan, dlm perancangan dan evaluasi
- SETING KELEMBAGAAN: bangun relasi eksekutif – legislatif; jalin hubungan kelompok oposisi; pre-emptif koalisi strategis antara kelompok panyandang sumberdaya dengan aktor sosial lain.

DUKUNGAN PUBLIK THD REFORMASI PENDIDIKAN, TIDAK SERTAMERTA MENDUKUNG REFOMASI MUTU PENDIDIKAN BAHKAN DAPAT MENIMBULKAN PENOLAKAN

CATATAN PENUTUP

- SISTEM KEBIJAKAN PENDIDIKAN PERLU BELAJAR DARI PENGALAMAN SUKSES DAN PENGALAMAN KEGAGALAN SETELAH KEBIJAKAN DIIMPLEMENTASIKAN.
- DIMENSI ISU KEBIJAKAN PENDIDIKAN:
  - APA persoalannya? (ingat Error tipe-III)
  - APA solusinya? (pilihan dari hasil pengembangan opsi)
  - BAGAIMANA ketepatan rancangan dan implementasinya?
  - BAGAIMANA ketepatan monev & pengendaliannya?

05	Kamis 02-04-020	Formulasi Dan Pengesahan/Legitimasi Kebijakan Penidikan	DK-1 Daring

Substansi Materi

- Konsep dasar Formulasi kebijakan
- Model, tipologi, formulasi kebijakan
- Proses formulasi kebijakan
- Proses formulasi kebijakan

TEMA:
Formulasi Dan Pengesahan/Legitimasi Kebijakan Penidikan

Materi ini adalah suatu materi yang sudah dibuat/disusun oleh kelompok I, sudah dikoreksi tgl.12-03-020 seharusnya sudah diperbaiki dan dikirim tanggal 20 maret 2020 ke email rusdiana@gmail.com:

Materi ini befungsi sebagai penguatan materi Diskusi Kelompok I:

Bagi Kelompok I:

- Materi ini befungsi sebagai penguatan, pembading dan mungkin sebagai bahan masukan perbaikan makalah

Bagi Kelompok II-III-IV-V-VI-VII:

- Untuk dijadikan bahan koreski/masukan dalam menanggapi makalah kelompok I.

Keterangan:

*) Peunjuk/informasi proses diskusi daring, tunggu di WAG

I. Konsep Dasar

Formulasi Kebijakan ?

Definisi - 1

- Keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, pengaturan tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam sistem politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan atau implementasi, monitoring dan peninjauan kembali/umpan balik (Udoji; dalam Solichin Abdul Wahab, 1997:17) .

Formulasi Kebijakan ?

Definisi - 2

- Langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan → sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang.
- Formulasi kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. (Menurut Anderson, dalam Winarno, 2007 : 93)

www.fppt.info

Tujuan dari mempelajari model formulasi kebijakan

1. Menyederhanakan dan memperjelas pemahaman tentang politik dan kebijakan publik;
2. Mengidendfikasi aspek-aspek penting dalam masalah kebijakan;
3. Membantu kita berkomunikasi dengan pihak lain mengenai hal-hal penting dalam kehidupan politik;
4. Mengarahkan upaya kita untuk lebih memahami kebijakan publik dengan mengenali apa yang penting dan yang tidak penting;
5. Memberikan penjelasan mengenai kebijakan publik dan memprediksi konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan.

www.fppt.info

II. Model-Model

MODEL FORMULASI KEBIJAKAN

MENCAKUP 2 KLASIFIKASI

(Nicholas Henry)

1. PROSES

   Menggambarkan bagaimana suatu kebijakan / policy dibuat (ber-proses)

   Bersifat DESKRIPTIF

   Mis : Model INSTITUSIONAL/KELEMBAGAAN
   Model ELITE-MASSA
   Model KELOMPOK
   Model SISTEM POLITIK

2. HASIL / AKIBAT (OUTPUT)

   Menunjukkan cara-cara bagaimana meningkatkan mutu / kualitas isi, hasil & akibat dari suatu kebijakan.

   Bersifat PRESKRIPTIF

   Mis : Model RATIONAL & COMPREHENSIVE
   Model INCREMENTAL
   Model PENGAMATAN TERPADU

1

Model Elite--Massa

Model Elit-Massa (1)

Kebijakan sebagai Preferensi Elite

Rakyat dibuat apatis dan miskin informasi sehingga elitlah yang membentuk pendapat umum serta kebijakan mengalir dari elit ke massa melalui administrator-administrator (pejabat pemerintah, birokrat).

Masyarakat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok kecil (*elit*) yang mempunyai kekuasaan dan kelompok besar (*massa*) yang tidak mempunyai kekuasaan. Hanya elit yang menentukan kebijakan sedangkan massa tidak menentukan kebijakan

Kelompok kecil yang memerintah pada umumnya mempunyai kedudukan sosial ekonomi yang tinggi.

Model Elit-Massa(2)

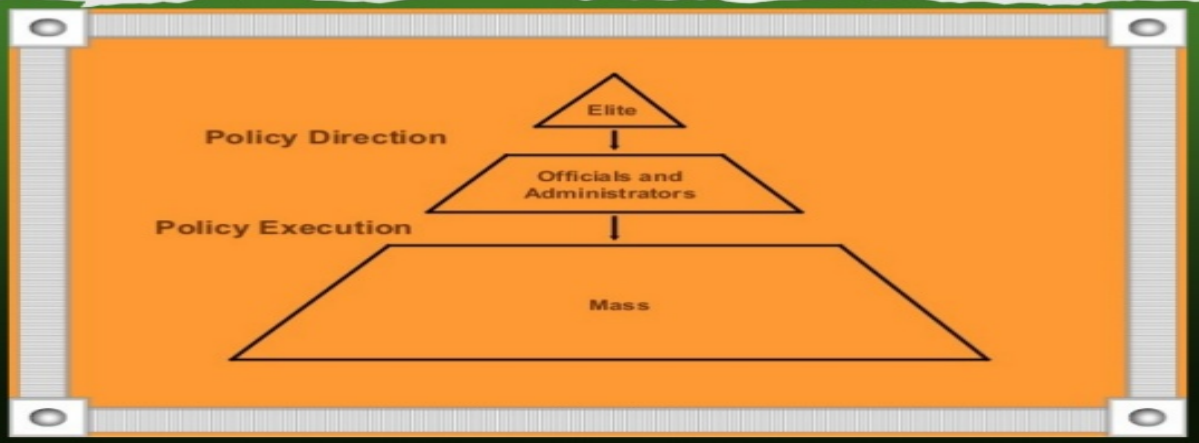

www.fppt.info

2

Model Kelompok

Model Kelompok

Kebijakan akan bergerak ke arah yang diinginkan kelompok yang memenangkan pengaruh, dan menjauh dari kelompok yang kehilangan pengaruh.

Peran individu akan menjadi penting dalam kancah politik, hanya jika individu tersebut merupakan bagian dari, atau bertindak atas nama kelompok.

1

kebijakan = keseimbangan *(equilibrium) kelompok.*

Kelompok → jembatan antara individu dan pemerintah.

Peran sistem politik = mengatasi konflik dalam kelompok melalui

- *1) membuat aturan main di kelompok;*
- *2) menyusun upaya kompromi dan menyeimbangan kepentingan;*
- *3) menerapkan kompromi dalam kebijakan publik, dan*
- *4) melaksanakan upaya kompromi dalam kebijakan publik.*

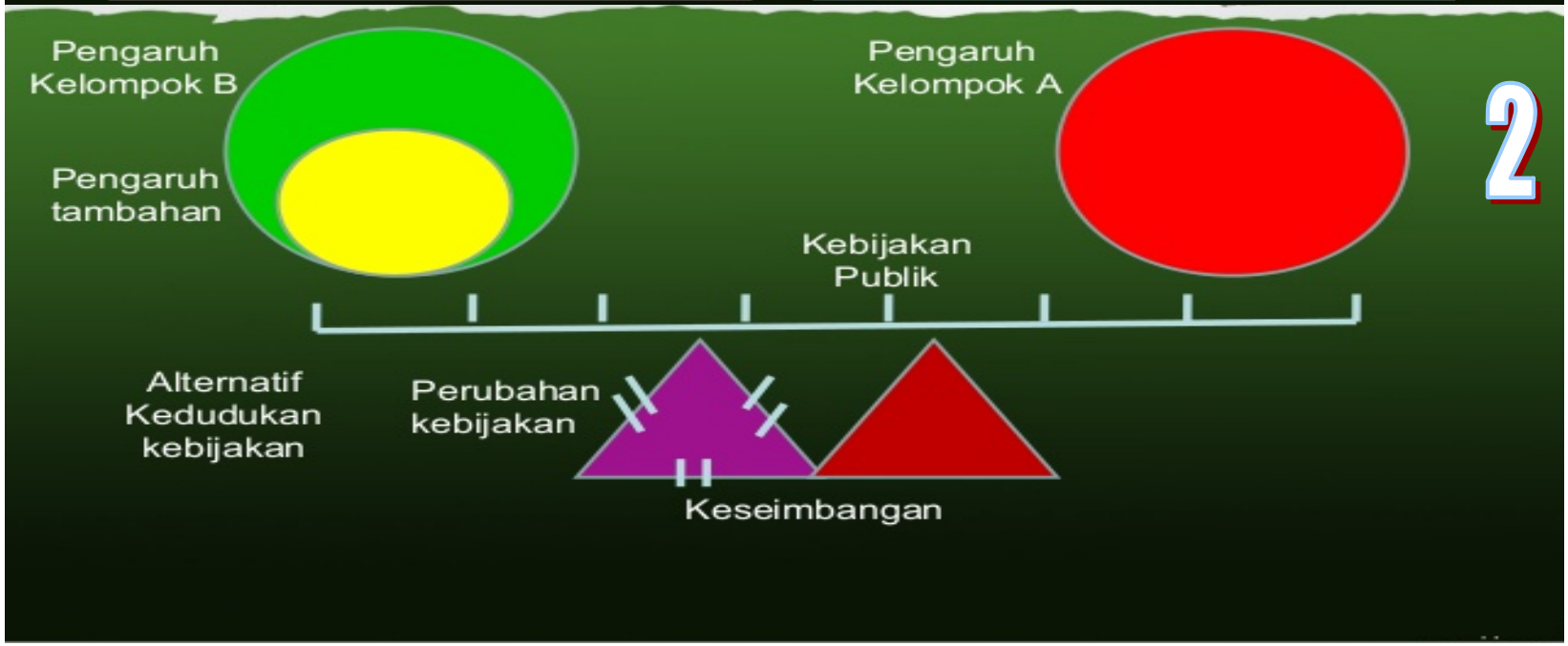

2

3

Model Rasionalisme

Model Rasional (1)

Model mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai maximum sosial gain yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat.

Model ini mengatakan bahwa proses formulasi kebijakan haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya, yaitu memperbandingkan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Dengan kata lain model ini mengedepankan pada aspek efisiensi atau aspek ekonomis.

Model Rasional (2)

Bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus memperhitungkan rasionalistas costs yang benefitsnya bagi masyarakat melalui cara-cara :

- Mengetahui pilihan-pilihan dan kecenderungan-kecenderungan yang diinginkan oleh masyarakat
- Menemukan pilihan-pilihan kebijakan yang mungkin untuk diimplementasikan
- Menilai perbandingan perhitungan untung-rugi yang akan diperoleh apabila kebijakan itu diimplementasikan
- Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien dan ekonomis.

www.fppt.info

4

Model Inkremental

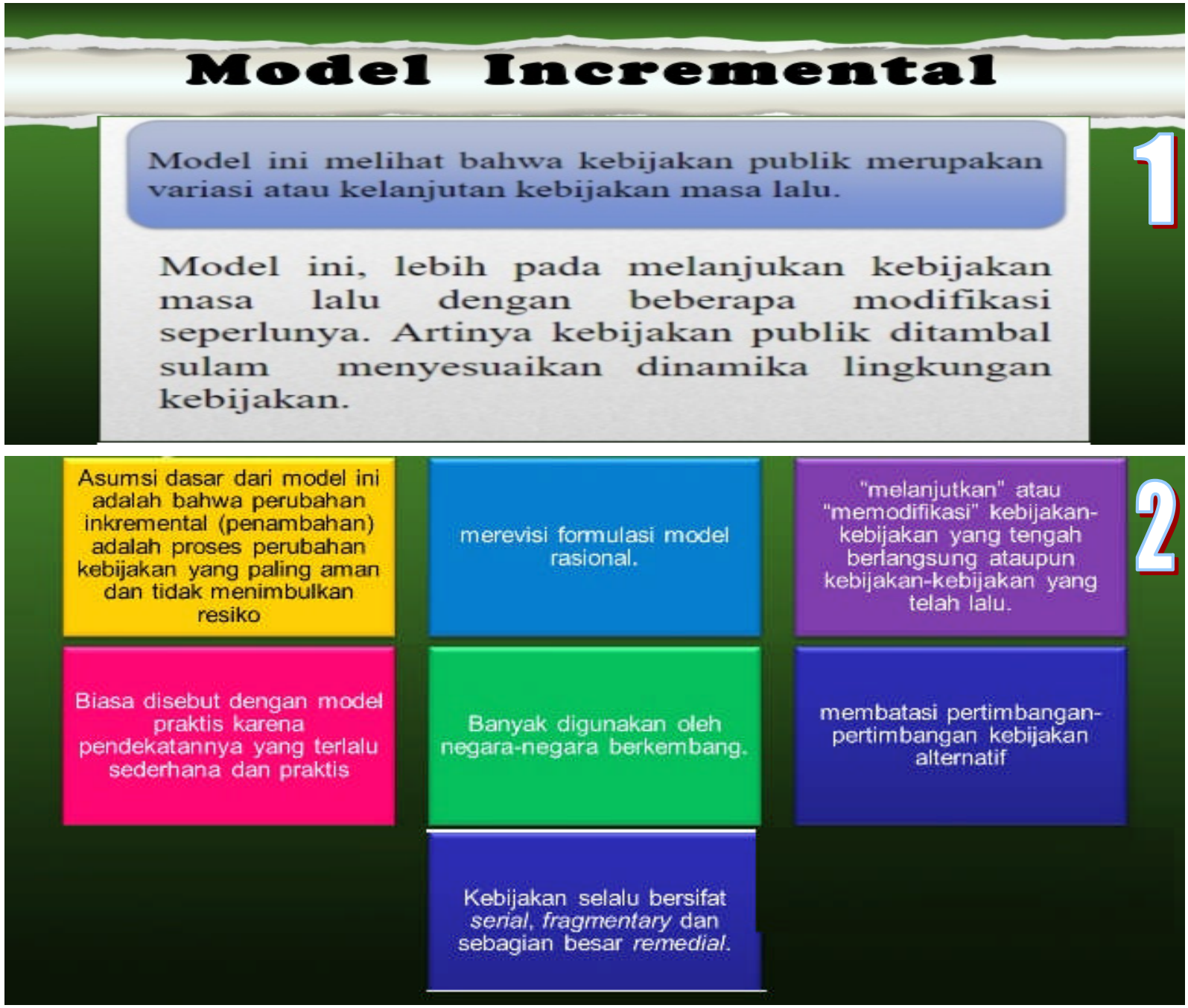

Alasan penggunan incremetal

alasan

1. Mereka tidak punya cukup waktu, informasi dan dana untuk meneliti semua alternatif kebijakan yang ada.
2. pembuat kebijakan menerima legitimasi kebijakan sebelumnya dikarenakan ketidakpastian konsekuensi dari kebijakan yang benar-benar bam atau berbeda.
3. Mungkin investasi pada program yang ada sangat besar, sehingga perubahan radikal tidak dianggap perlu dilakukan.
4. Inkrementalisme berguna secara politis. Kesepakatan akan mudah dicapai dalam pengambilan keputusan jika hal yang dipertentangkan hanyalah menambah atau mengurangi anggaran, atau memodifikasi program yang ada. Konflik akan muncul pada saat memutuskan kebijakankebijakan besar. Inkrementalisme disini berguna untuk menurunkan tingkat konflik, mempertahanakan stablitas,dan memelihara sistem politik itu sendiri.
5. Dengan tidak adanya tujuan atau nilai-nilai sosial yang disepakati, maka akan lebih mudah bagi pemerintah di masyarakat yang majemuk untuk melanjutkan program yang sudah ada, daripada merancang program-program tertentu.

Policy Increment
Past Policy Commitments
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000

5

Model Pengamatan Terpadu (Mixed Scanning)

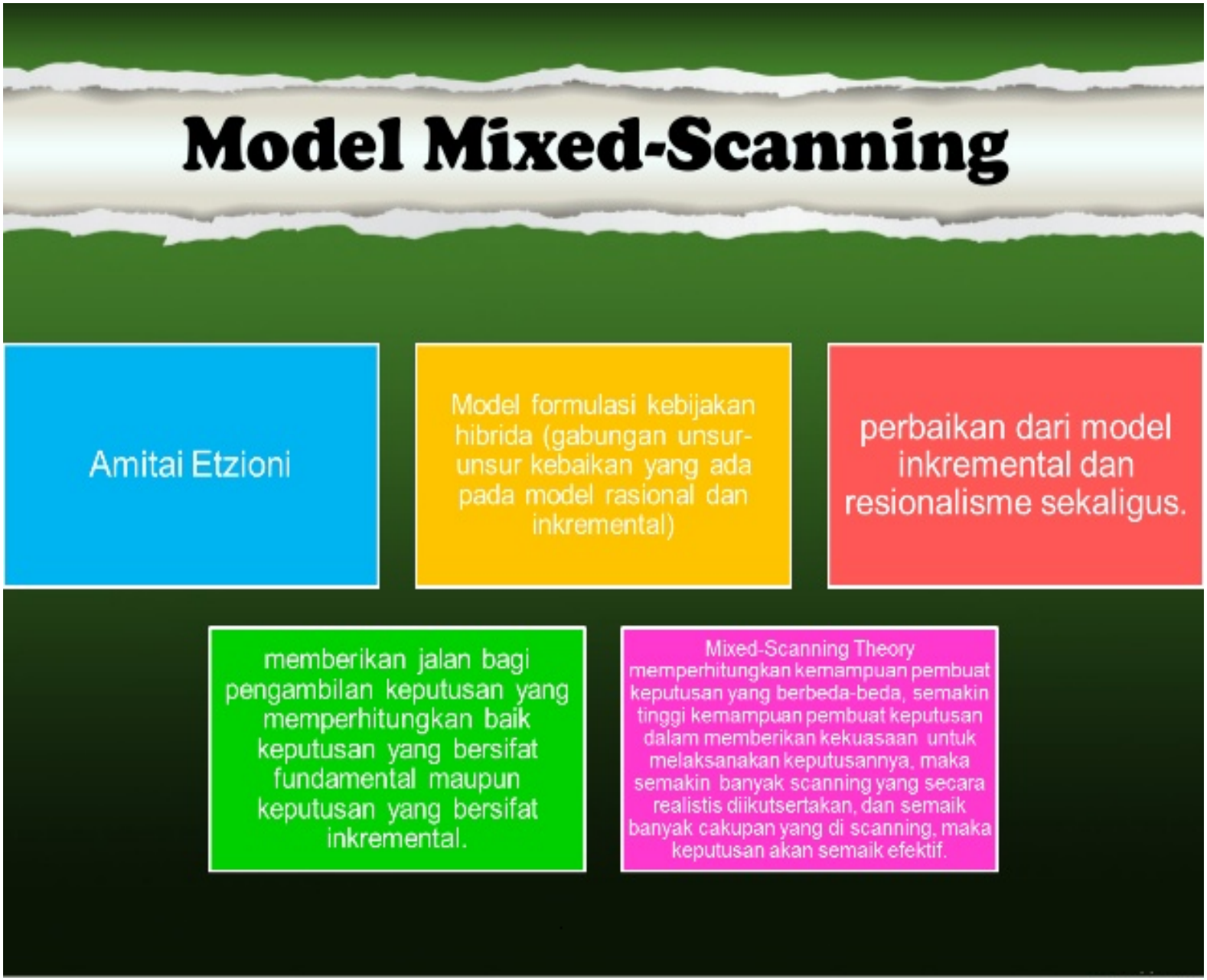

6

Model Kelembagaan

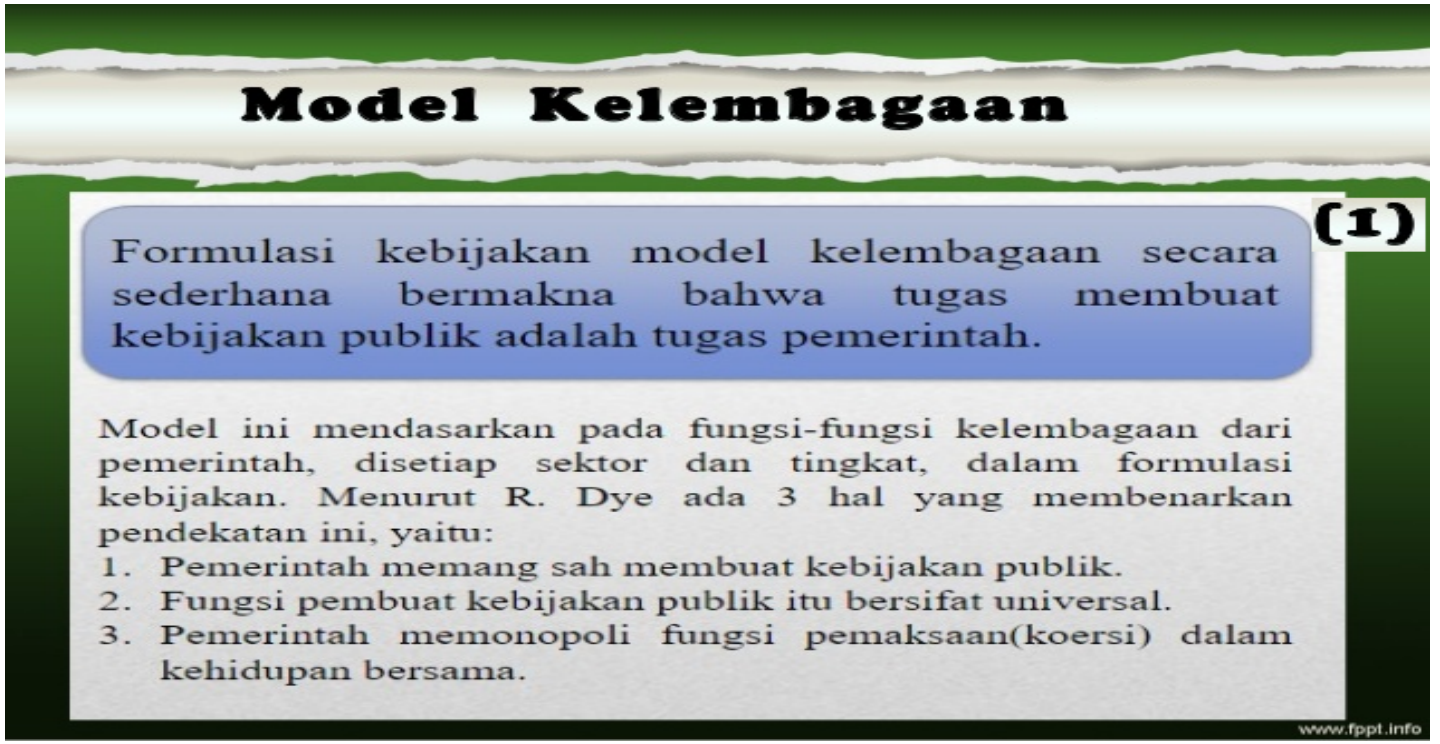

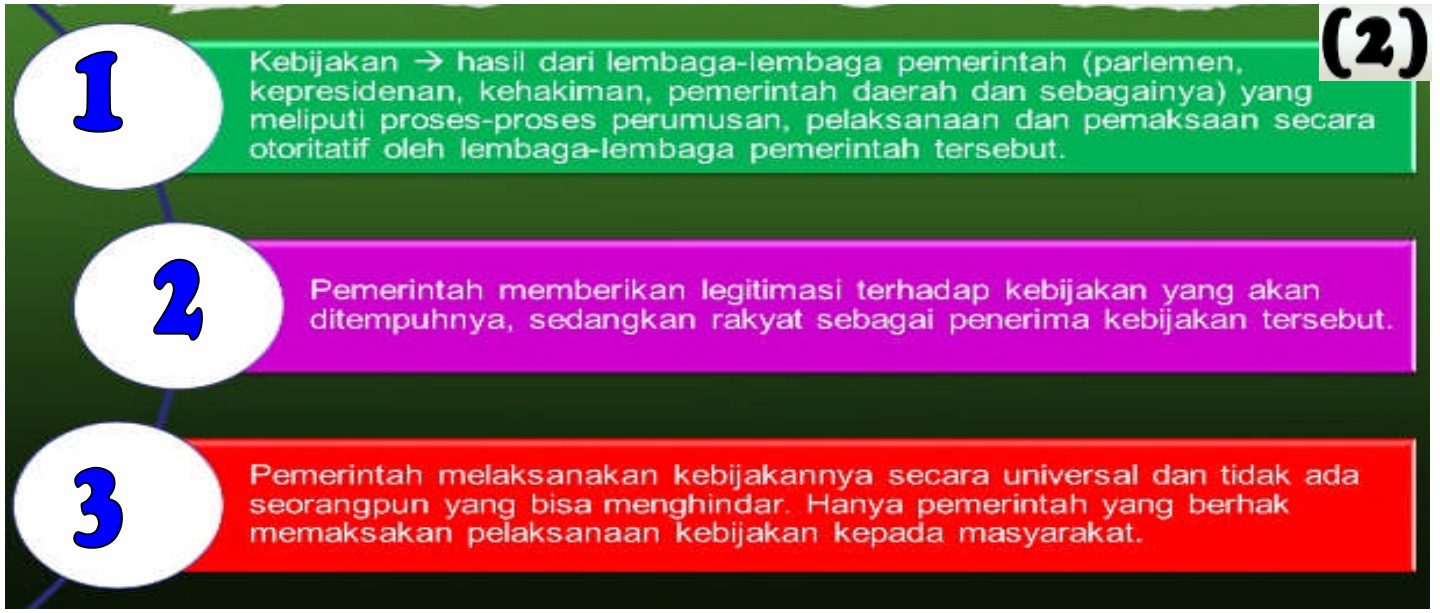

7

Model
Teori Permainan

Model Teori Permainan

1. Menurut model ini, strategi, yang mengacu pada pembuatan keputusan yang rasional dimana serangkaian tindakan dirancang untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan mempertimbangkan pilihan-pilihan kebijakan di tengah situasi yang rumit
2. Dilakukan pengaturan strategi agar kebijakan yang ditawarkan pada pengambil keputusan lain dapat diterima, khususnya oleh para penentang.
3. Pengaturan/pemilihan strategi menjadi hal yang paling utama karena jika tidak, maka tidak banyak didukung oleh para pengambil keputusan.

Model Pilihan Publik

1. Kebijakan yag dibuat oleh pemerintah haruslah kebijakan yang memang berbasis pada *Publik choices* (pilihan publik mayoritas).
2. Asumsinya dalam negara yang demokratis yang mengedepankan one-men-one-vote, maka siapa yang dapat menghimpun suara terbanyak dialah yang akan menjadi pemegang kekusaan/keputusan.
3. Kebijakan yang mayoritas merupakan konstruksi teori kontrak sosial, sehingga ketika kebijakan akan diputuskan akan sangat tergantung pada preferensi publik atas pilihan-pilihan yang ada.
4. Ketika ada satu pilihan dari banyak pilihan yanmg ditawarkan oleh pemerintah dipilih oleh mayoritas publik/warga negara, maka serta merta pilihan publik itulah yang menjadi kebijakan.

8

Model
Pilihan Publik

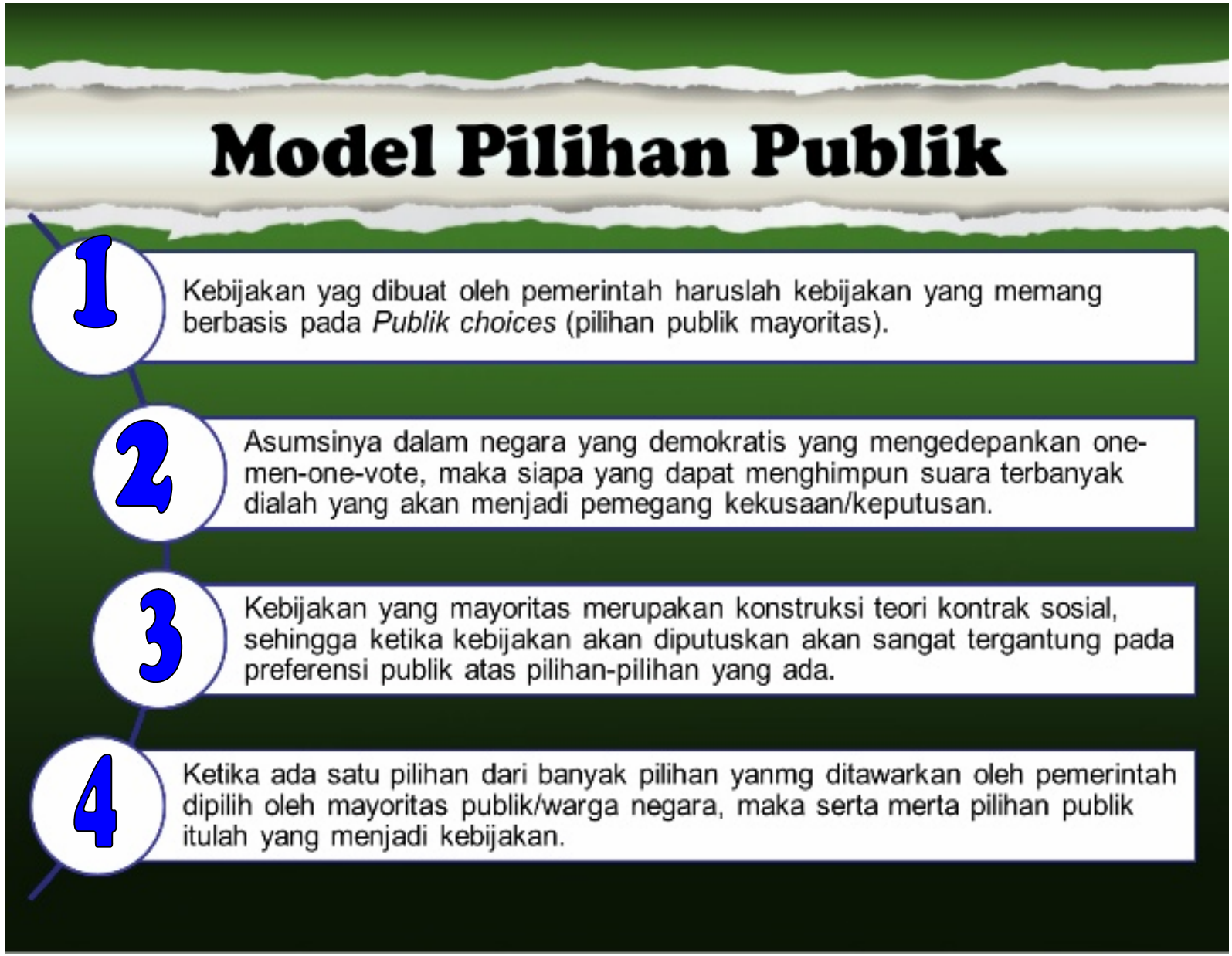

9

Model Demokratis

Model Demokratis

Model ini biasanya diperkaitkan dengan implementasi *good governance* bagi pemerintah an yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan, para konstituen dan pemanfaat diakomodasi keberadaannya.

www.fppt.info

10

Model Strategis

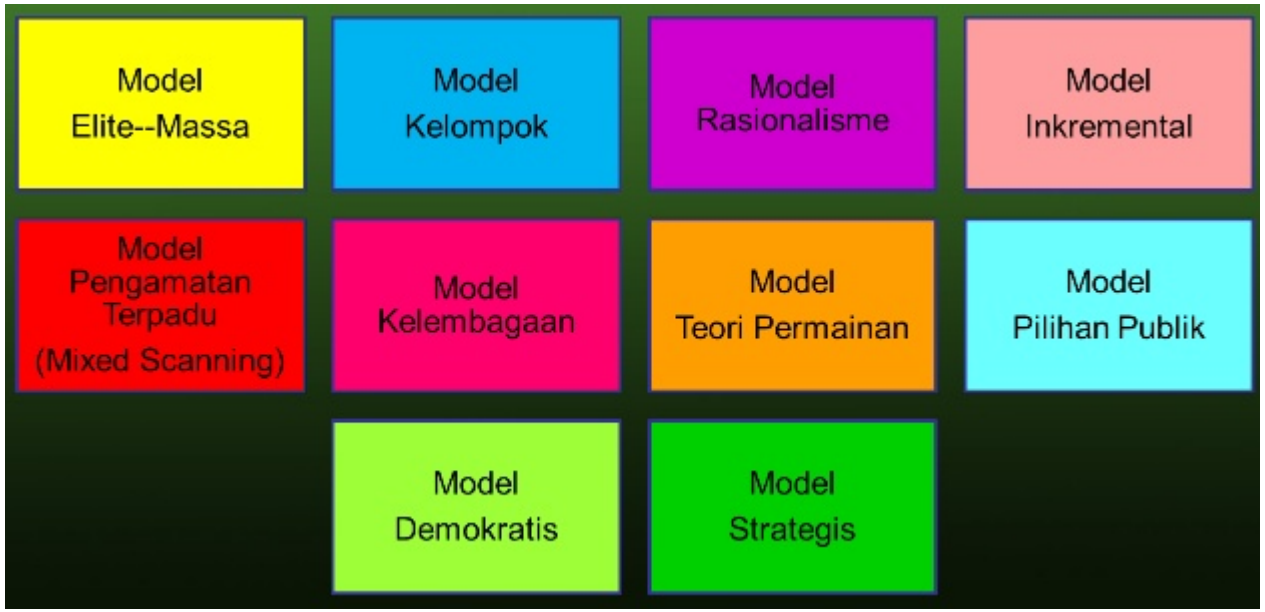
Model
Elite--Massa
Model
Kelompok
Model
Rasionalisme
Model
Inkremental
Model
Pengamatan
Terpadu
(Mixed Scanning)
Model
Kelembagaan
Model
Teori Permainan
Model
Pilihan Publik
Model
Demokratis
Model
Strategis

III. Proses

Tahap-Tahap Formulasi Kebijakan
Winarno (2002:80-84) membagi tahapan Formulasi kebijakan publik menjadi empat tahap, yaitu: perumusan masalah, (defining problem); agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan tahap penetapan kebijakan.
Identifikasi Masalah
1
Melaksanakan pengidentifikasian atas masalah-masalah yang ada
Agenda Setting
2
Memutuskan isu-isu yang hendak diselesaikan
Perumusan Kebijakan
3
Menuangkan isu-isu yang hendak diselesaikan dalam sebuah draft kebijakan
Legitimasi Kebijakan
4
Mencari dukungan politik agar dapat diterima dan direalisasikan
Implementasi Kebijakan
Pelaksanaan Keputusan politik yang telah ditetapkan
Evaluasi Kebijakan
Melakukan studi evaluasi atas program mulai dari output, outcome, hingga rekomendasi penyempurnaan kebijakan
www.fppt.info

MANA MODEL YG. PALING SESUAI ?

SEBELUM MEMILIH MODEL, MAKA TENTUKAN LEBIH DAHULU HAL-HAL BERIKUT :

1. Kompleksitasnya isu atau permasalahan;

2. Ketersediaan sumber daya , khususnya kompetensi SDM dan waktu.

PERUMUSAN KEBIJAKAN UNTUK NEGARA BERKEMBANG

ADA 5 (LIMA) TIPE AGENDA KEBIJAKAN DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG , YAITU :

- ***Rutin***; *tipe ini adalah tentang isu tahun demi tahun.*
- ***Berubah***; *negara berkembang diberi nama "berkembang" karena misi utamanya adalah untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik.*
- ***Krisis***; *tentang krisis ekonomi, keuangan, sosial dan politik yg. dipicu oleh sebab domestik dan global.*
- ***Konflik***; *tipe tentang konflik horizontal, konflik etnik yg. berkembang menjadi konflik vertikal yg. kadang-kadang berbenturan dengan keyakinan (agama, budaya, dan kebiasaan).*
- ***Tidak jelas***; *karena dunia dilanda krisis tanpa kecuali.*

www.fppt.info

Implementasi Formulasi Kebijakan

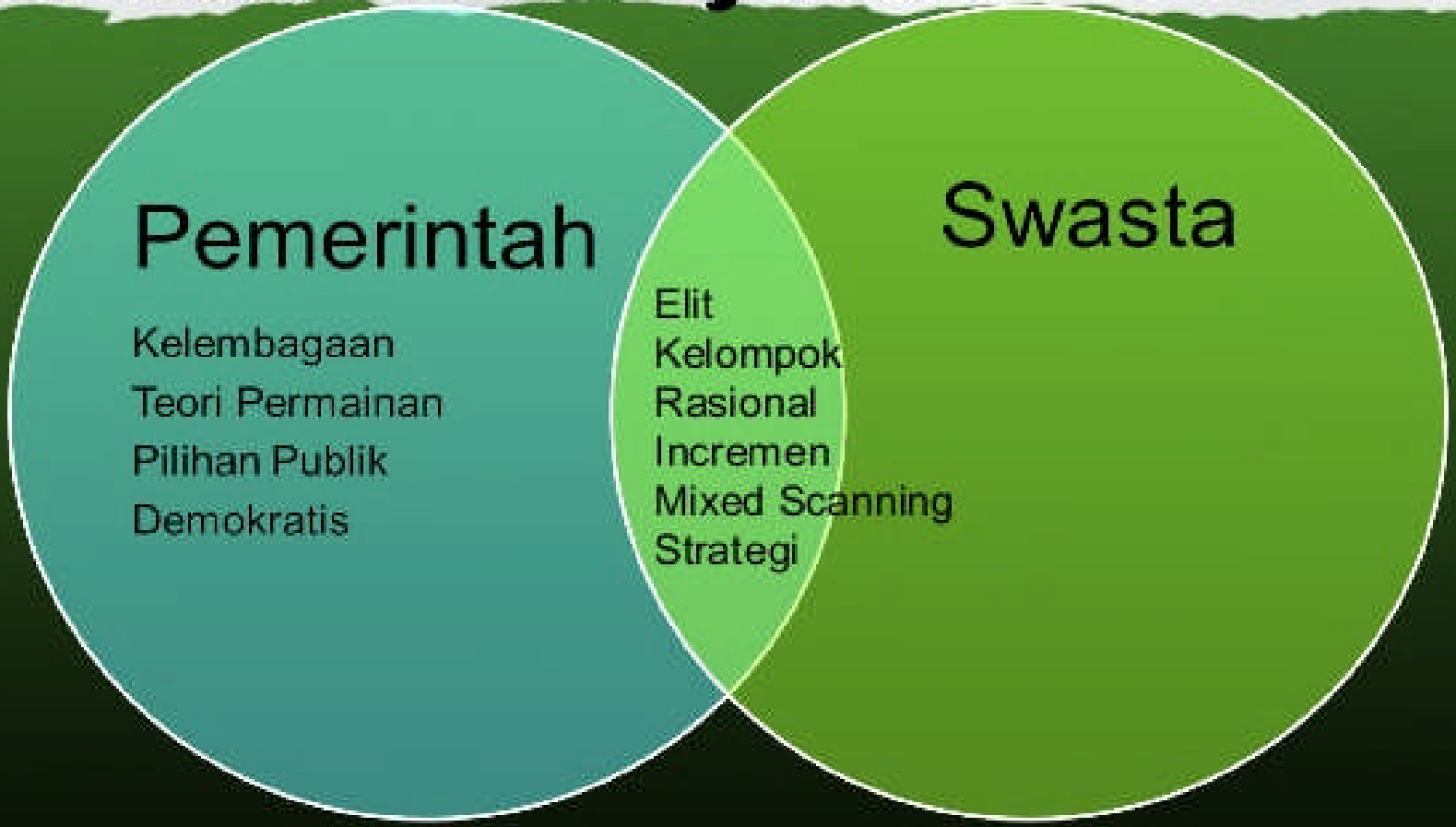

www.fppt.info

Level Kebijakan di Pemerintah Indonesia

Kebijakan Level Strategis

- ialah kebijakan yang bersifat nasional , berorientasi pada masyarakat luas, bersifat jangka panjang dan menyeluruh.

Kebijakan Level Operasional

- ialah kebijakan yang merupakan bagian dari kebijakan level strategis. Ini menggambarkan cara-cara jangka pendek mencapai tonggak dan menjelaskan bagaimana, atau apa sebagian, rencana strategis akan dimasukkan ke dalam operasi selama periode operasional yang diberikan

Pemerintah
Level Strategis
Level Operasional
• Kelompok
• Rasional
• Incremental
• Mixed Scanning
• Kelembagaan
• Teori Permainan
• Pilihan Publik
• Demokratis
• Strategi
• Rasional
• Mixed Scanning
• Pilihan Publik
• Demokratis

LEVEL STATEGIS

Level Strategis (1)

Model Kelompok

- Dalam pengambilan kebijakan masih terlihat berbagai kepentingan kelompok Fraksi yang bermain menetukan kebijakan Publik di Indonesia

Model Rasionalisme

- dalam pengambilan kebijakan level strategis , Pemerintah memperhitungkan manfaat yang akan diperoleh masyarakat umum, keuntungan dan kerugiannya

Model Inkrementasi :

- karena melihat kebijakan merupakan variasi atau kelanjutan masa lalu. Misalnya salah satu dasar dalan penetapan RPJMN periode berikutnya, adalah hasil yang dicapai dalam RPJMN periode sebelumnya.

Model Mixed scanning :

- Karena model ini gabungan model rasional dan inkrementalis dalam membuat kebijakan llevel strategis karena ada situasi dimana dalam menentukan kebijakan level strategis yang bersifat peralihan. (dari masa pemerintahan baru ke pemerintahan lama)

Level Strategis (2)

Model Kelembagaan :

- karena pada model ini kebijakan dibuat oleh Pemerintah dan bersifat universal

Model Teori Permainan

- Karena pada Model ini, dilakukan pengaturan strategi agar kebijakan yang ditawarkan pada pengambil keputusan lain dapat diterima

Model Pilihan Publik:

- Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah haruslah kebijakan yang memang berbasis pada *Publik choices* (pilihan publik mayoritas).

Model Demokratis :

- pada model ini pengambilan keputusan harus mengambil suara sebanyak mungkin dari stakeholder. Penetapan kebijakan level strategis, dimana bersifat nasional diperlukan masukan yang banyak dari stakeholder sehingga menghasilkan kebijakan yang bermanfaat

Model Strategi

- runtutan rumusan strategis sebagai basis perumusan kebijakan.

LEVEL OPERASINAL

Level Operasional (1)

Model Rasionalisme

- Bagaimana kebijakan operasional yang dibuat harus memperhitungkan rasionalistas costs ang benefitsnya bagi masyarakat, terutama kebijakan yang mungkin untuk diimplementasikan.

Model Mixed scanning

- Karena kebijakan operasional yang akan diformulasikan menggabungkan unsur-unsur kebaikan yang ada pada model rasional dan inkremental

Level Operasional (2)

Model Kelembagaan

- Karena tugas membuat kebijakan operasional juga merupakan tugas pemerintah. Hasil dari lembaga-lembaga pemerintah (parlemen, kepresidenan, kehakiman, pemerintah daerah dan sebagainya) yang meliputi proses-proses perumusan, pelaksanaan dan pemaksaan secara otoritatif oleh lembaga-lembaga pemerintah tersebut.

Model Demokratis

- Karena merupakan implementasi dari good governance yang mengamanatkan bagi pemerintahan agar dalam membuat kebijakan operasional para konstituen dan pemanfaat diakomodasi keberadaannya

Model Yang paling SESUAI di Indonesia

Model Kelembagaan

Model Demokratis

Formulasi Kebijakan di Swasta (1)

Model Elite

- Pada swasta pemegang saham sebagai kelompok kecil (elit) yang memiliki kekuasaan dan hanya kelompok elit yang menentukan kebijakan.

Model Kelompok

- Dalam model ini beberapa kelompok yang berkepentingan berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Dalam swasta jika saham dipegang oleh publik, maka dalam implementasi suatu kebijakan harus akan bergerak ke arah yang diinginkan kelompok yang memenangkan pengaruh, dan menjauh dari kelompok yang kehilangan pengaruh.

Model Rasionalisme

- Sebagai profit oriented pihak swasta pasti akan melakukan penilaian/perbandingan untung rugi yang diperoleh apabila kebijakan tersebut diimplementasikan. Swasta akan memilih alternatif kebijakan yang paling efisien dan ekonomis.

Model Yang paling SESUAI bagi Swasta

Model Strategi

Model Teori Permainan

CONTOH KETERLIBATAN (1)

Penyusunan Perda KIBBLA di Kota Depok

- Penyusunan Perda ini menggunakan Formulasi Kebijakan sebagai berikut :
  - Model Rasional, karena disusun dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
  - Model Kelembagaan, karena dalam hal ini Pemerintah Daerah memang yang bertanggung jawab dalam mewujudkan Kesehatan Ibu dan Anak yang optimal
  - Model Demokratis, karena dalam hal ini Perda disusun dalam rangka implementasi Good Governance

CONTOH KETERLIBATAN (2)

Level Strategis

- pada penyusunan Perda KIBBLA, kami ikut terlibat dalam proses sebagai berikut :
  - Penyusunan Agenda Setting
  - Identifikasi Stakeholder
  - Pendekatan Stakeholder terkait
  - Perumusan Strategi kebijakan
  - Penyusunan Naskah Akademik
  - Pembahasan dengan Legislatif sampai dengan Pengesahan PERDA

Level Operasional

- pada penyusunan Perda KIBBLA, kami ikut terlibat dalam proses sebagai berikut :
  - Penyusunan program kerja
  - Penyusunan anggaran untuk mendukung program
  - Koordinasi stakehodler internal dan eksternal
  - Melakukan sosialisasi Perda
  - Melakukan pengawasan dan Monev implementasi Perda

REFERENSI

- Sholihin Abdul Wahab,1991, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Impelementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press
- Amitai and Etzioni, Eva.(1964). *Social Change, Sources, Patterns and. Consequences.* New York, London: Basic Books
- Ace Suryadi dan HAR Tilaar, 1983, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sutjipto, 1987, *Analisis Kebijaksanaan Pendidikan Suatu Pengantar*, IKIP Padang, Padang.
- Checkland, Peter and Scholes, Jim, 1990, *Soft Systems Methodology in Action*, John Wiley & Sons, England.
- Rusdiana A, 2015. *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke imlentasi*. Bandung Pustaka Setia.
- http://digilib.uinsgd.ac.id/view/creators/Rusdiana=3AA=2E=3A=3A.html

YU KULIAH

Part: VI

SOSIALISASI & KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

www.fppt.info

Substansi Materi

2.Konsep dasar Sosialisasi&komunikasi kebijakan

2.Pentingnya SosKom kebijakan

3.Model SosKom kebijakan

4.Identifikasi SosKom Kebijakan

TEMA ini:

Sosialisasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan

Materi ini adalah suatu materi yang sudah dibuat/disusun oleh kelompok II, sudah dikoreksi tgl.12-03-020 seharusnya sudah diperbaiki dan dikirim tanggal 20 maret 2020 ke email rusdiana@gmail.com:

Materi ini befungsi sebagai penguatan materi Diskusi Kelompok I:

Bagi Kelompok II:

•Materi ini befungsi sebagai penguatan, pembading dan mungkin sebagai bahan masukan perbaikan makalah

Bagi Kelompok I-III-IV-V-VI-VII:

•Untuk dijadikan bahan koreski/masukan dalam menanggapi makalah kelompok II.

Keterangan Khusus tentang Paper Kelompok:

1) Paper Kelompok I-II-III-IV-V-VI-VII: segera kirimkan ke email rusdiana@gmail.com. Dengan kentuan:

a. Pengiriman: Paper ke-1 dan Piper ke-2 (setelah perbaikan). Setiap kalimat, paragraf dan sejeisnya yang diperbaiki atau redaksi baru (tambahan) diberi warna merah.

b. Pengiman ke email, menggunakan Fail *Microsof Office Word* (jagngan mengirim PDF). Apabila sudah megirim hibauan ini abaikan.

2) Peunjuk/informasi proses diskusi daring, tunggu di WAG

Konsep Dasar

Sosialisasi & Komunikasi Kebijakan

Definisi - 1 Sosialisasi

Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita. (George Herbert Mead, 1972).

Sosialiasai & Komunikasi Kebijakan

Definisi - 2-3. Komunikasi Pendidikan

Komunikasi sebagai suatu proses berbagi (*sharing process*), Schrarmm menguraikan demikian: “Komunikasi berasal dari kata-kata (bahasa) latin *communis* yang berarti umum (*common*) atau bersama. Apabila kita berkomunikasi, sebenarnya kita sedang berusaha menumbuhkan suatu kebersamaan (*commoness*) dengan seseorang.Yaitu kita berusaha berbagi informasi, ide, atau sikap”. Wilbur Schrarmm (Suprapto, 2006)

www.fppt.info

Batasan

Sosialisasi & Komunikasi Kebijakan

Dalam konteks implementasi kebijakan, pada dasarnya, sosialisasi memberikan dua kontribusi:

1. memberikan dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat.
2. memungkinkan lestarinya suatu masyarakat, karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu

Adapun komunikasi menurut Gonzalez, (Imron, 2008), adalah suatu proses, yang dalam proses tersebut partisipan bertukar tanda-tanda informasi dalam suatu waktu.

Tanda-tanda informasi tersebut data saja bersifat verbal, non verbal, dan paralinguistik.

Hakikat dari komunikasi kebijakan pendidikan adalah sosialisasi atas rumusan-rumusan kebijakan pendidikan yang sudah dilegitimasikan. Sebagai komunikatornya adalah para aktor perumusan kebijakan pendidikan, sedangkan sebagai komunikannya adalah para pelaksana kebijakan pendidikan beserta dengan perangkat dan khalayak pada umumnya.

lantas

Apa yang disosialisasikan & dikomunikasikan?

- Unsur-unsur komunikasi digambarkan Alo Liliweri (2009), antara lain:
  - Pengirim (sender) atau sumber (source) atau komunikator adalah individu, kelompok, atau organisasi yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah orang.
  - Penyandian (encoding), yakni proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang.
  - Pesan (message) merupakan pesan yang merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator.
  - Media adalah saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikan.

II. Alasan Pentingnya SosKom kebijakan

1.Agar khalayak memahami lebih dalam

Kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan harus senantiasa dikomunikasikan secara terus-menerus kepada khalayak, agar khalayak memahaminya lebih dalam.Sebab, tidak diterimanya suatu kebijakan tersebut, bisa jadi bukan karena kebijakan yang dirumuskan tersebut kurang aspiratif, melainkan terutama karena belum dipahaminya secara mendalam oleh khalayak.

2. Menghindari kesalahan pemahaman

Kontinuitas komunikasi sangat penting, jika kita sadari bahwa tidak semua hal yang dikomunikasikan oleh komunikator itu senantiasa dapat dicerna persis oleh komunikan. Kesalahan pemahaman inilah, yang seringkali menjadi penyebab tidak tersosialisasikannya suatu rumusan kebijakan yang sudah sah tersebut.Bahkan, tidak mendukungnya mereka yang terikat oleh kebijakan, terhadap kebijakan yang sah bisa disebabkan salahnya pemahaman akibat kurangnya komunikasi.

III. Model-Model Komunikasi kebijakan

Model komunikasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, adalah sebagai berikut:

1. Model Komunikasi Kebijakan Satu Arah

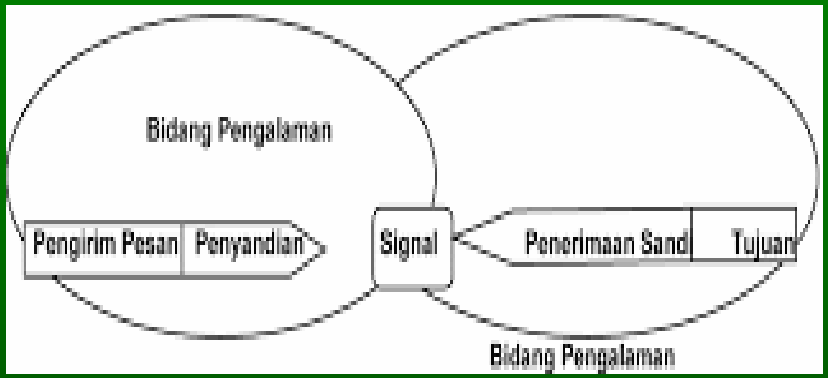

GBR: 1 Model Komunikasi Schraumn yang satu Arah (Ruben, 1988)

Model komunikasi satu arah ini mempunyai aliran yang berlawanan, ialah dari bawah ke atas. Model komunikasi kebijakan demikian, dikenal dengan *bottom up*. Dan Model Pendekatan *Top-Down.* Menurut pandangan George C. Edwards III (1980) dalam **Subarsono (2008**), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

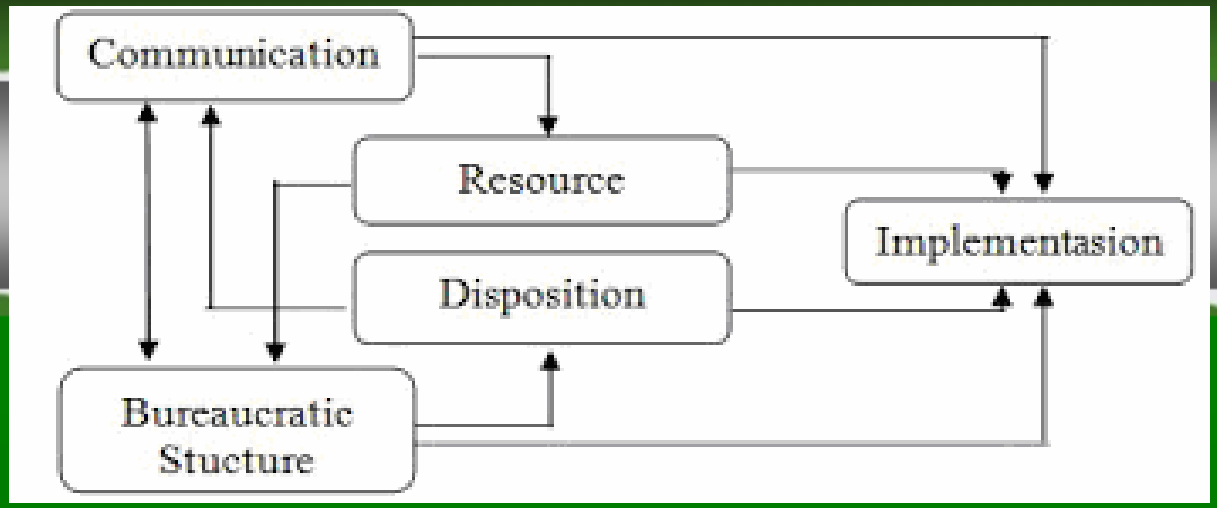

GBR. 2. Model Komunikasi George C. Edwards III (1980)

1. **Komunikasi. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu di komunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.**
2. **Sumber daya. Sumberdaya adalah faktor penting untuk mplementasi kebijakan agar efektif.**
3. **Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.**
4. **Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.**

Model *bottom up* adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus. Parsons (2006), mengemukakan bahwa yang benarbenar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Pendekatan *bottom up* menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.

2. Model Komunikasi Kebijakan Dua Arah

Komunikasi dua arah, dapat juga berupa komunikasi yang konsultatif, di mana sumber pesan dengan penerima pesan memberikan kontribusi yang seimbang. William J. Seiler (1988), memberikan model komunikasi dua arah dan bersifat lebihuniversal. Model tersebut adalah seperti terdapat pada gambar 6.2. berikut

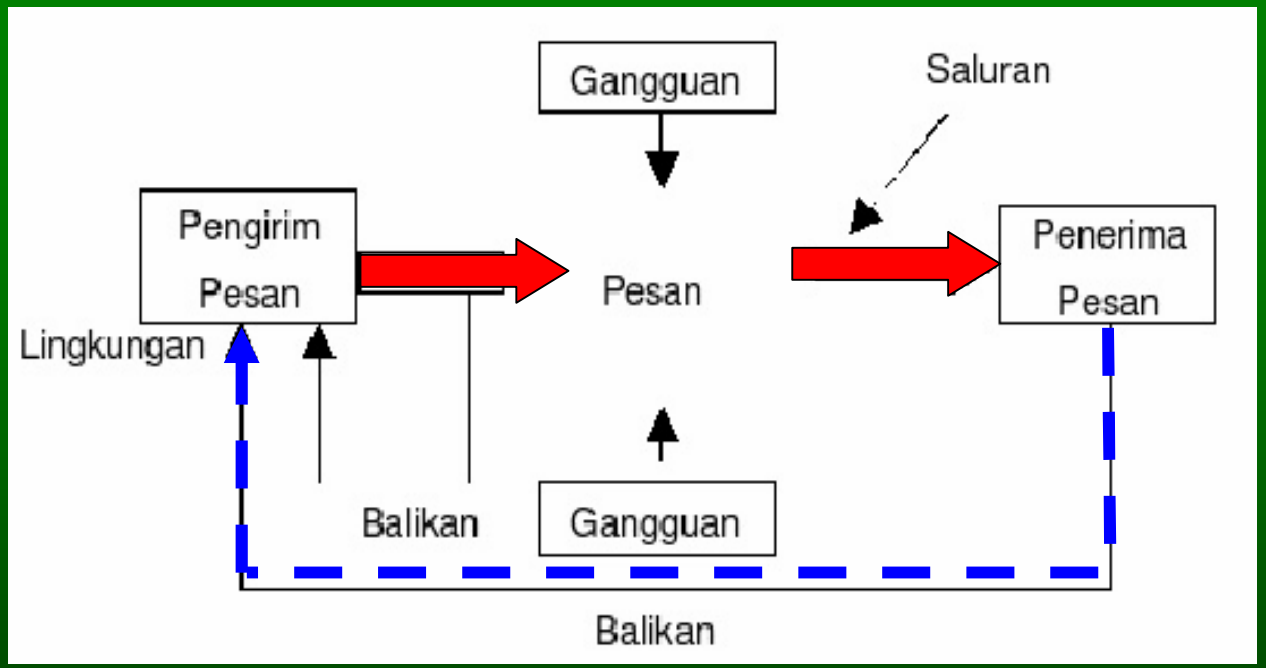

GBR.3. Model Komunikasi Dua arah
Sumber: William J. Seiler, 1988. (Arni Muhammad. 1989: 5)

3. Model Komunikasi Kebijakan Multi Arah

Menurut model komunikasi transaksi, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan khalayak sasarannya, sama-sama aktif dalam proses komunikasi. Dengan demikian, pesan-pesan kebijakan tersebut dapat dicerna persis oleh mereka.

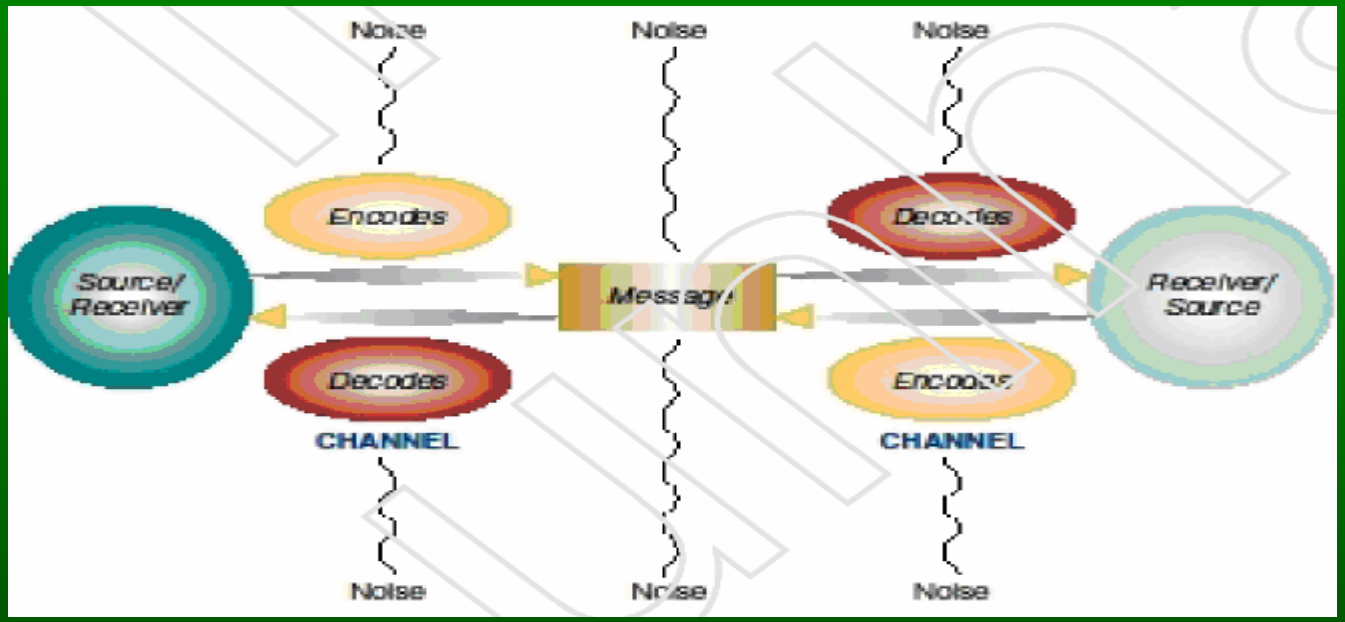

Gambar 6.2.
Model Komunikasi Transaksional
Sumber: Sherwyn P. Morreale, Brian H. Spitzberg, J. Kevin Barge dalam buku Human *Communication: Motivation*, *Knowledge, and Skills* (200 7:11).

IV. Analisis Masalah Komunikasi kebijakan

1. Problema yang bersumber dari komunikator

1. Kurang ahlinya komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan, sehingga kebijakan pendidikan yang rumusannya jelas, bisa tidak jelas karena tidak disampaikan dengan baik oleh komunikatornya.
2. Komunikator mempunyai referensi yang berbeda dengan komunikan dalam banyak hal.berbedanya referensi ini bisa menjadi penyebab taktepatnya jargon-jargon yang dipakai oleh komunikator dalam menyampaikanpesan-pesan kebijakan pendidikan, dari visi komunikan.
3. Kurangnya kredibilitas komunikator di mata komunikan. Kredibilitas komunikator, meliputi banyak hal, mulai dari tingkat ketokohannya di masyarakatnya (di mata komunikan), perilaku dan sikapnya, serta kemampuan aktingnya.

2. Problema yang bersumber dari Pesannya

1. Pesan itu sendiri, ialah rumusan kebijakannya tidak begitu jelas. Ketidakjelasan rumusan ini terjadi sebagai akibat dari banyaknya kompromi dan upaya konsensus yang dilakukan oleh para aktor pada saat merumuskan kebijakan. Jika rumusan kebijakan itu tidak jelas, maka akan ditangkap komunikator secara tidak jelas, lebih-lebih jika disampaikan kepada komunikan atau khalayak, akan tertangkap tidak jelas lagi.
2. Sebagai rumusan kebijakan yang baru dan belum mengkhalayak,bisa jadi rumusan kebijakan tersebut dirasakan asing oleh khalayak. Karena dirasakan asing, memberikan peluang bagi munculnya penolakan dari komunikan. Sebab, seberapa pun kadarnya, komunikan pasti telah punya referensi mengenai banyak hal.Referensi yang telah ada dalam dirinya tersebut, bisa menjadipenyebab resistensinya terhadap hal-hal yang baru, terlebih dengan hal-hal yangasing.
3. Sebagai akibat dari komprominya banyak aktor dalam merumuskankebijakan, tidak jarang rumusan kebijakan tersebut sangat ideal dan kurangrealistik. Ini bisa menjadi penyebab komunikan yang menerima pesan darikomunikator tersebut apatis, karena menganggap apa yang disampaikan oleh komunikator sekedar isapan jempol. Misalnya saja, rumusan kebijakan yang terlalu ambisius dan tidak mungkin dapat dilakukan.

3. Problema yang bersumber dari komunikannya

1. Heterogennya komunikan. *Heterogenitas* komunikan ini, bisa dalam hal tingkatan pendidikannya, ragam etnik, kepercayaan dan agamanya, dan ragam simbol-simbol yang dipakai dalam kehidupannya.Heterogenitas komunikan ini, menjadikan penyebab sulitnya mencari “bahasa” yang cocok untuk mereka.
2. Penyesuaian penyampaian pesan berdasarkan mereka yang berada di strata atas, tentu menjadi penyebab tidak dipahaminya pesan-pesan tersebut oleh rakyat kebanyakan, sementara jika menyesuaikan dengan mereka yang tingkatannya rendah, bisa dianggap tak berbobot oleh mereka yang berada di tingakatan atas.
3. Adanya pengetahuan sebelumnya dari pihak komunikan yangberbeda sama sekali dengan pesan-pesan kebijakan yang baru saja ia terima. Seleksi yang dilakukan ini bisa menjadi penyebab diterimanya kebijakan tersebut secara sepotong-sepotong dan tidak utuh.Tidak utuhnya penerimaan atas rumusan kebijakan bisa menjadi penyebab kelirunya pemahaman seseorang mengenai kebijakan.

REFERENSI

Utama

Arni Muhammad. 1989. *Komunikasi Oganisasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Imron, Ali. 2008. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suprapto, Tommy. 2009. *Pengantar Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI).

Said Zainal Abidin, 2006. *Kebijakan Publik,* Jakarta: Suara Bebas,

Joko Widodo, 2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aolikasi Analisis Proses Kebijakan Publik,* Malang: Bayumedia Publishing,

A. Rusdina, 2015 *Kebijkan Pendidikan*. Bandung Pustaka setia

(Tersedia di digilib dan dan WEB. http://arusdian.id/2020/04/07/menghadapi-kecemasan-berlebihan/) tomatis dengan diglib UIN

Anjuran

Sherwyn P. Morreale, Brian H. Spitzberg, J. Kevin Barge 2007. Human Communication: Motivation, Knowledge, and Skills.

Buku Kebijakan Pendididkan tersedia di

YU KULIAH

Part: VII

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

www.fppt.info

TEMA:
IMPLEMENTASI Kebijakan Penidikan

Materi ini adalah suatu materi yang sudah dibuat/disusun oleh kelompok III, sudah dikoreksi tgl.12-03-020 seharusnya sudah diperbaiki dan dikirim tanggal 20 maret 2020 ke email rusdiana@gmail.com:

Materi ini befungsi sebagai penguatan materi Diskusi Kelompok I:

Bagi Kelompok III:

•Materi ini befungsi sebagai penguatan, pembading dan mungkin sebagai bahan masukan perbaikan makalah

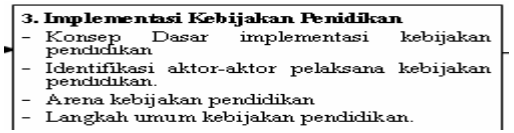
3. Implementasi Kebijakan Penidikan
- Konsep Dasar implementasi kebijakan pendidikan
- Identifikasi aktor-aktor pelaksana kebijakan pendidikan.
- Arena kebijakan pendidikan
- Langkah umum kebijakan pendidikan.

Bagi Kelompok I-II-IV-V-VI-VII:

•Untuk dijadikan bahan koreski/masukan dalam menanggapi makalah kelompok III.

Keterangan:

*) Peunjuk/informasi proses diskusi daring, tunggu di WAG dusahakan sebelum UTS

Substansi Materi

A-Konsep dasar Implementasi Kebijakan

B-Identifikasi Aktor/pelaksana

C-Arena Kebijakan Pendidikan

D-Langkah umum Kebijakan Pendidikan

3. Implementasi Kebijakan Penidikan
- Konsep Dasar implementasi kebijakan pendidikan
- Identifikasi aktor-aktor pelaksana kebijakan pendidikan.
- Arena kebijakan pendidikan
- Langkah umum kebijakan pendidikan.

A. KONSEP DASAR IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

DEFINISI

Definisi-1

Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. (Wododo, (2007)

Definisi-2

Kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi". (Wahab, 1997).....Suatu kebijakan……>

.....>

Suatu kebijakan setidak-tidaknya memuat empat komponen, yaitu:

1) Merupakan serangkaian tindakan yang sengaja dan benar-benar dilakukan
2) Dilakukan oleh seseorang atau sekelompok aktor
3) Adanya suatu masalah atau pesoalan tertentu yang dihadapi
4) Dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu

Definisi-3

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Coba tulis untuk jawaban; melalui PEMIKIRAN ANDA BAGAIMANA….?

“.....”

Hal ini yang sering anda mendapat koment …pahit…

Pentingnya Implementasi Kebijakan

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh.

Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Anda pasti terkecoh membaca kalimat “Pentingnya”…. Cari kata sepadan yang tepat

www.ippt.info

Model-Model Implementasi Kebijakan

Untuk mengkaji suatu implementasi kebijakan publik (termasuk kebijakan Pendidikan), maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan.

Ada beberapa model-model implementasi kebijakan seperti: model Van Meter&Horn; Mazmain&Sabatater; Hoog Wood&Gun; Gogin; Grindle, dsb. Lebih kuran ada 10 Model. **Buka** laman> https://adoc.tips/contoh-contoh-teori-gambar-1-model-implementasi-kebijakan-me.html. Namun kali ini yang saya sajikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

Edward III, melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktorfaktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward III menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

(a) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?

(b) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

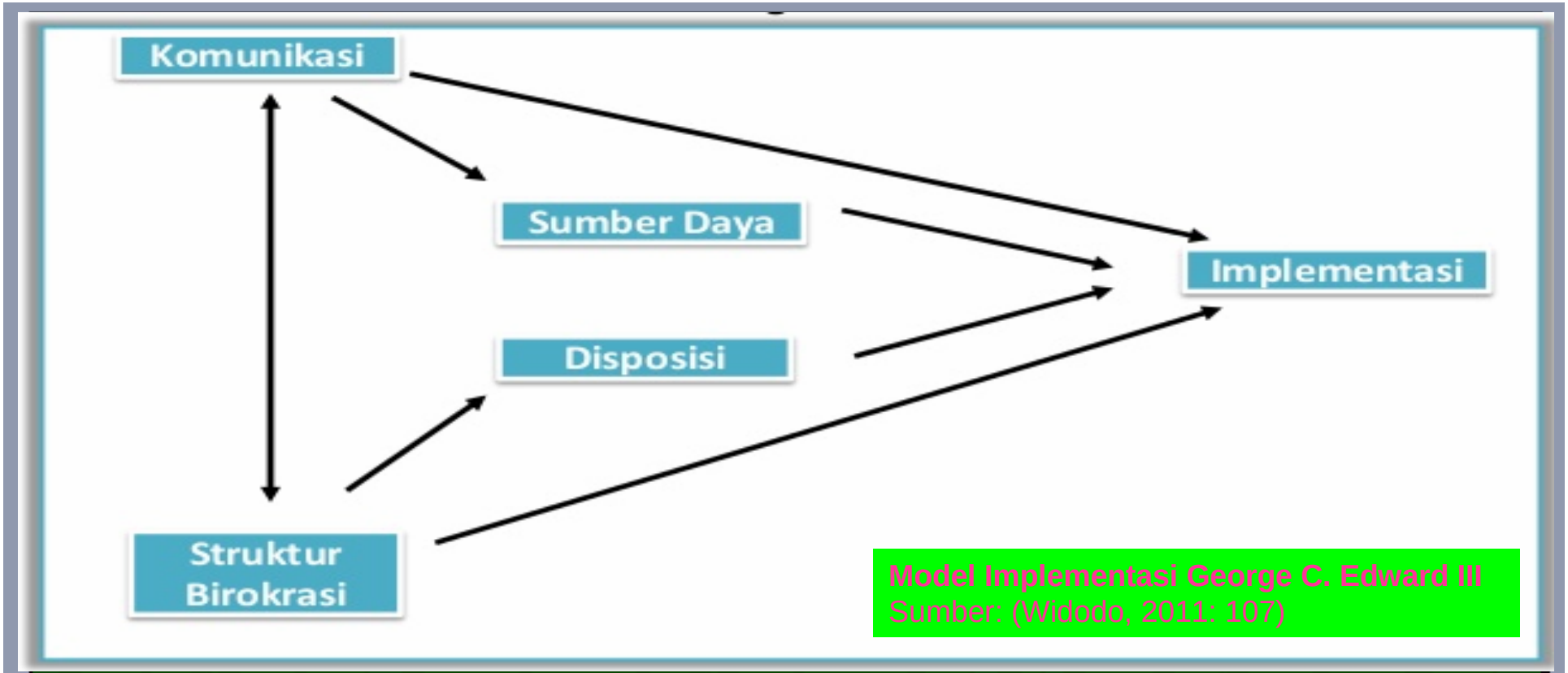

Model Implementasi George C. Edward III
Sumber: (Widodo, 2011: 107)

1. Komunikasi (*Communication)*

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors)*

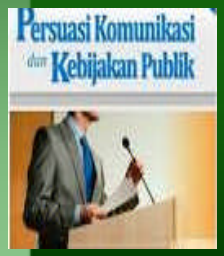

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu; tranformasi informasi (*transimisi)*, kejelasan informasi (*clarity)* dan konsistensi informasi (*consistency). ……,,,,>
>>>>…… **2. Sumber Daya (Resources)**

www.fppt.info

2. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (*Staff)*

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

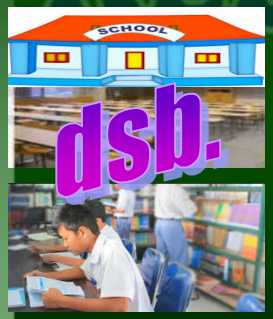

b. Fasilitas (facility)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

>……c. Informasi……..>

c. Informasi dan Kewenangan (Information and Authority);

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

SURAT EDARAN
Nomor: B-392/Un.05/II.4/HM.01/03/2020
TENTANG
TINDAK LANJUT KEBIJAKAN AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK
PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA

Kepada Yth.
1. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana
2. Para Kepala Lembaga dan Ketua Pusat
3. Para Kepala Biro dan Kepala Bagian
4. Sivitas Akademika
di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia no. 697/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: B-352/Un.05/II.4/HM.01/03/2020, tanggal 15 Maret 2020 tentang Kebijakan Akademik dan Non-Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung terkait Pencegahan Penyebaran Virus Corona; dan memperhatikan kondisi darurat bencana wabah virus corona yang saat ini sedang terjadi, dengan ini kami sampaikan bahwa:

Anda harus Kuliah Daring ini kebijakannya

informasi/kebijan menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3. Disposisi (Disposition)

Disposoisi:..>Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan/aktor berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan:..> kejujuran dan komitmen yang tinggi.

Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Siapa yang jadi AKTOR dlm konteks ini.....?

aktor

www.fppt.info

4. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)

Struktur birokrasi/TUSI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu: mekanisme dan birokrasi.

a. **Mekanisme,** dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.
b. **Birokrasi,** birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas menjadi tidak fleksibel.

Apa saja yang termasuk SOP ?

Apa saja yang termasuk BIROKRASI ?

www.fppt.info

B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Identifikasi Aktor/Pelaksana

Actor (Aktor/pelaksana)

Secara konseptual actor atau pelaku dan perumus kebijakan publik. Di Indonesia adalah perumus kebijakan itu sendiri (legislatif: DPR dan MPR), pemerintah (eksekutif: Presiden), badan administratif (Menteri Kabinet), dan peserta non-struktural (partai politik, interest groups, tokoh maupun perorangan).

Perwujudan kebijakan pemerintah (bidang pendidikan) dikategorisasikan menjadi 2 bentuk:

1. **Terwujud dalam bentuk peraturan pemerintah seperti: GBHN, TAP MPR, UU tentang pendidikan, PP, dan seterusnya.**

2. Terwujud dalam bentuk sikap pemerintah, terutama dari Menteri Pendidikan Nasional yang meliputi sikap formal yang dituangkan melalui SK atau Permen, dan sikap non-formal seperti komentar, pernyataan, atau anjuran tentang segala hal yang berkaitan dengan pendidikan nasional **(Assegaf, 2005)**

Tentunya, dalam pembentukan segala jenis peraturan pemerintah dan sikap formal pemerintah, tidaklah berjalan tanpa aturan.

Coba Anda Renungkan sejenak:

Seandainya Dosen tidak membuat intruksi dan coment dalam GCr, tidak membuat informasi dalam WAG kelas, akan bagaima jadinya pekerjaan/jawaban anda dalam LK-GCr…?

Landasan Kebijakan Para Actor (Aktor/pelaksana) dlm pembuatan kebijakan

Di Indonesia, pembuatan kebijakan publik telah diatur dalam UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (UU P3). Mekanisme pembuatan kebijakan tersebut terbagi dalam tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundang-undangan, dan penyebarluasan (Sirajuddin dkk, 2007). Tentunya kebijakan publik yang dimaksud juga meliputi kebijakan pendidikan yang berada dalam ranah publik.

Kualifikasi Para Actor (Aktor/pelaksana) perumusan kebijakan

Aktor-aktor perumusan kebijakan negara Arif Rohman (2012), megelompokan menjadi: aktor utama perumusan kebijakan pendidikan dan aktor non utama. Aktor utama lazim disebut aktor resmi dan aktor struktural. Sebaliknya selain aktor utama disebut sebagai aktor non utama, tidak resmi dan non struktural. Yang termasuk aktor utama dalam perumusan kebijakan pendidikan antara lain:

1. **Legislatif** sering dimaksudkan sebagai pembentuk perundangundang dan perumus kebijakan dalam suatu sistem politik. Para perumus kebijakan tersebut mempunyai sebutan yang berbeda-beda pada kebanyakan negara. Ada yang disebut parlemen, ada yang disebut DPR, MPR.

2. Eksekutif **...**

www.fppt.info

3. **Eksekutif;** dalah pelaksana undang-undang. Sungguh pun sebagai pelaksana, eksekutif juga berperan dalam perumusan kebijakan. Selain alasan-alasan yang dikemukakan di atas, ada alasan lain mengapa eksekutif juga berperan dalam perumusan kebijakan. Yaitu, bahwa agar kebijakan yang dibuat atau dirumuskan oleh legislatif dapat dilaksanakan sesuai dengan faktor kondisional dan situasional, eksekutif biasanya merumuskan kembali kebijakan yang dibuat oleh legislatif dalam bentuk kebijakan jabaran

4. **Administrator;** Maksudnya Administrator tertinggi masing-masing departemen/ kementerian (dalam hal ini adalah Menteri) dikenal sebagai pembantu eksekutif, membidangi masing-masing bidang yang di departementalisasikan. Dengan sendirinya, ia mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dengan departemennya.

Dengan demikian, secara meterial administrator tersebut mempunyai kewenangan untuk merumuskan, meskipun secara legalitas yang menetapkan adalah jajaran yang berada di atasnya: legislatif dan eksekutif.

5. **Partai politik;** adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintah agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggota lainnya dalam jajaran kabinet pemerinyah. **Fungsi partai politik**: sebagai wahana pendidikan politik, sosialisasi politik, pemilihan pemimpin-pemimpin politik, pemaduan pemikiran-pemikiran politik, memperjuangkan kepentingan rakyat, melakukan tata hubungan politik, mengkritik rezim yang berkuasa, membina opini masayarakat, mengusulkan calon, memilih pejabat-pejabat yang akan diangkat, bertanggung jawab atas pemerintah, menyelesaikan perselisihan dan menyatukan pemerintahan.

6. **Interest group; atau kelompok kepentingan adalah suatu kelompok yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kepentingan sama. Kelompok ini berusaha mempengaruhi pengurus kebijakan formal. Kelompok ini berusaha agar kepentingan kelompoknya dapat terakomodasi dalam kebijakan yang dirumuskan oleh para perumus formal.**

7. **Organisasi masa;** **adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai cita-cita dan keinginan yang sama. Sifat organisasi in adalah non politis. Organisasi ini dapat berdiri atau independen dan dapat juga berafilisasi denbgan organisasi politik tertentu.**

8. **Perguruan Tinggi;** **adalah suatu lembaga di mana para elit akademikus berada. Dalam penyusunan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan, umumnya tidak pernah dikesampingkan. Ia memegang peranan penting, meskipun tidak berada dalam jajaran peserta perumusan kebijakan formal. Sebab, harapan-harapan, aspirasi-aspirasi dan masukan-masukan yang berasal dari masyarakat lewat berbgai macam saluran, umunya dimintakan pendapatnya kepada perguruan tinggi.**

9. **Tokoh perorangan dapat berasal dari berbagai bidang:** Agama, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, seni dan teknologi. Karena kapasitas pribadinya, tokoh perorang dapat saja memberikan gagasan-gagasan, pikiran-pikiran yang brilian bagi penyusunan kebijakan. Oleh karena tokoh perorangan ini umumnya langsung berhubungan dengan para perumus kebijakan formal, mereka dapat langsung menyampaiakan gagasan dan sumbangan pikiran.

C. Arena IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Arena Implementasi Kebijakan Pendidikan; Arena adalah suatu wahana, temapat dan gelanggang yang dipergunakan oleh para peserta implementasi kebijakan untuk memainkan perannya. Arena ini bisa di level strategik (nasional), dapat juga di level operasional dan teknikal. Di arena ini, para pelaksana implementasi kebijaksaan pendidikan dapat mempergunakan keweangan-kewenangan yang mereka miliki. Berkaitan dengan wewenang ini, Weber (dalam Abdulsyani, 2007:144), menggolongkannya pada tiga bagian:

Anda harus Kuliah Daring ini kebijakannya

1-Wewenang tradisional

2-Wewenang legal-rasional/birokrati

3-Wewenang kharismatik

wewenang tradisional, legal-rasional/birokratis, karismatik.

1-Wewenang tradisional

Kewenangan yang didasarkan atas tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

2-Wewenang legal-rasional/birokrati

Kewenangan yang didasarkan atas tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

3-Wewenang kharismatik

Kewenangan yang didasarkan atas adanya jalinan emosional para pengikut terhadap para pemimpinnya. Meskipun arena yang dipakai dalam implementasi Kebijakan tersebut lazimnya berupa birokrasi, tetapi dalam realitasnya kewenangan yang dipakai tidak sekedar monopoli kewenangan legal-rasional.

"Sungguhpun arena dalam implementasi kebijakan telah tersedia, tidak jarang hal-hal yang direkayasa melalui luar gelanggang tersebut juga ikut menentukan"(Weber, dalam Abdulsyani, 2007).

Apa maknanya perkatataan Weber tsb.?

Langkah-langkah/Tahapan

D. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan Pengesahan Peraturan Perundangan;
2. Pelaksanaan Keputusan Oleh Instansi Pelaksana;
3. Kesediaan Kelompok Sasaran Untuk Menjalankan Keputusan;
4. Dampak Nyata Keputusan Baik Yang Dikehendaki Atau Tidak;
5. Dampak Keputusan Sebagaimana Yang Diharapkan Instansi Pelaksana;
6. Upaya Perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses implementasi tersebut menurut Repley (1985) yang dikutif oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti,(2012;72). dapat terlihat seperti gambar sebagai berikut :

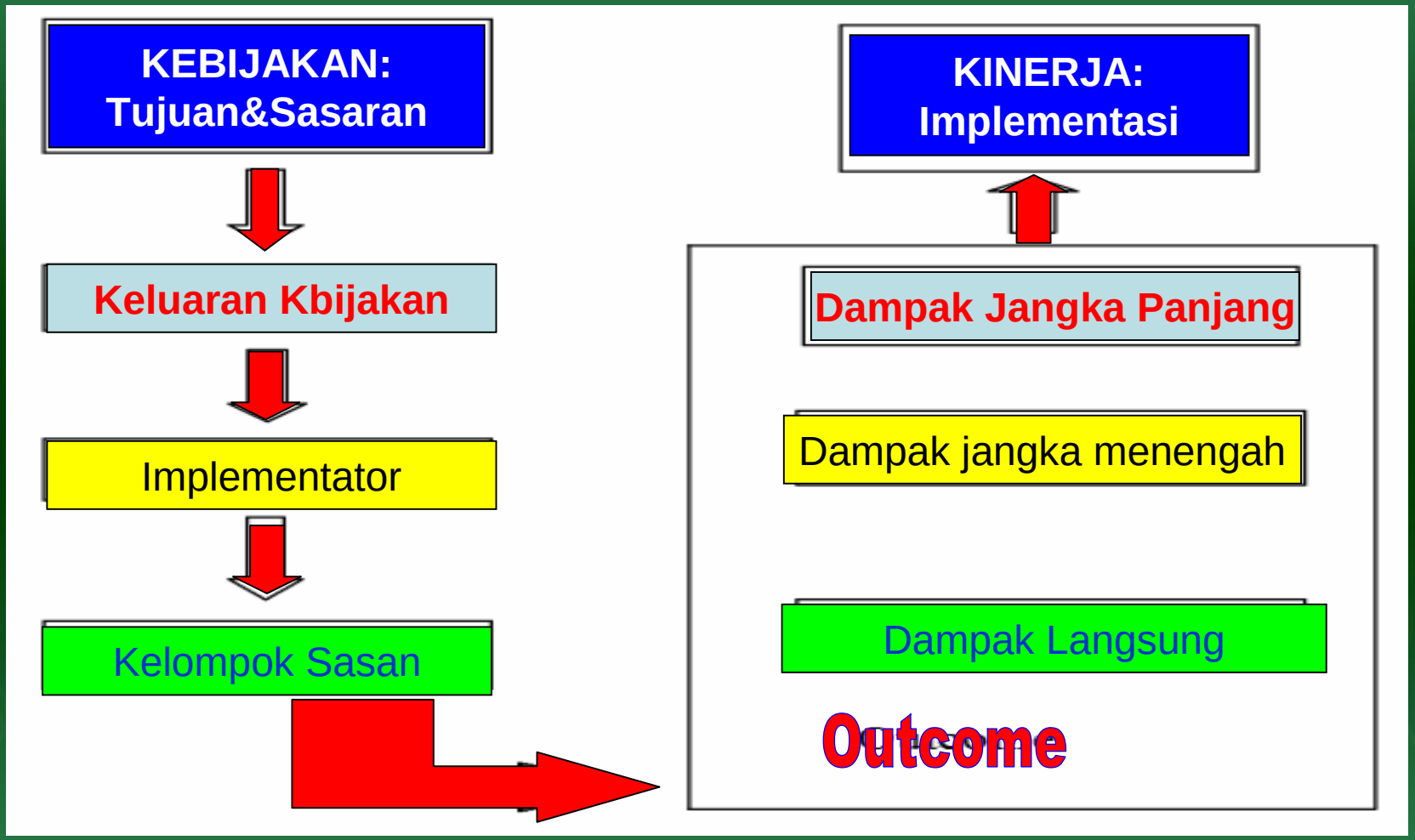

Gambar: Proses implenatasi Kebijakan Model Repley (1985)

Sumber: Purwanto dan Sulistyastuti, (2012;72).

www.fppt.info

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan yaitu:

1. Kondisi sosio ekonomi dan teknologi;
2. Dukungan publik;
3. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki oleh kelompok;
4. Dukungn dari pejabat tingkat atas;
5. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana.

Solichin Abdul Wahab (2001;93),

REFERENSI

- Arif Rohman, 2012. Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi .Yogyakarta: Aswaja Pressindo,
- Sholihin Abdul Wahab,1991, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Impelementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press
- Amitai and Etzioni, Eva.(1964). *Social Change, Sources, Patterns and. Consequences.* New York, London: Basic Books
- Ace Suryadi dan HAR Tilaar, 1983, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sutjipto, 1987, *Analisis Kebijaksanaan Pendidikan Suatu Pengantar*, IKIP Padang, Padang.
- Checkland, Peter and Scholes, Jim, 1990, *Soft Systems Methodology in Action*, John Wiley & Sons, England.
- Rusdiana A, 2015. *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke imlentasi*. Bandung Pustaka Setia. http://digilib.uinsgd.ac.id/ view/creators/ Rusdiana =3AA=2E=3A=3A.html
- Rusdiana A, 2014. Buku Ajar Kebijakan Pendidikan Tahun 2014: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30394

08	Kamis 23-04-020	Analisis Kebijakan Pendidikan	DK-1 Daring

YU KULIAH

Part: VIII

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

www.fppt.info

TEMA:
ANALISIS Kebijakan Penidikan

Materi ini adalah suatu materi yang sudah dibuat/disusun oleh kelompok III, sudah dikoreksi tgl.12-03-020 seharusnya sudah diperbaiki dan dikirim tanggal 20 maret 2020 ke email rusdiana@gmail.com:

Materi ini befungsi sebagai penguatan materi Diskusi Kelompok IV:

Bagi Kelompok IV:

•Materi ini befungsi sebagai penguatan, pembading dan mungkin sebagai bahan masukan perbaikan makalah

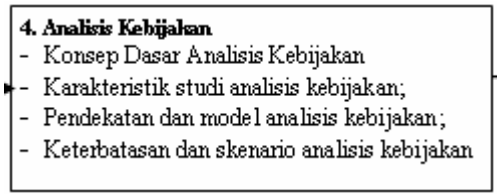

Bagi Kelompok I-II-III-V-VI-VII:

•Untuk dijadikan bahan koreski/masukan dalam menanggapi makalah kelompok IV.

Keterangan:

*) Peunjuk/informasi proses diskusi daring, tunggu di WAG dusahakan sebelum UTS. KAMIS, 30 APRIL 2030

Substansi Materi

- A-Konsep dasar Analisis Kebijakan
- B-Karakteristik Studi Analisis Kebijakan Aktor/pelaksana
- C-Pendekatan Model Analisis Kebijakan Pendidikan
- D-Keterbatasan&Skenario Analis Kebijakan

4. Analisis Kebijakan
- Konsep Dasar Analisis Kebijakan
- Karakteristik studi analisis kebijakan;
- Pendekatan dan model analisis kebijakan;
- Keterbatasan dan skenario analisis kebijakan

A. KONSEP DASAR ANALISIS KEBIJAKAN

1. DEFINISI ANALISI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Definisi-1

Analisis kebijakan menurut merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode *inquiri* dan argumentasi berganda untuk menghasilkan dan mendayagunakan informasi kebijakan yang sesuai dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat politis untuk memecahkan masalah kebijakan. (Dunn1981).

Pengertian tersebut tersebut mengandung dimensi rasional yaitu analisis yang menghasilkan informasi teknis; dan dimensi politik yaitu proses penentuan kebijakan melalui suatu perjuangan politik dari beberapa kelompok kepentingan berbeda.

.....>Definisi 2..>

.....>Definisi 2

…. Dalam konteks ini, Prasojo (2011), mendefinisikan "..kebijakan pendidikan merupakan suatu pertimbangan didasarkan pada sistem nilai serta beberapa faktor bersifat situasional. pertimbangannya dijadikan dasar untuk menyelenggarakan pendidikan bersifat melembaga.

Kebijakan pendidikan tentunya menjadi faktor kunci bagi keunggulan, dan eksistensi Negara dalam kompetisi global, sehingga kebijakan pendidikan penting mendapatkan prioritas utama untuk ditelaah secara kritis dan komprehensif (Dharmaningtias, 2013).

Hal senada disampaikan Olssen, Codd, dan O'neil (2004), menyatakan *education policy in the twenty-first century is the key to global security, sustainability and survival... education policies are central to such global mission*... Agar memiliki daya saing dan nilai keekonomian,

Margaret E. Goerzt (2001) mendefenisikan kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan.

Bagi yang tidak berfikir pasti anda bingung, melihat setumpuk definisi, padahal itu, memberikan umpan terhadap PEMIKIRAN ANDA ….dari definisi tersebut !!!

Siapapun, boleh membuat definisi hasil PEMIKIRAN sendiri, harusnya anda bersukur, sudah ada pendahuhu yang membuat definisi. Itulah yang sering anda mendapat coment yang pait…!!!!

www.fppt.info

.....>Definisi 3

Analisis kebijakan pendidikan. adalah prosedur yang menghasilkan informasi kependidikan, menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kependidikan (Hanisy, 2013).

Analisis kebijakan pendidikan tentunya tidak semata-mata menganalis data dan informasi pendidikan, juga memperhatikan seluruh aspek menyangkut proses pembuatan kebijakan, mulai dari analisis masalah, pengumpulan informasi, penentuan alternatif, sampai pada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan tentang pendidikan.

Rumusan alternatif kebijakan pendidikan dihasilkan dari pelaksanaan analisis kebijakan pendidikan tidak dengan sendirinya atau secara langsung dijadikan kebijakan. Rumusan kebijakan, jika sudah didukung kekuatan otoritas atau kewenangan yang ada, maka alternatif kebijakan bisa berubah menjadi kebijakan. Jadi prosedur menghasilkan alternatif kebijakan merupakan proses yang rasional. Sedangkan proses terjadinya kebijakan menjadi bagiian dari merupakan proses politik (*bargaining position*) para pihak yang memiliki kewenangan.

BEBERAPA POINT DI ATAS MENGENAI “DEFINISI ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN” itulah yang disebut RESUME, khusus untuk anda (saya resume dari beberapa sumber).
Masih sering ditemukan dalam LK/CK, yang menulis RESUME, pada telah jelas dalam format CK hanya ada dua poin yaitu: DESKRIFSI dan SUMMARY.....

www.fppt.info

.....>Definisi hasil pemikiran anda bagaimana?

Esensi dari definisi analisis kebijakan di atas, ditemukan ada tiga kata kunci yang harus anda difahami yaitu: metode *inquiri* , dimensi rasional, dan dimensi politik…..!!!

Coba tulis untuk jawaban; melalui PEMIKIRAN ANDA BAGAIMANA….definisi tersebut?

"……"
"……"
"……"
"……"

Hal ini yang sering anda mendapat koment …pahit… Kalau tidak … apa jadidinya…. Siapalagi yang bekewajiban memberiakan kement disini……!!!!

www.fppt.info

2. URGENSI ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Analisis kebijakan pendidikan menjadi penting guna menentukan arah dan pedoman penyelenggaraan pendidikan di suatu negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan tidak mungkin melepaskan dari kebijakan yang dibuat pemerintah-an atau pihak yang memiliki kewenangan di tempat lembaga pendidikan itu ada (ada lembaga pendidikan negeri dan swasta). Dengan melakukan analisis kebijakan, kita akan dapat mempelajari dan memahami kebijakan pemerintah atau pihak terkait sebagai pengelola pendidikan dengan akurat, antara lain:

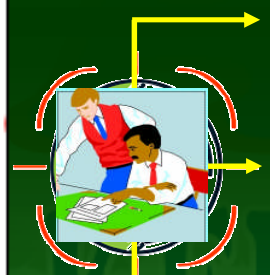

a. *we can describe educational policy we can learn what government is doing (and not doing) ini welfare, defence, education, civil right, health, energy, taxation, and so on;*
b. *we can inquiry about the causes, or determinants of educational policy;*
c. *we can inquiry about the consequences, or impact of educational policy* (Thomas R Dye.1987:5-6).

DARI ITU anda dapat mengetaui bahwa: Analisis kebijakan pendidikan amat penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Karena pendidikan sebagai satu bagian dari dimensi kehidupan manusia yang punya pengaruh besar bagi kehidupan manusia baik secara individual maupun sosial. Oleh karena itu berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau publik yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan perlu dicermati, mengingat dampaknya yang sangat luas bagi kehidupan manusia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk itu, analisis kebijakan pendidikan perlu didasarkan pada suatu prinsip objektif, tidak hanya untuk menyalahkan kebijakan pendidikan oleh pemerintah yang sedang berkuasa, atau pihak lain sebagai penyelenggara pendidikan. Namun juga memberi gambaran yang memungkinkan berupa perbaikan kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah atau penyelenggara pendidikan. (yang jadi persoalan apa makna dibalik a.b.c.d Dye 1987, diatas)

SI ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

endidikan

DK-1 Daring

uatan kebijakan (*policy making*) di bidang pendidikan memperhatikan faktor lingkungan nal, masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), dan umpan balik (*feedback*) ebijakan pendidikan itu sendiri. Analisis kebijakan pendidikan lakukan untuk pedoman lak, dalam mengarahkan kegiatan pendidikan, organisasi sekolah atau lembaga ikan sebagai penyelenggara dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

is kebijakan pendidikan yang dilaksanakan dapat berfungsi untuk:
encapai ketertiban layanan pendidikan,
enjamin hak asasi setiap warga mendapatkan layanan pendidikan,
ogram kegiatan layanan pendidikan berjalan efektif,
ktor pendidikan dapat melaksanakan pendidikan,
rtib administrasi bisa diwujudkan.

si lainnya dari analisis kebijakan pendidikan, antara lain;
ngsi alokasi untuk pengembangan dan kajian tingkatan makro,
ngsi inkuiri, setiap bahasan isu dan masalah pendidikan integral dengan isu strategis innya, misalnya analisis metodologis dan substansi, evaluasi dan meta analisis ebijakan dan argumentasi kebijakan,
ngsi komunikasi bagi pihak terkait misalnya pembuat keputusan, perencana dan engelola, peneliti, pelaksana dan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan.

(Adrianto, dkk. 2018)

www.fppt.info

B. KARAKTERISTIK&NILAI-NILAI ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Karakteristik Studi Analisis Kebijakan

1. Bersifat terapan *(applied)*

2. Bersifat deskriptif dan preskriptif

3. Bersifat interdisipliner, multidisipliner, dan integratif

(Wahab, 1998)

Ditemukan dalam pekerjaan (LK) ada kebanyakan hanya memindahkan itu……..
Hal ini yang sering anda mendapat koment …pahit… Kalau tidak … apa jadidinya….
Siapalagi yang bekewajiban memberiakan kement disini……..!!!!

Karakteristik……

Ada tiga esensi penting dari 3 karakteristik utama Studi analisis kebijakan, yaitu:

1. Bersifat terapan *(applied)*

Analisis kebijakan lebih berorientasi pada masalah (*problem oriented* bukan *problem blind)*

2. Bersifat deskriptif dan preskriptif

Bersifat preskriptif, maknanya bila upaya analisis berserta semua hasilnya secara sengaja dimaksudkan untuk keperluan pragmatis praktis dengan membantu menyediakan input yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah kebijakan relevan. Dengan pengertian itu analisis kebijakan identik dengan penelitian kebijakan (*policy research). A*da dua ahli yang pandangan berbeda dalam meknai ini:

a. Majchrzak, (dalam Wahab, 1998), memandang proses pelaksanaan penelitian/analisis mengenai suatu masalah sosial mendasar guna membantu pembuat kebijakan dengan cara menyajikan rekomendasi bersifat pragmatis, berorientasi pada aksi untuk mengatasi masalah tersebut.

b. Marshall, (dalam Wahab, 1998), memandang "Analisis kebijakan bisa bersifat deskriptif, analitis atau berkaitan dengan proses-proses kausal dan penjelasan atas proses itu sendiri".

Bersifat deskriptif; apabila kegiatan analisis kebijakan berserta seluruh hasil pengetahuan yang diperoleh dimaksudkan untuk tujuan mencari hubungan kausalitas antara tindakan pemerintah dan efek/perubahan yang ditimbulkan pada kelompok sasaran/masyarakat umum; dan memperkuat pemahaman atas proses pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan sebagai sistem tindakan atau sebagai suatu subsistem dari sistem politik yang lebih luas.

…..>. 2.Bersifat interdisipliner,

www.fppt.info

3. Bersifat interdisipliner, multidisipliner, dan integratif

Analisis kebijakan bukan sebuah disiplin tunggal (*a single discipline),* melainkan bersifat multidisipliner terhadap persoalan-persoalan sosial yang kompleks dan saling berkaitan.

Ketiga, hal di atas, perlu diperhatikan dengan teliti, hati-hati agar pemberlakuannya tidak menimbulkan kecacatan hukum baik internal maupun eksternal. Kemudian, secara eksternal pun analisis kebijakan pendidikan semestinya berpadu dengan kebijakan lain. misalnya kebijakan politik, kebijakan penganggaran. Sekaligus kebijakan pendidikan di pusat, daerah dan lembaga pendidikan masing-masing (Gunawan, A. H., 1986).

Ketiga karakteristik di atas, dapat anda pahami apabila anda dapat terlebih dahuhu menemukan kata-kata kunci yang terdapat dalam keiga substansi di atas.
Jadi yang diharapkan, anda dapat "memahami"… mencurahkan isi pikiran sendiri dari pemhaman apa yang dilihat, dibaca, ditelaah dari substansi materi di atas. (bukan hanya meindahkan apa yang dilihat), itulah sebabnya anda mendapat komen pedas dan pahit.
Tujuan dari pembelajaran ini: "Mahasiswa memahami pentingnya studi analisis kebijakan pendidikan dan implikasinya terhadap pembangunan pendidikan Indonesia. (Baca lagi RPS-RMP).

Ingin tahu Resepnya… pertama anda memiki modal hasil baca…(referen), ini referen yang hahus anda miliki: Coba anda temukan di laman ini: Efektivitas Menulis Assigment
http://arusdian.id/2020/04/22/efektivitas-menulis-assigment/
http://arusdian.id/2020/04/19/model-pembelajara…yang-mencerahkan/
Saya yakin, Anda baru menemukan hal ini, tidak hanya itu, setelah laman itu ketemu ada kurang lebih 10 materi yang saya buat khusus untuk memptivasi belajar anda, sebagian saya sudah tayang di WAG kelas…peroslanya …ANDA menyesal…. Kalu tidak baca…….?

Nilai-nilai Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan sangat terkait dengan persoalan nilai, moral dan etika, karena rekomendasi analisis kebijakan pendidikan menuntun kita menentukan berbagai alternatif mana yang bernilai lebih dan mengapa demikian?. Rekomendasi yang dihasilkan berkenaan pemilihan secara bernalar, dilengkapi dua atau lebih alternatif sebagai solusi. Anderson (2006), menyatakan kebijakan memiliki nilai-nilai sebagai berikut, yaitu:

a. nilai politik, mencakup kepentingan kelompok dan golongan dan tempat beraflikasi para aktor kebijakan pendidikan,
b. nilai organisasi mencakup mempertahankan keberadaan organisasi pendidikan, memperluas program, dan aktivitas organisasi pendidikan.
c. nilai pribadi, mencakup nilai seseorang karena sejarah kehidupan pribadinya.
d. nilai kebijakan mencakup nilai moral, keadilan, kemerdekaan, kebebasan, dan kebersamaan,
e. nilai ideologis mencakup nilai yang terkoneksi secara logis membentuk alam pikiran tentang dunia dan menuntun tindakannya.

Anderson, James E. (2006).

www.fppt.info

C. PENDEKATAN & MODEL ANALISIS KEBIJAKAN

1. Metode/Pendekatan dalam Analisis Kebijakan

Untuk menghasilkan nilai analisis Kebijakan pendidikan, Wahab (1998), memberikan solusi dalam pendekan dalam analisis kebijakan, sebagai berikut:

a. Pendekatan deskriptif/positif

Pendekatan ini, merupakan prosedur/cara untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat dengan keadaan tiadak adanya kriteria.; Bertujuan mengemukakan penafsiran yang benar secara ilmiah mengenai keadaan apa adanya *(state of the art)* dari gejala kemasyarakatan agar diperoleh kesepakatan umum mengenai suatu permasalahan yang sedang disoroti. Pendekatan ini menekankan pada penafsiran tentang terjadinya gej ala yang bersangkutan.

Dalam analisis kebijakan, pendekatan ini dimaksudkan untuk menyajikan informasi apa adanya pada para pengambil keputusan, agar memahami permasalahan yang sedang disotori dari kebijakan. Pendekatan ini sebagian dari proses analisis kebijakan dalam dimensi rasional.

www.fppt.info

b. Pendekatan normatif/preskriptif

Pendekatan ini, merupakan upaya untuk menawarkan suatu norma, kaidah, resep yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan suatu masalah, yang. Dalam analisis kebijakan, pendekatan ini dimaksudkan membantu para pengambil keputusan dalam bentuk pemikiran mengenai prosedur paling efisien dalam memecahkan masalah kebijakan publik, yang biasanya berbentuk alternatif kebijakan sebagai hasil dari analisis data.

Pendekatan ini juga dikatakan sebagian dari proses analisis kebijakan dalam dimensi rasional.

c. Pendekatan evaluatif

Pendekatam ini, menerangkan apa adanya tentang hasil dari suatu keadaan/upaya yang dilakukan oleh suatu kegiatan/ program dengan menerapkan kriteria atas terjadinya keadaan tersebut.

Gejala yang diterangkan adalah gejla yang berkaitan dengan nilai dan pengukuran setelah dihubungkan dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya, meningkatnya mutu pendidikan adalah suatu gej ala yang dipersepsikan setelah dilakukan pengukuran dalam kaitannya dengan kriteria tentang mutu pendidikan yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih menekankan pada pengukuran.

www.fppt.info

2.Model Pendekatan dalam Analisis Kebijakan

Solihin Wawab (1998), mengelompokan model pendekatan analaisis kebijakan kedalam 2 kelimpok:

a. Pendekatan Kuantitatif

Kuantitatif dalam konteks ini, merupakan bentuk operasional dari paradigma empiris atau pendekatan kuantitatif-empiris. Pengukuran secara objektif masalah sosial dilakukan dengan menjabarkan terlebih dahulu masalah sosial ke dalam beberapa komponen masalah, variabel, dan indikator. Setiap variabel yang ditentukan dalam suatu model kemudian diukur dengan memberikan simbolsimbol angka yang berbeda-beda terhadap kategori informasi yang berkaitan dengan variabel yang sedang diukur. Dengan menggunakan simbol angka, teknik perhitungan secara kuantitatif matematik dapat dilakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum dalam suatu parameter.

Tujuan utama kuantitatif dalam konteks ini, bukan menjelaskan suatu masalah tetapi menghasilkan suatu *generalisasi* atau realitas yang diperkirakan. Dengan generalisasi, peneliti dan analis kebijakan dituntut menghasilkan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan menyeluruh dalam lingkup lebih luas secara efisien dan objektif. Generalisasi tidak perlu dilakukan pengukuran/pengkajian terhadap keadaan sebenarnya dalam populasi, karena dapat dihasilkan melalui metode perkiraan/estimasi yang umum berlaku dalam metodologi statistik induktif. Estimasi……..>

www.fppt.info

Metode estimasi dilakukan berdasar pengukuran terhadap keadaan nyata yang lebih terbatas lingkupnya melalui *sampel,* sehingga yang diukur dalam penelitian sebenarnya bagian kecil dari populasi atau disebut sebagai *data.* Dengan demikian, kemampuan dalam mengembangkan model yang akan digunakan untuk estimasi merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki seorang analis kebijakan yang menggunakan metode kuantitatif.

1) Beragam teknik kuantitatif untuk analisis kebijakan disebut pula pendekatan *analycentric* sebagai bentuk *social engineering* yang umumnya digunakan adalah:
   - *Operation research* (OR);
   - *Programme evaluation and review technique* (PERT) sebagai *network analysis;* Critical *path method* (CPM) sebagai *network analysis;*
   - *Planning programming and budgetting system* (PPBS) yang merupakan pengembangan dari budgetting *theory;*
   - Management *by objective* (MBO); cost-*benefit analysis* (CBA);
   - *Game theory.*

(Baca juga Model dan Metode Penelitian ……)

2) Studi kuantitatif dalam pelaksanaannya, menggunakan pendekatan analisis sistem (*system analysis)* yang memadukan beragam model kuantitatif.

   Analisis sistem merupakan studi analitik yang dirancang secara khusus untuk membantu pembuat kebijakan mengidentifikasikan suatu pilihan tindakan tertentu yang diinginkan diantara sejumlah alternatif yang tersedia. (Quade, dalam Wahab, 1998),

www.fppt.info

3) Kriteria untuk mengatasi permasalahan bagaimana teknik analisis kebijakan alternatif yang baik dan mampu menjelaskan kompleksitas kebijakan, menurut Dror (dalam Wahab, 1998), harus memenuhi persyaratan berikut:

(a) Aspek politik dari pembuatan kebijakan publik, khususnya kelayakan politik, perekrutan dukungan politik, pengakomodasian atas tujuan yang saling bertentangan, dan kesadaran diri akan adanya keragaman nilai-nilai;
(b) Konsepsi pembuatan kebijakan haruslah diperluas tidak sekedar memandang pembuatan keputusan sebagai persoalan alokasi sumberdaya ekonomi semata namun diperlukan eksplorasi kualitatif jauh melampaui analisis kuantitatif dan estimasi biaya-manfaat *(cost-benefit);*
(c) Upaya kreatif dan pencarian alternatif kebijakan baru dibarengi dengan pemikiran inovatif, ketimbang pada analisis yang hanya memperbandingkan alternatif yang telah tersedia;
(d) Aspek kearifan (*tacit knowledge),* pemunculan ide segar, pemanfaatan pemikiran imajinatif, pengintegrasian secara sistematik intuisi terlatih dalam analisis kebijakan (penyusunan skenario dengan *soft system methodology in action),* model dan metode kualitatif, ketimbang pada pengetahuan eksplisit dan model kuantitatif;
(e) Pemikiran ke depan dengan jangkauan prediksi panjang, dan pemikiran spekulatif mengenai keadaan masa depan sebagai esensi untuk pembuatan kebijakan sekarang;
(f) Pendekatan harus luwes, tidak kaku, dan sistematik. Harus menyadari kompleksitas saling ketergantungan sarana (*means)* dan tujuan (*ends),* sifat kemajemukan kriteria pengambilan keputusan, sifat parsial dan sifat kesementaraan. Tujuan utamanya adalah klarifikasi isu, upaya penemuan alternatif baru, dan perhatian lebih masa depan.

www.fppt.info

b. Model Kualitatif Analisis Kebijakan

Metode kualitatif dalam analisis kebijakan dilakukan untuk memahami secara mendalam terhadap masalah kebijakan daripada melihat permasalahan kebijakan untuk kepentingan generalisasi. Metode ini menggunakan teknis analisis mendalam *(in-depth analysis)* yang mengkaji masalah kebijakan secara kasus per kasus dikarenakan sifat masalah yang berbeda satu sama lain, sehingga cara pemecahannya pun akan berbeda antar satu masalah dengan masalah lain.

Model kualitatif oleh Kent (dalam Wahab, 1998), dijabarkan ke dalam 19 langkah dalam analisis kebijakan berikut:

1) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi sekarang;
2) Mengidentifikasi para aktor kepada siapa rekomendasi /nasehat kebijakan ditujukan;
3) Mendeskripsikan karakteristik permasalahan secara rinci; identifikasi pihak terkait; bagaimana preferensi, sikap, nilai mereka terhadap masalah;
4) Mengkaji saran dan pandangan yang pernah diajukan dalam menangani masalah tersebut;
5) Mangkaji pengalaman sebelumnya dalam menangai masalah tersebut;
6) Membuat daftar tentang berbagai macam tindakan yang mungkin akan ditempuh aktor berkenaan dengan masalah tersebut;
7) Memilih tindakan tertentu yang bermanfaat untuk diteliti lebih lanjut dengan masuknya sejumlah informasi, opini dan peluang baru dalam analisis;
8) Menguraikan secara rinci tindakan yang telah disusun, termasuk saran bagaimana mengimplementasikan, sehingga dihasilkan daftar calon tindakan yang direkomendasikan; _____ > 9).....

8) Menguraikan secara……

9)Menguraikan berbagai akibat/konsekuensi dari masingmasing tindakan, termasuk tanggapan stakeholders/ pihak yang akan dipengaruhi;

10)Mengestimasi bagaimana peluang masing-masing tindakan akan membawa konsekuensi/akibat;

11)Mengevaluasi kualitas dampak yang diduga muncul, akibat mana yang dikehendaki dan tidak dikehendaki;

12)Menyingkirkan tindakan tertentu yang menimbulkan dampak tidak baik;

13)Merumuskan kembali daftar tindakan yang mungkin menjadi seperangkat alternatif yang sifatnya mutually exclusive (satu sama lain jelas bedanya) untuk mempertegas pilihan yang harus dilakukan;

14)Mengemukakan akibat/hasil tindakan yang direkomendasi dan alasan mengapa alternatif itu dipilih;

15)Menguraikan rinci karakter masing-masing tindakan dan peluang modifikasi, dan bagaimana kriteria memilihnya;

16)Mengkaji ulang estimasi akibat yang bakal terjadi dari tindakan yang direkomendasi beserta asumsi mengenai fakta dan nilai yang mendasari rekomendasi, resiko yang mungkin terjadi, dan mengembangkan cara baru mengurangi resiko;

17)Menguraikan rangkuman kesimpulan dari rekomendasi yang diajukan;

18)Merangkum rekomendasi pada pihak berkompeten untuk kritik, dan revisi analisis/rekomendasi dari hasil kritik;

19)Mengkomunikasikan rangkuman hasil analisis dan kesimpulan rekomendasi pada pembuat kebijakan dan pihak yang akan dipengaruhi kebijakan.

D. KETERBATASAN & SKENARIO ANALISIS KEBIJAKAN

1-Keterbatasan Analis Kebijakan

Keterbatasan analisis kebijakan, menurut Quade (DALAM Wahab, 1998), meliputi:

a. Analisis kebijakan tidak dapat menyediakan jawaban yang cepat untuk masalah yang ruwet dan tidak bisa dikelola *(intractable)*
b. Analisis kebijakan bukan ilmu pasti dan tidak akan menjadi demikian
c. Analisis kebijakan bukanlah obat mujarab bagi kerusakankerusakan yang terjadi pada kebijakan publik, dan tidak akan menjamin bahwa keputusan kebijakan akan dengan sendirinya berpihak/sejalan dengan kepentingan publik.

Namun demikian, fungsi utama analisis kebijakan adalah kemampuan memainkan peran secara maksimal utamanya dalam meluruskan kembali posisi suatu permasalahan; menjernihkan sesuatu isu kebijakan; dan menemukan alternatif baru dengan cara melibatkan diri secara total dalam proses pemikiran yang kreatif dan imajinatif

www.fppt.info

2-Skenario Analis Kebijakan

Skenario merupakan langkah-langkah hipotetik yang difokuskan pada proses-proses kausalitas dan titik-titik kritis keputusan. Selanjutnya seorang analis perlu memikirkan beberapa hal dalam menentukan langkah menyusun skenario analisis kebijakan sebagai berikut:

a. **Merumuskan lingkungan politik yang relevan dengan masalah kebijakan yang ditanganinya**
b. **Menghimpun dan mengorganisasikan informasi politik yang Diperlukan**
c. **Membuat pertimbangan politik dan mneyiapkan perkiraan kelayakan politiknya.**

(Solichin Abdul Wahab, 1998),

REFERENSI

Arif Rohman, 2012. Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi .Yogyakarta: Aswaja Pressindo,

Sholihin Abdul Wahab,1991, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Impelementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara,

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press

Amitai and Etzioni, Eva.(1964). *Social Change, Sources, Patterns and. Consequences.* New York, London: Basic Books

Ace Suryadi dan HAR Tilaar, 1983, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Sutjipto, 1987, *Analisis Kebijaksanaan Pendidikan Suatu Pengantar*, IKIP Padang, Padang.

Checkland, Peter and Scholes, Jim, 1990, *Soft Systems Methodology in Action*, John Wiley & Sons, England.

Rusdiana A, 2015. *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke imlentasi*. Bandung Pustaka Setia. http://digilib.uinsgd.ac.id/ view/creators/ Rusdiana =3AA=2E=3A=3A.html

Rusdiana A, 2014. Buku Ajar Kebijakan Pendidikan Tahun 2014: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30394

Dunn, William N, 1981, *An Introduction to Public Policy Analysis,*

Prentice Hall: Englewood Cliff, NJ.

Anjuran

Sholihin Abdul Wahab, 1998, *Analisis Kebijakan Publik Teori dan*

***Aplikasinya,* Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas**

Brawijaya,

YU KULIAH

Part: IX

MONEV

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

www.fppt.info

H I M B A U A N !!!

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

1. UNTUK PEMANFAATAN WAKTU, AGAR TUGAS PERKULIAHAN CEPAT SELESAI, SILAHKAN INTRUKSI KERJA (ASIGMENT) DALAM GCR DIKERJAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA. WALAUPUN HARI INI HARI INI PADA KALENDER MAERAH. (ORANG CERDAS PANDAI MEMANFAATKAN WAKTU)
2. SILAHKAN MULAI DARI SEKARANG. PENYELESAIAN SELAMBAT-LAMBATNYA JUM'AT 8 MEI 2020. PUKUL 00.7.00 WIB (WAKTU DIBERI PANJANG SUPAYA HASIL LEBIH OPTIMAL).
3. DAPAT DIPASTIKAN SEMUA KELOMPOK DISKUSI TELAH MEGIRIMKAN FAIL KERJANYA
   Kelompok I-II-III-IV-V-VI-VII (Pk-1 &Perbaikan Pk-2) Ciri perbaikan pada Pk-2 (setiap kalimat, pragraf, sumber dan sejenisnya yang diperbaiki, pont/huruf-nya ditulis dengan warna merah)
   Dikirim ke-email: rusdiana61@gmail.com
   Dengan fail: Microsoft Office Word /rtf (bukan pdf)

BAGI YANG BELUM HARAP MENYESUAIKAN. BAGI YANG SUDAH, ABAIKAN HIBAUAN INI.

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Bandung, 7 Mei 2020

H.A. Rusdiana

TEMA:
MONEV Kebijakan Penidikan

Materi ini adalah suatu materi yang sudah dibuat/disusun oleh kelompok III, sudah dikoreksi tgl.12-03-020 seharusnya sudah diperbaiki dan dikirim tanggal 20 maret 2020 ke email rusdiana@gmail.com:

Materi ini befungsi sebagai penguatan materi Diskusi Kelompok V:

Bagi Kelompok V:

•Materi ini befungsi sebagai penguatan, pembading dan mungkin sebagai bahan masukan perbaikan makalah (kelompok V, wajib mengirimkan fail tgl 9/5/020)

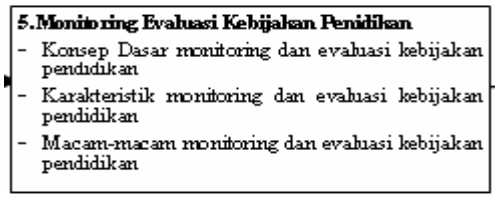

Bagi Kelompok I-II-III-IV-VI-VII:

•Untuk dijadikan bahan koreski/masukan dalam menanggapi makalah kelompok V.

Catatan perlu diperhatikan oleh semua:

*) Materi penguatan klp diskusi masih siasa 2 klp/materei. Sebelum cuti bersama (Hari Raya Iedul Fitri) harus selesai materi penguatan Duskusi kelompok. Supaya sisa waktu setelah lebaran digunakan utuk diskusi daring.

**)Kelompok V, wajib mengirimkan fail tgl 9/5/020. (petunjuk pengiriman sama dg klp I-IV lihat WAG Kls)

Substansi Materi

A-Konsep dasar MONEV Kebijakan

B-Karakteristik MONEV Kebijakan Pendidikan

C- Macam Model MONEV Kebijakan Pendidikan

D-Studi MONEV Kebijakan Pendidikan

A. KONSEP DASAR MONEV KEBIJAKAN PENDIDIKAN

1. KONSEP MONITORING

Definisi-1

Monitoring merupakan fungsi manajemen yang dilakukan pada saat suatu kegiatan sedang berlangsung yang apabila dilakukan oleh seorang pimpinan maka mengandung fungsi pengendalian. Monitoring mencakup unsur-unsur: (1) penelusuran pelaksanaan kegiatan dan keluarannya (outputs), (2) pelaporan tentang kemajuan (3) identifikasi masalah-masalah pengelolaan dan pelaksanaan. (Wrihatnolo, 2009).

Monitoring ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam usaha menjawab pertanyaan mengapa kebijakan/ program itu pada suatu tahap dapat menghasilkan konsekuensi yang demikian komplek, terutama yang berhubungan dengan mendapatkan premis faktual suatu kebijakan, dengan bergerak mundur dari apa yang diamati sekarang untuk menginterpretasikan apa yang telah terjadi sebelumnya (expost facto).(Rusdiana, 2014).

Bagi yang tidak berfikir pasti anda bingung, melihat setumpuk definisi, padahal itu, memberikan umpan terhadap PEMIKIRAN ANDA ….dari definisi tersebut !!!

Fungsi monitoring

Secara konseptual monitoring berfungsi untuk:

1. Ketaatan (compliance); Menentukan apakah tindakan administrator, staf dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang ditetapkan
2. Pemeriksaan (auditing); Menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi target group telah mencapai sasaran
3. Laporan (accounting); Menghasilkan informasi yang membantu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagi akibat implementasi kebijakan sebuah periode waktu tertentu
4. Penjelasan (explanation); Menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijakan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaan tidak cocok. (Dunn, 1981)

www.fppt.info

Langkah kerja Monitoring

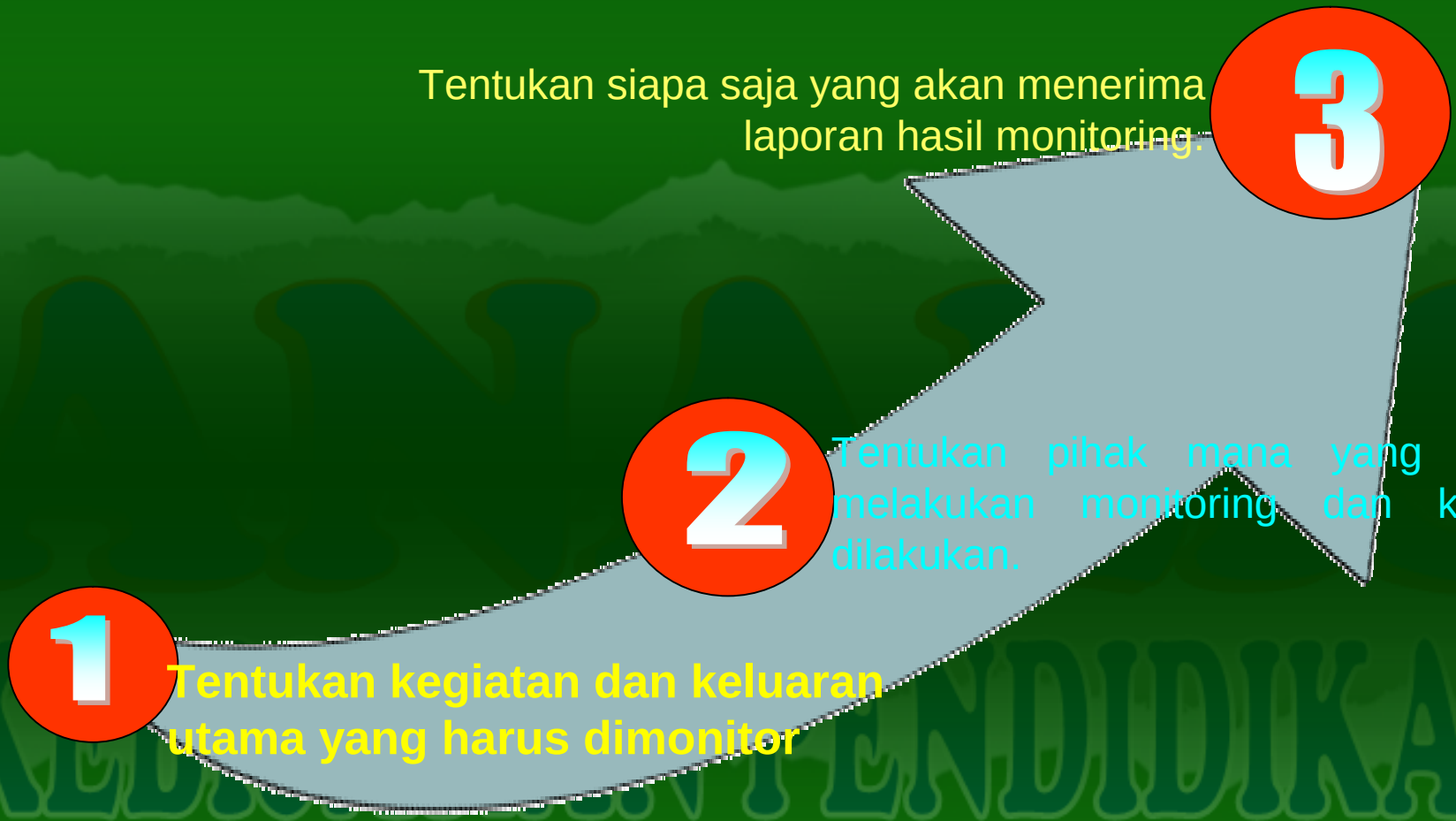

Masih sering ditemukan dalam LK/CK, yang hanya menulis kalimat-kalimat di atas.....?
Padahah anda dituntut memahami makna dari prase kalimat itu, ...> silahkan simak di bawah:

www.fppt.info

Langkah:

1 Menentukan kegiatan dan keluaran utama yang harus dimonitor

Sebagai lankah pertama dari kegiatan monitoring yaitu keluaran/target utama yang harus dimonitor, dalam hal ini monitoring dapat difokuskan pada hal-hal seperti metode atau bahan ajar yang telah dikembangkan, sudahkan sekolah atau guru mengembangkan metode dan bahan ajar seperti yang telah ditetapkan, apakah dalam pengembangan tersebut menghasilkan metode dan bahan ajar yang sesuai.

Hal yang perlu diingat adalah jangan berusaha untuk memonitor segala aspek, yang penting memonitor apa yang telah dilakukan, keluaran apa yang dihasilkan, di mana, kapan, oleh siapa, dan untuk siapa. Kemudian, hasil monitoring itu dibandingkan dengan rencana semula, selisih antara rencana dan hasil monitoring dibuat laporannya, dan kemudian sejauh mungkin faktor-faktor penyebab perbedaan itu diidentifikasi.

Tata cara penyimpanan data juga penting untuk mempermudah penyusunan laporan yang akurat dan tepat waktu. Sedapat mungkin sumber data yang telah dikumpulkan secara rutin dimanfaatkan. Ciptakan format pelaporan yang tidak terlalu rumit, dengan sebagian hasilnya disajikan secara visual/grafik.

Nilai Apa..... yang didapat dari tiga paragrap dia tas.....?

www.fppt.info

Langkah:

2

Menentukan pihak-pihak yang akan melakukan monitoring dan kapan dilakukannya

Kegiatan kedua ini, mentukan pihak-pihak yang akan melakukan monitoring dan kapan dilakukan. Sebaiknya pihak yang melakukan monitoring yang dimaksud di sini bukan pihak pengelola program langsung, untuk menjaga independensi. Dengan menganut asas partisipatif, wakilwakil penerima manfaat program/kegiatan sedapat mungkin bersama-sama melakukan monitoring. Mengenai frekuensi, hal ini sebaiknya dilakukan paling tidak setiap enam bulan sekali untuk sebuah program jangka menengah atau jangka panjang.

Nilai Apa..... yang didapat dari tiga paragrap dia tas.....?

Langkah:

3

Menentukan siapa-siapa saja yang akan menerima laporan hasil monitoring.

Langkah ketiga ini mentukan siapa saja yang akan menerima laporan hasil monitoring. Sebaiknya laporan hasil monitoring disebarkan tidak hanya pada pihak-pihak pemerintah (eksekutif dan legislatif), tetapi juga pada pihak pelaksana (misalnya: dinas pendidikan, depag, sekolah, guru), instansi pemerintah pusat serta wakil-wakil kelompok penerima manfaat untuk meminta umpan balik. Buatlah pertemuan berkala untuk meninjau kembali tingkat kemajuan serta memutuskan apakah rencana implementasi perlu disesuaikan.

Nilai Apa..... yang didapat dari tiga paragrap dia tas.....?

www.fppt.info

2. BATASAN EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Definisi-2

Evaluasi sebagai proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan kegiatan. Kegiatan dalam konteks ini mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu; juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. (Anderson, dlm Arikonto dan Cepi Safruddin, 2009).

Konsep dasar evaluasi merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah kurun waktu tertentu atau setelah suatu kegiatan telah berlalu. Evaluasi ini mencakup kegiatan antara lain: (a) Penilaian atas dampak kolektif baik positif maupun negative dari semua (atau sebagian besar) kegiatan yang telah dilakukan, pada lokasi dan/atau kelompok sasaran yang berbeda-beda. (b) Diskripsi keluaran dan hasil/manfaat sebagaima dilihat dari sudut pandang penerima manfaat. (Wrihatnolo, 2009).

Evaluasi kebijakan bisa bervariasi, bergantung pada dimensidimensi yang menjadi fokus evaluasi. Salah satu dimensi yang sering mendapat sorotan adalah dimensi kuantitas dan kualitas. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi diemensi kuantitaif berbeda dengan dimensi kualitatif. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif, seperti tes standar, tes prestasi belajar, tes diagnostik dan lain-lain. Sedangkan, instrumen untuk mengevaluasi dimensi kualitatif dapat digunakan, questionnare, inventori, interview, catatan anekdot dan sebagainya. (Rusdiana, 2014)

www.fppt.info

Contoh: kebijakaan pendidikan yang memuat aturan yang mengharuskan setiap mahasiswanya harus membayar SPP, Rp 12.000.0000-, per semester. Karena salah satu mahasiswanya ada yang tidak mampu membayar sebesar itu, kemudian ia mengajukan keringanan biaya kepada pimpinan perguruan tinggi. Padahal, aturan perguruan tinggi tersebut menyebutkan, setiap mahasiswa harus mengikuti aturan yang dijunjung tinggi. Atas alas an-alasan pengajuan tersebut, pimpinan perguruan tinggi mengabulkan dengan cara, memberikan keringanan kepada mahasiswa. Dengan pertimbangan ada Kebijakan UKT. Berlaku secara Nasional.

Tujuan

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. **Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.**
2. **Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.**
3. **Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.**
4. **Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kabijakan, baik dampak positif maupun negative.**
5. **Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpanganpenyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.**
6. **Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan akan dating. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kabijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. (Rusdiana, 2014)**

www.fppt.info

Karakteristik Evaluasi Kebijakan

Ada beberapa ciri khusus evaluasi kebijakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak bebas nilai, bahwa evaluasi kebijakan senantiasamenentukan harga dab nilai suatu kebijakan.
2. Berorientasi pada masalah, evaluasi kebijakan haruslah diaksentuasikan kepada masalah yang pernah dirumuskan atu diformulasikan.
3. Berorientasi pada masa lalu dan kini, menyatakan bahwa yang dievaluasi adalah sesuatu yang telah terjadi, dan yang terjadi senantiasa diperhatikan dan bahkan menjadi pusat perhatian.
4. Berorentasi pada dampak, evaluasi harus mengetahui apakah dampak yang ditimbulkan tersebut harus mengetahui apakah dampak yang ditimbulkan tersebut sesuai dengan yang diharapkan ataukah tidak. (Rusdiana, 2014)

www.fppt.info

Alasan-alasan Perlunya Evaluasi

Evaluasi kebijakaan diperlukan dengan maksud untuk:

1. Mengetahui apakah hal-hal yang telah dirumuskan dalam formulasi kebijakaan tersebut dapat dilaksanakan ataukah belum.
2. Mengetahui apakah rumusan-rumusan kebijakaan yang tertulis telah berhasil dilaksanakan ataukah belum.
3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan rumusan kebijaksaan dalam kaitannya dengan faktor kondisionak dan situasional di mana kebijaksaan twersebut dilaksanakan.
4. Mengatahui seberapa jauh rumusan kebijakan telah dapat diimplementasikan.
5. Mengetahui keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kebijakaan.
6. Mengetahui seberapa dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakaan terhadap khalayak yang bermaksud ditujuoleh kebijakan, dan khalayak yang tak bermaksud dituju oleh kebijakaan.
7. Mengetahui apakah risiko-risiko yang telah diperhitungkan pada saat formulasi telah dapat diatasi dengan baik ataukah tidak.
8. Mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam hal perbaikan kebijaksaan. (Rusdiana, 2014).

www.fppt.info

Pengelompokan Macam dan Jenis Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Secara umum evaluasi menjadi tiga macam golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan semu adalah evaluasi yang mempersoalkan alat-alat evaluasinya dan tidak menyentuh sama sekali terhadap substansi yang di evaluasi.
2. Evaluasi kebijakan resmi adalah evaluasi yang mempersoalkan validitas, reabilitas, dan fisibilitas alat-alat evaluasi dan melihat substansi yang di evalusi.
3. Evaluasi berdasarkan teori keputusan, selain memperhatikan kesahihan dan keandalan juga mempertimbangkan harga atu nilainya bagi mereka yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan. (Dunn (1981)

Secara Khusus, dilihat dari kepentingannya, ada beberapa macam evaluasi kebijakan pendidikan, diantaranya adalah:

1. Dintinjau dari segi waktu mengevaluasinya: (i) Pandangan linier, evaluasi dilaksanakan setelah implementasi; kebijakan. (ii) Pandangan Komprehensif, evaluasi dilaksanakan di hamper setiap tahap proses kebijakan. Evaluasi dilaksanakan saat perumusan, legitimasi, komunikasi, implementasi, partisipasi dan terhadap evaluasi itu sendiri.
2. Ditinjau dari substansi evaluasi kebijakan pendidikan; (i). Evaluasi kebijakan pendidikan dasar; (ii). Evaluasi kebijakan pendidikan menengah; (iii. Evaluasi kebijakan pendidikan tinggi
3. Ditinjau dari periodisasi evaluasi; (i). Evaluasi kebijakan pendidikan repelita keenam tahun pertama; (ii). Evaluasi kebijakan pendidikan repelita keenam tahun kedua; (iii). Evaluasi kebijakan pendidikan repelita keenam tahun; (iv). Evaluasi kebijakan pendidikan repelita keenam tahun terakhir; (Rusdiana, 2014)
4. Ditinjau dari kriteria avaluasi. Evaluasi yang menggunakan kriterium, yaitu kriterium *standard critrian reference* dan kriterim *norn critrian reference*
5. Ditinjau dari sasaran evaluasi (i). Evaluasi dampak (ii). Evaluasi proses
6. Dari segi kontinuitas; (i). Evaluasi Formatif (ii). Sumatif (Rusdiana, 2014)

www.fppt.info

Cakupan Wilayah Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Apa saja yang dievaluasi sangat tergangtung kepada pendekatan yang dipakai:

1. Menurut pendekatan input keberhasilan kebijakan ditentukan oleh inputnya. Input pendidikan memang tidak boleh dianggap sama.
2. Menurut pendekatan transformasi atau proses, implementasi kebijakan pendidikan bergantung kepada komponen-komponen trasnformasi yang ada di lembaga pendidikan.
3. Menurut pendekatan output adalah implementasi kebijakan pendidikan berkenan dengan beberapa output pendidikan telah terserap dengan baik, diakui mutunya oleh masyarakat serta mau belajar sepanjang hayat, sebagaimana misi hampir setiap usaha pendidikan.

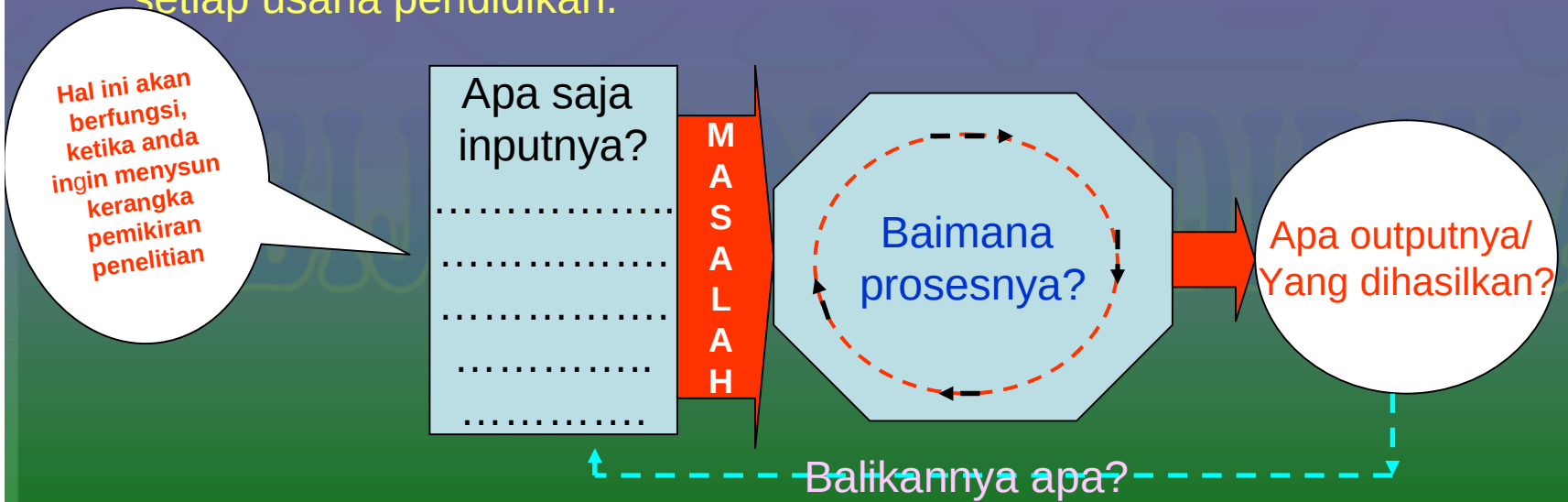

Gambar .1 Proses Evaluasi

B. KARAKTERISTIK MONEV KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Definisi-3

Monitoring dan Evaluasi (ME) adalah dua kata yang memiliki aspek kegiatan yang berbeda yaitu kata Monitoring dan Evaluasi. Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, adakah hambatan yang terjadi, dan bagaimana para pelaksana program itu mengatasi hambatan tersebut.

Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Tujuan utama monitoring adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program (kebijakan pendidikan). Informasi ini hendaknya dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang untuk: (1) Memeriksa kembali strategi pelaksanaan program sebagaimana sudah direncanakan setelah membandingkan dengan kenyataan di lapangan; (2) menemukan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program; (3) Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan program. (Lihat buku Evaluasi Prog. Pendidikan: Rusdiana (2017).

www.fppt.info

Pendekatan MONEV Kebijakan Pendidikan

Ada berbagai cara untuk memonitor keluaran dan dampak. Cara itu adalah :
1) pelaporan sistem sosial (*social accounting*),
2) eksperimentasi sosial (*social experimentation*),
3) pemeriksaan sosial (*social auditing*)
4) dan pengumpulan bahan untuk penelitian sosial (*social research cumulation*).
Pendekatan ini masing-masing mempunyai dua aspek yaitu aspek yang berhubungan dengan jenis informasi yang diperlukan (Dunn, 1981). Hal tersebut dapat digambarkan seperti dalam diagram di bawah ini:

Diagram Perbandingan antara Empat Pendekatan dalam Monitoring

Pendekatan	Jenis Kontrol	Jenis Informasi yang Diperlukan
Pelaporan Sistem Sosial	Kuantitatif	Informasi yang ada/ yang baru
Eksperimentasi Sosial	Manipulasi langsung dan kuantitatif	Informasi baru
Pemeriksaan Sosial	Kuantitatif dan/ Kualitatif	Informasi baru
Pengumpulan bahan untuk Penelitian Sosial	Kuantitatif dan/ Kualitatif	Informasi yang ada

Sumber: (Dunn, 1981).

www.fppt.info

Keempat pendekatan (Dun 1981)diatas mempunyai ciri yang bersamaan yaitu bahwa keempatnya:

1. Terpusat kepada keluaran kebijaksanaan, sehingga dalam monitoring ini sangat diperhatikan variabel yang mempengaruhi keluaran, baik yang tidak dapat dikontrol oleh pembuat kebijaksanaan (misalnya kondisi sekarang yang sudah ada), dan variabel yang dapat dimanipulasikan atau diramalkan sebelumnya;
2. Berpusat pada tujuan, yaitu untuk memberikan pemuasan kebutuhan, nilai atau kesempatan kepada klien atau target;
3. Berorientasi pada perubahan. Tiap-tiap pendekatan itu berusaha untuk memonitor perubahan dalam suatu jangka waktu tertentu, baik dengan menganalisis perubahan unjuk kerja antara beberapa program yang berbeda atau yang sama beberapa variabelnya, atau kombinasi antara keduanya;
4. Memungkinkan klasifikasi silang keluaran dan dampak berdasarkan variabel-variabel lain termasuk variabel yang dipergunakan untuk memonitor masukan kebijaksanaan (waktu, uang, tenaga, perlengkapan) dan proses kebijaksanaan (aktivitas, dan sikap administratif, organisasi dan politis yang diperlukan untuk transformasi masukan kebijaksanaan menjadi keluaran),

Semunya, berhubungan dengan aspek pelaksanaan kebijaksanaan secara obyektif maupun subyektif. Indikator obyektif didasarkan atas data baru yang diperoleh melalui survei sampel atau studi lapangan.

www.fppt.info

C. MODEL PROSES MONEV KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Proses MONEV Kebijakan Pendidikan

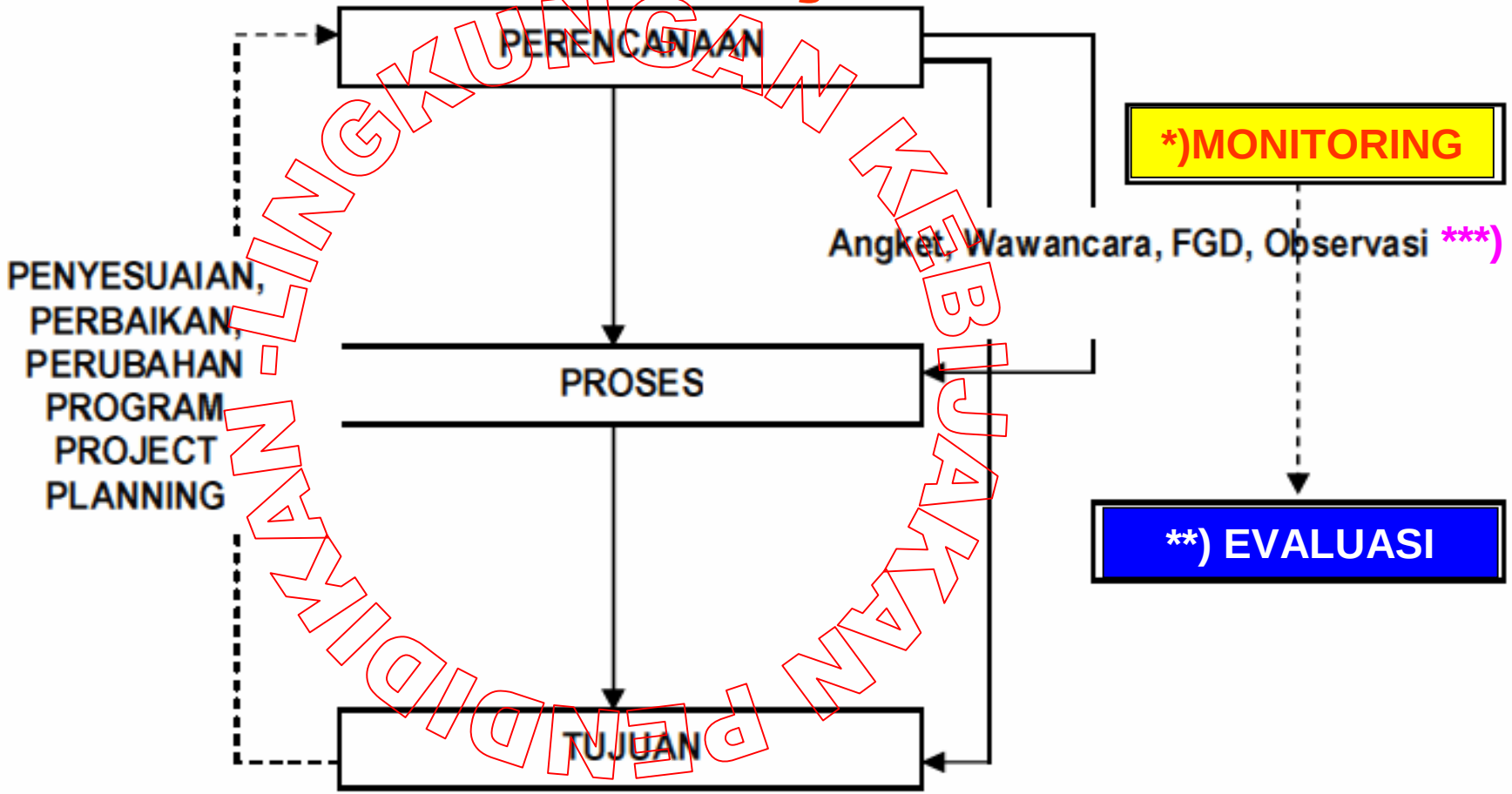

Gambar .1 Proses Monitoring dan Evaluasi

Sumber: Diknas 2001 (DIMODIFIKASI)

www.fppt.info

*) MONITORING

Monitoring lebih menekankan pada pemantauan proses pelaksanaan (Departemen Pendidikan Nasional: 2001:77). Monitoring juga lebih ditekankan untuk tujuan supervisi. Proses dasar dalam monitoring ini meliputi tiga tahap, yaitu:

- -menetapkan standar pelaksanaan;
- -pengukuran pelaksanaan;
- -menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana.

**) EVALUASI

Evaluasi program berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan.

***) Angket-Wawacara-FGD-Observasi

Teknik dan alat monitoring dapat berupa: (1) Teknik pengamatan partisipatif; (2) Teknik wawancara; (3) Teknik pemanfaatan dan analisis data dokumentasi; (5) Evaluator atau praktisi atau pelaksana program; (6) Perumusan tujuan pemantauan; (7) Penetapan sasaran pemantauan; (8) Penjabaran data yang dibutuhkan; (9) Penyiapan metode/alat pemantauan sesuai dengan sifat dan sumber/jenis data; (10) Perencanaan analisis data pemantauan dan pemaknaannya dengan berorientasi pada tujuan monitoring

www.fppt.info

Peran Monitoring Evaluasi Kebijakan Pendidikan

MONEV memainkan peran metodologis yang penting dalam analisis kebijakan. Ketika situasi masalah (problem situation) timbul saat transformasi tindakan kebijakan menjadi informasi tentang hasil kebijakan melalui monitoring, situasi masalah (sistem dari berbagai masalah yang saling tergantung) tersebut ditransformasikan melalui perumusan masalah ke dalam suatu masalah kebijakan. MONEV setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis kebijakan, yaitu:

1. Kepatuhan (compliance): Monitoring bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para pelaku kebijakan (administrator program, staf, dll) sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh para legislator.
2. Pemeriksaan (auditing): Monitoring membantu menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka.
3. Akuntansi: Monitoring menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.
4. Eksplanasi: Monitoring menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program berbeda. Informasi tersebut membantu kita menemukan kebijakan dan program apa yang berfungsi secara baik, bagaimana mereka berproses, dan mengapa. (Rusdiana, 2014)

www.fppt.info

MODEL
Hasil MONEV Kebijakan Pendidikan
PADA PESEKOLAHAN/MADRASAH

Hasil monev menjadi umpan balik program (LIHAT GAMBAR:1), yang memerlukan perbaikan, kebutuhan yang belum terlayani, kemampuan personil dalam melaksanakan program, serta dampak program terhadap perubahan.

NO.	KOMPONEN PROGRAM	DESKRIPSI KEBERHASILAN PROGRAM
1	2	3
I	**BIDANG KURIKULUM**	
	1.1 Penyusunan Kurikulum sekolah (Dokumen I, Dokumen II, dan Dokumen III)	Tersusunnya kurikulum sekolah mencakup Kurikulum Dokumen I, Dokume II, dan Dokumen III. Perlu ada penyempurnaan lebih baik lagi, agar lebih relevan dengan keadaan individu siswa ABK dan harapan masyarakat.
	1.2 Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar	Para guru telah melaksanakan KBM yang berorientasi pada PAIKEM.
	1.3 Pelaksanaan Penilaian (formatif, sumatif, dan UN/US)	Terlaksananya penilaian yang sudah terencana, baik ulangan harian, UTS, UAS, dan UN/US. Dan diikuti dengan analisis hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti dengan program perbaikan atau pengayaan.

www.fppt.info

1	2	3
II	**BIDANG KESISWAAN**	
	2.1. Penerimaan Peserta Didik Baru	Terlaksananya sistem Penerimaan Peserta Didik Baru yang terencana dengan baik.
	2.2.Pelaksanaan assessment	Terlaksananya assessment sebagai dasar untuk memberikan layanan pada siswa, walaupun instrumen dan pelaksanaannya perlu disempurnakan lagi agar lebih *valid* dan *comprehensive*.
	2.3.Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan	Bimbingan dan Penyuluhan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan program BP yang telah dipersiapkan dan permasalahan yang dialami para siswa.
	2.4.Pelaksanaan ekstra kurikuler (Pramuka, Olah Raga, Kesenian, dan Keterammpilan)	Terlaksnanya kegiatan ekstra kurikuler secara rutin, walupun dalam bidang kesenian perlu dikembangkan lagi dengan melengkapi sarana kesenian yang diperlukan.
	2.5.Pengusulan beasiswa dan Bagus	Beasiswa dan Bagus terealisasi dengan baik serta memberikan dampak positif kepada para siswa yakni mendorong untuk lebih rajin ke sekolah.
	2.6.Pelaksanaan Rekreasi.	Terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, yaitu untuk menambah kebersamaan, dan kekeluargaan semua warga sekolah.
	2.7.Penyusunan Administerasi Kesiswaan	Telah tersusun dengan baik walaupun perlu lebih dilengkapi lagi untuk dapat mengkaper semua hal yang diperlukan oleh para siswa.

www.fppt.info

1	2	3
III	**BIDANG KETENAGAAN**	
	3.1 Pendidik : 3.1.1 Pembagian tugas guru .	Pembagian tugas guru telah dilaksanakan dengan mengupayakan agar sesuai dengan kemampuannya (*the right man on the right place*).
	3.1.2 Pembinaan guru mela lui supervisi.	Terlaksananya *class visit* dalam rangka pelaksanaan supervisi yang diikuti dengan evaluasi dan tindak lanjut.
	3.1.2 Peningkatan profesionalisme kinerja guru.	Terealisasi dengan terwujudnya kegiatan-kegiatan mengikuti progra KKG, mengikuti diklat-diklat kependidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi, dan seminar-seminar pendidikan, untuk lebih memahami dan mengimplementasikan 4 kompetensi guru (kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial).
	3.1.4 Pengusulan kenaikan pangkat guru	Terealisasi dengan turunnya SK kenaikan pangkat bagi 5 orang guru per-Oktober 2010.
	3.1.5 Pengusulan tunjangan kesejahrteraan guru.	Diterimanya TPP dan uang kompensasi secara rutin bagi guru PNS dan diterimanya uang insentif bagi guru sukwan tahun anggaran 2010.
	3.2 Tenaga Kependidikan: 3.2.1 Peningkatan profesi-onalisme tenaga kependidikan	Terlaksananya mengikiuti kegiatan KKG, KKKS, diklat, lokakarya, dan workshop tentang kependidikan, untuk lebih memahami dan mengimplementasikan 5 kompetensi kepala sekolah (kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan kompetensi sosial).
	3.2.2 Pengusulan kenaikan pangkat tenaga kependidikan.	Terlah dilakukannya pengusulan kenaikan pangkat dengan memperoleh nilai KTI 4 poin dari 12 poin yang diperlukan, dan telah dilakukan revisi KTI untuk dilakukan penilaian kembali.

www.fppt.info

1	2	3
IV	**BIDANG SARANA DAN PRASARANA**	
	4.1 Pemeliharaan sarana dan prasarana	Terpeliharanya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah.
	4.2 Usul penambahan sarana meubelair	Terpenuhinya meubelair sekolah sesuai dengan yang diperlukan.
	4.3 Usul pengadaan sarana keterampilan *handcraft*	Terpenuhinya peralatan *handcraft* yang diperlukan
	4.4. Penambahan buku-buku pembelajaran.	Semakin lengkapnya buku-buku paket pembelajaran dan buku pedoman guru.
	4.5 Pengembangan program 6 K (keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan).	Terlaksananya kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan program 6 K yaitu dengan kegiatan Jumsih (Jumat bersih), adanya pembagian piket sekolah, dan menanamkan sikap wawasan wiyata mandala.
	4.6 Pembuatan administerasi sarana dan prasarana.	Tersusunnya adinisterasi sarana dan prasarana.
V	**BIDANG HUMAS**	Terjalinnya hubungan yang baik dengan yayasan.
	5.1 Koordinasi rutin dengan yayasan.	
	5.2. Meningkatkan hubungan dengan instasi-instansi terkait.	Terjalinnya hubungan dan adanya dukungan dari instansi-instansi sepeti UPTD pendidikan kecamatan, SD dan MI sekitar.
	5.3. Melaksanakan sosialisasi sekolah ke masyarakat.	Dibuatnya spanduk pada awal tahun ajaran, memuat profil dan penjelasan-penjelasan tentang SLB pada majalah pendidikam lokal, serta mengikuti kegiatan-kegiatan di tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan.
	5.4. Berpartisipasi dalam kegia-tan-kegiatan lingkungan sekolah dan pemerintahan setempat, dan instansi terkait di daerah.	Sekolah telah berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintahan setempat, seperti pembangunan jalan, acara hari-hari besar nasional dan keagamaan, pengajian, sunatan masa, dan siskamling.

www.fppt.info

1	2	3
VI	**BIDANG KEUANGAN**	
	6.1. Penyusunan RAPBS	Tersusunnya RAPBS dengan baik
	6.2. Pengusulan dana BOS	Terealisasinya dana BOS baik dari pusat maupun dari provinsi.
	6.3.Menentukan biaya pembe-lanjaan sesuai dengan RAPBS yang telah dibuat.	Adanya pembelanjaan yang sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan dalam RAPBS.
	6.4. Penyusunan LPJ	Tersusunnya LPJ BOS maupun keuangan dari sumber lain sebagai bukti pemanfaatan dana yang transparan, dan akuntabel.
VII	**BIDANG MANAJEMEN SEKOLAH**	
	7.1. Manajemen kurikulum.	Adanya pelaksanaan kurikulum yang terprogram dan sistematis.
	7.2. Manajemen kesiswaan.	Lancarnya kegiatan-kegiatan kesiswaan baik kurikuler maupun ekstra kurikuler.
	7.3. Manajemen ketenagaan.	Adanya ketenagaan yang bekerja sesuai dengan kompetensi dan tupoksinya.
	7.4.Manajemen sarana dan prasarana.	Adanya pendayagunaan sarana dan prasarana secara baik.
	7.5.Manajemen humas.	Terjalinnya hubungan yang harmonis, kerjasama dan adanya kemitraan antara sekolah dan masyarakat.
	7.6. Manajemen keuangan.	Terencana dan terprogramnya penggunaan dana yang dimiliki sekolah.

www.fppt.info

Model Deskripsi Hasil Evaluasi Perguruan Tinggi

Model Deskripsi Hasil Evaluasi Perguruan Tinggi
INTRUMEN PENILAIAN HASIL MONEV KHUSUS
KOPERTAIS WILYAHA II JAWA BARAT DAN BANTEN TAHUN 2016
Nama PTKIS: ……

No	Item yang Dinilai	Ketentuan Penilaian	Nilai yg Diperoleh	Jml
1	2	3	4	5
A. KELEMBAGAAN				
1	Visi	Sangat baik=25; Baik=20; Sedang (cukup)=15; Kurang baik=10; Tidak baik=5		
2	Hubungan misi dengan visi	Sangat baik=25; Baik=20; Sedang (cukup)=15; Kurang baik=10; Tidak baik=5		
3	Sosialisasi visi, misi, dan tujuan PTKIS	Tidak ada=0; Ada=5; Banyak=10		
4	Jumlah prodi	Masukan sesuai dengan jumlah		
5	Peringkat akreditasi institusi (yang masih berlaku)	Peringkat akreditasi: A=50; B=35; C=20		
6	Sertifikat ISO (yang masih berlaku)	Jumlah x 20		
1	2	3	4	5
7	Peringkat akreditasi prodi (yang masih berlaku)	Jumlah prodi x peringkat akreditasi: A=40; B=30; C=20		
8	Senat PTKIS	Ada =10; Tidak ada=0		
9	Bagian akademik& administrasi pelayanan pendukung	Ada =10; Tidak ada=0		
10	Pusat Penjaminan Mutu	Ada =10; Tidak ada=0		
11	Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Ada =10; Tidak ada=0		
12	Bagan Struktur Organisasi PTKIS	Ada lengkap=20; Ada tidak lengkap=10; Tidak ada=0		
13	Lembaga Alumni	Ada =10; Tidak ada=0		
Jumlah A				

Pada PT bidang yang dimonev, meliputi:

A. KELEMBAGAAN

B. AKADEMIK

C. KETENAGAAN

D. PENELITIAN, PEGABDIAN&KS

E. KEMAHASISWAAN

F. TATAKELOLA/KINERJA

G. SAPRAS&KEU

(Lihat buku Panduan Movev Kopertais, 2017).

D. STUDI DAMPAK MONEV KEBIJAKAN PENDIDIKAN

FLLOW UP MONEV Kebijakan Pendidikan

Agar MONEV terhadap KEBIJAKAN/program supervisi pendidikan bermanfaat perlu dipikirkan oleh supervisor akan tindak lanjutnya. Biasanya tindak lanjut atau *follow up* dari hasil-hasil evaluasi yang diperoleh perlu mendapat supervisi/penilaian yang seksama dan kontinyu dari supervisor dalam rangka pengembangan program supervisinya (Diknas, 2009: 15).

Maka dari itu, pembagian kerja, koordinasi, kepemimpinan dan integrasi merupakan unsur yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan program pendidikan. Menghadapi ancaman lingkungan dan memenuhi kebutuhan, mungkin saja program pendidikan perlu direstrukturisasi.

www.fppt.info

Manfaat dari MONEV Kebijakan Pendidikan

1. Untuk pengguna/Siswa

nfaat hasil MONEV program pembelajaran, bagi siswa, yaitu:

- Digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai bahan program secara menyeluruh;
- Merupakan penguatan bagi siswa;
- Usaha perbaikan;
- Sebagai diagnose.

2. Untuk pengguna/Guru

etelah mengetahui data hasil MONEV, maka guru::

- Mengetahui sampai sejauh mana bahan yang diajarkan sudah dapat diterima oleh siswa. Hal ini akan menentukan pula apakah guru itu harus menggantikan cara menerangkan (strategi mengajar) atau tetap dapat menggunakan cara (strategi) yang lama.
- Mengetahui bagian-bagian mana dari bahan pelajaran yang belum dikuasai oleh siswa. Apabila bagian yang belum dikuasai kebetulan merupakan bahan prasyarat bagi bagian pelajaran yang lain, maka bagian itu harus diterangkan lagi, dan barangkali memerlukan cara atau media lain untuk memperjelas. Apabila bahan ini tidak diulangi, maka akan mengganggu kelancaran pemberian bahan pelajaran selanjutnya, dan siswa akan semakin tidak dapat menguasainya.
- Dapat meramalkan sukses dan tidaknya seluruh program yang akan diberikan.

www.fppt.info

3. Manfaat bagi Lembaga/Sekolah/Madrasah

- Kebijakan pendidikan (supervisi) yang berlangsung saat ini dapat dikatakan sama dengan evaluasi program, tetapi sarananya ditekankan pada kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, prestasi belajar menjadi titik pusat perhatian. Oleh karena tujuan utamanya memperhatikan prestasi belajar bidang studi atau mata pelajaran maka supervisor (yang di dalam praktik disebut pengawas), disaratkan memiliki latar belakang studi tertentu dan harus memiliki pengalaman menjadi guru. Dilihat dari ruang lingkupnya, supervisi dibedakan menjadi 3, yaitu (1) supervisi kegiatan pembelajaran, (2) supervisi kelas, dan (3) supervisi sekolah.
- Kebijakan supervisi sekolah/madrasah yang diartikan sebagai evaluasi program, dapat disamaartikan dengan validasi lembaga dan akreditasi.
- Evaluasi program merupakan langkah awal dari proses akreditasi dan validasi lembaga.

MONEV Kebijakan/program secara kelembaan, tidak lain adalah supervisi pendidikan dalam pengertian khusus, tertuju pada lembaga secara keseluruhan.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN
www.fppt.info

4. Manfaat bagi Orang Tua/Masyarakat

Bagi orang tua, hasil MONEV kebijakan/program pembelajatran dapat dimanfaatkan untuk:

- Mengetahui kemajuan belajar peserta didik.
- Membimbing kegiatan belajar peserta didik di rumah.
- Menentukan tindak lanjut pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anaknya.
- Memprakirakan kemungkinan berhasil tidaknya anak tersebut dalam bidang pekerjaannya.

5. Manfaat bagi Pemerintah

Adda empat kemungkinan MONEV kebijkan pendidikan dimanfaakan oleh Pemerintah, antara lain :

1. Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan. (cotoh; kuliah tatap muka diganti dengan DARING)
2. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit). (cotoh; kurikulum KBK diganti dengan kur 2013; mengharuskan PBM berpusat pada siswa-penilaian outentik)
3. Melanjutkan, karena pelaksanaan program menunjukan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat. (cotoh; Jurusan MPI sudah terakreditasi Nasional A. mau dilanjut ke akreditasai Internasional)
4. Menyebarluaskan program (melaksanakan program ditempat-tempat lain atau mengulangi lagi dilain waktu), karena program tersebut berhasil dengan baik maka yang baik jika dilaksanakan lagi ditempat dan waktu yang lain. (cotoh; tidak menutup kemunginan program pekuliahan daring jadi kebijakan pendidikan di Indonesia masa depan, eperti dinegara maju lainnya)

www.fppt.info

REFERENSI

Arif Rohman, 2012. Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi .Yogyakarta: Aswaja Pressindo,

Sholihin Abdul Wahab,1991, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Impelementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara,

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press

Amitai and Etzioni, Eva.(1964). *Social Change, Sources, Patterns and. Consequences.* New York, London: Basic Books

Ace Suryadi dan HAR Tilaar, 1983, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Sutjipto, 1987, *Analisis Kebijaksanaan Pendidikan Suatu Pengantar*, IKIP Padang, Padang.

Checkland, Peter and Scholes, Jim, 1990, *Soft Systems Methodology in Action*, John Wiley & Sons, England.

Rusdiana A, 2015. *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke imlentasi*. Bandung Pustaka Setia. http://digilib.uinsgd.ac.id/ view/creators/ Rusdiana =3AA=2E=3A=3A.html

Rusdiana A, 2014. Buku Ajar Kebijakan Pendidikan Tahun 2014: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30394

Dunn, William N, 1981, *An Introduction to Public Policy Analysis,*

Prentice Hall: Englewood Cliff, NJ.

Anjuran

Sholihin Abdul Wahab, 1998, *Analisis Kebijakan Publik Teori dan*

***Aplikasinya,* Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas**

Brawijaya,

Ingat menulis CK

Disin Anda sudah dimulai diajak berfikir tinkat tinggi, bukan hanya menyalin materi semata

Deskripsi

- ……
  ……
  ……
- ……
  ……
  ……
- ……
  ……
  ……
- ……
  ……
  ……

Summary

……
……

Untuk motivasi temukan laman ini: Efektivitas Menulis Assigment http://arusdian.id/2020/04/22/efektivitas-menulis-assigment/

10	Ka[illegible]	Kebijakan Pendidikan Makro, Messo dan Mikro	DK-1 Daring

YU KULIAH

Part: X

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

-MAKRO

-MESSO

-MIKRO

www.fppt.info

TEMA:

Kebijakan Penidikan MAKRO, MESO & MIKRO

Materi ini befungsi sebagai penguatan materi Diskusi Kelompok VI sd VIII:

Bagi Kelompok VI-VII-VII:

•Materi ini befungsi sebagai penguatan, pembading dan mungkin sebagai bahan masukan perbaikan makalah

Materi ini adalah suatu materi yang sudah dibuat/disusun oleh kelompok VI-VII-VIII, sudah dikoreksi tgl.12-03-020 seharusnya sudah diperbaiki dan dikirim tanggal 20 maret 2020 ke email rusdiana@gmail.com:

(kelompok VI-VII-VIII, wajib mengirimkan fail tgl 16/5/020)

Bagi Kelompok I-II-III-IV-VI-VII-VIII:

•Untuk dijadikan bahan koreski/masukan dalam menanggapi makalah kelompok V.

*) Materi penguatan klp diskusi masih siasa 2 klp/materei. Sebelum cuti bersama (Hari Raya Iedul Fitri) harus selesai materi penguatan Duskusi kelompok. Supaya sisa waktu setelah lebaran digunakan utuk diskusi daring.

) **Catatan perlu diperhatikan oleh semua:

Kelompok VI-VII-VIII, wajib mengirimkan fail tgl 9/5/020. (petunjuk pengiriman sama dg klp I-IV lihat WAG Kls)

AGENDA DAN STUKRTUR MATERI:
Kebijakan Penidikan MAKRO, MESO & MIKRO

AGENDA DAN KONTRAK PERKULIAHAN
MK. Kebijakan Pendidikan*)

PERT/ KE-	HARI/ TANGGAL	MATERI/ POKOK BAHASAN	KET.
01	Kamis 05-03-020	**Pengantar:** - Silabus - Kerangka Perkuliahan (5W+1H) - Kesepakatan Perkuliahan/berbagai aturan dan tugas-tugas perkuliahan	CDT Daring
02	12-03-020	Konsep Dasar Kebijakan Publik	CDT/asp Daring
03	19-03-020	Perkembangan Historis Kebijakan Penidikan Di Indonesia	CDT/asp Daring
04	26-03-020	Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional Dan Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional	CDT/asp Daring
05	02-04-020	Formulasi Dan Pengesahan/Legitimasi Kebijakan Penidikan	DK-1 Daring
06	09-04-020	Sosialisasi Dan Komunikasi Kebijakan Penidikan	DK-2 Daring
07	16-04-020	Implementasi Kebijakan Penidikan	DK-3 Daring
08	23-04-020	**UTS**	Daring
	07-05-020	**Libur Hari Raya Waisak**	
09	14-05-020	Analisis Kebijakan	DK-4 Daring
	21-05-020	**Libur Kenaikan Isa Almasih**	
10	28-05-020	Monitoring Evaluasi Kebijakan Penidikan	DK-5 Daring
11	04-06-020	Kebijakan Makro/Nasional Pengemb Penidikan	DK-6 Daring
12	11-06-020	Kebijakan Messo/Daerah Pengemb Penidikan	DK-7 Daring
13	18-06-020	Kebijakan Mikro/Sekolah Pengemb Penidikan	DK-8 Daring
	22-27-020	**Cuti bersama Hari Raya Iedul Fitri tgl 22 sd. 27 Juni 2020**	
14	06 sd. 11-07-020	**UAS/Analisis**	Daring

Catatan:
*) Disesuikan SE Rektor UIN SGD No. B-392/Un. 05/II/04/HM.01/03/2020 Tgl 26 Maret 2020

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep kebijakan pendidikan secara komprehensip untuk kepentingan pengembangan pendidikan

6. Kebijakan Makro Pengemb Penidikan
- Konsep dasar kebijakan makro pendidikan;
- Bentuk/model kebijakan makro pendidikan
- Iplemetasi kebijakan makro pendidikan;
- Permasalah dan solusi kebijakan makro pendidikan;.

7. Kebijakan Meso Pengemb Penidikan
- Konsep dasar kebijakan meso pendidikan;
- Bentuk/model kebijakan meso pendidikan
- Iplemetasi kebijakan meso pendidikan;
- Permasalah dan solusi kebijakan meso pendidikan;.

8. Kebijakan Mikro Pengemb Penidikan
- Konsep dasar kebijakan mikro pendidikan;
- Bentuk/model kebijakan mikro pendidikan;
- Implemetasi kebijakan mikro pendidikan;
- Permasalah dan solusi kebijakan mikro pendidikan;.

Pertimbangan pengabungan Materi 11-12-13:

1. Waktu tersedia sebelum Cuti Bersama (22-27 Mei 2020), tidak ada lagi
2. Waktu tersedia setelah Cuti Bersama (22-27 Mei 2020), dialokasikan untuk Diskusi Kelompok dimuliai tanggal 4 Juni 2020

Substansi Materi

A-Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan Makro-Meso&Mikro

B-Bentuk/Model Kebijakan Pendidikan Makro-Meso&Mikro

C-Implementasi Kebijakan Pendidikan Makro-Meso&Mikro

D-Analisis, Masalah dan Solusi dalam Kebijakan Pendidikan Makro-Meso&Mikro

A. KONSEP DASAR

KEBIJAKAN PENDIDIKAN MAKRO, MESO & MIKRO

Definisi-1: Kebijakan

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepratatif, meskipun kebijakan juga mengatur "apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh". Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diintepretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada. ((Dunn, 1999) sudah dibahas sebelumnya)

Contoh kebijakan adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen, Perda,Keputusan Bupati, dan Keputusan Rektor Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan disini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Contoh ini juga memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro.

2. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan negara. Carter V Good (1959: 67) memberikan pengertian kebijakan pendidikan sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengopersikan pendidikan yang bersifat melembaga.

Kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.[1] Kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.[2] Menurut Onisimus, kebijakan pendidikan apabila dikaitkan dengan kebijakan publik ialah proses, aktivitas, strategi, prosedur, dan alternatif langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan permasalahan pendidikan nasional yang ditetapkan secara komprehensif dalam suatu kurun waktu tertentu.[3]

---

[1]H. A. R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). 7
[2]Tilaar, *kekuasaan Pendidikan …..*, 140
[3]Onisimus Amtu*, Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah Konsep, Stratrgi dan Implementasi*, (Bandung: Alfabet, 2013). Hal. 213

Uluran tangan dari pemerintah di bidang pendidikan dimaksudkan untuk mengemban amanat konstitusi. Amanat tersebut tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Rumusan tersebut ternyata mempunyai makna yang sangat dalam dan setiap periode mengalami interpretasi yang berbeda-beda. Berkembangnya tujuan pendidikan dari satu GBHN ke GBHN berikutnya mengindikasikan bahwa apa yang dikemukakan dalam UUD perlu untuk diinterpretasikan sesuai dengan zamannya. Saat ini berlaku UU.No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Standar nasional pendidikan dalam PP No. 19 tahun 2005Didukukung dengan bebarapa Peraturan lainnya.

Arah Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. **Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.**
2. **Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.**
3. **Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional.**
4. **Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.**
5. **Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.**
6. **Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.**
7. **Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.**
8. **Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.**

Setiap kebijakan yang dicontohkan disini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Contoh ini juga menurut Noeng Muhadjir (2013: 164), memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro.

www.fppl.info

B. BENTUK/MODEL KEBIJAKAN PENDIDIKAN MAKRO, MESO & MIKRO

AREA KEBIJAKAN PENDIDIKAN MAKRO, MESO & MIKRO

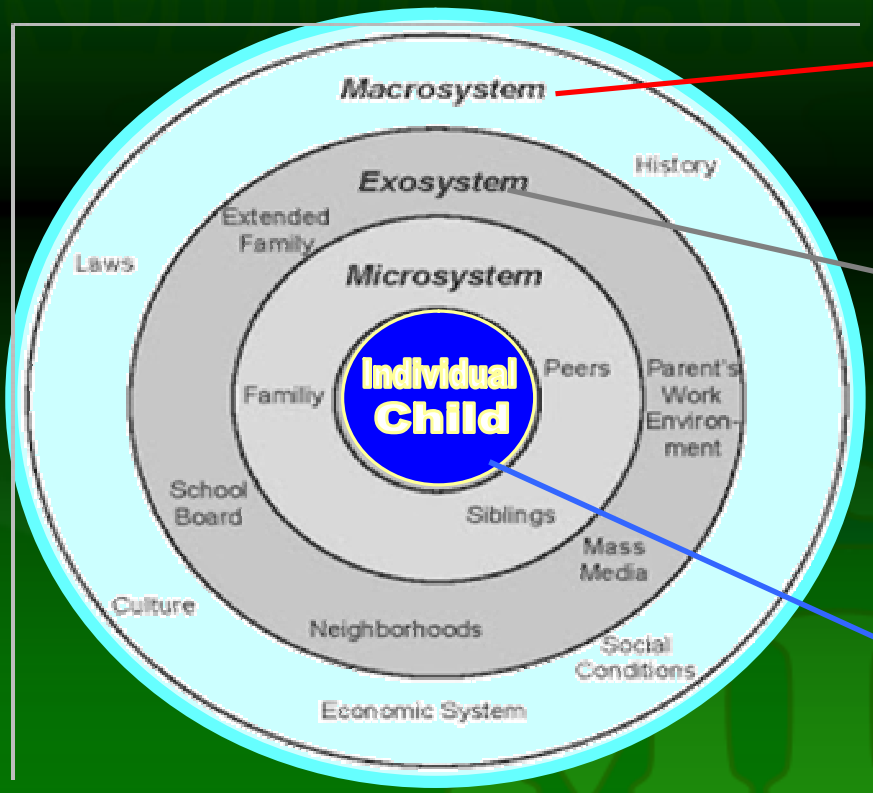

- Area makro adalah intervensi yang tersedia pada skala besar yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan sistem perawatan.

- Area mezo terjadi dalam skala menengah, yang melibatkan lingkungan, lembaga atau kelompok-kelompok kecil lainnya..

- Are mikro adalah praktek yang paling umum, dan terjadi secara langsung dengan klien individu atau keluarga.

www.fppt.info

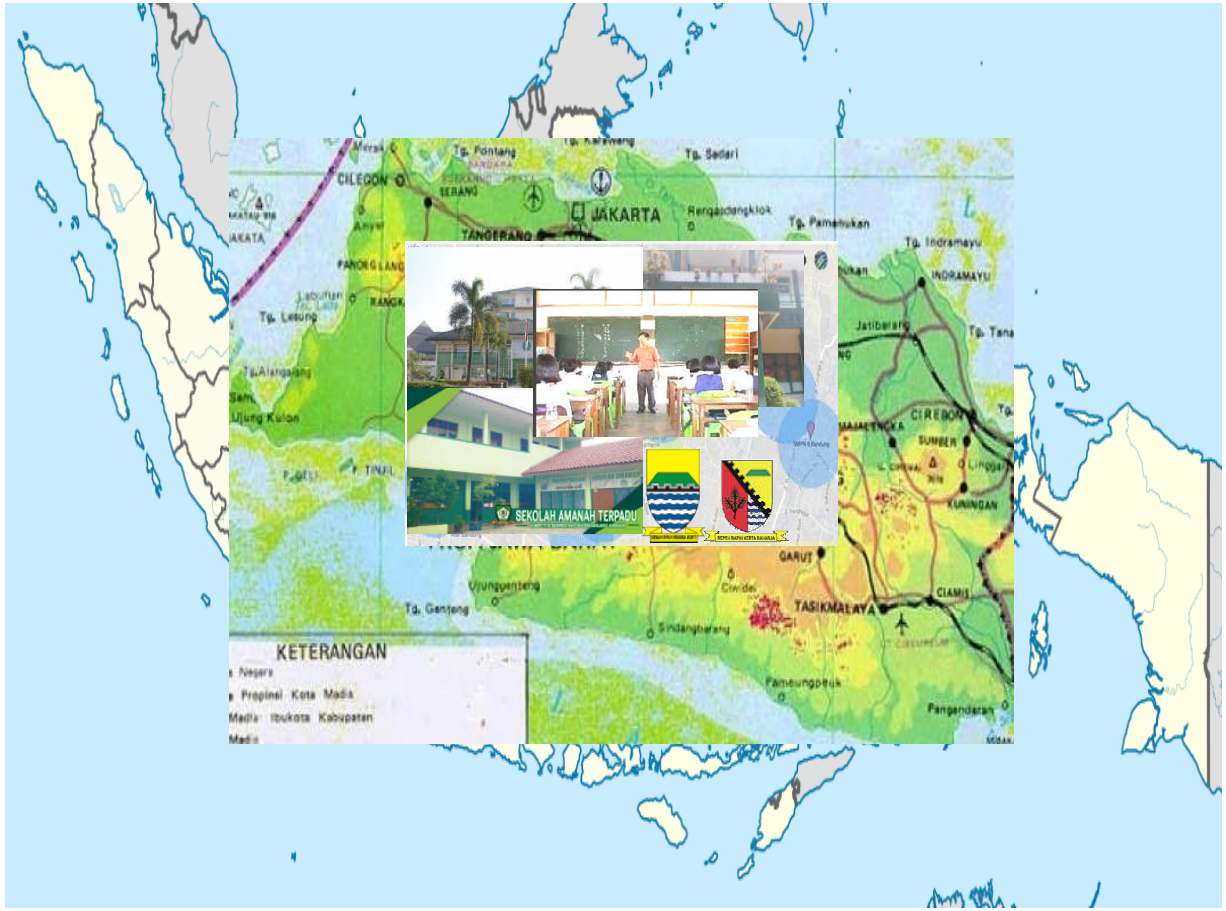
JAKARTA
CILEGON
SERANG
TANGERANG
INDRAMAYU
CIREBON
KUNINGAN
GARUT
TASIKMALAYA
CIAMIS
Ujung Kulon
Tg. Pontang
Tg. Sedari
Tg. Pamanukan
Tg. Indramayu
Tg. Leuung
Tg. Genteng
Sindangbarang
Pameungpeuk
Pangandaran
KETERANGAN
SEKOLAH AMANAH TERPADU

JENJANG KEBIJAKAN PENDIDIKAN MAKRO, MESO & MIKRO

Ruang lingkup kajian Level /Jenjang Kebijkan pendidikan

- Jenjang makro (memfokuskan pada kajian keterkaitan antara institusi pendidikan dengan masyarakat);
- Jenjang meso (memfokuskan pada kajian keterkaitan antarinstitusi pendidikan di suatu wilayah);
- Jenjang mikro (memfokuskan pada interaksi yang terjadi di dalam institusi pendidikan).

1. MODEL KEBIJAKAN PENDIDIKAN MAKRO

- Level intervensi makro dalam pekerjaan sosial meliputi lingkungan, komunitas dan masyarakat untuk mencapai perubahan sosial. Praktek pekerjaan sosial dalam ranah makro memerlukan pengetahuan tentang standar komunitas dan nilai, dan ketrampilan memobilisasi komunitas yang dibutuhkan dalam memprakarsai pemecahan masalah. (Dubois & Miley, 2014:71).
- Sedangkan menurut Sistem makro mengenai sistem yang lebih besar daripada kelompok kecl. Orientasi makro berfokus pada sosial, politik, dan kondisi ekonomi dan kebijakan yang berpengaruh bagi orang banyak dalam mengakses sumber dan hidup yang berkualitas. (Zastow & Ashman, 2004:12-13).
- Praktek kerja sosial makro adalah upaya untuk membantu klien dengan mengintervensi sistem yang besar. Contohnya termasuk melobi untuk mengubah undang-undang perawatan kesehatan, mengorganisir kelompok aktivis negara-lebar atau advokasi untuk perubahan kebijakan sosial skala besar. Praktek pekerjaan sosial makro adalah salah satu perbedaan utama antara pekerjaan sosial dan profesi pembantu lainnya, seperti terapi kejiwaan. Praktek pekerjaan sosial makro memberdayakan klien dengan melibatkan mereka dalam perubahan yang sistemik.

http://purwoudiutomo.com/tag/anggaran-pendidikan/

KEBIJAKAN PENDIDIKAN FORMAL

KAJIAN UTAMA KEBIJAKAN

1. UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Standar nasional pendidikan dalam PP No. 19 tahun 2005

Tujuan standarisasi pendidikan nasional

- sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu
- menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Keberadaan standar-standar tersebut diakui belum sempurna dan memerlukan penyesuaian dengan situasi menyangkut tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Standar komponen dan pengelolaan pendidikan formal yang berlaku secara nasional merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia. Standar nasional pendidikan yang berlaku meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

- Standar Kompetensi Lulusan
- Standar Isi
- Standar Proses
- Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- Standar Sarana dan Prasarana
- Standar Pengelolaan
- Standar Pembiayaan Pendidikan
- Standar Penilaian Pendidikan

www.fppi.info

STANDAR ISI

No	Nomor Permen	Tentang
1	Nomor 22 tahun 2006	Standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah
2	Nomor 24 tahun 2006	Pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dan Permendiknas No 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah

www.fppl.info

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No	Nomor Permen	Tentang
1	No 23 tahun 2006	Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah
2	No 24 tahun 2006	Pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 tahun 2006 tentang satuan pendidikan dasar dan menengah dan peraturan menteri pendidikan nasional no 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dan menengah

www.fppl.info

STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

NO	Nomor Permen	Tentang
1	Nomor 12 Tahun 2007	Standar pengawas Sekolah/Madrasah
2	Nomor 13 tahun 2007	Standar Kepala Sekolah/Madrasah
3	Nomor 16 Tahun 2007	Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
4	Nomor 24 Tahun 2008	Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
5	Nomor 25 Tahun 2008	Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
6	Nomor 26 Tahun 2008	Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah
7	Nomor 27 Tahun 2008	Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor

www.fppt.info

STANDAR PENGELOLAAN

No.	Nomor Permen	Tentang
1	Nomor 19 Tahun 2007	Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2	Nomor 17 tahun 2010	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3	Kepmendiknas No 129a/U/2004	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

www.fppt.info

STANDAR PENILAIAN

No.	Nomor Permen	Tentang
1	Nomor 20 Tahun 2007	Standar Penilaian Pendidikan

www.fppi.info

STANDAR SARANA PRASARANA

NO	Nomor Permen	Tentang
1	Nomor 24 Tahun 2007	Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA
2	Nomor 33 Tahun 2008	Standar Sarana dan Prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB
3	Nomor 40 Tahun 2008	Standar Sarana dan Prasarana untuk SMK/MAK

www.fppt.info

STANDAR PROSES

No	Nomor Permen	Tentang
1	Nomor 41 Tahun 2007	Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
2	Nomor 1 Tahun 2008	Standar Proses Pendidikan Khusus

www.fppt.info

Standar Biaya

NO	Nomor Permen	Tentang
1	Nomor 69 Tahun 2009	Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

www.fppt.info

SE 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19)

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT
PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* (COVID-19)

Yth.
1. Gubernur;
2. Bupati/Walikota,
di seluruh Indonesia.

Berkenaan dengan penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang semakin meningkat maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Ujian Nasional (UN):
   a. UN Tahun 2020 dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan;
   b. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
   c. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.
2. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
   b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;
   c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah;
   d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

3. Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini;
   b. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
   c. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
   d. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1) kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
      2) kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) /sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan; dan
      3) kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
4. Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini;
   b. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
   c. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah;
   b. PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan:
      1) akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/atau
      2) prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah;
   c. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.
6. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat kebersihan, *hand sanitizer, disinfectant*, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Maret 2020
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,

Nadiem Anwar Makarim

Tembusan Yth:
1. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
3. Seluruh Kepala Satuan Pendidikan.

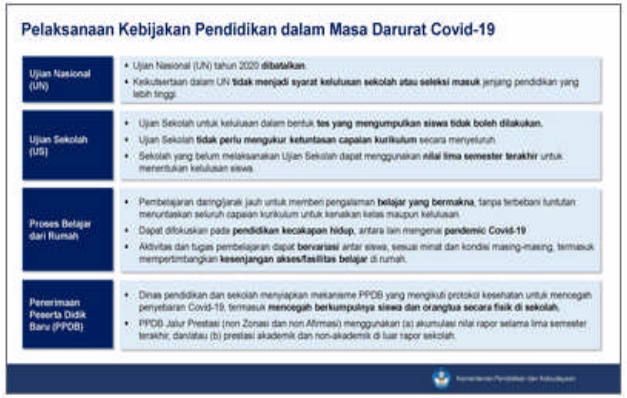

https://www.jogloabang.com/pendidikan/se-4-2020-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-masa-darurat-penyebaran-covid-19

www.fppi.info

2. MODEL KEBIJAKAN PENDIDIKAN MESO

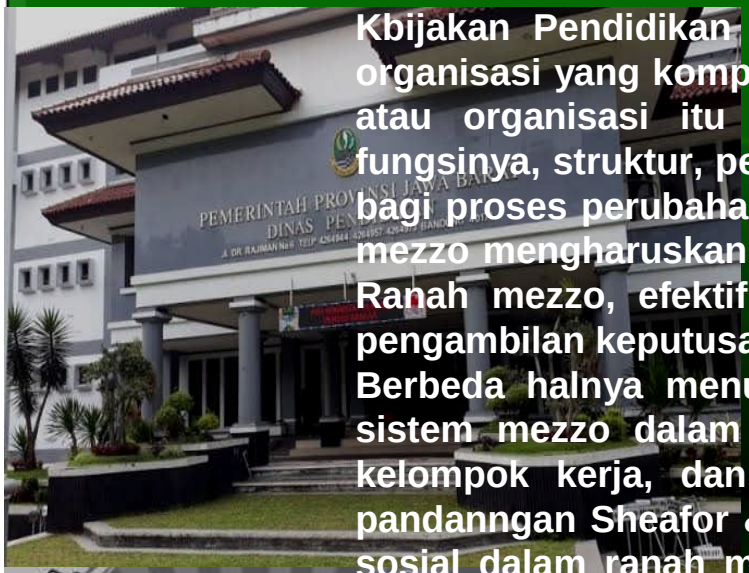

Kbijakan Pendidikan dalam ranah mezzo meliputi interaksi kelompok formal dan organisasi yang kompleks. Intervensi ranah mezzo, fokus untuk mengubah kelompok atau organisasi itu sendiri. Faktor-faktor dari kelompok dan organisasi yaitu fungsinya, struktur, peran, pola pengambilan keputusan, dan gaya pengaruh interaksi bagi proses perubahan. Lebih lanjut menurut dubois dan miley, bekerja dalam ranah mezzo mengharuskan untuk memahami dinamika kelompok, dan struktur organisasi. Ranah mezzo, efektifnya memerlukan ketrampilan dalam perencanaan organisasi, pengambilan keputusan, dan negosiasi konflik. (Dubois & Miley, 2014:69)

Berbeda halnya menurut Zastrow & Ashman (2004:12) yang menyebutkan bahwa sistem mezzo dalam kebijakan dengan beberapa kelompok kecil, yaitu keluarga, kelompok kerja, dan kelompok-kelompok sosial lainnya. Berbeda juga menurut pandanngan Sheafor & Herejsi (2003:10) yang menyebutkan bahwa pratek pekerjaan sosial dalam ranah mezzo mengenai relasi interpersonal yang lebih intim melebihi berhubungan dengan kehidupan keluarga tetapi lebih secara arti pribadi yang merupakan representasi antara organisasi dan institusi. Diantaranya mengenai relasi antara individu dalam kelompok terapi atau kelompok penyembuhan, antara kawan sebaya di sekolah atau tempat kerja, dan antara di tetangga.

Praktek pekerjaan ranah mezzo berhubungan dengan kelompok-kelompok kecil menengah, seperti lingkungan, sekolah atau organisasi lokal lainnya. Contoh praktek mezzo pekerjaan sosial yaitu pengorganisasian masyarakat, manajemen dari organisasi kerja sosial atau fokus pada institusi atau budaya perubahan daripada masing-masing klien. Aktor yang terlibat dalam praktek mezzo sering juga terlibat dalam mikro dan/atau kerja sosial makro. Hal ini memastikan kebutuhan dan tantangan dari masing-masing klien dipahami dan ditangani bersama-sama dengan isu-isu sosial yang lebih besar.

https://www.radardepok.com/2020/03/ini-isi-surat-edaran-disdik-jabar-yang-isinya-ada-penundaan-un/

www.fppt.info

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselboard (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

Bandung, 15 Maret 2020

Nomor : 443/ 3302– Set.Disdik
Sifat : amat segera
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Ujian Nasional dan Kegiatan Belajar Mengajar pada Satuan Pendidikan di Jawa Barat.

Kepada
Yth. 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-XIII, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota se-Jawa Barat
3. Kepala Satuan Pendidikan se-Jawa Barat
di
Tempat.

Bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 pada satuan pendidikan di Jawa Barat serta perkembangan kondisi saat ini, dengan memperhatikan:

a. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 19 (Covid-19) di Jawa Barat
b. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID -19) Pada Satuan Pendidikan;
c. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/26/HUKHAM Tanggal 13 Maret 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *Coronavirus Disease*-19 (COVID-19); dan
d. Surat Ketua BSNP Nomor 0114/SDAR/BSNP/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 perihal Pelaksanaan UN Tahun 2020 terkait Penyebaran Virus Corona (COVID-19).

kami minta Saudara melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilaksanakan di rumah masing-masing mulai tanggal 16 s.d. 29 Maret 2020;
2. Kepala Satuan Pendidikan agar menugaskan setiap Guru dan Tenaga kependidikan untuk memberikan tugas/pembelajaran jarak jauh kepada seluruh peserta didik yang diliburkan sebagaimana angka 1, serta tetap hadir di satuan pendidikan sesuai hari dan jam kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dalam pemberian tugas/pembelajaran jarak jauh yang diberikan oleh guru agar menyampaikan materi yang berhubungan tentang edukasi mengenai Covid-19;
3. Kepala Satuan Pendidikan menginformasikan kepada orangtua peserta didik untuk melakukan pengawasan dan memastikan putra/putrinya melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah (tidak melakukan bepergian/wisata dan/atau kegiatan lain yang tidak selaras dengan berbagai upaya pencegahan Penularan Infeksi Covid-19)
4. Kepala Cadisdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota se-Jawa Barat bersama dengan Pengawas Sekolah melakukan pemantauan penyelenggaraan KBM sebagaimana angka 1 di setiap satuan pendidikan sebagaimana kewenangannya;
5. Sehubungan terdapatnya keadaan darurat, yaitu telah ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi di Provinsi Jawa Barat, maka penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah ditunda sementara waktu sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian;
6. Kepala Cadisdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota, dan Kepala Satuan Pendidikan agar melaporkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut di atas secara berjenjang melalui saluran informasi yang tersedia;
7. Menunda kegiatan untuk mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar instansi dan satuan pendidikan (seminar, studi wisata, berkemah, dan kegiatan sejenis lainnya);
8. Dalam pelaksanaannya, agar seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan, guru, tenaga kependidikan, serta peserta didik agar melaksanakan pola hidup sehat dan mempedomani Surat Edaran Gubernur Jawa Barat nomor 400/26/HUKHAM Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *Coronavirus Disease*-19 (COVID-19) baik di instansi kerja, satuan pendidikan, maupun rumah.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat,

Dr. Ir. DEWI SARTIKA, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196301221986032004

Tembusan, Yth.:
1. Bapak Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
6. Pengawas SMA/SMK/SLB se-Jawa Barat.

Scanned with CamScanner

3. MODEL KEBIJAKAN PENDIDIKAN MIKRO

- Intervensi Kebijkan mikro dalam pekerjaan sosial meliputi individu, keluarga atau dalam kelompok kecil untuk memfasilitasi perubahan perilaku individu atau dalam relasinya dengan orang lain. Lebih lanjut menurut Dubois dan Miley menyatakan bahwa individu sering mencari layanan pekerja sosial karena pengalaman pahit mereka dalam penyesuain diri, relasi interpersonal, atau karena stress dari lingkungan. (Dobuis & Miley (2014:69)
- Focus perubahan dan level mikro ini adalah menciptakan keberfungsian individu. Berbeda halnya menurut Zastrow & Ashman (2004:12) yang menyebutkan bahwa ranah mikro hanya meliputi individual saja. Sistem dalam ranah mikro ini memerlukan interaksi dari sistem biologis, psikologis dan sosial dari individu. Orientasi dari ranah mikro dalam praktek pekerjaan sosial focus pada kebutuhan individu, masalah dan kekuatan.
- Praktek pekerjaan sosial mikro adalah jenis yang paling umum dari pekerjaan sosial, dan bagaimana kebanyakan orang membayangkan pekerja sosial memberikan pelayanan. Dalam pekerjaan sosial mikro, pekerja sosial terlibat dengan individu atau keluarga untuk memecahkan masalah. Contoh umum termasuk membantu individu untuk mencari perumahan yang tepat, perawatan kesehatan dan pelayanan sosial. Terapi keluarga dan konseling individu juga akan jatuh di bawah naungan praktek mikro, seperti yang akan seorang individu atau keluarga, dan pengobatan orang yang menderita kondisi kesehatan mental atau masalah penyalahgunaan zat. Menurut salah satu sumber, praktek pekerjaan sosial mikro bahkan mungkin termasuk dalam pekerjaan sosial militer (*military social work*, di mana pekerja sosial membantu anggota militer menghadapi tantangan yang menyertai kehidupan militer dan mengakses manfaat yang merupakan hak mereka dengan layanan mereka. Banyak pekerja sosial terlibat dalam praktek mikro dan mezzo secara bersamaan. Bahkan intervensi pada tingkat makro yang paling ambisius memiliki akar dalam percakapan antara seorang pekerja sosial tunggal dengan satu klien.

https://www.google.com/search?q=Kebijakan+pendidikan+tingkat+Mikro+Sekolah&tbm=

www.fppt.info

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
Jalan A.H.Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614 Telp. (022) 7800525 Fax. (022) 7803936
website: www.uinsgd.ac.id e-mail: info@uinsgd.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor: B-392/Un.05/II.4/HM.01/03/2020

TENTANG
TINDAK LANJUT KEBIJAKAN AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA

Kepada Yth.
1. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana
2. Para Kepala Lembaga dan Ketua Pusat
3. Para Kepala Biro dan Kepala Bagian
4. Sivitas Akademika
di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia no. 697/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: B-352/Un.05/II.4/HM.01/03/2020, tanggal 15 Maret 2020 tentang Kebijakan Akademik dan Non-Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung terkait Pencegahan Penyebaran Virus Corona; dan memperhatikan kondisi darurat bencana wabah virus corona yang saat ini sedang terjadi, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Perkuliahan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan sistem daring (*online*)/penugasan/bentuk lainnya di luar tatap muka diperpanjang sampai akhir perkuliahan semester genap tanggal 4 Juli 2020.
2. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan secara daring sesuai kalender akademik yaitu: 20-25 April 2020 untuk UTS; dan 06 Juli-11 Juli 2020 untuk UAS.
3. Seluruh kegiatan akademik baik berupa Ujian Komprehensif, Seminar Proposal, dan Ujian Munaqasyah, demikian pula bimbiingan skripsi/tesis/disertasi dan kegiatan penelitian dapat dilakukan secara daring dengan tetap memperhatikan aturan dan norma akademik yang berlaku.
4. Kegiatan praktikum yang menunjang pembelajaran ditiadakan, sedangkan praktikum untuk tugas akhir yang bersifat *hands-on* dibolehkan dengan prosedur yang ketat dan mempertimbangkan protokol kesehatan.
5. Dalam pemberian tugas, dosen harus mengedepankan asas proporsional dan memperhatikan kondisi psikologis mahasiswa.
6. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melaporkan pelaksanaan kegiatan akademik daring sebagai bahan evaluasi di tingkat universitas.
7. Selama masa darurat bencana wabah virus corona, akses masuk ke lingkungan kampus dibatasi dengan ketat. Ini berlaku untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa kecuali memiliki kepentingan mendesak/tidak dapat ditunda atas izin pimpinan unit dan diperiksa tim satuan pengamanan kampus di pintu gerbang.
8. Menghentikan sementara semua kegiatan yang bersifat massal di lingkungan kampus termasuk kegiatan kemahasiswaan.
9. Seluruh sivitas akademik diharapkan mengikuti arahan pemerintah untuk melakukan *social distancing* dan jika memiliki gejala demam, batuk, pilek, dan sesak nafas dapat berkoordinasi dengan menghubungi call center 022-7800525, 081223981 01, 081223468618.
10. Hal-hal yang bersifat teknis terkait pembelajaran daring ini akan dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri.
11. Kebijakan Akademik dan Non-Akademik Pencegahan Virus Corona ini akan ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan serta kebijakan pemerintah.

Demikian edaran ini kami sampaikan. Semoga Allah Swt. melindungi kita semua. Aamin. Atas kerjasama yang baik dari semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Bandung, 26 Maret 2020
Rektor

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
NIP. 196204101988031001

www.fppi.info

C. IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN PENDIDIKAN MAKRO, MESO & MIKRO

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

1. KEBIJAKAN PENDIDIKAN MAKRO

Contoh

Kebijakan Nasional Pendidikan Karakter

PRODUK

1. Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025
2. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
4. Arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet Terbatas Bidang Kesra tanggal 18 Maret 2010
5. Arahan Presiden RI pada Rapat Kerja Nasional di Tampak Siring, Bali Tanggal 19- 20 April 2010
6. Arahan Presiden RI pada Puncak Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Istana Negara Tanggal 11 Mei 2010

2. KEBIJAKAN PENDIDIKAN MESO

Contoh

Kebijakan Nasional Pendidikan Karakter

STRATEGI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER

1. STREAM TOP DOWN

- SOSIALISASI
- PENGEMBANGAN REGULASI
- PENGEMBANGAN KAPASITAS
- IMPLEMENTASI & KERJASAMA
- MONITORING & EVALUASI

2. STREAM BOTTOM UP

ILUSTRASI *BEST PRACTICE*
Talent scouting; IHE; YPI Al -Hikmah; The ESQ Way 165; MHMMD; DLL

3. STREAM REVITALISASI PROGRAM

SOSIO PEDAGOGIS
Pramuka; Kantin Kejujuran; UKS; PMR; Perlombaan/-olimpiade sains & OR; revitalisasi gugus sekolah

INTEGRASI 3 PENDEKATAN
1.KBM
2.Pengembang-an Budaya Satuan Pendidikan;
3.Keg. Ko-Kurikuler &/-Ekstrakurikuler;
4.Kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat.

PENYIAPAN PERANGKAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SATUAN PENDIDIKAN

1. Pembentukan Tim "Penggerak" Tingkat Nasional, Tingkat Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, dan Tingkat satuan Pendidikan
2. Pemetaan kesiapan pelaksanaan Pendidikan Karakter PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM untuk setiap Kabupaten/Kota (**Sumber** : Bantuan Teknis Profesional Tim Pengembang Kurikulum di Tingkat Propinsi dan Kab/Kota, 2010; T.O.T Tingkat Utama dan Tingkat Nasional terhadap 1200 peserta dari unsur-unsur unit Utama Kemendiknas, Dinas Pendidikan Provinsi & Kab/Kota, P4TK; LPMP; Universitas baik negeri maupun swasta;);
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan Pendidikan Karakter pada setiap satuan penddikan (**Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter**);
4. Penyiapan bahan sosialisasi berupa bahan/materi pelatihan untuk pelaksanaan Pendidikan Karakter dengan waktu/masa pelatihan yang bervariasi; *booklet*, *leaflet* diperuntukan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di setiap satuan pendidikan;
5. Contoh-contoh *Best Practice* pelaksanaan pendidikan karakter di setiap jenjang pendidikan (**Sumber**: Laporan hasil piloting di 16 propinsi 16 Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Pusat Kurikulum pada Tahun Anggaran 2010.

www.fppi.info

3. KEBIJAKAN PENDIDIKAN MIKRO

Contoh

Kebijakan Nasional Pendidikan Karakter

PROSEDUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

1. Melaksanakan sosialisasi pendidikan karakter kepada seluruh komponen warga sekolah (tenaga pendidik dan kapendidikan serta komite sekolah).
2. Membuat komitmen dengan semua *stakeholder* (seluruh warga sekolah, orang tua siswa, komite, dan tokoh masyarakat setempat) untuk mendukung pelaksanaan pendidikan karakter.
3. Melakukan analisis konteks menganalisis kondisi sekolah (internal dan eksternal) yang dikaitkan dengan nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
4. Menyusun rencana aksi sekolah berkaitan dengan penetapan nilai-nilai pendidikan karakter.
5. Menyusun program pelaksanaan pendidikan karakter (pengintegrasian melalui pembelajaran, penyusunan mata pelajaran muatan lokal , kegiatan lain, penjadualan dan penambahan jam belajar di sekolah)
6. Melakukan pengkondisian (penyediaan sarana , keteladanan , *reward* dan *punishment*)
7. Melakukan penilaian keberhasilan dan supervisi pelaksanaan pendidikan karakter menggunakan indikator-indikator keberhasilan.
8. Melakukan penyusunan KTSP yang memuat pengembangan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa.

INDIKATOR AWAL SEKOLAH BERKARAKTER BANGSA

- **BERSIH, RAPI DAN NYAMAN**
  - Tersedia toilet yang selalu bersih dan tersedia air dan fasilitasnya
  - Bak sampah tersedia di tempat-tempat yang semestinya
  - Tanaman di halaman terpelihara dan menimbulkan rasa sejuk
- **DISIPLIN**
  - Tenaga kependidikan dan peserta didik datang tepat waktu dan pembelajaran berlangsung dengan baik
  - Aturan yang sudah disetujui oleh warga sekolah harus dilaksanakan dengan baik
- **SOPAN**
  - Guru dan tenaga kependidikan serta peserta didik saling memberi salam jika bertemu
  - Berpakaian rapi dan sopan
  - Apa lagi?
- **DILANJUTKAN DENGAN INDIKATOR NILAI-NILAI YANG LAIN**

D. ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN MAKRO, MESO & MIKRO

MASALAH

Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan, baik di tingkat makro (Nasional), tingkat messo (daerah), dan tingkat mikro (satuan pendidikan). Masalah-masalah di Negara kita misalnya: [1]

1. Belum terealisasikan bahwa pendidikan sebagai bidang usaha yang terbuka bagi penanam modal asing (kepres no.77/2001).
2. *Mindset* masyarakat tentang pendidikan yang bermutu sebagai piranti filter terhadap pengaruh budaya asing belum terbentuk dengan baik
3. Belum siapnya lembaga pendidikan dan perangkatnya (guru, manajemen, kurikulum, metode, dll)
4. *Mindset* mutu pendidikan belum merata di kalangan penduduk indonesia . *Mind set* tentang mutu pendidikan internasional belum merata di kalangan lembaga pendidikan
5. Pelayanan pendidikan masih lebih mengutamakan keterjangkauan saja daripada mementingkan mutu
6. Investor asing lebih memperhatikan pada keuntungan sehingga memungkinkannya terjadi

[1] Indonesia education strategic plan"masalah-masalah Negara"

TANTANGAN

Tantangan utama

pembangunan pendidikan di Indonesia

a. Tingkat pendidikan penduduk Indonesia relatif masih rendah;

b. Dinamika perubahan struktur penduduk

c. Kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antar kelompok masyarakat

d. Fasilitas pelayanan pendidikan belum tersedia secara merata, terutama di daerah pedesaan, terpencil, dan kepulauan, sehingga menyebabkan sulitnya anak-anak mengakses layanan pendidikan

e. Kualitas pelayanan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik

f. Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien terutama karena desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik.

PELUANG

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH

1. Meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan dasar, dengan target utama daerah dan masyarakat miskin, terpencil, dan terisolasi.
2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan menerapkan standar nasional pendidikan sebagai acuan dan rambu-rambu hukum untuk meningkatkan mutu berbagai aspek pendidikan nasional termasuk mutu pendidik dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi lulusan, pembiayaan pendidikan dan penilaian pendidikan,
3. Meningkatkan anggaran pendidikan untuk dapat mencapai 20 persen dari APBN dan APBD sesuai amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Mendorong pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan sampai dengan satuan pendidikan dalam menyelenggaraan pendidikan.
5. Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan dalam rangka membangun pelayanan pendidikan yang amanah, efisien, produktif dan akuntabel melalui upaya peningkatan tata kelola yang baik (*good governance*) kelembagaan pendidikan.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah dan dewan pendidikan dalam

Ingat menulis CK

Disin Anda sudah dimulai diajak berfikir tinkat tinggi, bukan hanya menyalin materi semata

Deskripsi

- ……
  ……
  ……
- ……
  ……
  ……
- ……
  ……
  ……
- ……
  ……
  ……

Summary

……
……

Untuk motivasi temukan laman ini: Efektivitas Menulis Assigment http://arusdian.id/2020/04/22/efektivitas-menulis-assigment/

YU KULIAH Part: XI

SUBSTANSI

KEBIJAKAN STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009

Tentang Standar Nasional tentang Pendidikan

1. **Standar Isi**
2. **Standar Kompetensi Lulusan**
3. **Standar Proses**
4. **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**
5. **Standar Sarana dan Prasarana**
6. **Standar Pengelolaan Pendidikan**
7. **Standar Pembiayaan Pendidikan**
8. **Standar Penilaian Pendidikan**

Disusun:

SEBAGAI BAHAN ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENGUATAN TUGAS TERSTRUKTUR DILKUKAN OLEH KELOMPOK

Oleh:

Dr. H. A. Rusdiana, MM

JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG 2020

KEBIJAKAN STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009

Tentang Standar Nasional tentang Pendidikan

1. Permen Diknas tentang Standar Isi

No	Nomor Permen	Tentang	Petugas
1	2	3	4
1	Nomor 22 tahun 2006 (Download Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 dan Lampiran)	Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	**Anggota Kelompok 1:**
2	Nomor 24 tahun 2006 (Download Permendiknas No. 24 tahun 2006)	- Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah dan - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah	
3	Nomor 14 Tahun 2007 (Download Permendiknas No. 14 tahun 2007)	Standar Isi Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C	

2. Permen Diknas tentang Standar Kompetensi Lulusan:

NO	Nomor Permen	Tentang	Petugas
1	Nomor 23 Tahun 2006 (Download Permendiknas No. 23 Tahun 2006 dan Lampiran)	- Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	**Anggota Kelompok 2:**
2	Nomor 24 tahun 2006 (Download Permendiknas Nomor 24 tahun 2006)	- Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah dan - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah	

3. Permen Diknas tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Nomor Permen	Tentang	Petugas
1	Nomor 12 Tahun 2007 (Download Permendiknas No. 12 Tahun 2007)	Standar pengawas Sekolah/ Madrasah	**Anggota Kelompok 3:**
2	Nomor 13 tahun 2007 (Download Permendiknas No. 13 tahun 2007 dan Lampiran)	Standar Kepala Sekolah/Madrasah	
3	Nomor 16 Tahun 2007 (Download Permendiknas No. 16 Tahun 2007)	Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru	

No	Nomor Permen	Tentang	Petugas
4	Nomor 24 Tahun 2008 (Download Permendiknas No. 24 tahun 2008)	Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah	
5	Nomor 25 Tahun 2008 (Download Permendiknas No. 25 tahun 2008)	Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah	
6	Nomor 26 Tahun 2008 (Download Permendiknas No. 26 Tahun 2008)	Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah	**Anggota Kelompok 4:**
7	Nomor 27 Tahun 2008 (Download Permendiknas No. 27 tahun 2008)	Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor	
8	Nomor 40 Tahun 2009 (Download Permendiknas No. 40 tahun 2009)	Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan	
9	Nomor 41 Tahun 2009 (Download Permendiknas No. 41 tahun 2009)	Standar Pembimbing Pada Kursus & Pelatihan	
10	Nomor 43 Tahun 2009 (Download Permendiknas No. 43 tahun 2009)	Standar Tenaga Administrasi Program paket A , Paket B, dan Paket C	

No	Nomor Permen	Tentang	Petugas
11	Nomor 42 Tahun 2009 (Download Permendiknas No. 42 Tahun 2009)	Standar Pengelola Kursus	**Anggota Kelompok 5:**
12	Nomor 44 Tahun 2009 (Download Permendiknas No. 44 tahun 2009)	Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B dan Paket C	
13	Nomor 45 Tahun 2009 (Download Permendiknas No. 45 tahun 2009)	standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan	

4. Permen Diknas tentang Standar Pengelolaan :

NO	Nomor Permen	Tentang	Petugas
1	Nomor 19 Tahun 2007 (Download Permendiknas No. 19 tahun 2007)	Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;	sda

5. Permen Diknas tentang Standar Penilaian:

NO	Nomor Permen	Tentang	Petugas
1	Nomor 20 Tahun 2007 (Download Permendiknas No. 20 tahun 2007)	Standar Penilaian Pendidikan	sda

6. Permen Diknas tentang Standar Sarana Prasaran :

No	Nomor Permen	Tentang	Petugas
1	Nomor 24 Tahun 2007 (Download Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007)	Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA	**Anggota Kelompok 6:**
2	Nomor 33 Tahun 2008 (Download Permendiknas Nomor 33 tahun 2008)	Standar Sarana dan Prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB	
3	Nomor 40 Tahun 2008 (Download Permendiknas No. 40 tahun 2008)	Standar Sarana dan Prasarana untuk SMK/MAK	

7. Permen Diknas tentang Standar Proses :

No	Nomor Permen	Tentang	Petugas
1	Nomor 41 Tahun 2007 (Download Permendiknas No. 41 tahun 2007)	Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	**Anggota Kelompok 7:**
2	Nomor 1 Tahun 2008 (Download Permendiknas No. 1 tahun 2008)	Standar Proses Pendidikan Khusus	
3	Nomor 3 Tahun 2008 (Download Permendiknas No. 3 tahun 2008)	Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C	

8. Permen Diknas tentang Standar Biaya :

No	Nomor Permen	Tentang	Petugas
1	Nomor 69 Tahun 2009 (Download Permendiknas No. 69 tahun 2009)	- Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)	**Anggota Kelompok 8:**

Tambahan: Permendiknas tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini :

No	Nomor Permen	Tentang	Petugas
1	Nomor 58 Tahun 2009 (Download Permendiknas No. 58 tahun 2009)	Standar Pendidikan Anak Usia Dini	**Anggota Kelompok 8:**

YU KULIAH Part: XII

SOSILAISASI KEBIJAKAN DISKUSI KELOMPOK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DISKUSI KELOMPOK
MATA KULIAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN, JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH KEGURUAN UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Standar Operasional Prosedur (SOP) Diskusi Kelompok

Standar Operasional Prosedur (SOP), dapat didefinisikan sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional dari suatu kebijakan yang harus dilakukan sehari-hari, dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dilakukan secara benar, tepat, dan konsisten, untuk menghasilkan produk sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya (Tathagati, 2014). Adanya SOP akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan, memberikan suatu rancangan berupa SOP yang akan menjadi pedoman karyawan dalam melakukan tugasnya dan untuk meminimalisasi kesalahan saat melakukan tugas masing-masing karyawan. Sedangkan menurut Budihardjo (2014), standar operasional prosedur (SOP) adalah suatu perangkat lunak pengatur, yang mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu.

Hampir semua lembaga yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia mempunyai standar operasional prosedur (SOP). Tidak hanya di dunia pemerintahan, pendidikan dan lain sebagainya, suatu perusahaan manufaktur juga memerlukan SOP disetiap departemen yang ada diperusahaan tersebut. Terlebih saat ini sedangkan dihadapkan dengan menyonsong Masaa/Era New Normal. Segala urusan dalam kehidupan harus berbasis SOP.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Diskusi kelompok dalam kontek ini, digunakan sebagai pratik mata kuliah Kebijakan Pendidikan, dengan harapan untuk memberikan suatu rancangan berupa SOP yang akan menjadi pedoman mahasiswa dalam melakukan tugasnya (diskusi kelompok) dan untuk meminimalisasi kesalahan saat melakukan tugas dan fungsinya masing-masing, baik tugas individu maupun kelompok.

1 Kelompok Mahasiswa Tugas Penyaji (KMTJ)

Secara umum Kelompok Mahasiswa KMTJ memiliki tugas dan fungsi menyiapkan Admiistrasi/sarana kelengkapan Diskusi (Termasuk ID ZOOM).

Secara khusus KMTJ, memiliki TUSI, antara lain:

1. Menyiapkan, menyusun, dan merivisi Makalah dan membagikan kepada kelompok lain
2. Membuat Poster untuk disajikan pada waktu presentasi, proses pembuatanya melibatkan anggota kelompok. Dengan cara memilih poster tebaik yang dibuat oleh anggota, selanjutnya dijadikan Poster andalan dalalam penyajian/presentasi, sekaligus pembuat dijadikan Penyaji.
3. Membagi tugas pada anggota dengan prinsip (bagi habis) artinya semua anggota harus kebagian tugas. Dalam menyukseskan Acara presentasi.
4. Meminta nama identitas penyampai masukan dari kelompok penyanggah (KLMPJ) untuk ditulis dalam Poster Informasi/undangan (lihat Contoh).
5. Membuat Poster Informasi/undangan, Denga prinsip 5W+1H. (lihat Contoh).

2 Kelompok Mahasiswa Penyanggah (KMPN)

Secara umum Kelompok Mahasiswa penyanggah (KMPN) menyiapkan ADM kelengkapan Diskusi dan menyampaikan Nama Jubir Bicara Kepada KMTJ

Secara khusus KMPN memiliki TUSI, antara lain:

1. Menerima, Makalah dari kelopk lain untuk direvisi
2. Membagi tugas pada anggota dengan prinsip (bagi habis) artinya semua anggota harus kebagian tugas. Untuk merevisi Makalah dari kelopk lain
3. Membuat Berita acara&laporan singkat untuk disampaikan pada waktu presentasi, proses pembuatanya melibatkan anggota kelompok. Dengan cara memilih masukan tebaik yang dibuat oleh anggota, selanjutnya dijadikan andalan untuk disampaikan pada presentasi, sekaligus pembuat dijadikan Penyaji.
4. Meyampaikan nama identitas/poto juru bicara Kepada KMTJ

3

Kelompok Mahasiswa Tugas Penyaji (KMTJ)

Secara umum Kelompok Mahasiswa MKTJ, dalam tahapan ini mengiformasikan ke khalayak kelas pada WAG kelas. (Termasuk ID ZOOM)

Secara khusus KMPN dallam tahapan ini memiliki TUSI, menyapaikan informasi memuat:

1. Identitas Judul Diskusi
2. Identitas Individu yang terlibat
3. Waktu tempat
4. Fasilitas Via ZOOM (ID) ZOOM
5. Himbowan ajakan/Ungangan (lihat contoh)
6. Dapat dipastikan Semua mahasiwa sudah memiliki ID ZOOM sehari sebelum Diskusi dilaksanakan

4

Semua Mahasiswa

Secara umum Semua Mahasiswa menerima informasi paling lambat sehari sebelum diskusi dilaksanakan (dipastikan sudah memiliki ID.. ZOOM) untuk mempersiapkan diri terkait tugas individu maupun kelompok.

Secara khusus/indiividu semua mahasiswa dalam tahapan ini memiliki TUSI:

1. Memahami ID ZOOM yang diberikan untuk *pass word* masuk kelas Virtual
2. Menyiapkan Identitas Diri denga Lebel dada bukti Absen (code yang digunakan di G C R)
3. Menerima tugas dari kelompok (misal ditunujuk sebagai Jubir klpk untuk menyampaikan masukan pada waktu presentasi)
4. Menyiapkan Lembar CK untuk mencatat apa yang disampaikan oleh Penyaji kelompok, maupun Ulasan Dosen. Berfungsi melegkapi Portofolio Individu. (terkait dengan no 6)

5

Kelompok Mahasiswa Tugas Penyaji (KMTJ)

Secara umum Kelompok Mahasiswa KMTJ dalam tahap ini memiliki tugas dan fungsi Melaksanakan presentasi POSTER via Zoom/aplikasi. (Sesuai dengan susunan Acara)

Secara khusus KMTJ, memiliki TUSI, antara lain:

1. Menyiapkan, Sususnan Acara untuk ditayangkan pada pembukaan oleh Moderator
2. Isi Susunan Acara Diskusi Kelompok
   - Pembukaan oleh Moderator tayangkan gambar/poster susunan Acara, Berbicara sesuai isi gambar/POSTER.
   - Penyajian Materi oleh petugas yang terpilih. Tayangkan Poster, Berbicara sesuai isi POSTER.
   - Penyampaian Tanggapan/masukan oleh petugas KMPN
   - Penyampain Rankuman isi tanggapan dari masukan oleh petugas KMPN. Sampai pada kesimpulan.
3. Membagi tugas pada anggota dengan prinsip (bagi habis) artinya semua anggota harus kebagian tugas. Dalam menyukseskan Acara presentasi.
4. Pentup do'a.

Sudah barang tentu 4 poin penting di atas, tidak lepas dari alokasi dan kontrol waktu. Untuk diskusi kali ini disediakan waktu 20 menit.

ULASAN DOSEN (waktu menyesuaikan)

6

Semua Mahasiswa

Secara umum Semua Mahasiswa secara individu pada tahapan ini dipastikan dapat melihat, mendengar mencatat isi materi yang dipaparkan (disini LCK berfungsi sebagai kelenkapan POTOFOLIO INDIVIDU)

Secara khusus/indiividu semua mahasiswa dalam tahapan ini memiliki TUSI:

1. Memahami isi materi yang disampaiakan melalui pendengaran dan penglihatan/baca
2. Menulis apa yang dipikirkan dari hasil pendengaran dan penglihatan/baca
3. Menulis pada Lembar CK, dengan substansi: Deskripsi isi materi bagian dilengkapi summary. (ingat menulis dalam GCR), kalau pada CGR sumbernya hanya lihat/baca, disini subemya lihat, baca, dan dengar.

7

Kelompok Mahasiswa penyanggah (KMPN)

Secara umum Kelompok Mahasiswa penyanggah (KMPN), dalam tahap ini; - Menyapaikan Masukan dan menyerahkan Fail Berkas Revisi Paper kepada KMTJ

Secara khusus KMPN dalam tahapan ini memiliki TUSI:

1. Jubir yang diberi tugas oleh kelompok, menyampaikan ringkasan isi materi hasil revisi kelompok, melalui tayangan. Berbicara sesuai denga apa yang ditagkan
2. Isi yang ditayankan mencakup Konten dan teknis sesuai porsi yang ditentukan
3. Setelah Jubir, berbicara/menyampaikan masukan; KMPN menyerahkan Fail Berkas Revisi Paper (secara lengkap) kepada KMTJ.

8

Kelompok Mahasiswa Tugas Penyaji (KMTJ)

Secara umum Kelompok Mahasiswa KMTJ dalam tahap ini memiliki tugas dan fungsi – Menerima Masukan Fail revisi dari KMPN -Membuat berita Acara (BA) notulen-Menyampaikannya pada akhir Diskusi

Secara khusus KMTJ, memiliki TUSI, antara lain:

1. Menerima Masukan & Fail revisi dari KMP secara lengkap
2. Membuat berita Acara (BA) notulen atau rekaman proses diskusi
3. Menyampaikan isi masukan dari KMPN pada akhir Diskusi dalam betuk tayang (apa yang disapaikan sesuai dengan apa yang ditayang kan
4. Membuat BA berfungsi sebagai kelengkapan PORTOFOLIO Kelompok

DISKUSI KELOMPOK

FORMULASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Diselenggarakan oleh:

Kelompok 1 (MPI/VI B)

Dosen Pengampu

Mata Kuliah
KEBIJAKAN PENDIDIKAN

KELOMPOK PENYAJI

Muhammad Risal Umami
(Ketua Kelompok)

1

12

Mochamad Yasin Nurjaman
(Pemateri)

Mia Nurul Amallya
(Notulen)

14

17

Muhammad Dzikry Alizar
(Moderator)

Mr. Ibrohem Hama
(Penjawab)

16

Kamis
11 Juni 2020
Pukul 15.50 Wib–
Selesai

LIVE
ZOOM

Narahubung:
Mia Nurul Amallya (081312366198)

KELOMPOK PENYANGGAH

Muhammad Aan A.
(Kelompok 2)

1

Nurul Hidayanti
(Kelompok 3)

17

Raya Oktavia
(Kelompok 4)

12

Sri Nisa N
(Kelompok 5)

14

Walid Ependi P
(Kelompok 6)

16

Wawan Kurniawan
(Kelompok 7)

16

Yushi Arifah
(Kelompok 8)

16

*SEMUA ANGGOTA KELAS WAJIB MENGIKUTI

TERAMPIL MENULIS POSTER
JUDUL
Nama Penulis 1 ..... 2 ..... 3 ..... dst.....
Institusi.....
Abstrak
Memberikan summary secara akurat mengenai hipotesis atau pertanyaan penelitian (research question), metode, data dan konklusi
Metode
Bagaimana studi ini dilakukan?
Diskusi
- Apa Makna hasil yang diperoleh?
- Apa yang kita pikirkan mengenai hasil yang diproleh.
Hasil
Apa yang ditemukan? dilakukan ?
Pendahuluan
-Mengapa studi ini dilakukan
-Pertanyaan Penelitian
-Hipotesis/bila ada
-Tujuan Stud/Penelitian
Narasi
Tabel
Gambar
Simpulan
Bersadarkan Hasil yang diperoleh
Daftar Pustaka
Referensi yang terlalu sedikit bisa menandakan peneliti tidak banyak membaca literatur pendukung atau hasil penelitian

BERITA ACARA /NOTULA DISKUSI

Pada hari ini Tanggal 26 April 2015 Pukul 19.00 s.d 20.00 WIB bertempat di Ruang 202 Lantai 2 Gedung STIE Latansa Mashiro Rangkasbitung telah dilaksanakan Diskusi Kelompok 5 yang bertemakan "*Keragaman dan Kesetaraan Manusia*" dengan hasil sebagai berikut :

Penyaji: ……

No	Kegiatan	Nama Audience	Pertanyaan
1	Diskusi sesi 1	Mulyadi	Bagaimana cara menghadapi konflik yang timbul karena perbedaan agama?
2		Raisa	Apa yang dimaksud dengan semangat pluralisme dan bagaimana cara meningkatkan semangat pluralisme tersebut ?
3		Sarifah	Hal positif apa saja yang dapat diambil dari film tersebut dalam kehidupan sehari-hari ?

Kesimpulan hasil diskusi kelompok adalah :

1. Konflik yang timbul dari perbedaan agama dapat dihindari dengan menumbuhkan semangat religious, semangat nasionalisme, semangat pluralisme, semangat humanisme, melakukan dialog antar umat beragama dan membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, media masa dan harmonisasi dunia
2. Semangat pluralisme adalah menyadari bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adapun cara untuk meningkatkan semangat pluralisme yaitu menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya keberagaman di Indonesia, saling menghargai satu sama lain tidak membeda-bedakan suku atau golongan
3. Hal positif yang dapat diambil dari film "*tanda tanya*" yaitu kita dapat hidup berdampingan meskipun berbeda-beda agama, suku dan ras jika saling menghargai satu sama lain dan dalam hidup bermasyarakat tidak boleh mementingkan kepentingan kelompok atau golongan

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Rangkasbitung, 30 April 2015

Ketua Kelompok 5	Notulen
(Anita Purnamasari Alfia)	(Metty Mulyati)

Anggota Kelompok:……
…….. ……..

Ada di RPS hal 18

PORTOPOLIO

PORTOPOLIO KELOMPOK (TUGAS KELOMPOK/TERSTRUKTUR)

SAMPUL
PORTO POLIO KLP

Logo
MATA KULIAH
……

Kelompok:……
SMT/Kelas……
Nama Mhs……/NIM…
Nama Mhs……/NIM…

Nama Prodi……
Fak……
UIN……
TH…..

Uraian ISI per kelompok	Cekclist
1. Makalah Final Hasil Diskusi dilengkapi dengan Poster	
2. Notula Diskusi	
3. Makalah yang didiskusikan….mak ke….	
4. Makalah Hasil Revisi/Masukan Kelompok Diskusi	
5. Makalah Hasil Revisi/Masukan Kelompok Diskusi	
6. Makalah Sebelum didiskusikan….mak ke….sd. …ke…..	

Ada di RPS hal 17

PORTOFOLIO KELOMPOK

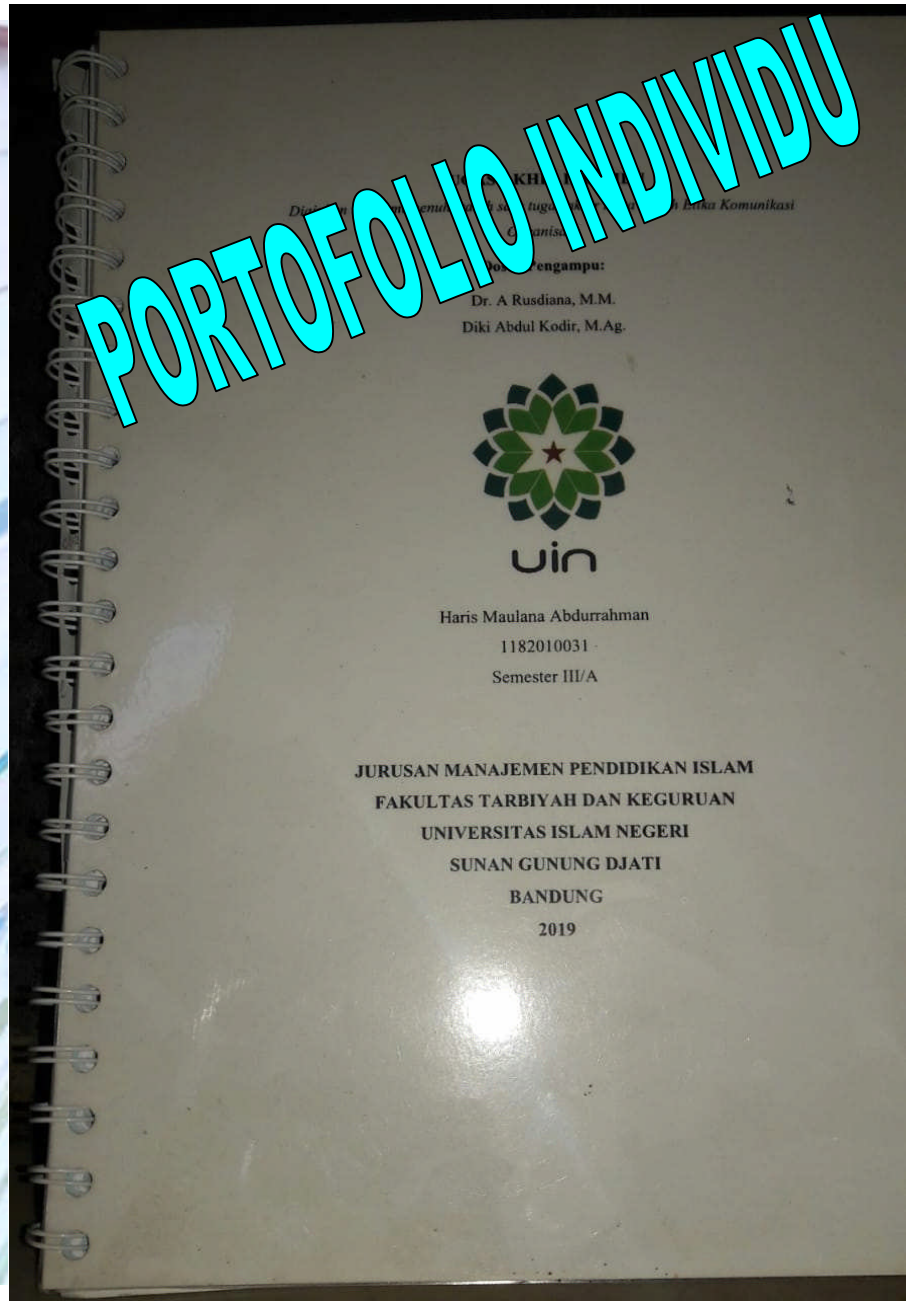
PORTOFOLIO INDIVIDU
Dr. A Rusdiana, M.M.
Diki Abdul Kodir, M.Ag.
uin
Haris Maulana Abdurrahman
1182010031
Semester III/A
JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2019

PORTOPOLIO INDIVIDU (TUGAS INDIVIDU)

Uraian	Cekclist
1. Catatan Kuliah	
2. UTS	
3. UAS/RISET MINI dg Poster	

Logo
PORTO POLIO
MATA KULIAH
……
Nama Mhs……
NIM……
SMT/Kelas……

Nama Prodi……
Fak……
UIN……
TH…..

CATATAN KULIAH
Hari/Tgl : .....
Materi Kuliah: .....
Metode : .....
Oleh :.....

Ringkasan Materi :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..

Bdg, ...
ttd. ttd.
Dosen, Mhs

UTS
Hari/Tgl : .....
Materi Kuliah: .....
Metode : .....
Oleh :.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

UAS
Logo
Judul
……
…. Di……

Nama
Mhs……
NIM……
SMT/Kelas……

Prodi……
Fak……
UIN……
TH…..

Ada di RPS hal 23

TERAMPIL MEMBANGUN BUDAYA BELAJAR KELOMPOK

Hubungan positif menopang keberhasilan kelompok dan melalui hubungan itulah staf terikat dan terhubung satu sama lain.

Menjadi lebih transparan dalam pekerjaan yang dilakukan, maka data yang mereka kumpulkan dan tindakkan mereka membantu dalam meningkatkan efisiensi kelompok.

Kurangnya kepercayaan kelompok dapat menyebabkan moral rendah yang sering mengurangkan komitmen seseorang terhadap kelompok. Berdampak pada penurunan nilai produktivitas.

Setiap anggota staf bergantung pada rekannya untuk bekerja bersama dan berkontribusi secara efisien ke kelompok. Tidak ada anggota staf yang dapat bekerja sendiri; dia harus mengambil bantuan rekan mereka untuk menyelesaikan tugas secara efisien.

MENGGALI PRESTASI *dari* PEMBELAJARAN BERBASIS PORTOFOLIO

Terampil
PRESENTASI DAN MEYIMAK BERBASIS POSTER
Survey membuktikan 70% professional menyatakan presentasi berpengaruh pada kesuksesesan karir mereka.
-Keterampilan prosentasi berbanding lurus dengan potensi karir.
-Penyajian dalam bentuk poster lebih efisien; presentasi oral terkadang membombardir audiens dengan banyak hal yang tentunya dapat menjadi membosankan.
PRESENTASI
-Menyiapkan,
-Menyusun, dan Menguasai Bahan Presentasi;
- Menguasai Alat Presentasi;
-Menganalisis audiens;
-Menganalisis konteks dan setting;
-Latihan berpresentasi; -Penyajian presentsi;
-Mengarahkan perhatian audiens;
-Menutup presentasi;
-Dialog interaktiftau tanya jawab;
-Tindak lanjut.
MENYIMAK
-Mendengarkan
-Mengidentifikasi
-Menginterpretasi/Menafsirka
-Memahami
-Menilai-
-Menaggapi/Mereaksi

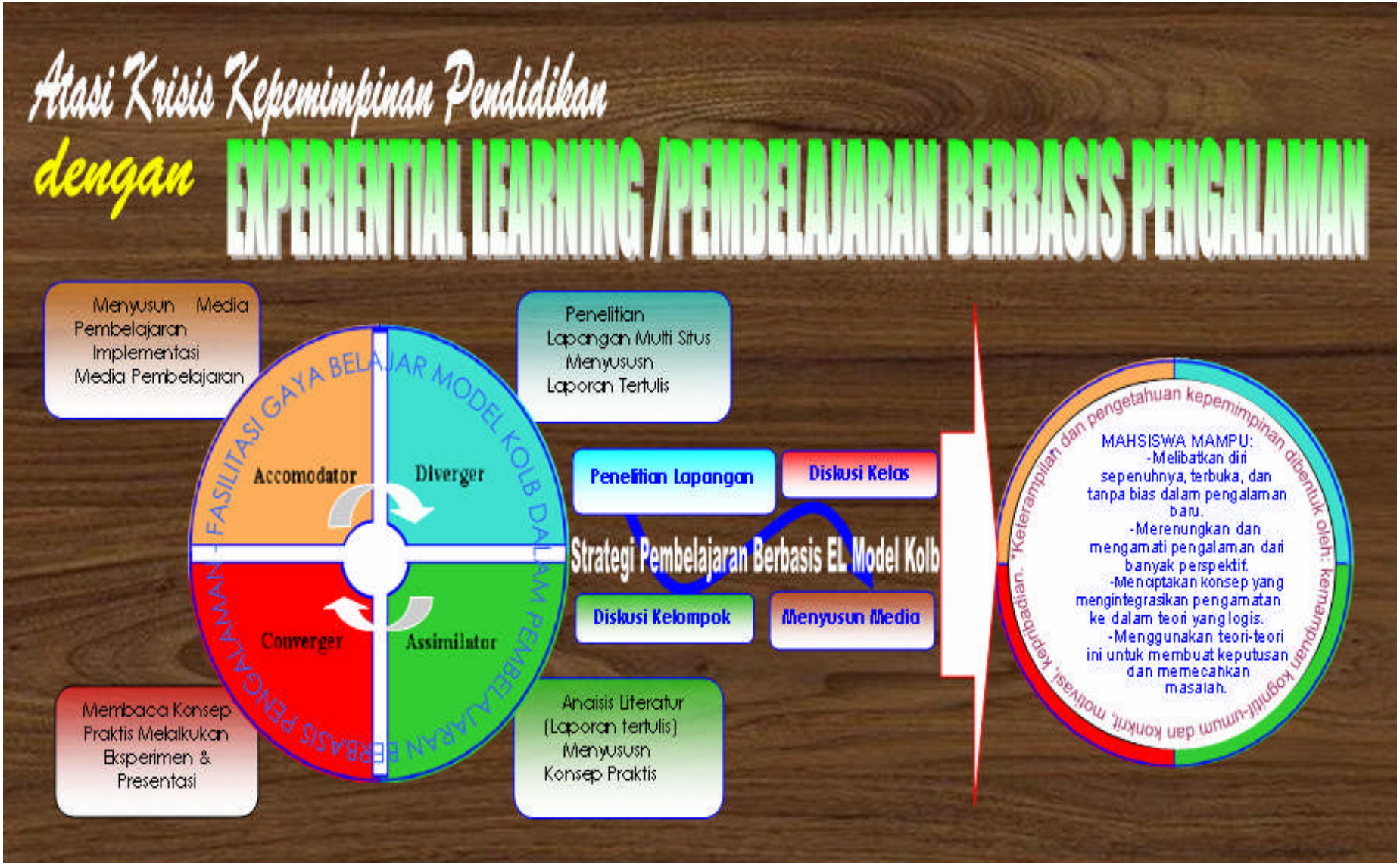
Atasi Krisis Kepemimpinan Pendidikan
dengan
EXPERIENTIAL LEARNING /PEMBELAJARAN BERBASIS PENGALAMAN
Menyusun Media Pembelajaran Implementasi Media Pembelajaran
Penelitian Lapangan Multi Situs Menyususn Laporan Tertulis
FASILITASI GAYA BELAJAR MODEL KOLB DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS PENGALAMAN
Accomodator
Diverger
Converger
Assimilator
Penelitian Lapangan
Diskusi Kelas
Strategi Pembelajaran Berbasis EL Model Kolb
Diskusi Kelompok
Menyusun Media
MAHSISWA MAMPU:
-Melibatkan diri sepenuhnya, terbuka, dan tanpa bias dalam pengalaman baru.
-Merenungkan dan mengamati pengalaman dari banyak perspektif.
-Menciptakan konsep yang mengintegrasikan pengamatan ke dalam teori yang logis.
-Menggunakan teori-teori ini untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah.
"Keterampilan dan pengetahuan kepemimpinan dibentuk oleh: kemampuan kognitif-umum dan konkrit, motivasi, kepribadian."
Membaca Konsep Praktis Melalkukan Eksperimen & Presentasi
Analisis Literatur (Laporan tertulis) Menyususn Konsep Praktis

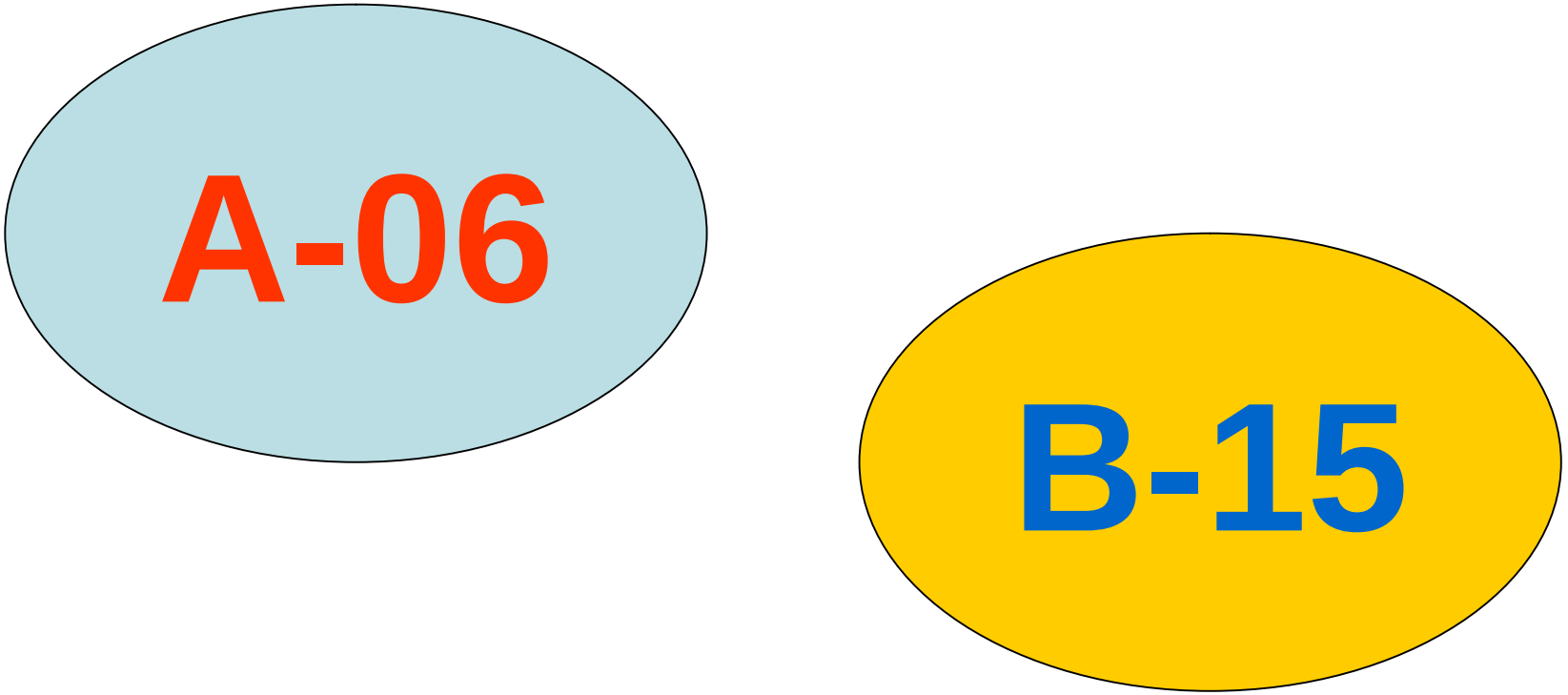
A-06
B-15

YU KULIAH Part: XII

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 120
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Lampiran Surat
Nomor : 363/E.E2/KR/2020
Tanggal : 14 April 2020

Nomor : 363/E.E2/KR/2020 14 April 2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penerapan Pembelajaran Daring dengan Google Classroom

Yth.
1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta non Vokasi;
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi I s.d XIV;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kementerian dan Lembaga Lain

Dalam rangka mendukung proses pembelajaran dari rumah di lingkungan Perguruan Tinggi selama masa pandemi COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) berupaya memberikan layanan terbaik dalam menerapkan pembelajaran berbasis daring.

Ditjen Dikti bekerjasama dengan Google, telah menyediakan sistem manajemen pembelajaran daring menggunakan *platform* Google Classroom yang dapat diakses di **kuliahdaring.kemdikbud.go.id** oleh semua Perguruan Tinggi di Indonesia secara cuma-cuma. Agar dapat memanfaatkan sistem pembelajaran tersebut secara optimal, kami mengimbau seluruh Perguruan Tinggi untuk turut berpartisipasi berbagi modul pembelajaran daring yang dapat diakses secara terbuka oleh seluruh mahasiswa di Indonesia.

Para Dosen yang akan berkontribusi dalam sistem pembelajaran tersebut, kami harapkan untuk memberikan Surat Pernyataan dengan format sebagaimana terlampir dan mengirimkannya melalui tautan **https://bit.ly/sharing content**. Ditjen Dikti akan melakukan evaluasi setiap bulan untuk memberikan apresiasi bagi Dosen dan Perguruan Tinggi yang paling banyak berbagi modul serta modul yang paling banyak diakses oleh mahasiswa.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal

Nizam
NIP 196107061987101001

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN

BERBAGI MODUL PEMBELAJARAN PADA GOOGLE CLASSROOM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap dengan gelar : .....
Jabatan : .....
Nama Perguruan Tinggi : .....
Alamat Perguruan Tinggi : .....

menyatakan berpartisipasi dalam pencegahan perlambangan dan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkungan Perguruan Tinggi dengan menjalankan model pembelajaran daring yang memanfaatkan *platform* Google Classroom.

Konten mata kuliah yang dimasukan dalam *platform* tersebut saya berikan secara terbuka kepada seluruh mahasiswa di Indonesia untuk pembelajaran mandiri secara daring.

Daftar program studi yang saya ikut sertakan dalam konten terbuka adalah sebagai berikut:

No	Nama Program Studi	Jenis Partisipasi*)		Penanggungjawab masing-masing Program Studi	
		Sumbang Konten	Ikut Kelas	Nama	Nomor Kontak
1					
2					
3					
4					
5					
..n					

Surat Pernyataan ini dibuat untuk mendukung penerapan pembelajaran daring selama masa pandemi Covid-19.

(Kota Perguruan Tinggi), (Tanggal tanda tangan)

(Nama, jabatan, dan cap Perguruan Tinggi)

Keterangan:
*) Silakan centang (√) pada kolom Jenis Partisipasi

YU KULIAH

Part: XIV

SOSILAISASI KEBIJAKAN

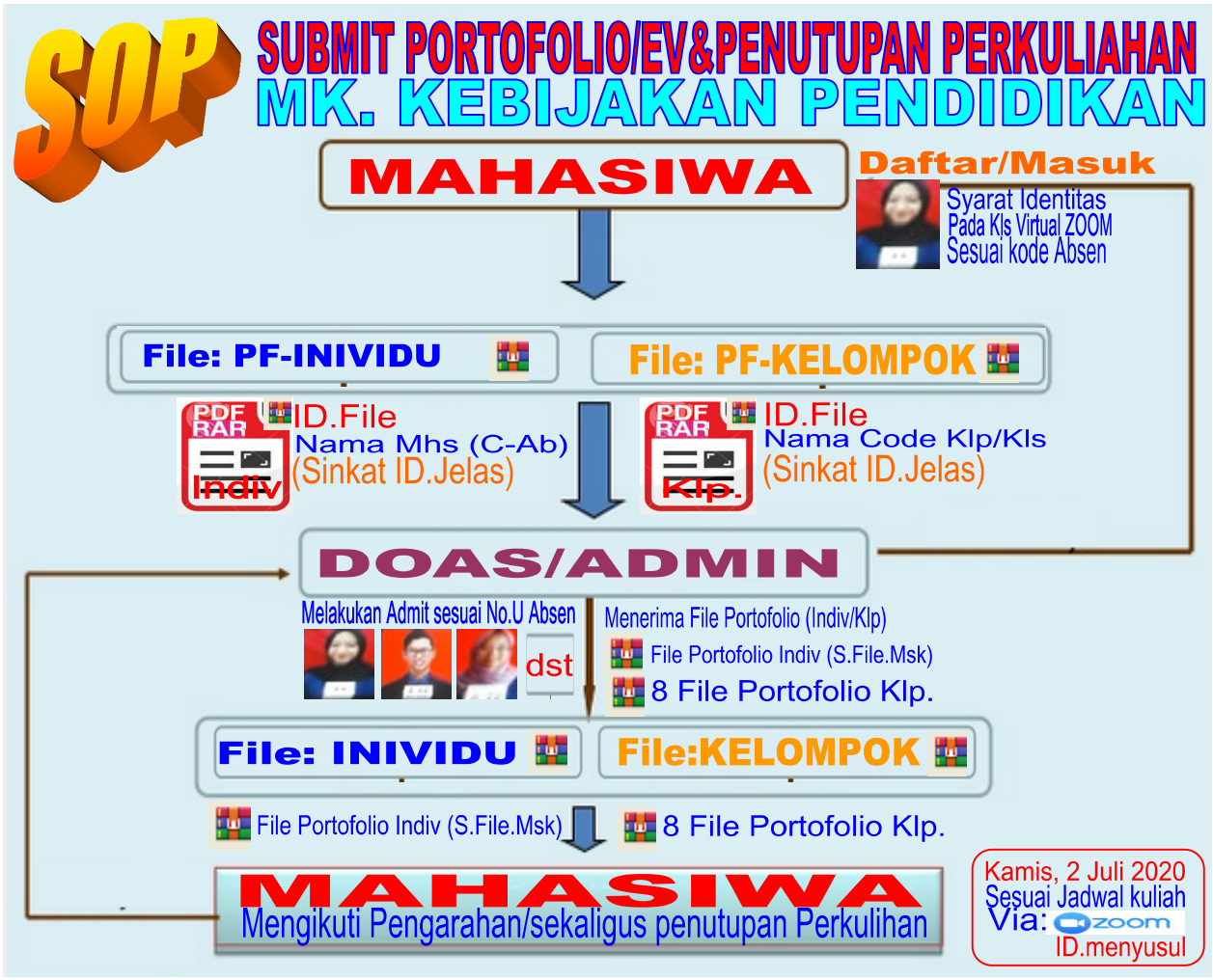

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN& PENGIRIMAN PORTOFOLIO INDIVIDU DAN KELOMPOK
MATA KULIAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN

PENDAHULUAN

Sesui rencana perkuliahan bahwa diskusi kelompok webinar zoom telah dilaksanakan pada hari kamis 25 Juni 2020.Selanjutnya informasi yang berkaitan dengan penyusunan dan pengiriman fail prortofolio individu dan kelompok (bukti kinerja), dengan ketentuan sbb:

ISI PETUNJUK

I. PORTOPOLIO KELOMPOK (TUGAS KELOMPOK/TERSTRUKTUR)

1.Contoh :

SAMPUL
PORTO POLIO KLP

Logo Fak
MATA KULIAH
…….
Kelompok:.....

Photo	Nama..... NIM .....
Photo	Nama..... NIM .....
Photo	Nama..... NIM ..... dst
	(lengkapi dg poto yang menggunakan no dada0

Nama Prodi……
Fak……..
UIN……
TH…..

2. Lembar Cekclist PORTOFOLIO (PP) Kelompok

Uraian ISI Fail PORTOFOLIO (PP)	Cekc
1. Makalah Final Hasil Perbaikan Diskusi Webinar Tgl..... (dilengkapi dengan Poster yang di sampaikan pada waktu diskusi web tgl....)	
2. Notula Diskusi/berita acara Diskusi Webinar Tgl..... Dilengkapi dengan lembar masukan dari 7 kelompok (klp. 1-2-3-4-5-6-7-8) Yang dibacakan/disampaikan pada Diskusi Webinar Tgl.....	
3. Dokumen kelengkapan kegiatan/kebijakan Diskusi klp webinar (inf diskusi, inf jadwal undangan diskusi; dok admistrasi dan poto proses pelaksanaan diskusi dan sejenisnya. Koresepondensi sesuaikan dg tanggal informasi itu dibuat/diterima.	
4. Makalah yang didiskusikan maksudnya adalah makalah yang dikirim ke kelompok lain untuk direvisi/koreksi berati dokumen dalam PP ini yaitu dokunen kerja kelompok (1,2,3,4,5,6,7, 8) pada makalah anda yang dikirim dari:	
1.Kelompok 1 tgl..... (bukti kerja koreksi online/inset coment) dilengkapi Beita acara yang di ttd oleh anggota kelompok mereka	
2.Kelompok 1 tgl..... (bukti kerja koreksi online/inset coment) dilengkapi Beita acara yang di ttd oleh anggota kelompok mereka	
3.Kelompok 1 tgl..... (bukti kerja koreksi online/inset coment) dilengkapi Beita acara yang di ttd oleh anggota kelompok mereka	
4.Kelompok 1 tgl..... (bukti kerja koreksi online/inset coment) dilengkapi Beita acara yang di ttd oleh anggota kelompok mereka	
5.Kelompok 1 tgl..... (bukti kerja koreksi online/inset coment) dilengkapi Beita acara yang di ttd oleh anggota kelompok mereka	
6.Kelompok 1 tgl..... (bukti kerja koreksi online/inset coment) dilengkapi Beita acara yang di ttd oleh anggota kelompok mereka	
7.Kelompok 1 tgl..... (bukti kerja koreksi online/inset coment) dilengkapi Beita acara yang di ttd oleh anggota kelompok mereka	
8.Kelompok 1 tgl..... (bukti kerja koreksi online/inset coment) dilengkapi Beita acara yang di ttd oleh anggota kelompok mereka	
5. Makalah Hasil Revisi/Masukan Dosen (makalah yg dibagikan kpd kelompok lain)	
6. Makalah Revisi/Masukan dosen (bukti frf dosen... tgl...)	
7. Makalah Sebelum didiskusikan….mak ke….sd. ...ke.....	
8. RPS/RPM lengkap	

*)*Semua Fail dikirim ke email dosen dalam bentuk PDF/di ZIIP*

II. PORTO POLIO INDIVIDU (TUGAS INDIVIDU)

Uraian	Cekc
Dokumen CK 1. Catatan Kuliah 2 kali tatap muka tgl..... dan tgl.... 2. Catatan Kuliah GCR yang dikirim pada email dosen tgl..... (lihat email kirim) tgl....	
3. Catatan Kuliah yang dikirim pada email dosen tgl..... (lihat email kirim) tgl....	
4. Bukkti UTS (print screen bagian awal dok UTS di GCR) bukti cukup 1 bag. Awal saja	
5. Bukti UAS (print screen informasi UAS), yang di iformasikan pada WA muali dari SE Rektor UIN. Tgl..... dan ..... tgl.....	
6. Dokumen kelengkapan/penunjang kebijkan kuliah daring (inf diskusi, inf jadwal undangan dan sejenisnya. Koresepondensi sesuaikan dg tanggal informasi itu dibuat/diterima.	

Sampul

Logo Fak
PORTO POLIO INIVIDU
MATA KULIAH
……

Nama .....
NIM.....
SMT/Kelas.....

Nama Prodi……
Fak……..
UIN……
TH…..

CATATAN KULIAH
Hari/Tgl : .....
Materi Kuliah: .....
Metode : .....
Oleh :.....

Ringkasan Materi:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Tulisan tangan Anda
Summary:.....
Bdg, ...
ttd.
Mhs
Print screen bagian awal dok instuksi GCR

KP: UTS
Hari/Tgl : .....
Materi Kuliah: .....
Metode : .....
Oleh :.....

Korespondensi tentang
Informasi pelak UTS
Deskipsi singkat soal
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Tulisan tangan Anda
Tempelkan:
Print screen bagian awal dok UTS di GCR

KP: UAS
Hari/Tgl : .....
Materi Kuliah: .....
Metode : .....
Oleh :.....

Korespondensi tentang
Informasi pelak UAS
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Tulisan tangan Anda
Print screen bagian awal dok UTS di GCR

*)Semua Fail dikirim ke email dosen dalam bentuk PDF/di ZIIP

Catatan/keterangan:

1. CK/Catatan Kuliah
- dok CK. Kuliat tatap muka 2 kali pertemuan. CK GCR ..... kali pertemuan (isi tulisan tangan)
- dok Print screen (bagian awal) anda mulai mengisi instruksi di GCR ..... kali pertemuan (ambil dari GCR)

2. KP: Korespondensi UTS (Istilah KP, memdakan dengan istilah CK) isinya sama catatan
- Inf UTS: semua informari kebijakan UTS yg kamu terima sebelum UTS baik di WAG/web/dsj. Tulis!
-Print screen semua Inf kebijakan UTS yg kamu terima sebelum UTS baik di WAG/web/dsj. Tempelkan secara runtut
- Deskripsi singkat soal UTS: ingatan/penglihatan atau buka lagi GCR UTS. Deskripkan secara tertulis
-Print screen bagian awal dokumen UTS di GCR (pada waktu/tgl anda mengisi instruksi) Tempelkan secara runtut

3. KP: Korespondensi UAS (Istilah KP, memdakan dengan istilah CK) isinya sama catatan
- Inf UAS: semua informari mengenai kebijakan UAS yg kamu terima sebelum UAS baik di WAG/web/dsj. Tulis!
- Print screen Inf UAS: semua informari mengenai kebijakan UAS yg kamu terima sebelum UAS baik di WAG/web/dsj. Tempelkan secara runtut.

PENUTUP

Penyusunan dan pengiriman fail prortofolio individu dan kelompok, yang sesuai ketentuan/petunjuk, inilah yang dinamakan bukti kemampuan skill anda (bukti kinerja anda dalam kontek profesi anda sebagai manajer), merupakan tuntutan kebutuhan keterampilan era 4.0. Dalam memahami, menyerap, dan mengaplikasikan materi dan model perkuliahan Kebijakan pendidikan yang saya berikan dalam masa covid ini. Sudah barang tentu memerlukan "kesetian, semangat, persahabatan, kepatuhan, persatuan/kolaborasi/klp, dan kepatuhan". Pinsip-prinsip itulah yang sejatinya akan menjadi kunci sukses dalam segala hal, apalagi anda sebagai seorang calon manajer.

Tidak ada lain, kebahagian bagi saya, anda dapat memahami dan mengiplementasisikannya. Dengan harapan, semoga petunjuk ini dapat bermanfaat da menginspirasi pada kegiatan lainnya.

Bandung, 25 Juni 2020
Pengampu MK.

H. A. Rusdiana

SOP

SUBMIT PORTOFOLIO/EV&PENUTUPAN PERKULIAHAN
MK. KEBIJAKAN PENDIDIKAN

MAHASISWA

Daftar/Masuk

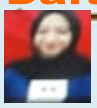

Syarat Identitas
Pada Kls Virtual ZOOM
Sesuai kode Absen

File: PF-INIVIDU

File: PF-KELOMPOK

PDF RAR Indiv — ID.File
Nama Mhs (C-Ab)
(Sinkat ID.Jelas)

PDF RAR Klp. — ID.File
Nama Code Klp/Kls
(Sinkat ID.Jelas)

DOAS/ADMIN

Melakukan Admit sesuai No.U Absen

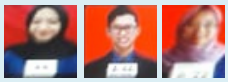

dst

Menerima File Portofolio (Indiv/Klp)
File Portofolio Indiv (S.File.Msk)
8 File Portofolio Klp.

File: INIVIDU

File:KELOMPOK

File Portofolio Indiv (S.File.Msk)

8 File Portofolio Klp.

MAHASISWA
Mengikuti Pengarahan/sekaligus penutupan Perkulihan

Kamis, 2 Juli 2020
Sesuai Jadwal kuliah
Via: zoom
ID.menyusul